

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Pengaruh karakteristik ibu terhadap munculnya pekerja anak di Indonesia tahun 2018

Gratiana Imelda Nahak, Hardius Usman

Pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi *sandwich* di Indonesia

Amelia Rahman, Turro Seltris Wongkaren

Kontribusi ekonomi remitansi bagi pembangunan desa: Studi kasus pedagang warung tegal di Jakarta Selatan

Nur Ali Hidayatulloh, Rakhmat Hidayat

Pekerja migran Malaysia asal Kerinci Jambi dan pendidikan anak-anak mereka

Musli, Della Amrina Yusra, Yumasdaleni

Dilema petani di tengah dualisme kebijakan pertanian: Studi kasus strategi penghidupan berkelanjutan petani sawah di kawasan agropolitan Ciwidey, Jawa Barat

Nurrokhmah Rizqihandari, R. Rijanta, Sudrajat, Rika Harini, Hafid Setiadi

Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran

Rahmat Saleh, Ricardi S. Adnan, Aswatini Raharto

Kontribusi hubungan kemiskinan dan disabilitas netra: Studi kasus di Indonesia dengan menggunakan Data IFLS tahun 2014

Fera Febriana Sritutur

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 17	No. 2	125-254	Jakarta Desember, 2022	E-ISSN 25028537
-------------------------------	---------	-------	---------	---------------------------	--------------------



Pengaruh karakteristik ibu terhadap munculnya pekerja anak di Indonesia tahun 2018 <i>Gratiana Imelda Nahak, Hardius Usman</i>	125-142
Pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi <i>sandwich</i> di Indonesia <i>Amelia Rahman, Turro Seltris Wongkaren</i>	143-160
Kontribusi ekonomi remitansi bagi pembangunan desa: Studi kasus pedagang warung tegal di Jakarta Selatan <i>Nur Ali Hidayatulloh, Rakhmat Hidayat</i>	161-178
Pekerja migran Malaysia asal Kerinci Jambi dan pendidikan anak-anak mereka <i>Musli, Della Amrina Yusra, Yumasdaleni</i>	179- 192
Dilema petani di tengah dualisme kebijakan pertanian: Studi kasus strategi penghidupan berkelanjutan petani sawah di kawasan agropolitan Ciwidey, Jawa Barat <i>Nurrokhmah Rizqihandari, R. Rijanta, Sudrajat, Rika Harini, Hafid Setiadi</i>	193-218
Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran <i>Rahmat Saleh, Ricardi S. Adnan, Aswatini Raharto</i>	219-236
Kontribusi hubungan kemiskinan dan disabilitas netra: Studi kasus di Indonesia dengan menggunakan Data IFLS tahun 2014 <i>Fera Febriana Sritutur</i>	237-254



Pengaruh karakteristik ibu terhadap munculnya pekerja anak di Indonesia tahun 2018

The influence of the mother's characteristics on child labor in Indonesia in 2018

Gratiana Imelda Nahak^{1*}, Hardius Usman²

¹ DIII-Statistik, Politeknik Statistika STIS

² Politeknik Statistika STIS

*Korespondensi penulis: imeldagratiانا@gmail.com

ABSTRACT

The issue of child labor remains unresolved in Indonesia. It is hindering the achievement of one of the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs), which is to end child labor in all forms by 2025. This study aimed to examine the characteristics of child laborers aged 10–17 years old and the impact of maternal characteristics on child labor in Indonesia in 2018. The study analyzed data from The National Socioeconomic Survey (Susenas) Kor March 2018, using binary logistic regression. The results showed that most child laborers had mothers who were heads of households, had low levels of education, were disabled, had severe illnesses, were of productive age, had previously been married, and were recent migrants. It was concluded that maternal position in the household, maternal education level, maternal health status for severe illnesses, maternal age, and migration status significantly affected the prevalence of child labor in Indonesia in 2018. However, maternal physical condition, health status for mild illnesses, and marital status did not have an impact on child labor in Indonesia in 2018.

Keywords: *child labor, maternal characteristics, binary logistic regression*

ABSTRAK

Isu pekerja anak masih menjadi masalah serius di Indonesia yang belum dapat diatasi. Hal ini menjadi kendala terpenuhinya salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum karakteristik pekerja anak usia 10–17 tahun di Indonesia serta pengaruh karakteristik ibu terhadap status pekerja anak di Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini menganalisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik, yaitu data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2018. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja anak memiliki ibu dengan karakteristik sebagai kepala rumah tangga, berpendidikan rendah, memiliki keterbatasan fisik (difabel), mengalami sakit berat, berusia produktif, berstatus pernah kawin, dan memiliki status sebagai migran risen. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa kedudukan ibu dalam rumah tangga, pendidikan ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit berat, umur ibu, serta status migrasi ibu berpengaruh signifikan terhadap munculnya pekerja anak. Namun, kondisi fisik ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit ringan, dan status perkawinan ibu tidak berpengaruh terhadap munculnya pekerja anak di Indonesia pada tahun 2018.

Kata kunci: *pekerja anak, karakteristik ibu, regresi logistik biner*



PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 1989) dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) menyebutkan bahwa anak, yaitu orang yang berusia di bawah 18 tahun, berhak untuk mendapatkan pendidikan, beristirahat dan bersenang-senang, serta dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan berbahaya. Sementara itu, Indonesia memiliki UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak-hak anak tersebut perlu dilindungi dan dihormati karena anak berperan penting bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang. Untuk dapat memikul tanggung jawab tersebut, anak harus dipersiapkan dengan memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial dan memperoleh jaminan kesejahteraan. Oleh karena itu, seorang anak idealnya dikhususkan untuk pendidikan, rekreasi, dan pelatihan (ILO, 1973). Namun, hingga kini masih banyak anak di dunia yang terjebak dalam lingkaran pekerja anak dan mempertaruhkan masa depan mereka.

Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 152 juta pekerja anak di dunia, dengan 73 juta anak di antaranya terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan kondisi fisik, mental maupun sosial mereka (ILO, 2017). Meski angka ini menurun apabila dibandingkan dengan jumlah pekerja anak pada tahun 2012 yang mencapai 168 juta dan dengan 82 juta anak bekerja pada pekerjaan yang membahayakan, namun angka tersebut tetap menunjukkan bahwa masih banyak anak di dunia yang tidak terpenuhi hak-haknya. Oleh sebab itu, salah satu target yang ingin dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya pada tahun 2025 melalui target 8.7 (ILO, 2018).

Pekerja anak dapat menjadi masalah serius sebab anak berusia rentan terpaksa bekerja (Rosidah, 2012). Dalam UU Nomor 20 Tahun 1999 dan UU Nomor 1 Tahun 2001 telah

dinyatakan secara tegas kewajiban untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak serta ditetapkan 18 tahun sebagai usia minimum seseorang untuk bekerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai penyimpangan terhadap peraturan ini sehingga dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk terhadap anak itu sendiri, generasi selanjutnya, maupun bagi negara.

Menurut Sugiyani (2000), dampak seorang anak yang bekerja antara lain tidak memiliki waktu luang untuk bermain, terganggunya proses tumbuh kembang anak, terganggunya kesehatan fisik dan mental anak, rasa rendah diri dalam pergaulan, rentan terhadap perlakuan diskriminatif, rentan mengalami kecelakaan kerja, rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan, serta rentan menciptakan generasi miskin. Pekerja anak tersebut di masa depan akan menciptakan pekerja anak lainnya, atau dengan kata lain, tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan karena ketidakmampuan bersaing di era globalisasi.

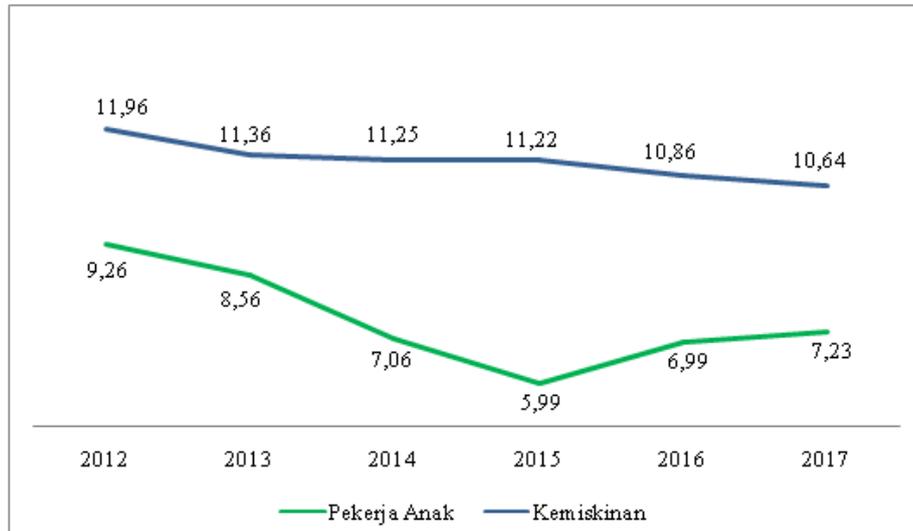
Munculnya masalah pekerja anak diakibatkan oleh kemiskinan yang merupakan pendorong utama bagi anak untuk masuk ke pasar tenaga kerja karena orang tua membutuhkan tenaga anak untuk mendapatkan penghasilan rumah tangga (Usman & Nachrowi, 2004). Selain itu, kemiskinan membuat orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan anak yang mahal sehingga akhirnya memutuskan untuk mengikutsertakan anaknya dalam dunia kerja demi membantu menambah pendapatan rumah tangga (Akarro & Mtwewe, 2011; Endrawati, 2012).

Darusasi dan Pitoyo (2013) menemukan adanya hubungan positif antara kondisi ekonomi keluarga dan munculnya pekerja anak. Sejalan dengan itu, Fernandez dan Abocejo (2014) dalam penelitiannya menemukan adanya korelasi yang tinggi antara kemiskinan dan kasus pekerja anak serta jumlah pekerja anak yang tidak bersekolah. Artinya, semakin buruk kondisi perekonomian suatu rumah tangga, maka akan semakin kecil peluang anak untuk menyelesaikan pendidikannya dan semakin besar peluang seorang anak untuk bekerja. Sahu (2013) juga berpendapat bahwa kejadian pekerja anak dikarenakan kondisi ekonomi keluarga miskin dan bukan karena faktor lainnya seperti ukuran

rumah tangga, pendidikan anak, dan pendidikan orang tua.

Penurunan angka kemiskinan tidak searah dengan kenaikan angka pekerja anak (Gambar 1). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa faktor

kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan anak bekerja, tetapi ada faktor lainnya yang turut mengakibatkan munculnya pekerja anak (Nandi, 2016; Priyambada dkk., 2005).



Sumber : BPS (2018), KemenPPPA & BPS (2019)

Gambar 1. Perbandingan Persentase Kemiskinan di Indonesia dan Persentase Anak Usia 10-18 yang Bekerja di Indonesia Tahun 2012-2017

Webbink dkk. (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan pembuat keputusan utama mengenai apakah seorang anak akan bersekolah atau bekerja, dengan pembuat keputusan yang paling dominan adalah orang tua atau pengasuh anak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Doss (2011) yang menggunakan model dua pembuat keputusan (*two decision makers*), yaitu suami dan istri atau dalam hal ini merupakan orang tua. Variabel kontrol yang digunakan adalah umur anak dan karakteristik rumah tangga, termasuk ukuran rumah tangga. Dalam kasus ini, anak yang telah dewasa dan masih tinggal bersama orang tua tidak dimasukkan sebagai pengambil keputusan. Orang tua memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan dan melakukan intervensi dalam memutuskan alokasi waktu anak untuk beraktivitas karena anak yang berusia 7–14 tahun dianggap belum cukup matang dalam mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri (Purwanti, 2014). Keputusan seorang anak untuk bekerja didominasi oleh karakteristik orang tua mereka.

Proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh sifat individu, daya tawar-menawar individu tersebut, kondisi sosial ekonomi rumah tangga, dan jenis keputusan apa yang akan diambil rumah tangga tersebut (Sekaringsih, 2013). Oleh sebab itu, Krutikova (2009) menggunakan daya tawar-menawar ibu untuk melihat pengaruhnya terhadap jam kerja anak. Hal ini dikarenakan daya tawar-menawar ibu dipandang sebagai kemampuan untuk menentukan pilihan atau keputusan (Anderson & Eswaran, 2009). Menurut Brown dkk. (2002), kehadiran ibu kandung di dalam rumah berperan besar dalam pembentukan modal manusia, khususnya anak, melalui dukungan motivasi kepada anak untuk bersekolah dibandingkan motivasi untuk ikut bekerja. Sejalan dengan itu, Basu (2011) juga berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh ibu akan terkait kesejahteraan anaknya, seperti tempat anaknya akan bersekolah atau jenis makanan yang dimakan anaknya, sedangkan ayah lebih cenderung membuat keputusan terkait ekonomi, seperti tempat anak bekerja atau aset yang harus dibeli. Semakin rendah tingkat pendidikan maupun pendapatan seorang ibu akan

membuat posisi tawar-menawar melemah karena hal tersebut membuat ibu tidak memiliki banyak pilihan di luar rumah (Quisumbing & McClafferty, 2000).

Namun, bukan hal yang mudah dalam mengukur daya tawar-menawar (Kibe, 2017). Beberapa studi seperti Doss (2011) dan Majlesi (2016) menggunakan pendekatan pendapatan ibu untuk mengukur daya tawar-menawarnya, meski hal tersebut dapat menimbulkan masalah endogenitas karena jumlah jam kerja dan jenis pekerjaan ibu terkadang masih ditentukan oleh ayah (Behrman, 1997). Basu dan Ray (2002) mengukur daya tawar-menawar ibu dengan menggunakan dua variabel, yaitu pendidikan perempuan dewasa paling terdidik dalam rumah tangga relatif terhadap total tahun pendidikan semua laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga serta pendapatan perempuan dewasa sebagai total proporsi pendapatan orang dewasa.

Sementara itu, Kambhampati (2009) mengukur daya tawar-menawar ibu menggunakan beberapa variabel yang dapat mencerminkan efek intrinsik ibu seperti pendidikan ibu, pendapatan ibu, dan status pekerjaan ibu, serta variabel-variabel yang dapat berpengaruh terhadap daya tawar-menawar ibu, seperti jenis kelamin kepala rumah tangga, upah ibu relatif terhadap ayah dan pendidikan ibu relatif terhadap ayah. Sedangkan menurut Doss (2011), daya tawar-menawar seorang ibu bergantung pada pendidikan, pekerjaan, serta kepemilikan aset. Selain itu, dalam konteks tertentu, hal-hal lainnya yang turut memengaruhi daya tawar-menawar ibu adalah mas kawin ketika pernikahan, ada tidaknya anak laki-laki yang pernah dilahirkan, peran ibu dalam pengambilan keputusan secara independen dan otonominya untuk bepergian atau melakukan perjalanan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel-variabel ekonomi, serta karakteristik rumah tangga, serta karakteristik kepala rumah tangga atau anak untuk melihat dampaknya terhadap munculnya masalah pekerja anak (lihat Behera & Das, 2016; Darmika & Usman, 2020; Darusasi & Pitoyo, 2013; Elwan & Aslim, 2019; Genicot dkk., 2016; Iryani & Priyarsono, 2013). Penelitian ini berfokus pada peran ibu terhadap

kesejahteraan anaknya yang berkaitan dengan permasalahan pekerja anak. Oleh sebab itu, variabel-variabel karakteristik ibu akan diuji untuk melihat ada tidaknya pengaruh daya tawar-menawar ibu dalam rumah tangga terhadap kesejahteraan anak. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan gambaran umum dan karakteristik anak usia 10–17 tahun di Indonesia pada tahun 2018 dan menganalisis pengaruh karakteristik ibu terhadap status pekerja anak di Indonesia pada tahun 2018.

METODOLOGI

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu *raw data* yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor bulan Maret tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas merupakan survei yang dilaksanakan oleh BPS dengan mengumpulkan data sosial kependudukan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan data Susenas Kor Maret 2018 karena adanya informasi yang lebih beragam mengenai karakteristik ibu dan anak yang tidak dimiliki oleh survei ketenagakerjaan lainnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 162.702 anak usia 10–17 tahun di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam Susenas Kor Maret 2018, karakteristik ketenagakerjaan yang dicakup hanyalah untuk penduduk berusia 10 tahun ke atas. Oleh karena tidak tersedianya data ketenagakerjaan untuk anak di bawah usia 10 tahun, maka yang dapat dicakup dalam penelitian ini adalah anak dengan usia 10–17 tahun saja.

Variabel

Pada penelitian ini, variabel status pekerja anak diperoleh dari kuesioner Susenas Kor Maret 2018 pada rincian pertanyaan 407 untuk mengidentifikasi umur anak serta rincian pertanyaan 801 mengenai kegiatan yang dilakukan anak selama seminggu yang lalu yang dibedakan berdasarkan bekerja dan melakukan kegiatan selain bekerja. Variabel status pekerja anak dikategorikan menjadi dua yaitu :

- a. Pekerja anak, yaitu anak usia 10–17 tahun yang bekerja minimal satu jam tanpa terputus selama seminggu yang lalu. Konsep pekerja

anak dalam penelitian ini tidak dibedakan berdasarkan anak bekerja dan pekerja anak menurut konsep Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2005), melainkan kedua kategori tersebut tetap dianggap sebagai pekerja anak;

- b. Bukan pekerja anak, yaitu anak yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan/atau melakukan kegiatan lainnya selain bekerja dalam seminggu yang lalu.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah anak usia 10–17 tahun yang berstatus bukan kepala rumah tangga, baik anak kandung, anak tiri, anak angkat, maupun cucu yang berada dalam suatu rumah tangga. Anak usia 10–17 tahun yang berstatus sebagai kepala rumah tangga tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena dianggap telah mencapai masa dewasa sehingga perlu bekerja demi kelangsungan hidupnya dan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Ibu yang dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah ibu yang berstatus kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga; tidak termasuk ibu kandung dari cucu.

Variabel respons dalam penelitian ini adalah status pekerja anak yang dikategorikan menjadi pekerja anak dan bukan pekerja anak. Sedangkan variabel penjelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedudukan ibu dalam rumah tangga (X_1) yang dikategorikan menjadi kepala rumah tangga dan bukan kepala rumah tangga; pendidikan ibu (X_2) yang dikategorikan menjadi SD ke bawah, SMP–SMA, dan Perguruan Tinggi; kondisi fisik ibu (X_3) yang dikategorikan menjadi penyandang disabilitas dan normal; kondisi kesehatan ibu (X_4) yang dikategorikan menjadi sakit berat, sakit ringan, dan sehat; status perkawinan ibu (X_5) yang dikategorikan menjadi belum/pernah kawin dan kawin; umur ibu (X_6) yang dikategorikan menjadi produktif dan tidak produktif; serta status migrasi ibu (X_7) yang dikategorikan menjadi migrasi risen dan bukan migrasi risen.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengkategorian Variabel-Variabel yang Digunakan dalam Penelitian

Kode variabel	Nama Variabel	Angka Dummy	Kategori
Y	Status pekerja anak	1	Pekerja anak
		0*	Bukan pekerja anak
X ₁	Kedudukan ibu dalam rumah tangga	1	Kepala rumah tangga
		0*	Bukan kepala rumah tangga
X ₂	Pendidikan ibu	1 0	≤ SD
		0 1	SMP–SMA
		0 0	Perguruan Tinggi
X ₃	Kondisi fisik ibu	1	Penyandang disabilitas
		0*	Normal
X ₄	Kondisi kesehatan ibu	1 0	Sakit berat
		0 1	Sakit ringan
		0 0	Sehat
X ₅	Status perkawinan ibu	1	Belum/pernah kawin
		0*	Kawin
X ₆	Umur ibu	1	Tidak produktif
		0*	Produktif
X ₇	Status migrasi ibu	1	Migran risen
		0*	Bukan migran risen

Keterangan: * = *reference category*

Analisis Statistik

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan gambaran umum dan karakteristik anak usia 10–17 tahun di Indonesia

pada tahun 2018 dengan menggunakan grafik dan tabel. Sedangkan metode analisis inferensial digunakan untuk menganalisis pengaruh karakteristik ibu terhadap status pekerja anak di Indonesia pada tahun 2018.

Metode analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner.

Regresi logistik biner digunakan ketika variabel respons (Y) berskala dikotomi atau variabel respons (Y) hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu $Y = 1$ untuk kejadian “sukses” dan $Y = 0$ untuk kejadian “gagal”. Pernyataan “sukses” atau “gagal”-nya suatu kejadian merupakan ketertarikan atau berdasarkan sudut pandang peneliti; dalam penelitian ini kejadian “sukses” ($Y = 1$) ditunjukkan ketika anak berstatus sebagai pekerja anak dan kejadian “gagal” ($Y = 0$) ditunjukkan ketika anak berstatus bukan pekerja anak.

Dalam penelitian ini, analisis inferensial digunakan untuk mengetahui pengaruh karakteristik ibu terhadap status pekerja anak di Indonesia pada tahun 2018 dengan menggunakan *software* SPSS dan *Microsoft Excel*. Pada penelitian ini pengambilan variabel-variabel penjelas menggunakan metode *enter*, yaitu dengan memasukkan semua variabel penjelas secara bersama-sama. Sedangkan *cut of significance* yang digunakan adalah sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Model awal regresi logistik biner yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i} + \beta_7 X_{7i} + \varepsilon_i$$

Keterangan :

β_0 : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_7$: koefisien regresi variabel penjelas ke-1 sampai ke-7 pada kategori ke- i

ε_i : komponen galat ke- i

Prosedur kerja dalam regresi logistik biner yang dilakukan guna mencapai tujuan penelitian antara lain:

1. Melakukan uji kesesuaian model (*goodness of fit*)

H_0 : Model sesuai (tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara observasi dan hasil prediksi dari model atau model yang diajukan sesuai dengan data yang digunakan) H_1 : Model tidak sesuai (terdapat perbedaan yang signifikan antara observasi dan hasil prediksi dari model atau model yang diajukan tidak sesuai dengan data yang digunakan).

Keputusan menolak H_0 ketika p -value lebih kecil dari α (0,05).

2. Melakukan uji simultan

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_7 = 0$ (secara simultan semua variabel penjelas tidak berpengaruh terhadap variabel respons)

$H_1 : \text{minimal ada satu } \beta_j \neq 0$

(minimal ada satu variabel penjelas yang berpengaruh terhadap variabel respons).

Keputusan menolak H_0 p -value lebih kecil dari α (0,05).

3. Melakukan uji parsial

$H_0 : \beta_j = 0$ (variabel penjelas ke- j tidak berpengaruh terhadap variabel respons)

$H_1 : \beta_j \neq 0$ (variabel penjelas ke- j berpengaruh terhadap variabel respons), dengan $j = 1, 2, \dots, 7$.

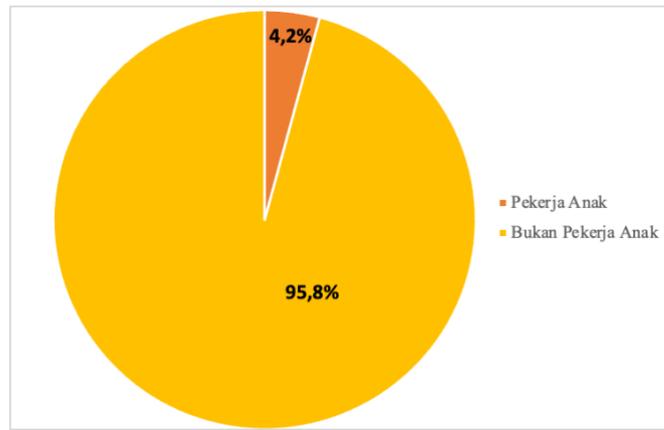
Keputusan menolak H_0 ketika p -value lebih kecil dari α (0,05).

4. Melakukan penghitungan rasio kecenderungan (*odds ratio*) yang ditunjukkan dengan nilai $\exp(\hat{\beta})$ yang merupakan ukuran kecenderungan untuk mengalami kejadian kejadian “sukses” atau “gagal”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018 secara deskriptif, terlihat bahwa di antara 100 anak usia 10–17 tahun terdapat 4–5 anak yang berstatus sebagai pekerja anak di Indonesia (Gambar 2). Angka ini terbilang cukup rendah, namun perlu diperhatikan bahwa permasalahan pekerja anak bukan merupakan masalah banyak atau sedikitnya, melainkan merupakan masalah pengabaian terhadap hak-hak anak. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual serta hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Oleh karena itu, apabila seorang anak bekerja bahkan dieksploitasi pada pekerjaan yang membahayakan, anak tidak secara utuh mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya tersebut.



Sumber : Hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018

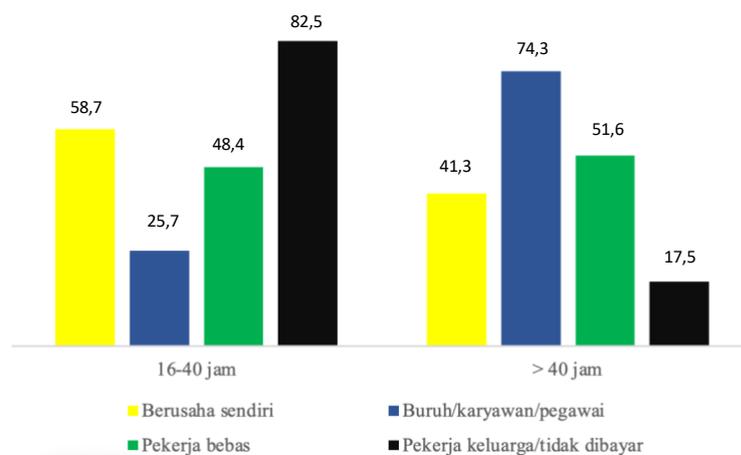
Gambar 2. Persentase Anak Usia 10–17 Tahun Berdasarkan Status Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2018

Seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak adalah:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya;
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya, baik pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, kimia, maupun biologis;
3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu;
4. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;

5. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas, dan/atau rokok.

Berdasarkan data Susenas Kor Maret 2018, sebanyak 64,4% dari pekerja anak di Indonesia bekerja di atas 15 jam selama seminggu. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan anak usia 13 tahun ke atas untuk melakukan pekerjaan ringan dengan jam kerja yang tidak melebihi tiga jam per hari atau dengan kata lain tidak melebihi 15 jam per minggu. Hal ini menjadi dugaan awal bahwa sebanyak 64,4% pekerja anak tersebut tereksplotasi dari segi jam kerja.

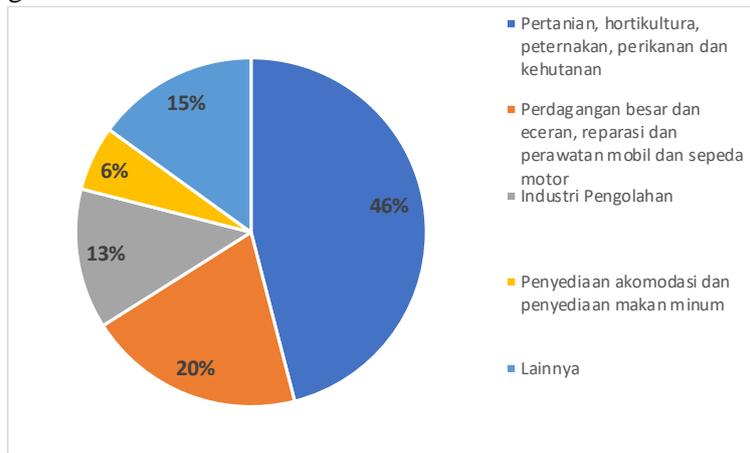


Sumber : Hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018

Gambar 3. Persentase Pekerja Anak Usia 10–17 Tahun yang Diduga Tereksplotasi Berdasarkan Jumlah Jam Kerja pada Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan di Indonesia Tahun 2018

Pekerja anak yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai umumnya bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu (Gambar 3). Persentase pekerja anak yang berstatus sebagai pekerja bebas, baik pada sektor pertanian maupun nonpertanian, hampir sama antara yang bekerja pada rentang waktu 16–40 jam dan yang bekerja lebih dari 40 jam. Sedangkan pekerja anak yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar dan berusaha sendiri umumnya memiliki jam kerja 16–40 jam dalam seminggu. Hal ini menunjukkan adanya indikasi eksploitasi anak dari segi jam kerja terhadap pekerja anak yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif lanjutan untuk mengetahui sektor lapangan usaha yang diduga mengeksploitasi pekerja anak yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dari segi jam kerja, yaitu di atas 40 jam dalam seminggu (Gambar 4). Tiga sektor lapangan usaha dengan persentase tertinggi adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini menjadi dugaan bahwa pekerja anak yang bekerja pada ketiga sektor tersebut mengalami eksploitasi dari segi jam kerja.



Sumber : Hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018

Gambar 4. Persentase Pekerja Anak Usia 10–17 Tahun Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Tempat Anak Bekerja di Indonesia Tahun 2018

Hingga tahun 2018, sektor pertanian, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap pekerja anak berusia 10 – 17 tahun di Indonesia (Gambar 4). Apabila dilihat berdasarkan status dalam pekerjaan, 75% pekerja anak yang bekerja pada sektor pertanian, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Artinya lebih dari setengah pekerja anak yang bekerja pada sektor tersebut bekerja untuk membantu keluarganya atau bekerja secara sukarela atau tidak dibayar. Hal ini juga menunjukkan bahwa mayoritas pekerja anak masih bekerja pada sektor informal.

Factor (VIF). Hasil yang diperoleh adalah bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel penjas kurang dari 10 (Tabel 2). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel penjas yang digunakan telah memenuhi asumsi non-multikolinearitas dan dapat dilakukan analisis menggunakan regresi logistik biner.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Nonmultikolinearitas

Variabel	Nilai VIF
Kedudukan ibu dalam rumah tangga	5,258
Pendidikan ibu	1,006
Kondisi fisik ibu	1,061
Kondisi kesehatan ibu	1,022
Umur ibu	1,114
Status perkawinan ibu	5,335
Status migrasi ibu	1,001

Hasil Analisis Inferensial

Sebelum melanjutkan ke analisis inferensial, terlebih dahulu dilakukan pengecekan multikolinearitas dari variabel-variabel penjas dengan menggunakan nilai *Variance Inflation*

Selanjutnya untuk mengetahui apakah model yang dianalisis cocok dengan data yang digunakan, dilakukan uji Hosmer dan Lemeshow dengan $\alpha = 0,05$ (Tabel 3). Hasil uji Hosmer dan Lemeshow menunjukkan bahwa statistik uji

(9,138) < (12,59) atau $p\text{-value } (0,166) > \alpha (0,05)$ sehingga gagal tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 5%, hasil yang terbentuk dari model telah sesuai dengan hasil data asli.

Tabel 3. Hasil Uji Hosmer dan Lemeshow

<i>Chi-square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
9,138	6	0,166

Uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji simultan yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel penjelas dengan variabel status pekerja anak secara bersama-sama, dengan $\alpha = 0,05$.

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

	<i>Chi-square</i>	<i>Sig.</i>
<i>Model</i>	2231,365	0,000

Berdasarkan Tabel 4., nilai statistik uji G (2231,365) > nilai $\chi^2_{(0,05,9)}$ (16,92) serta $p\text{-value } (0,000) < \alpha (0,05)$ sehingga tolak H_0 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 5%, setidaknya ada satu variabel penjelas yang berpengaruh terhadap

variabel status pekerja anak. Karena hasil uji simultan menyatakan tolak H_0 , maka dilanjutkan dengan uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penjelas terhadap variabel status pekerja anak dengan $\alpha = 0,05$. Selanjutnya hasil uji parsial (*wald test*) dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil uji parsial, $p\text{-value}$ dari variabel kedudukan ibu dalam rumah tangga, pendidikan ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit berat, umur ibu, dan status migrasi ibu kurang dari $\alpha = 0,05$ sehingga tolak H_0 pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel kedudukan ibu dalam rumah tangga, pendidikan ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit berat, umur ibu, dan status migrasi ibu signifikan memengaruhi status pekerja anak di Indonesia pada tahun 2018.

Sementara itu, variabel kondisi fisik ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit ringan dan status perkawinan ibu memiliki $p\text{-value}$ lebih dari $\alpha = 0,05$ sehingga gagal tolak H_0 pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel kondisi fisik ibu, kondisi kesehatan ibu untuk kategori sakit ringan, dan status perkawinan ibu tidak signifikan terhadap status pekerja anak di Indonesia tahun 2018.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (*Wald Test*)

Kode Variabel	Nama Variabel	Kategori	$\hat{\beta}$	P-Value	Exp ($\hat{\beta}$)
Konstanta	Konstanta	-	-4,696	0	0,009
X ₁	Kedudukan ibu dalam rumah tangga	Kepala rumah tangga	0,257	0	1,293
		Bukan kepala rumah tangga	-	-	-
X ₂	Pendidikan ibu	≤ SD	2,146	0	8,554
		SMP-SMA	1,295	0	3,651
X ₃	Kondisi fisik ibu	PT	-	-	-
		Penyanggah disabilitas	0,022	0,464	1,022
X ₄	Kondisi kesehatan ibu	Normal	-	-	-
		Sakit berat	0,154	0	1,167
X ₅	Status perkawinan ibu	Sakit ringan	0,003	0,911	1,003
		Sehat	-	-	-
X ₆	Umur ibu	Pernah kawin	0,107	0,18	1,113
		Kawin	-	-	-
X ₇	Status migrasi ibu	Tidak produktif	-0,545	0	0,58
		Produktif	-	-	-
X ₇	Status migrasi ibu	Migran risen	0,258	0	1,294
		Bukan migran risen	-	-	-

Model yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$g(x) = -4,696 + 0,257X_{1i}^* + 2,146X_{21i}^* + 1,295X_{22i}^* + 0,022X_{3i} + 0,154X_{41i}^* + 0,003X_{42i} + 0,107X_{5i} - 0,545X_{6i}^* + 0,258X_{7i}^*$$

Keterangan :

(*) : Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Kedudukan ibu dalam rumah tangga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap status pekerja anak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Darusasi dan Pitoyo (2013) serta Purwanti (2014) yang menemukan bahwa gender kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap keputusan anak bekerja dalam suatu rumah tangga. Nilai $exp(\hat{\beta})$ untuk variabel kedudukan ibu dalam rumah tangga sebesar 1,293 yang berarti bahwa anak yang memiliki ibu sebagai kepala rumah tangga memiliki risiko 1,293 kali untuk menjadi pekerja anak dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan kedudukan bukan sebagai kepala rumah tangga, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. Hal ini dikarenakan rumah tangga lebih miskin apabila dikepalai oleh perempuan daripada oleh laki-laki karena perempuan cenderung memiliki penghasilan yang lebih rendah daripada laki-laki (Jafarey & Lahiri, 2001; Pitriyan, 2006). Selain itu, ibu sebagai KRT cenderung melibatkan anaknya untuk bekerja saat ada tawaran kerja bagi anaknya, dengan asumsi bahwa ibu merasa perlu dibantu dalam hal perekonomian rumah tangganya (dalam kondisi masih atau tidak lagi memiliki suami) dengan cara melibatkan anaknya bekerja (Amir dkk., 2019).

Pendidikan dapat memengaruhi pilihan perempuan dan daya tawar-menawarnya (Doss, 2011; Quisumbing & McClafferty, 2000). Sejalan dengan hasil penelitian Abdallah (2020) yang menggunakan metode regresi logistik, hasil uji parsial dan penghitungan rasio kecenderungan menunjukkan pendidikan ibu signifikan terhadap pekerja anak dan memiliki nilai $exp(\hat{\beta})$ untuk kategori SD ke bawah sebesar 8,554. Hal ini berarti kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah untuk bekerja adalah 8,554 kali dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan pendidikan tertinggi perguruan tinggi, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. Sedangkan nilai

$exp(\hat{\beta})$ untuk kategori SMP–SMA adalah sebesar 3,651 yang berarti bahwa kecenderungan anak dengan ibu yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah menengah untuk bekerja 3,651 kali dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan pendidikan tertinggi perguruan tinggi, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa kecenderungan anak dengan ibu berpendidikan rendah untuk menjadi pekerja anak lebih besar daripada anak dengan ibu berpendidikan tinggi. Ariyanti (2016) menyatakan bahwa pendidikan ibu berpengaruh terhadap kejadian anaknya bekerja karena ibu yang terdidik memahami arti pentingnya pendidikan sehingga termotivasi untuk menyekolahkan anaknya. Sebaliknya, ibu yang tidak terdidik tidak memahami arti pentingnya pendidikan sehingga lebih memilih mengirim anaknya ke dunia kerja.

Keterbatasan fisik merupakan penghalang bagi orang tersebut—baik secara fisik, budaya, maupun hubungan politik—dalam partisipasinya di masyarakat, termasuk pendidikan, pekerjaan, keluarga atau komunitas (Mont & Nguyen, 2013). Keterbatasan fisik orang tua dapat membatasi kemampuan mereka dalam menghasilkan mata pencaharian sehingga hal ini merupakan isu yang penting. Hasil analisis yang diperoleh adalah kondisi fisik ibu tidak signifikan terhadap status pekerja anak. Hal ini dikarenakan, berdasarkan temuan dari hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018, semakin parah (sedikit mengalami kesulitan, banyak mengalami kesulitan atau sama sekali tidak bisa) tingkat disabilitas yang diderita oleh ibu justru semakin kecil peluang bagi anaknya untuk menjadi pekerja anak. Selain itu, ketika seorang ibu mengalami disabilitas, sumber pembiayaan dalam rumah tangga berasal dari pensiunan (31,7%), kiriman uang atau barang baik dari keluarga maupun lainnya (30,5%), investasi (26,8%), dan/atau dari anggota rumah tangga yang bekerja (14,1%). Karena persentase sumber pembiayaan dalam rumah tangga ibu penyandang disabilitas untuk ART yang bekerja adalah yang paling rendah, maka hal ini berarti bahwa peluang kejadian anak bekerja untuk membantu pembiayaan dalam rumah tangga semakin kecil sehingga di dalam model menjadi tidak signifikan. Meski tidak berpengaruh signifikan, koefisien regresi pada variabel

kondisi fisik ibu bertanda positif yang berarti bahwa kondisi fisik ibu yang terbatas (penyandang disabilitas) dapat menyebabkan resiko bagi anaknya untuk bekerja semakin besar.

Nilai $\exp(\beta)$ kondisi fisik ibu adalah sebesar 1,022. Artinya, seorang anak yang memiliki ibu dengan kondisi disabilitas memiliki kecenderungan 1,022 kali untuk bekerja dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan kondisi normal, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. Hal ini berarti bahwa ibu dengan kondisi fisik yang disabilitas lebih cenderung mengirim anaknya untuk bekerja. Menurut Mont dan Nguyen (2013), hal ini dikarenakan tanggung jawab anak akan lebih besar jika orang tuanya mengalami disabilitas tidak memiliki pendapatan yang cukup atau jika orang tua membutuhkan bantuan pribadi yang tidak dapat diperoleh dari luar keluarga. Dengan kata lain, kondisi disabilitas orang tua dapat menyebabkan ia tidak mampu bekerja sehingga anak menjadi satu-satunya harapan orang tua untuk memperoleh penghasilan bagi rumah tangga (Lal, 2019).

Selain disabilitas, masalah kesehatan yang merugikan akan membebani anggota rumah tangga dengan biaya keuangan saat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu biaya akses perawatan kesehatan, sedangkan secara tidak langsung yaitu hilangnya pendapatan terkait dengan berkurangnya tenaga kerja dalam rumah tangga dan produktivitas. Akibatnya, guncangan kesehatan yang besar dapat mengakibatkan keluarga mengalami penurunan pendapatan jangka pendek dan masuk ke dalam perangkap kemiskinan yang berkepanjangan (Sun & Yao, 2010; Wagstaff, 2005). Variabel kondisi kesehatan ibu dengan kategori sakit ringan tidak signifikan terhadap status pekerja anak. Hal ini dikarenakan kondisi sakit ringan yang dimaksud adalah kondisi ketika ibu menderita penyakit yang tidak mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya sehingga anak tidak perlu bekerja sebagai pengganti ibunya atau untuk membantu menambah penghasilan rumah tangga. Nilai $\exp(\beta)$ kondisi kesehatan ibu dengan kategori sakit ringan sebesar 1,003. Hal ini berarti bahwa kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan kondisi sakit ringan untuk bekerja 1,003 kali

dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan kondisi sehat, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan.

Sementara itu, variabel kondisi kesehatan ibu dengan kategori sakit berat signifikan terhadap status pekerja anak dan memiliki nilai $\exp(\beta)$ sebesar 1,167. Hal ini berarti bahwa kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan kondisi sakit berat untuk bekerja 1,167 kali dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan kondisi sehat, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Bratti & Mendola (2014), Lal (2019) dan Mendolia dkk. (2017), yang menyatakan bahwa seorang ibu yang sakit secara substansial akan mengurangi peluang anaknya untuk bersekolah dan sebaliknya memperbesar kemungkinan anaknya untuk bekerja. Hal ini akan lebih berakibat pada anak usia 10–15 tahun yang akan bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan pada kelompok umur lainnya. Sementara itu, kondisi terburuk dari kejadian ini adalah pada anak perempuan karena harus terlibat dalam pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pengeluaran untuk kesehatan ibu lebih tinggi daripada *foregone income*.

Di sisi lain, struktur keluarga merupakan salah satu faktor penentu keputusan pekerja anak. Literatur yang membahas peran struktur keluarga pada pekerja anak merujuk pada tiga hal utama, yaitu perampasan ekonomi, ketidakhadiran ayah, dan stres yang dialami keluarga (de Mesquita & de Farias Souza, 2018). Variabel status perkawinan ibu tidak signifikan terhadap status pekerja anak karena, berdasarkan hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018, ditemukan bahwa masih banyak ibu yang berstatus kawin tetapi tidak tinggal serumah dengan suami, yang menjadikannya tidak begitu berbeda dengan ibu yang berstatus cerai baik hidup maupun mati atau berstatus belum kawin.

Nilai $\exp(\beta)$ status perkawinan ibu adalah sebesar 1,113. Hal ini berarti bahwa kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan status pernah kawin untuk bekerja 1,113 kali dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan status kawin, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. Hal ini dikarenakan ibu yang berstatus kawin masih memiliki suami yang diharapkan dapat bekerja dan memperoleh

penghasilan sehingga ibu dan anak tidak perlu bekerja (Rad dkk., 2015). Sementara itu, adanya perubahan perilaku ibu akibat ketidakhadiran ayah dalam rumah tangga dan tekanan dalam keluarga akibat perceraian perkawinan dapat pula meningkatkan kemungkinan anak untuk bekerja (de Mesquita & de Farias Souza, 2018). Selain masalah perceraian orang tua, hal lainnya yang membawa anak ke pasar tenaga kerja adalah karena anak kehilangan salah satu atau bahkan kedua orang tuanya yang telah meninggal (Al Zayadi & Al Zayadi, 2018).

Umur yang semakin bertambah dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja sehingga mengakibatkan kesempatan anaknya untuk bekerja menjadi semakin besar (Jussi, 2009). Variabel umur ibu signifikan terhadap status pekerja anak dan memiliki nilai $exp(\hat{\beta})$ sebesar 0,580. Hal ini berarti bahwa kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan usia produktif untuk menjadi pekerja anak adalah sebesar 1,724 kali dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan usia tidak produktif, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Rad dkk. (2015) yang menyatakan bahwa seorang anak dengan ibu berumur 65 tahun ke atas akan memiliki risiko yang kecil untuk bekerja. Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas Kor Maret 2018, ditemukan bahwa ibu yang berumur produktif memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi sumber pembiayaan terbesar dalam rumah tangga. Menurut Basu dan Ray (2002), semakin kecil kontribusi pendapatan ibu dalam rumah tangga, maka akan semakin kecil kemungkinan baginya untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, perannya yang kecil sebagai sumber pembiayaan dalam rumah tangga inilah yang mengakibatkan posisi tawar-menawarnya melemah sehingga, sesuai dengan teori Basu (2001), mengakibatkan peluang bagi anaknya untuk bekerja akan semakin besar.

Tiap individu mempunyai beberapa kebutuhan seperti kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis yang apabila tidak terpenuhi di daerah tempat tinggal, dapat menimbulkan tekanan sehingga individu tersebut akan terdorong untuk memenuhi kebutuhannya di daerah lain. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan seseorang melakukan migrasi (Lee, 1966). Variabel migrasi ibu signifikan

terhadap status pekerja anak dan memiliki nilai $exp(\hat{\beta})$ sebesar 1,294. Hal ini berarti bahwa kecenderungan anak yang memiliki ibu dengan status migran risen untuk bekerja 1,294 kali dibandingkan dengan anak yang memiliki ibu dengan status bukan migran risen, dengan asumsi variabel penjelas lainnya konstan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian lainnya yang hanya berfokus pada kejadian ketika ibu bermigrasi tanpa membawa serta anaknya (Nguyen & Purnamasari, 2011; Kusumawardhani & Warda, 2013; Rad dkk., 2015, Purwatiningsih, 2016), sedangkan dalam penelitian ini tidak membedakan hal tersebut. Berdasarkan penelitian van de Glind (2010), anak yang mengikuti orang tua bermigrasi memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi pekerja anak. Pekerja anak digunakan oleh keluarga untuk dapat memenuhi kuota pekerja. Hal lainnya yaitu bahwa ketika keluarga bermigrasi ke luar daerah tanpa dokumen hukum, mereka disebut sebagai migran dalam situasi yang tidak teratur sehingga anak mereka akan sering mendapat pengecualian seperti pendidikan atau perawatan kesehatan sehingga meningkatkan resiko pekerja anak. Lebih lanjut, migrasi dapat pula dibedakan berdasarkan tujuannya seperti pada penelitian Morgan dan Trinh (2018), yaitu migrasi untuk bekerja dan migrasi untuk bersekolah. Menurut penelitian tersebut, anak yang tinggal dalam rumah tangga yang salah satu anggotanya bermigrasi untuk bekerja, memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bekerja. Sebaliknya, anak yang tinggal pada rumah tangga dengan salah seorang anggotanya bermigrasi untuk bersekolah, memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bersekolah. Penelitian ini tidak membedakan kedua hal tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pengolahan dan hasil analisis data secara deskriptif, terdapat 4,20% anak usia 10–17 tahun di Indonesia pada tahun 2018 yang berstatus sebagai pekerja anak. Anak-anak ini umumnya memiliki ibu yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, berpendidikan rendah, memiliki keterbatasan fisik seperti cacat (difabel), dalam kondisi sakit berat, masih berusia produktif, merupakan orang tua tunggal (berstatus cerai hidup ataupun mati) atau berstatus sebagai migran risen. Selanjutnya,

berdasarkan hasil analisis inferensial diperoleh hasil yang serupa dengan hasil analisis deskriptif. Karakteristik ibu yang signifikan berpengaruh positif mengakibatkan anaknya bekerja antara lain kedudukan ibu sebagai kepala keluarga, pendidikan ibu yang rendah, kondisi ibu yang sakit berat, dan status migrasi ibu sebagai migran risen. Umur ibu berpengaruh negatif yang berarti bahwa semakin bertambah usia seorang ibu, maka kemungkinan bagi anaknya untuk bekerja akan semakin kecil.

Hasil lainnya yang diperoleh pada penelitian ini adalah bahwa adanya indikasi pekerja anak tereksplotasi dari segi jam kerja pada sektor industri pengolahan (C), perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (G), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (I). Indikasi ini didasarkan pada hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa anak dengan status buruh yang bekerja di atas 40 jam dalam seminggu umumnya bekerja pada ketiga sektor ini. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang pemerintah diharapkan memberi perhatian khusus terhadap sektor-sektor ini.

Selain itu, berdasarkan penelitian ini, ibu merupakan salah satu aktor yang memiliki peran penting dalam munculnya masalah pekerja anak, sehingga diharapkan dukungan dari berbagai pihak terhadap kedudukan ibu dalam rumah tangga karena kesejahteraan ibu juga menentukan kesejahteraan anaknya.

Lebih lanjut, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini tidak membedakan antara pekerja anak dan anak yang bekerja. Oleh sebab itu, penemuan hanya berupa indikasi atau dugaan terhadap adanya pekerja anak yang tereksplotasi dari segi jam kerja. Kedua, variabel status migrasi ibu dalam penelitian ini tidak dibedakan antara yang bermigrasi dengan membawa serta anaknya atau tidak dan bermigrasi untuk tujuan bersekolah atau bekerja, sehingga hasil yang diperoleh masih secara umum. Keterbatasan ini menjadi ruang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan analisis lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Abdallah, A.S.R. (2020). Using logistic regression to identify the factors affecting child labor in Red Sea State. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 7(10), 12-19. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2020.10.002>
- Akarro, R.R.J., & Mtwewe, N. A. (2011). Poverty and its association with child labor in Njombe district in Tanzania: The case of Igima Ward. *Current Research Journal of Social Sciences*, 3(3): 199-206. <https://maxwellsci.com/print/crjss/v3-188-198.pdf>
- Al Zayadi, H.A.N., & Al Zayadi, H.S.H. (2018). A geographical analysis of the phenomenon of child labor in the city of Nasiriya. Study in social geography. *Alustath Journal for Human and Social Science*, 226 (2), 435-454. <https://doi.org/10.36473/ujhss.v226i2.70>
- Amir, F., Ashar, K & Pratomo, D.S. (2019). Pengaruh budaya & bargaining power terhadap partisipasi kerja dan sekolah anak di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12 (1), 1-9. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2019.v12.i01.p01>
- Anderson, S., & Eswaran, M. (2009). What determines female autonomy? Evidence from Bangladesh. *Journal of Development Economics*, 90(2), 179-191. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.10.004>
- Ariyanti, I. (2016). Socio economic factors affecting the child labour in Palembang city Indonesia. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 21(2), <https://www.icommercecetral.com/open-access/socio-economic-factors-affecting-the-child-labour-in-palembang-city-indonesia.php?aid=78453>
- Basu, K. (2011). Gender and say: A model of household behavior with endogenously-determined balance of power. *The*

- Economic Journal*, 116(511), 558-580.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01092.x>
- Basu, K., & Ray, R. (2002). The collective model of the household and an unexpected implication for child labor: Hypothesis and an empirical test. *Policy Research Working Paper* 2813.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/433691468757838910/The-collective-model-of-the-household-and-an-unexpected-implication-for-child-labor-hypothesis-and-an-empirical-test>
- Behera, P. K. & Das, S. (2016). Factors Responsible For the Incidence of Child Labour: A Study in Cuttack City, Odisha. *IOSR-JEF*, 7 (4), 24-32.
<https://doi.org/10.9790/5933-0704022432>
- Behrman, J. R. (1997). Intrahousehold distribution and the family. dalam M.R Rosenzweig & O. Stark (Eds.), *Handbook of family and population economics* (Vol 1A., pp. 125-187). Elsevier Science B.V.
[https://doi.org/10.1016/S1574-003X\(97\)80021-9](https://doi.org/10.1016/S1574-003X(97)80021-9)
- BPS. (2018, 16 Juli). *Berita Resmi Statistik No. 57/07/ThXXI*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Bratti, M., & Mendola, M. (2014). Parental health and child schooling. *Journal of Health Economics*, 35, 94–108.
<https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2014.02.006>
- Brown, D. K., Deardorff, A. V & Stern, R. M. (2002). The determinants of child labor: Theory and evidence. *Discussion paper* 486.
<https://fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/Papers476-500/r486.pdf>
- Darmika, W. D. B. & Usman, H. (2020). Pengaruh karakteristik kepala rumah tangga dan rumah tangga terhadap munculnya pekerja anak di Indonesia tahun 2018: Analisis data Susenas 2018. *Prosiding Seminar Nasional Official*
- Statistics* 2020, 1, 462-471
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.399>
- Darusasi, R. & Pitoyo, A. J. (2013). Kondisi demografi dan sosial ekonomi rumah tangga pekerja anak DKI Jakarta (analisis data susenas kor 2010). *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(1), 69 – 76.
- de Mesquita, S. P., & de Farias Souza, W. P. S. (2018). Child labor and family structure: The role of divorce. *International Journal of Social Economics*, 45(10), 1453–1468.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2017-0287>.
- Doss, C. (2011). Intrahousehold bargaining and resource allocation in developing countries.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19492>
- Elwan, L. O. M. & Aslim, L. O. (2019). Permasalahan Pekerja Anak di Kota Kendari. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 36-45.
<https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.14>
- Endrawati, N. (2012). Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal (Studi kasus di Kota Kediri). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 270–283.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47>
- Fernandez, R.C.E., & Abocejo, F. T. (2014). Child labor, poverty and school attendance: Evidences from the Philippines by region. *CNU-JHE*, 8, 114–127.
https://www.researchgate.net/publication/319505916_Child_Labor_Poverty_and_School_Attendance_Evidences_from_the_Philippines_by_Region
- Genicot, G., Mayda, A. M., & Mendola, M. (2016). *The Impact of Migration on Child Labor : Theory and Evidence From Brazil* (Discussion Paper Series 10444).
<https://docs.iza.org/dp10444.pdf>
- ILO. (1973). *C138 - Minimum age convention*. International Labour Organization.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_i

[lo_code:C138#:~:text=The%20minimum%20age%20for%20admission%20to%20any%20type%20of%20employment,2.](#)

- ILO. (2017). *Global estimates of child labour : Result and trends, 2012-2016*. International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
- ILO. (2018). *Tujuan pembangunan millenium: Referensi manual serikat pekerja pada agenda untuk pembangunan berkelanjutan 2030*. International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_646001.pdf
- Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 177–195. <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i2.226>
- KemenPPPA & BPS. (2019). *Profil Anak Indonesia 2019*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/e56dc-15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf
- Jafarey, S., & Lahiri, S. (2001). Child labour: Theory, policy and evidence. *World economics journal*, 2(1), 69–93. <https://www.world-economics-journal.com/Journal/Papers/Child%20Labour.details?ID=47>
- Jussi, I. (2009). Work ability - A comprehensive concept for occupational health research and prevention. *Scandinavian Journal of Work, Environment and Health*, 35(1), 1–5. <https://doi.org/10.5271/sjweh.1304>
- Kambhampati, U. S. (2009). Child schooling and work decisions in India: The role of household and regional gender equity. *Feminist Economics*, 15 (4), 77-112. <https://doi.org/10.1080/13545700903153997>
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_213.pdf
- Kibe, S. W. (2017). *Essays on women's bargaining power: Evidence from India* [Disertasi Doktor, Fordham University]. research library. <https://research.library.fordham.edu/dissertations/AAI10277270>
- Krutikova, S. (2009). Determinants of child labour: The case of Andhra Pradesh. *Young Lives Working Paper*, 48. https://www.younglives-india.org/sites/default/files/YL-WP48-Krutikova-ChildLabour_0.pdf
- Kusumawardhani, N., & Warda, N. (2013). Migrasi orang tua dan kejadian anak yang bekerja : Bukti dari Indonesia rumusan permasalahan [presentasi power point]. Child Poverty and Social Protection Conference, Indonesia. http://cpsp.smeru.or.id/Ppt%20Day%20/Theme3%20Kalasan1/Niken_ppt_bahasa.pdf
- Lal, B. S. (2019). Child labour in India: Causes and consequences. *International Journal of Science and Research*, 8(5), 2199–2206. <https://www.ijsr.net/archive/v8i5/ART20198458.pdf>
- Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 13(1), 47-57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
- Majlesi, K. (2016). Labor market opportunities and women's decision making power within households. *Journal of Development Economics*, 119, 34–47. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.10.002>
- Mendolia, S., Nguyen, T., & Yerokhin, O. (2017). *Impact of parental health on children 's schooling and labour force participation : Evidence from Vietnam* (Discussion Paper Series 10651). <https://docs.iza.org/dp10651.pdf>
- Mont, D., & Nguyen, C. (2013). Does parental

- disability matter to child education? Evidence from Vietnam. *World Development*, 48, 88–107. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.04.001>.
- Morgan, P. J., & Trinh, L. Q. (2018). *Heterogeneous Effects of Migration on Child Welfare : Empirical Evidence From Viet Nam* (ADBI Working Paper Series 835). <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/418491/adbi-wp835.pdf>
- Nandi, N. (2016). Pekerja anak dan permasalahannya. *Jurnal Geografi Gea*, 6(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1731.g1181>
- Nguyen, T., & Purnamasari, R. S. (2011, Maret). Impacts of international migration and remittances on child outcomes and labor supply in Indonesia : How does gender matter? (World Bank Policy Research Working Paper) <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5591>
- Pitriyan, P. (2006, Agustus). The impact of child labor on child s education : The case of Indonesia. *Working paper in economics and development studies, 200609*. Center for Economics and Development Studies. <http://ceds.feb.unpad.ac.id/wopeds/200609.pdf>
- Priyambada, A., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2005). What happened to child labor in indonesia during the economic crisis? The trade-off between school and work. *SMERU Research Institute, Working Paper* (Issue September). <https://smeru.or.id/en/publication/what-happened-child-labor-indonesia-during-economic-crisis-trade-between-school-and-work>
- Purwanti, P. A. P. (2014). Pengaruh karakteristik rumah tangga desa dan kota terhadap alokasi waktu anak untuk bekerja di Indonesia. *Jurnal piramida* Vol. X No. 2 : 86 – 93. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19492>
- Purwatiningsih, S. (2016). respons anak-anak migran terhadap migrasi internasional di perdesaan ponorogo. *Populasi*, 24(1), 57–71. respons anak-anak migran terhadap migrasi internasional di perdesaan ponorogo
- Quisumbing, A.R., & McClafferty. (2000). *Using Gender Research in Development*. Food Security in Practice Technical Guide Series No 2. <https://doi.org/10.2499/0896297551.ch2>
- Rad, E. H., Gholampoor, H., & Jaafaripooyan, E. (2015). Child labor and the influencing factors: Evidence from less developed provinces of Iran. *Iranian Journal of Public Health*, 44(9), 1244–1252. <https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/3395/3104>
- Rosidah, I. (2012). Quo vadis pekerja anak dalam tinjauan hukum. *LBH Yogyakarta*. <https://lbhyogyakarta.org/2012/05/30/quo-vadis-pekerja-anak-dalam-hukum/>
- Sahu, K. K. (2013). An empirical study of determinants of child labour. *International Journal of Science, Environment and Technology*, 2(3), 423 – 433. <https://www.ijset.net/journal/115.pdf>
- Sekaringsih, R. B. (2013). Dampak pengambilan keputusan dalam rumah tangga terhadap pendidikan anak dan kesehatan anak. Temuan Sakerti Tahun 2000 dan 2007.
- Sugiyani, E. (2000). Perlindungan hak bagi pekerja anak melalui program literacy class di Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Respositoryuinjkt. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7218>
- Sun, A., & Yao, Y. (2010). Health shocks and children's school attainments in rural China. *Economics of Education Review*, 29(3), 375–382. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2009.04.006>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

- Negara Republik Indonesia, 138.
https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1999_20.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/56658/105729/F1902768125/IND56658%20%20IND.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
<https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekretariat Negara. Jakarta.
https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child.
<https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>
- Usman, H & Nachrowi, D. N. (2004). *Pekerja anak di Indonesia : Kondisi, determinan dan eksploitasi (kajian kuantitatif)*. Grasindo.
- van de Glind, H. (2010, September). *Migration and child labour exploring child migrant vulnerabilities and those of children left-behind*. Working paper.
<https://hdl.handle.net/1813/101442>
- Wagstaff, A. (2005). The economic consequences of health shocks. *World Bank Policy Research Working Paper 3644*, 202.
<http://hdl.handle.net/10986/8307>
- Webbink, E., Smits, J., & de Jong, E. (2013). Household and context determinants of child labor in 221 districts of 18 developing countries. *Social Indicators Research*, 110(2), 819–836.
<https://doi.org/10.1007/s11205-011-9960-0>

Pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi *sandwich* di Indonesia

The effect of social capital on the happiness of the sandwich generation in Indonesia

Amelia Rahman^{1*}, Turro Seltris Wongkaren²

¹Badan Pusat Statistik Indonesia

²Universitas Indonesia

*Korespondensi penulis: amelia.rahman@bps.go.id

ABSTRACT

The measure of welfare is not only about material prosperity but also about happiness. The sandwich generation has a dual role to play in influencing their happiness. On the other hand, social capital also affects happiness. There are several mechanisms by which social capital affects happiness, including health conditions, household income, and education. This study aims to analyze specifically how social capital influences the happiness of the sandwich generation in Indonesia. This study uses SPTK 2017 data, analyzing the head of household or partner of the sandwich generation and non-sandwich generation. Using OLS estimation, the study found that the happiness index in the sandwich and non-sandwich generations are not significantly different. However, social capital generally has a significant effect on happiness. In addition, health conditions were found to be a variable that becomes a mechanism for how social capital affects happiness. Increasing the value of social capital in the poor health sandwich generation will be more beneficial in increasing their happiness. Meanwhile, household income and education were not found to be mechanisms for social capital.

Keywords: sandwich generation, happiness, social capital

ABSTRAK

Ukuran kesejahteraan tidak hanya dapat digambarkan dengan kondisi kemakmuran material namun juga dapat digambarkan oleh kondisi kebahagiaan. Peran ganda yang melekat pada mereka yang masuk ke dalam generasi *sandwich* tentu akan berpengaruh terhadap kebahagiaannya. Salah satu faktor yang memengaruhi kebahagiaan seseorang adalah nilai modal sosial. Terdapat beberapa mekanisme bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan, diantaranya melalui kesehatan, pendapatan rumah tangga, dan pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara khusus bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi *sandwich* di Indonesia. Tulisan ini menggunakan data SPTK 2017 dengan unit analisis adalah kepala rumah tangga atau pasangannya yang termasuk dalam generasi *sandwich* dan generasi non-*sandwich*. Dengan menggunakan metode estimasi OLS, hasil analisis menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan pada generasi *sandwich* dan non-*sandwich* tidak berbeda secara nyata, tetapi secara umum modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Selain itu kondisi kesehatan ditemukan sebagai variabel yang menjadi mekanisme bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan. Peningkatan nilai modal sosial pada generasi *sandwich* yang memiliki kesehatan yang kurang baik akan lebih bermanfaat dalam meningkatkan kebahagiaannya. Sementara itu variabel pendapatan rumah tangga dan pendidikan ditemukan bukan menjadi mekanisme bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan.

Kata kunci: generasi *sandwich*, kebahagiaan, modal sosial

DOI: 10.14203/jki.v17i2.675

Naskah masuk: 14 Juli 2022

Revisi akhir: 6 Oktober 2022

Naskah diterima: 8 Desember 2022



ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2022 National Research and Innovation Agency

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>).

PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat dunia semakin menyadari bahwa ukuran kesejahteraan tidak hanya dapat digambarkan dengan kondisi kemakmuran material, tetapi dapat juga digambarkan oleh kondisi kesejahteraan subjektif atau dikenal dengan kebahagiaan. Menjadi bahagia merupakan hak setiap individu, oleh karena itu negara harus dapat mengupayakan kebahagiaan bagi setiap warganya (Hansson, 2006). Selain itu, peningkatan kualitas hidup untuk semua juga merupakan tujuan akhir dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu dengan cara meningkatkan kesejahteraan dalam semua aspek, baik ekonomi, kesehatan, lingkungan, maupun sosial (United Nations, 2015).

Hasil studi Easterlin (1974) yang melihat hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan di Amerika Serikat menemukan bahwa rata-rata individu yang memiliki tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan subjektif tinggi. Meski pendapatan dan kesejahteraan subjektif berhubungan positif, tetapi pada suatu titik tertentu pendapatan tidak lagi dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif (Easterlin, 1974). Hal ini kemudian dikenal dengan istilah *Easterlin Paradox*.

Berdasarkan data World Happiness Report tahun 2020, nilai Happiness Index Indonesia hanya menempati peringkat ke-84 dari 153 negara di dunia. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya, indeks kebahagiaan Indonesia tergolong cukup rendah. Indeks kebahagiaan Indonesia masih di bawah Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Padahal, kebahagiaan penduduk dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan dan perkembangan sosial di masyarakat (Forgeard, 2011).

Manusia sebagai makhluk sosial, tentu tidak terlepas dari adanya interaksi dengan orang lain. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat modal sosial dan intensitas kontak sosial seseorang dengan orang lain (Arampatzi dkk., 2018). Modal sosial dipandang sebagai budaya bekerja sama yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa (Fukuyama, 2001). Selain itu, modal sosial juga

merupakan aset yang berdampak positif bagi keluarga dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup (Hamdan dkk., 2014). Hubungan antara tingkat kebahagiaan dan modal sosial menurut Bartolini & Sarracino (2014) memiliki hubungan jauh lebih kuat daripada hubungan antara tingkat kebahagiaan dan Produk Domestik Bruto (PDB), baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Diener dkk. (2009) menyebutkan setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa variabel kebahagiaan itu penting. Pertama, kebahagiaan yang tinggi akan memberikan banyak keuntungan, misal kesehatan yang lebih baik atau umur yang lebih panjang. Kedua, orang-orang menganggap kebahagiaan sangat penting, bahkan kebahagiaan dan kepuasan hidup dinilai lebih penting daripada materi atau uang. Ketiga, kebahagiaan merupakan cara utama untuk menilai kualitas hidup selain ekonomi dan indikator sosial lainnya. Keempat, kebahagiaan dinilai sebagai variabel utama dalam penelitian tentang orang tua atau kelompok tertentu.

Pada tahun 1960-an Indonesia mengalami era *baby boom* yang ditandai dengan penambahan jumlah bayi yang luar biasa (Badan Pusat Statistik, 2019). Perbaikan dalam bidang kesehatan telah meningkatkan harapan hidup penduduk, sehingga menyebabkan bayi-bayi pada era *baby boom* menua dan memperlebar piramida kelompok penduduk tua (Badan Pusat Statistik, 2019). Peningkatan persentase penduduk lansia di Indonesia yang juga diikuti dengan meningkatnya rasio ketergantungan, tentu menjadi beban tersendiri bagi penduduk usia produktif. Badan Pusat Statistik (2019) menyebutkan bahwa 51,08% penduduk lansia mengalami keluhan kesehatan dan 26,20% lansia mengalami sakit. Selain itu, 40,64% lansia tinggal bersama tiga generasi. Kondisi kelanjutusiaan ini membutuhkan perhatian lebih dari keluarga penanggung lansia yang umumnya berusia produktif. Mereka dihadapkan pada kondisi yang diharuskan memenuhi kebutuhan keluarga inti dan juga kebutuhan orang tua atau masuk ke dalam generasi *sandwich*. Generasi ini perlu menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawabnya untuk merawat anak dan

orangtuanya (Evans dkk., 2016; Sinha, 2013). Memberikan perawatan kepada orangtua lanjut usia bukanlah hal yang baru dan keluarga (anak) memiliki peran penting dalam hal perawatan ini (Ward-Griffin & Marshall, 2003). Pasangan (suami dan istri) yang terjepit dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak, orang tua, dan pekerjaan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi (Duxbury & Dole, 2015; Malach-Pines dkk., 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk melihat secara khusus bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi *sandwich*. Penelitian tentang kesejahteraan subjektif (kebahagiaan) sudah banyak dilakukan. Seperti Diener (2000) yang meneliti kebahagiaan melalui penilaian kognitif kehidupan seseorang serta efek positif dan negatifnya. Terdapat berbagai macam faktor penentu kesejahteraan subjektif individu, yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan status pekerjaan (Alesina dkk., 2004; Leung dkk., 2011; Winkelmann, 2009). Selain itu beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara modal sosial individu dan berbagai komponen kesejahteraan subjektif, termasuk kebahagiaan dan kepuasan hidup (Han dkk., 2013; Helliwell, 2001; Helliwell & Putnam, 2012; Portela dkk., 2013; Putnam, 2000; Yip dkk., 2007).

Hal yang membedakan tulisan ini dengan studi sebelumnya terletak pada unit analisis yang digunakan serta mekanisme bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif mengenai kebahagiaan pada seseorang yang termasuk dalam generasi *sandwich*. Sehingga dapat mengisi kekosongan studi (*research gap*) yang sangat dibutuhkan karena semakin meningkatnya jumlah dan persentase penduduk lansia di Indonesia. Hal lain yang membedakan tulisan ini dari penelitian sebelumnya adalah pembentukan variabel indeks kebahagiaan dan indeks modal sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebahagiaan

Kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau yang lebih dikenal sebagai kebahagiaan

memiliki definisi yang beragam. Kebahagiaan dapat berarti kesenangan, kepuasan hidup, emosi positif, kehidupan yang bermakna, atau perasaan puas lainnya (Diener dkk., 2009). Salah satu pemikir awal tentang kebahagiaan pra Sokrates yaitu filsuf Democritus yang menyatakan bahwa hidup bahagia itu bukan karena apa yang dimiliki, tetapi bagaimana cara orang merespons terhadap keadaan hidupnya (Tatarkiewicz, 1976). Kebahagiaan dimaknai sebagai perasaan senang dan puas terhadap sesuatu hal yang dianggap mulia (Kahneman dkk., 1999). Franklin (2010) menyebutkan bahwa kebahagiaan merupakan hal yang dirasakan atas upaya pencapaian dan pemenuhan terhadap potensi dan tujuan hidup seseorang. Kebahagiaan juga dimaknai sebagai evaluasi kehidupan yang dirasakan seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan yang juga mempertimbangkan perasaan (OECD, 2013).

Pada konteks budaya, kebahagiaan juga memiliki makna yang berbeda-beda. Budaya barat mendefinisikan kebahagiaan sebagai pencapaian prestasi pribadi (*personal achievement*). Individu bertindak untuk memaksimalkan pengalaman afek positifnya. Berbeda dengan budaya barat, budaya timur memaknai kebahagiaan sebagai pencapaian hubungan interpersonal seseorang dengan orang lain (Uchida dkk., 2004).

Konsep Modal Sosial

Häuberer (2011) menyebutkan bahwa Bourdieu dan Coleman merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan teori modal sosial secara sistematis pada era 80-an. Modal sosial merupakan akumulasi sumber daya potensial yang diperoleh dari pemanfaatan jejaring dan keanggotaan dalam kelompok (Bourdieu, 1986). Coleman (1988) memandang bahwa modal sosial mengacu pada kemampuan seseorang untuk bekerjasama dalam sebuah kelompok. Coleman (1988) juga mengidentifikasi tiga elemen utama sebagai pilar modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa percaya pada lingkungan sosial. Rasa percaya menimbulkan harapan dan kewajiban dalam lingkungan sosial. Kedua, arus informasi yang sehat dalam struktur

sosial yang penting untuk mendorong perkembangan aktivitas masyarakat. Terakhir, norma yang harus ditaati oleh masyarakat serta ditegakkan dengan sanksi yang jelas dan efektif.

Putnam (2000) menyatakan bahwa gagasan yang mendasari modal sosial adalah nilai norma dan jaringan yang saling terkait. Hal ini memungkinkan orang-orang yang mengikuti jejaring sosial mendapatkan keuntungan dari jejaring yang mereka ikuti. Dengan demikian, modal sosial dapat menjadi salah satu masukan bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan suatu negara. Sementara itu, Fukuyama (2001) menjabarkan modal sosial sebagai sebuah budaya bekerja sama yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Menurutnya, modal sosial merupakan seperangkat nilai dan norma yang dilembagakan dan dianut oleh anggota kelompok sehingga memberi kesempatan untuk saling bekerja sama antarindividu. Modal sosial dibangun sebagai sebuah norma yang mengedepankan asas kepentingan umum dalam sebuah komunitas dengan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Ragamnya variabel yang digunakan sebagai proksi modal sosial menghasilkan keragaman dimensi dan konsep yang sulit dipahami (Bjørnskov, 2008; Durlauf, 2002). Van Oorschot dan Arts (2005) mengelompokkan modal sosial menjadi tiga dimensi, yaitu jaringan sosial (misalnya hubungan informal, partisipasi, dan keanggotaan organisasi), norma sosial (misalnya norma bersama dan nilai-nilai kewarganegaraan), dan kepercayaan sosial (misalnya kepercayaan umum, kepercayaan terhadap institusi, dan kepercayaan antarpribadi).

Hubungan Modal Sosial dan Kebahagiaan

Terdapat beberapa kemungkinan mekanisme yang menghubungkan modal sosial dan kebahagiaan. Individu yang memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat memiliki tingkat kesehatan fisik yang lebih baik dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan subjektifnya (Helliwell & Putnam, 2004). Selain itu Helliwell & Putnam (2004) juga menyebutkan bahwa orang yang memiliki teman dekat dan orang kepercayaan, tetangga yang ramah dan rekan

kerja yang suportif cenderung untuk tidak mengalami kesedihan, kesepian, harga diri rendah, dan masalah dengan makan dan tidur sehingga akan cenderung meningkatkan kebahagiaannya.

Individu yang memiliki modal sosial yang tinggi juga lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk lebih mudah untuk memperoleh kesempatan kredit usaha (Narayan & Pritchett, 1999). Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh pendapatan. Mereka yang memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang juga lebih tinggi (Helliwell & Putnam, 2004).

Michalos (2008) menyatakan bahwa hubungan antara pendidikan dan kebahagiaan tidak dapat dilakukan secara langsung, namun tergantung pada definisi dan operasionalisasi pendidikan, pengaruh, dan kebahagiaan. Chen (2012) mendapatkan bukti empiris bahwa pendidikan yang dikombinasikan dengan kemampuan menjalin hubungan yang lebih luas akan berdampak positif terhadap kesejahteraan.

Generasi *Sandwich*

Miller (1981) merupakan orang pertama yang menciptakan istilah generasi *sandwich* yaitu merujuk pada wanita usia 40 tahun-an yang merawat anak-anak mereka yang masih kecil serta merawat orang tua mereka yang berusia antara 60 dan 70 tahun. Sinha (2013) menyebutkan bahwa generasi *sandwich* saat ini berusia antara 45 dan 65 tahun yang merawat anak-anak serta orang tua mereka.

Hal serupa juga diungkapkan oleh peneliti lainnya bahwa generasi *sandwich* merupakan generasi yang diapit oleh tanggung jawab ganda dalam merawat anak-anak serta orang tua mereka yang sudah lanjut usia secara bersamaan (Agree dkk., 2003; Chisholm, 1999; Grundy & Henretta, 2006; Miller, 1981). Peneliti lainnya memperluas kriteria generasi *sandwich* menjadi memiliki setidaknya satu anak di bawah usia 18 tahun dan tinggal di dalam rumah (Sinha, 2013; Tebes & Irish, 2014).

PENELITIAN TERDAHULU

Bjørnskov (2008) dalam penelitiannya di Amerika Serikat menemukan bahwa variabel modal sosial, yaitu kepercayaan sosial, *informal sociability*, dan *formal sociability*, memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kebahagiaan individu. Sejalan dengan hal tersebut, Leung dkk. (2011) juga setuju bahwa kepercayaan sosial, kepercayaan terhadap institusi, dan obligasi memiliki pengaruh yang positif dan kuat terhadap kebahagiaan individu. Rodríguez-Pose dan von Berlepsch (2014) juga menemukan bahwa modal sosial berperan penting dalam kebahagiaan individu dalam tiga dimensi, yaitu kepercayaan individu, interaksi sosial individu, serta norma dan sanksi sosial.

Bartolini dkk. (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa hubungan sosial dan kepercayaan terhadap institusi berkorelasi positif dan signifikan terhadap kebahagiaan seseorang. Helliwell (2001) menemukan fakta empiris bahwa semakin tinggi modal sosial, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan serta semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan subjektif. Sarracino (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara berbagai proksi modal sosial dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup.

Helliwell & Putnam (2004) menemukan bahwa modal sosial, yang diukur dengan kekuatan ikatan keluarga, lingkungan, agama, dan komunitas, mendukung kesehatan fisik dan kesejahteraan subjektif. Penelitian Han (2014) di Korea Selatan menunjukkan bahwa variabel modal sosial pada tingkat individu, yakni persepsi dalam membantu dan bekerja sukarela berpengaruh positif terhadap kebahagiaan. Selain itu persepsi membantu dan partisipasi organisasi dalam tingkat rumah tangga juga berhubungan positif dengan kebahagiaan. Sementara komponen modal sosial, yaitu kepercayaan terhadap pemimpin, bantuan, partisipasi, dan toleransi, juga memiliki hubungan positif dengan kebahagiaan (Rahayu, 2016).

Portela dkk., (2013) dalam penelitiannya di Eropa menemukan bahwa dampak modal sosial terhadap kesejahteraan subjektif berbeda-beda, tergantung pada komponen yang dianalisis.

Jejaring sosial, kepercayaan sosial, dan kepercayaan institusional merupakan komponen yang berkorelasi tinggi dengan kesejahteraan subjektif. Selain itu, tanggung jawab yang meningkat karena menjadi generasi *sandwich* dapat menyebabkan efek negatif pada keseluruhan kesejahterannya (Remennick, 1999; Voydanoff & Donnelly, 1999). Penelitian Gillett & Crisp (2017) di Australia menemukan bahwa stres yang dialami generasi *sandwich* memiliki efek buruk terhadap kebahagiaannya.

Pekerja yang memiliki lebih dari satu beban pengasuhan (anak dan orang tua) memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan pekerja yang hanya memiliki beban satu pengasuhan (Chapman dkk., 2004; Halinski dkk., 2018). Selain itu, pasangan yang terjepit dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak, orang tua, dan juga pekerjaan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi (Duxbury & Dole, 2015; Malach-Pines dkk., 2009; Pines dkk., 2011).

METODOLOGI

Data yang digunakan berasal dari Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) Tahun 2017. Unit analisis adalah Kepala Rumah Tangga (KRT) atau pasangannya yang tinggal bersama anak dan orang tuanya atau masuk ke dalam generasi *sandwich* serta yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut (generasi *non-sandwich*). Generasi *sandwich* dalam penelitian ini mengacu pada Agree dkk (2003) yang menyebutkan bahwa generasi *sandwich* merupakan generasi yang diapit oleh tanggung jawab ganda dalam merawat anak-anak serta orang tua mereka yang sudah lanjut usia secara bersamaan. Sedangkan generasi *non-sandwich* dalam penelitian ini merupakan KRT yang tinggal sendiri, KRT yang tinggal bersama anak dan pasangannya, KRT yang hanya tinggal bersama orang tuanya, serta KRT yang tinggal bersama keluarga lain. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 4.483 generasi *sandwich* dan 67.832 generasi *non-sandwich*.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks kebahagiaan. Pembentukan

variabel indeks kebahagiaan menggunakan metode yang digunakan BPS. Peneliti menggunakan nilai bobot setiap indikator berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh BPS.

Pembentukan variabel indeks modal sosial menggunakan metode yang digunakan oleh BPS. Peneliti menggunakan nilai bobot setiap indikator berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh BPS.

Variabel Independen

Tabel 1. Pembentukan Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Simbol	Deskripsi
Kebahagiaan	<i>happiness</i>	Kontinu
Modal sosial	<i>soscap</i>	Kontinu
Status generasi	<i>sandwich</i>	1 = <i>sandwich</i> 0 = <i>non-sandwich</i>
Kondisi kesehatan	<i>health</i>	1 = sehat 0 = sakit
Pendapatan rumah tangga	<i>wage</i>	5 = > Rp.7.200.00 4 = Rp.4.800.001 – Rp.7.200.000 3 = Rp.3.000.001 – Rp.4.800.000 2 = Rp.1.800.001 – Rp.3.000.000 1 = ≤ Rp.1.800.000
Tingkat pendidikan	<i>educ</i>	1 = rendah 2 = menengah 3 = tinggi
Umur	<i>age</i>	Kontinu
Hubungan dengan KRT	<i>krt</i>	1 = KRT 0 = pasangan KRT
Status bekerja	<i>work</i>	1 = bekerja 0 = tidak bekerja
Status kawin	<i>married</i>	1 = kawin 0 = lainnya
Jenis kelamin	<i>male</i>	1 = laki-laki 0 = perempuan
Jumlah anggota rumah tangga	<i>jart</i>	Kontinu
Wilayah tempat tinggal	<i>urban</i>	1 = kota 0 = desa
Keberadaan anak ≤ 18 tahun	<i>child</i>	1 = ada 0 = tidak ada

Metode Analisis

Model regresi *Ordinary Least Square* (OLS) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni bagaimana secara khusus modal sosial memengaruhi kebahagiaan. Penelitian ini akan membentuk enam model.

Model OLS I dan II menggunakan seluruh sampel baik generasi *sandwich* maupun *non-sandwich* sebagai unit analisis. Model OLS I menggambarkan bagaimana pengaruh modal sosial dan status menjadi *sandwich* atau *nonsandwich* terhadap kebahagiaan. Persamaan pada model OLS I adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} happiness1 = & \beta_1 + \beta_{11} soscap + \\ & \beta_{12} sandwich + \beta_{13} health + \beta_{14} wage1 + \\ & \beta_{15} wage2 + \beta_{16} wage3 + \beta_{17} wage4 + \\ & \beta_{18} educ1 + \beta_{19} educ2 + \beta_{110} age + \\ & \beta_{111} age_{square} + \beta_{112} krt + \beta_{113} married + \\ & \beta_{114} male + \beta_{115} jart + \beta_{116} urban + \\ & \beta_{117} child + \varepsilon \end{aligned}$$

Model OLS II memperlihatkan secara khusus bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan melalui status generasi *sandwich* atau *non-sandwich*. Berikut adalah persamaan pada model OLS II:

$$\begin{aligned} happiness2 = & \beta_2 + \beta_{21} soscap + \\ & \beta_{22} sandwich + \beta_{23} soscap * sandwich + \\ & \beta_{24} health + \beta_{25} wage1 + \beta_{26} wage2 + \\ & \beta_{27} wage3 + \beta_{28} wage4 + \beta_{29} educ1 + \\ & \beta_{210} educ2 + \beta_{211} age + \beta_{212} age_{square} + \\ & \beta_{213} krt + \beta_{214} married + \beta_{215} male + \\ & \beta_{216} jart + \beta_{217} urban + \beta_{218} child + \varepsilon \end{aligned}$$

Selanjutnya Model OLS III, IV, V, dan VI hanya menggunakan generasi *sandwich* sebagai unit analisis. Model OLS III menggambarkan bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan tanpa adanya interaksi dengan ketiga variabel moderasi, yaitu kesehatan, pendapatan rumah tangga, dan pendidikan. Persamaan OLS pada Model III adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} happiness3 = & \beta_3 + \beta_{31} soscap + \beta_{32} health + \\ & \beta_{33} wage1 + \beta_{34} wage2 + \beta_{35} wage3 + \\ & \beta_{36} wage4 + \beta_{37} educ1 + \beta_{38} educ2 + \\ & \beta_{39} age + \beta_{310} age_{square} + \beta_{311} krt + \\ & \beta_{312} married + \beta_{313} male + \beta_{314} jart + \\ & \beta_{315} urban + \beta_{316} child + \varepsilon \end{aligned}$$

Model OLS IV menggambarkan secara khusus bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui variabel kondisi kesehatan. Model persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} happiness4 = & \beta_4 + \beta_{41} soscap + \\ & \beta_{42} health + \beta_{43} soscap * health + \\ & \beta_{44} wage1 + \beta_{45} wage2 + \beta_{46} wage3 + \\ & \beta_{47} wage4 + \beta_{48} educ1 + \beta_{49} educ2 + \\ & \beta_{410} age + \beta_{411} age_{square} + \beta_{412} krt + \\ & \beta_{413} married + \beta_{414} male + \beta_{415} jart + \\ & \beta_{416} urban + \beta_{417} child + \varepsilon \end{aligned}$$

Model OLS V menggambarkan secara khusus bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui variabel pendapatan rumah tangga. Berikut model regresi OLS V:

$$\begin{aligned} happiness5 = & \beta_5 + \beta_{51} soscap + \\ & \beta_{52} health + \beta_{53} income + \beta_{54} soscap * \\ & income + \beta_{55} educ1 + \beta_{56} educ2 + \\ & \beta_{57} age + \beta_{58} age_{square} + \beta_{59} krt + \\ & \beta_{510} married + \beta_{511} male + \beta_{512} jart + \\ & \beta_{513} urban + \beta_{514} child + \varepsilon \end{aligned}$$

Model OLS VI menggambarkan secara khusus bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui variabel tingkat pendidikan. Model OLS yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} happiness6 = & \beta_6 + \beta_{61} soscap + \\ & \beta_{62} health + \beta_{63} wage1 + \beta_{64} wage2 + \\ & \beta_{65} wage3 + \beta_{66} wage4 + \beta_{67} educ1 + \\ & \beta_{68} educ2 + \beta_{69} soscap * educ1 + \\ & \beta_{610} soscap * educ2 + \beta_{611} age + \\ & \beta_{612} age_{square} + \beta_{613} krt + \beta_{614} married + \\ & \beta_{615} male + \beta_{616} jart + \beta_{617} urban + \\ & \beta_{618} child + \varepsilon \end{aligned}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan nilai indeks kebahagiaannya, generasi *sandwich* memiliki rata-rata nilai indeks kebahagiaan yang sedikit lebih tinggi yaitu 71,23 poin. Sedangkan generasi *non-sandwich* memiliki rata-rata nilai indeks kebahagiaan sebesar 70,72 poin. Berdasarkan nilai indeks modal sosial, terlihat rata-rata nilai indeks modal sosial pada generasi *sandwich* sedikit lebih tinggi dibandingkan pada generasi *non-sandwich*, yakni 50,69 poin pada generasi *sandwich* dan 49,90 poin pada generasi *non-sandwich*.

Selanjutnya variabel lain yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu kondisi kesehatan. Sebagian besar sampel baik pada generasi *sandwich* maupun *non-sandwich* memiliki kesehatan yang baik yaitu sebesar 78,18% pada generasi *sandwich* dan 73,80% pada generasi *non-sandwich*. Hal ini menunjukkan bahwa generasi *sandwich* lebih sehat dibandingkan generasi *non-sandwich*. Dilihat dari umur, generasi *sandwich* memiliki rata-rata umur lebih muda yakni 40,20 tahun, sedangkan generasi *non-sandwich* memiliki rata-rata umur 46,79 tahun. Kondisi kesehatan yang baik akan mempermudah seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas.

Berdasarkan kelompok umur, 40,11% generasi *non-sandwich* berumur 50 tahun ke atas, sedangkan pada generasi *sandwich* hanya 16,66% yang berumur 50 tahun ke atas. Hal ini

mengindikasikan bahwa generasi *sandwich* lebih didominasi mereka yang berumur muda, sedangkan generasi *non-sandwich* lebih didominasi mereka yang berumur tua. Selanjutnya berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, pada generasi *sandwich* maupun *non-sandwich* mayoritas memiliki tingkat pendapatan rumah tangga yang rendah dan sangat rendah. Namun pada generasi *sandwich* mereka yang berpendapatan rumah tangga sangat rendah cenderung lebih banyak dibandingkan generasi *non-sandwich*. Padahal rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada generasi *sandwich* lebih banyak dibandingkan generasi *non-sandwich*. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya beban anggota rumah tangga yang ditanggung generasi *sandwich* tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan rumah tangganya. Berdasarkan tingkat pendidikan, 50,00% generasi *non-sandwich* berpendidikan rendah, sedangkan pada generasi *sandwich* 49,28% berpendidikan menengah. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan pada generasi *sandwich* lebih tinggi dibandingkan pada generasi *non-sandwich*.

Data SPTK 2017 menunjukkan bahwa generasi *sandwich* maupun *non-sandwich* yang memiliki indeks modal sosial yang rendah lebih cenderung tidak bahagia, sedangkan mereka yang memiliki indeks modal sosial yang tinggi lebih cenderung sangat bahagia. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan kebahagiaan pada mereka yang memiliki indeks modal sosial tinggi dan rendah. Mereka yang memiliki keterikatan sosial yang kuat, seperti persahabatan dan dukungan keluarga, akan cenderung lebih bahagia. Selain itu, baik pada generasi *sandwich* maupun *non-sandwich*, mereka yang sakit lebih cenderung tidak bahagia. Sebaliknya, mereka yang sehat lebih cenderung sangat bahagia. Kesehatan fisik akan memengaruhi perasaan dan suasana hati seseorang. Individu yang memiliki permasalahan pada kesehatannya memiliki beban yang lebih berat sehingga hal ini akan menurunkan tingkat kebahagiaannya.

Generasi *sandwich* yang memiliki pendapatan rumah tangga sangat rendah lebih cenderung tidak bahagia dan sebaliknya generasi *sandwich* yang memiliki pendapatan rumah tangga tinggi atau sangat tinggi lebih cenderung sangat bahagia. Hal ini disebabkan mereka yang memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang telah terpenuhi kebutuhannya maka akan cenderung lebih bahagia.

Berdasarkan tingkat pendidikan, generasi *sandwich* yang berpendidikan rendah lebih cenderung tidak bahagia dan sebaliknya generasi *sandwich* yang berpendidikan tinggi lebih cenderung sangat bahagia. Hal ini disebabkan pendidikan yang tinggi akan meningkatkan peluang seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja, pekerjaan yang lebih baik, serta pendapatan yang lebih tinggi. Hal-hal tersebut tentu akan berdampak pada meningkatnya kebahagiaan. Selain itu, pendidikan yang tinggi juga akan meningkatkan pengetahuan seseorang. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih mudah dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan.

Hasil Estimasi OLS

Pengaruh Modal Sosial dan Status Generasi *Sandwich* dan *Non-sandwich* terhadap Kebahagiaan

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan baik pada generasi *sandwich* maupun *non-sandwich*, maka peneliti membentuknya dalam dua model. Model I menggambarkan bagaimana pengaruh modal sosial dan status menjadi *sandwich* atau *non-sandwich* terhadap kebahagiaan. Sedangkan Model II digunakan untuk melihat secara khusus bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan melalui status sebagai generasi *sandwich* atau *non-sandwich*.

Tabel 2. Koefisien Model Persamaan Pengaruh Modal Sosial dan Status Generasi *Sandwich* dan *Non-sandwich* terhadap Kebahagiaan

Variabel Dependen	Model OLS	
	I	II
Variabel Independen	(1)	(2)
Indeks kebahagiaan		
Modal sosial	0,073***	0,074***
<i>Sandwich</i>	0,085	0,426
Modal sosial* <i>sandwich</i>	-	-0,007
Kondisi kesehatan	2,739***	2,739***
Pendapatan	≤ Rp.1.800.000 (ref)	
rumah tangga	Rp.1.800.001-Rp.3.000.000	2,843***
	Rp.3.000.001-Rp.4.800.000	4,723***
	Rp.4.800.001 - Rp.7.200.000	6,116***
	Rp.> 7.200.000	7,561***
Pendidikan	Rendah (ref)	
	Menengah	1,832***
	Tinggi	4,594***
Umur	-0,130***	-0,129***
Umur kuadrat	0,001***	0,001***
KRT	-0,279*	-0,279*
Kawin	1,308***	1,307***
Bekerja	-0,259***	-0,259***
Laki-laki	0,160	0,160
Jumlah ART	-0,211***	-0,211***
Perkotaan	0,681***	0,681***
Keberadaan anak ≤ 18 tahun	-0,580***	-0,580***
Konstanta	64,239***	64,215***
N	72315	72315

Keterangan: * = sig<0,10; **=sig<0,05; ***=sig<0,01

Sumber: SPTK 2017 (diolah)

Pada Model I terlihat bahwa modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Hal ini berarti, penambahan satu unit nilai indeks modal sosial akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,07 poin. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif antara berbagai proksi modal sosial dan kebahagiaan (Bartolini dkk., 2013; Han, 2014; Rahayu, 2016; Rodríguez-Pose & von Berlepsch, 2014). Hubungan yang baik dengan teman, keluarga, dan masyarakat membuat seseorang terhindar dari kesepian sehingga akan merasa lebih bahagia. Model I juga memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kebahagiaan pada generasi *sandwich* dan *non-sandwich*. Hasil ini berbeda dengan penelitian Remennick (1999) serta Voydanoff dan Donnelly (1999) yang menemukan bahwa peningkatan tanggung jawab yang datang karena

menjadi generasi *sandwich* dapat menyebabkan efek negatif terhadap kebahagiaannya. Hal ini berarti di Indonesia keberadaan anak dan orang tua tidak selalu menjadi beban bagi kepala rumah tangga atau pasangannya.

Selanjutnya meskipun tidak signifikan, pada model dengan interaksi memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan *non-sandwich*, peningkatan nilai modal sosial membawa peningkatan nilai indeks kebahagiaan yang semakin kecil pada generasi *sandwich*. Hal ini berarti modal sosial akan lebih bermanfaat bagi generasi *non-sandwich* dalam meningkatkan kebahagiaannya. Selain itu, pada Model II juga terlihat bahwa meskipun tidak signifikan, generasi *sandwich* memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan generasi *non-sandwich*.

Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan Generasi *Sandwich*

Berdasarkan tinjauan literatur, diketahui bahwa modal sosial dapat memengaruhi kebahagiaan melalui beberapa mekanisme, yaitu melalui kesehatan, pendapatan rumah tangga, dan pendidikan. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi *sandwich*, maka peneliti membuat empat model. Pertama, Model III menggambarkan bagaimana modal sosial

memengaruhi kebahagiaan tanpa adanya interaksi dengan ketiga variabel moderasi. Kedua, Model IV menggambarkan secara khusus bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui variabel kondisi kesehatan. Ketiga, Model V menggambarkan secara khusus bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui variabel pendapatan rumah tangga. Keempat, model VI menggambarkan secara khusus bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui variabel tingkat pendidikan.

Tabel 3. Koefisien dari Model Persamaan Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan Generasi *Sandwich* melalui Kesehatan

Variabel Dependen	Model OLS	
	III	IV
Variabel independen	(1)	(2)
Indeks kebahagiaan		
Modal sosial	0,061***	0,074***
Kondisi kesehatan	2,737***	2,739***
Modal sosial * Kondisi kesehatan	-	-0,062***
Pendapatan rumah tangga		
≤ Rp.1.800.000 (ref)		
Rp.1.800.001-Rp.3.000.000	2,649***	2,842***
Rp.3.000.001-Rp.4.800.000	4,559***	4,722***
Rp.4.800.001 - Rp.7.200.000	6,447***	6,115***
Rp.> 7.200.000	8,314***	7,560***
Pendidikan		
Rendah (ref)		
Menengah	1,788***	1,832***
Tinggi	3,969***	4,594***
Umur	-0,202**	-0,130***
Umur kuadrat	0,002*	0,001***
Hubungan dengan KRT	-1,811**	-0,279*
Status kawin	0,433	1,307***
Status bekerja	-0,336	-0,259***
Jenis kelamin	2,086***	0,160
Jumlah ART	-0,170*	-0,211***
Wilayah tempat tinggal	0,298	0,681***
Keberadaan anak ≤ 18 tahun	-0,419	-0,580***
Konstanta	66,856***	64,215***
N	4483	4483

Keterangan: * = sig<0,10; **=sig<0,05; ***=sig<0,01

Sumber: SPTK 2017 (diolah)

Pada model III terlihat bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara modal sosial dan kebahagiaan pada generasi *sandwich*. Peningkatan satu poin nilai modal sosial pada generasi *sandwich* akan meningkatkan nilai kebahagiaan sebesar 0,06 poin. Hasil ini sesuai dengan penelitian Bartolini dkk. (2013), Bartolini & Sarracino (2014), Han (2014), Helliwell (2001), Jovanović (2016),

Leung dkk. (2011), Rahayu (2016), Rodríguez-Pose dan von Berlepsch (2014). Generasi *sandwich* yang memiliki hubungan baik dengan anak dan orang tuanya tidak akan menjadikan mereka sebagai beban, namun justru keberadaan keduanya akan meningkatkan kebahagiaannya. Selain itu, generasi *sandwich* yang memiliki hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat akan lebih mudah untuk berbagi

beban dalam penjagaan anak dan orang tua, misal dengan sesekali menitipkan anaknya kepada tetangga.

Variabel lain yang juga signifikan memengaruhi kebahagiaan pada generasi *sandwich* adalah kondisi kesehatan. Individu yang sehat memiliki 2,74 poin indeks kebahagiaan lebih tinggi daripada mereka yang sakit. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Leung dkk. (2011) yang menemukan bahwa individu yang sehat akan lebih cenderung untuk bahagia dibandingkan mereka yang sakit. Individu yang sakit memiliki beban pikiran yang lebih besar terhadap dirinya sehingga akan mengurangi kebahagiaannya. Berada pada posisi penanggung jawab anak dan orang tua tentu sudah menjadi beban bagi generasi *sandwich*. Beban ini akan semakin berat jika mereka dalam kondisi sakit.

Pendapatan rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan generasi *sandwich*. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Model III memperlihatkan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka semakin tinggi pula nilai indeks kebahagiaannya. Hal ini mengindikasikan pendapatan rumah tangga tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi kebahagiaan generasi *sandwich*. Pada penelitian ini tidak terjadi *Easterlin Paradox*, yakni kebahagiaan terus meningkat seiring meningkatnya pendapatan rumah tangga (Hori & Kamo, 2018). Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka akan semakin mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan, maka akan tercipta kebahagiaan. Selain itu, semakin tinggi pendapatan maka seseorang akan semakin tidak mengkhawatirkan biaya hidup untuk dirinya dan keluarganya. Terlebih bagi generasi *sandwich* memiliki pendapatan yang tinggi tentu akan mengurangi beban yang ditanggungnya. Apabila kebutuhan anak, orang tua, dan keluarga terpenuhi maka individu akan semakin bahagia. Sebaliknya, mereka yang kesulitan atau memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan anak, orang tua, keluarga, bahkan dirinya sendiri tentu akan semakin stres dan akan menurunkan tingkat kebahagiaannya.

Variabel lain yang juga berpengaruh kuat dan signifikan terhadap kebahagiaan adalah tingkat pendidikan. Generasi *sandwich* yang berpendidikan menengah memiliki nilai kebahagiaan 1,79 poin lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Bahkan, individu yang berpendidikan tinggi memiliki nilai kebahagiaan 3,97 poin lebih tinggi dibandingkan individu yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula nilai kebahagiaannya (Blanchflower & Oswald, 2004; Cuñado & de Gracia, 2012). Pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan pengetahuan yang didapatkan dengan menempuh pendidikan akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan pada individu.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui kesehatan, maka berdasarkan Model IV terlihat bahwa interaksi variabel modal sosial dan kondisi kesehatan menunjukkan hasil yang signifikan memengaruhi kebahagiaan generasi *sandwich*. Dibandingkan dengan yang tidak sehat, peningkatan nilai indeks modal sosial membawa penambahan nilai kebahagiaan yang lebih kecil pada generasi *sandwich*. Hal ini mengindikasikan bahwa modal sosial akan lebih bermanfaat pada mereka yang sakit dibandingkan pada mereka yang sehat dalam meningkatkan kebahagiaannya. Sikap saling percaya, hubungan yang baik, serta kerjasama yang baik akan lebih meningkatkan kebahagiaan pada mereka yang sakit. Hal ini sejalan dengan penelitian (Helliwell & Putnam, 2004) yang menyebutkan bahwa hubungan yang baik akan meningkatkan kesehatan seseorang dan secara tidak langsung akan meningkatkan kebahagiaannya. Individu yang sakit tentu lebih membutuhkan bantuan orang lain daripada mereka yang sehat. Pertolongan dan bantuan tersebut akan didapatkan jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan tetangga, sehingga pertolongan dan bantuan tersebut tentu akan meningkatkan kebahagiaannya. Model V menggambarkan secara khusus bagaimana modal sosial memengaruhi

kebahagiaan generasi *sandwich* melalui pendapatan rumah tangga. Pada Tabel 4 terlihat bahwa interaksi variabel modal sosial dan pendapatan tidak signifikan memengaruhi kebahagiaan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme modal sosial memengaruhi kebahagiaan melalui pendapatan tidak berjalan. Hasil studi ini berbeda dengan temuan Narayan & Pritchett (1999) yang menyebutkan bahwa

seseorang yang memiliki modal sosial yang tinggi akan lebih cenderung untuk memperoleh kesempatan kredit usaha sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kebahagiaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga tidak menjadi mekanisme bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan pada generasi *sandwich*.

Tabel 4. Koefisien dari Model Persamaan Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan Generasi *Sandwich* melalui Pendapatan Rumah Tangga

Variabel Dependen	Model OLS
Indeks kebahagiaan	V
Variabel independen	(1)
Modal sosial	0,056***
Kondisi kesehatan	2,867***
Pendapatan rumah tangga	
≤ Rp.4.800.000 (ref)	
> Rp.4.800.000	3,542***
Modal sosial*Pendapatan rumah tangga	0,012
Pendidikan	
Rendah (ref)	
Menengah	2,154***
Tinggi	5,112***
Umur	-0,177*
Umur kuadrat	0,002
Hubungan dengan KRT	-1,922***
Status kawin	0,479
Status bekerja	-0,092
Jenis kelamin	2,172***
Jumlah ART	-0,108
Wilayah tempat tinggal	0,560**
Keberadaan anak ≤ 18 tahun	-0,516
Konstanta	67,072***
N	4483

Keterangan: * = sig<0,10; **=sig<0,05; ***=sig<0,01

Sumber: SPTK 2017 (diolah)

Pada Model VI yang menggambarkan model interaksi antara variabel modal sosial dan pendidikan juga terlihat tidak signifikan. Hasil ini berbeda dengan temuan Chen (2012) yang menyebutkan bahwa pendidikan yang dikombinasikan dengan kemampuan menjalin hubungan yang lebih luas akan berdampak positif terhadap kebahagiaan. Dapat disimpulkan bahwa

tingkat pendidikan tidak menjadi mekanisme bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan. Namun, pendidikan berpengaruh langsung terhadap kebahagiaan. Mereka yang berpendidikan tinggi lebih bahagia dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kebahagiaan juga semakin tinggi.

Tabel 5. Koefisien Model Persamaan Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan Generasi *Sandwich* melalui Tingkat Pendidikan

Variabel Dependen		Model OLS
Indeks Kebahagiaan		VI
Variabel Independen		(1)
Modal sosial		0,064***
Kondisi kesehatan		2,741***
Pendapatan rumah tangga	≤ Rp.1.800.000 (ref)	
	Rp.1.800.001-Rp.3.000.000	2,656***
	Rp.3.000.001-Rp.4.800.000	4,561***
	Rp.4.800.001 - Rp.7.200.000	6,456***
	Rp.> 7.200.000	8,321***
Pendidikan	Rendah (ref)	
	Menengah	1,642
	Tinggi	5,529***
Modal sosial*Pendidikan menengah		0,003
Modal sosial*Pendidikan tinggi		-0,032
Umur		-0,209**
Umur kuadrat		0,002*
Hubungan dengan KRT		-1,829***
Status kawin		0,411
Status bekerja		0,343
Jenis kelamin		2,099***
Jumlah ART		0,168*
Wilayah tempat tinggal		0,283
Keberadaan anak ≤ 18 tahun		-0,405
Konstanta		66,86***
N		4483

Keterangan: * = sig<0,10; **=sig<0,05; ***=sig<0,01

Sumber: SPTK 2017 (diolah)

KESIMPULAN

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara khusus pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan pada generasi *sandwich*. Berdasarkan hasil deskriptif ditemukan bahwa generasi *sandwich* yang memiliki modal sosial tinggi lebih cenderung sangat bahagia dan mereka yang memiliki modal sosial rendah lebih cenderung tidak bahagia. Selain itu generasi *sandwich* yang sehat lebih cenderung bahagia, sedangkan mereka yang sakit lebih cenderung tidak bahagia. Berdasarkan pendapatan rumah tangga juga didapat bahwa rumah tangga yang memiliki pendapatan rumah tangga yang sangat rendah lebih cenderung untuk tidak bahagia, sementara semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka kecenderungan untuk bahagia semakin meningkat. Selanjutnya berdasarkan pendidikan terlihat bahwa mereka yang berpendidikan rendah lebih cenderung tidak

bahagia, sementara mereka yang berpendidikan tinggi lebih cenderung sangat bahagia.

Hasil dari Model OLS I menunjukkan bahwa modal sosial berdampak positif dan signifikan baik pada generasi *sandwich* maupun *non-sandwich*. Namun status sebagai generasi *sandwich* atau *non-sandwich* tidak berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan pada generasi *sandwich* maupun *non-sandwich* tidak berbeda secara nyata. Selanjutnya hasil dari Model OLS II memperlihatkan bahwa meskipun tidak signifikan, pada model dengan interaksi memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan *non-sandwich*, peningkatan nilai modal sosial membawa peningkatan nilai indeks kebahagiaan yang semakin kecil pada generasi *sandwich*. Dapat disimpulkan bahwa modal sosial akan lebih bermanfaat bagi generasi *non-sandwich* dalam meningkatkan kebahagiaannya.

Hasil dari Model OLS III terlihat bahwa modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan generasi *sandwich*. Peningkatan nilai modal sosial pada generasi *sandwich* akan meningkatkan nilai kebahagiaannya. Generasi *sandwich* yang memiliki hubungan baik dengan anak dan orang tuanya tidak akan menjadikan mereka sebagai beban, namun justru keberadaan keduanya akan meningkatkan kebahagiaannya. Selain itu, generasi *sandwich* yang memiliki hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat akan lebih mudah untuk berbagi beban dalam penjagaan anak dan orang tua, misal dengan sesekali menitipkan anaknya kepada tetangga.

Hasil dari Model OLS IV menunjukkan bahwa variabel kondisi kesehatan merupakan mekanisme yang tepat bagaimana secara khusus modal sosial memengaruhi kebahagiaan pada generasi *sandwich*. Dibandingkan dengan yang tidak sehat, peningkatan nilai indeks modal sosial membawa penambahan nilai kebahagiaan yang lebih kecil pada generasi *sandwich*. Hal ini mengindikasikan bahwa modal sosial akan lebih bermanfaat pada generasi *sandwich* yang sakit dibandingkan pada mereka yang sehat dalam meningkatkan kebahagiaannya.

Selanjutnya hasil dari Model OLS V dan VI memperlihatkan bahwa pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan bukan menjadi mekanisme bagaimana modal sosial memengaruhi kebahagiaan pada generasi *sandwich*. Hasil ini telah dikontrol oleh variabel lain yaitu pendidikan, umur, hubungan dengan KRT, status perkawinan, status bekerja, jenis kelamin, jumlah anggota rumah tangga, wilayah tempat tinggal, dan keberadaan anak umur kurang dari 18 tahun.

Saran

Peran generasi *sandwich* sebagai orang tua dan anak memerlukan usaha dan pengorbanan yang lebih besar untuk merawat anak dan orang tuanya. Meningkatnya populasi lansia saat ini membutuhkan perhatian semua pihak agar lansia tidak menjadi lansia terlantar. Selain itu, diperlukan dukungan terhadap mereka yang melakukan perawatan terhadap lansia, dalam hal ini keluarga inti. Hasil analisis membuktikan

bahwa modal sosial memiliki dampak positif terhadap kebahagiaan, baik pada generasi *sandwich* maupun *non-sandwich*. Oleh karena itu, salah satu implementasi yang relevan untuk meningkatkan kebahagiaan adalah dengan menumbuhkembangkan nilai modal sosial di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah mendorong kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam masyarakat seperti budaya gotong royong. Budaya ini sudah mulai memudar di dalam masyarakat, padahal budaya gotong royong dapat menciptakan rasa saling percaya, toleransi, dan tolong. Jika budaya ini terus dilestarikan, maka akan memberi banyak manfaat terlebih bagi generasi *sandwich*. Mereka akan mudah percaya untuk menitipkan anak atau orang tua mereka terhadap tetangga atau masyarakat sekitar, sehingga beban yang ditanggung akan menjadi lebih ringan.

Hasil analisis juga membuktikan bahwa modal sosial akan lebih bermanfaat terhadap generasi *sandwich* yang sakit dalam meningkatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di antaranya program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berperilaku hidup sehat sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan bahagia.

Dalam studi selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang menggambarkan kondisi kesehatan dan status bekerja orang tua yang tinggal bersama di dalam rumah. Hal ini penting agar dapat diketahui bagaimana perbedaan kebahagiaan generasi *sandwich* yang memiliki orang tua yang sehat dan orang tua yang sakit. Selain itu, penting juga untuk dilihat bagaimana perbedaan kebahagiaan generasi *sandwich* yang memiliki orang tua yang bekerja atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agree, E., Bissett, B., & Rendall, M. S. (2003). Simultaneous care for parents and care for children among mid-life British women and men. *Popul Trend*, 112, 29-35. PMID: 12870427.

- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12870427/>
- Alesina, A., Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: Are Europeans and Americans different? *Journal of Public Economics*, 88 (9-10), 2009-2042. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.07.006>
- Arampatzi, E., Burger, M. J., & Novik, N. (2018). Social network sites, individual social capital and happiness. *Journal of Happiness Studies*, 19(1), 99–122. <https://doi.org/10.1007/s10902-016-9808-z>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta: BPS.
- Bartolini, S., Bilancini, E., & Pugno, M. (2013). Did the decline in social connections depress Americans' happiness?, *Social Indicators Research*, 110, 1033-1059. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9971-x>
- Bartolini, S., & Sarracino, F. (2014). Happy for how long? How social capital and economic growth relate to happiness over time. *Ecological Economics*, 108, 242-256. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.10.004>
- Bjørnskov, C. (2008). Social capital and happiness in the United States. *Applied Research in Quality of Life*, 3(1), 43–62. <https://doi.org/10.1007/s11482-008-9046-6>
- Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2004). Money, sex and happiness: An empirical study. *Scandinavian Journal of Economics*, 106(3), 393-415. <https://doi.org/10.1111/j.0347-0520.2004.00369.x>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (241-258).
- Chapman, N. J., Ingersoll-Dayton, B., & Neal, M. B. (2004). Balancing the multiple roles of work and caregiving for children, adults, and elders. In G.P. Keita & J.J. Hurrell, Jr (Eds), *Job stress in a changing workforce: Investigating gender, diversity, and family issues* (pp. 283-300). <https://doi.org/10.1037/10165-018>
- Chen, Wc. (2012). How education enhances happiness: Comparison of mediating factors in four East Asian countries. *Social Indicators Research*, 106, 117-131. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9798-5>
- Chisholm, J. F. (1999). The sandwich generation. *Journal of Social Distress and the Homeless*, 8(3), 177-191. <https://doi.org/10.1023/A:1021368826791>
- Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. *The American Journal of Sociology*, 94, S95-S210. <https://www.jstor.org/stable/2780243>
- Cuñado, J., & de Gracia, F. P. (2012). Does education affect happiness? Evidence for Spain. *Social Indicators Research*, 108, 185-196. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9874-x>
- Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*, 55(1), 34-43. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>
- Diener, E., Napa Scollon, C., & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. In E. Diener (Eds), *Assessing Well-Being* (pp 67-100). Social Indicators Research Series, vol 39. Springer https://doi.org/10.1007/978-90-481-2354-4_4
- Durlauf, S. N. (2002). On the empirics of social capital. *Economic Journal*, 112(483), F459-F479. <https://doi.org/10.1111/1468-0297.00079>

- Duxbury, L., & Dale, G. (2015). Squeezed in the middle: Balancing paid employment, childcare and eldercare. In R. Burke., K. M. Page., & C. Cooper, *Flourishing in Life, Work and Careers*. Elgaronline. <https://doi.org/10.4337/9781783474103.0017>
- Easterlin, R. A. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. In P.A. David & M.W. Reder (Eds), *Nations and households in economic growth*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-205050-3.50008-7>
- Evans, K. L., Millsteed, J., Richmond, J. E., Falkmer, M., Falkmer, T., & Girdler, S. J. (2016). Working sandwich generation women utilize strategies within and between roles to achieve role balance. *PLoS ONE*, *11*(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157469>
- Forgeard, M. J. C. (2011). Happy people thrive on adversity: Pre-existing mood moderates the effect of emotion inductions on creative thinking. *Personality and Individual Differences*. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.07.015>
- Franklin, K. (2010). *The impact of deployment and psychological well-being on family relationships: A secondary analysis of air force community assessment data* [Doctoral dissertation, Virginia Commonwealth University]. scholarscompass. <https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3315&context=etd>
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*. <https://doi.org/10.1080/713701144>
- Gillett, J. E., & Crisp, D. A. (2017). Examining coping style and the relationship between stress and subjective well-being in Australia's 'sandwich generation.' *Australasian Journal on Ageing*, *36*(3), 222-227. <https://doi.org/10.1111/ajag.12439>
- Grundy, E., & Henretta, J. C. (2006). Between elderly parents and adult children: A new look at the intergenerational care provided by the "sandwich generation." *Ageing and Society*, *26*(5), 707-722. <https://doi.org/10.1017/S0144686X06004934>
- Halinski, M., Duxbury, L., & Higgins, C. (2018). Working while caring for mom, dad, and junior too: Exploring the impact of employees' caregiving situation on demands, control, and perceived stress. *Journal of Family Issues*, *39*(12), 3248–3275. <https://doi.org/10.1177/0192513X18777839>
- Hamdan, H., Yusof, F., & Marzukhi, M.A. (2014). Social capital and quality of life in urban neighborhoods high density housing. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *153*, 169-179. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.051>
- Han, S. (2014). Social capital and subjective happiness: which contexts matter? *Journal of Happiness Studies*, *16*, 241-255. <https://doi.org/10.1007/s10902-014-9506-7>
- Han, S., Kim, H., & Lee, H. S. (2013). A multilevel analysis of the compositional and contextual association of social capital and subjective well-being in Seoul, South Korea. *Social Indicators Research*, *111*, 185-202. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9990-7>
- Hansson, M. (2006). *Economic growth and happiness - in the Western World Today*. 41–60. <https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/1325368>
- Häuberer, J. (2011). The founding concepts of social capital - Bourdieu's theory of capital and coleman's rational-choice approach to social capital. In *Social Capital Theory*. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92646-9_2

- Helliwell, J. F. (2001). Social capital, the economy and well-being. *The Review of Economic Performance and Social Progress*.
- Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (2004). The social context of well-being. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 359, 1435-1446. <https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1522>
- Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (2012). The social context of well-being. In F.A. Huppert, N.Baylis, & Barry Keverne (Eds), *Science of well-being* (Oxford Academic, pp. 434-459). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198567523.003.0017>
- Hori, M., & Kamo, Y. (2018). Gender differences in happiness: the Effects of Marriage, Social Roles, and Social Support in East Asia. *Applied Research in Quality of Life*, 13, 839-857. <https://doi.org/10.1007/s11482-017-9559-y>
- Jovanović, V. (2016). Trust and subjective well-being: The case of Serbia. *Personality and Individual Differences*, 98, 284-288. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.04.061>
- Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (1999). Well-being: The foundations of hedonic psychology. *Health San Francisco*. <https://doi.org/10.7758/9781610443258>
- Leung, A., Kier, C., Fung, T., Fung, L., & Sproule, R. (2011). Searching for happiness: The importance of social capital. *Journal of Happiness Studies*, 12(3), 443-462. <https://doi.org/10.1007/s10902-010-9208-8>
- Malach-Pines, A., Hammer, L., & Neal, M. (2009). "Sandwiched generation" couples: A cross-cultural, cross-gender comparison. *Pratiques Psychologiques*, 225-237. <https://doi.org/10.1016/j.prps.2008.09.010>
- Michalos, A. C. (2008). Education, happiness and wellbeing. *Social Indicators Research*, 87, 347-366. <https://doi.org/10.1007/s11205-007-9144-0>
- Miller, D. A. (1981). The 'sandwich' generation: Adult children of the aging. *Social Work*, 26(5), 419-423. <https://doi.org/10.1093/sw/26.5.419>
- Narayan, D., & Pritchett, L. (1999). Cents and sociability: Household income and social capital in rural Tanzania. *Economic Development and Cultural Change*, 47(4), 871-897. <https://doi.org/10.1086/452436>
- OECD. (2013). OECD guidelines on measuring subjective well-being. In *OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being*. <https://doi.org/10.1787/9789264191655-en>
- Pines, A. M., Neal, M. B., Hammer, L. B., & Icekson, T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. *Social Psychology Quarterly*, 74(4), 361-386. <https://doi.org/10.1177/0190272511422452>
- Portela, M., Neira, I., & Salinas-Jiménez, M. del M. (2013). Social capital and subjective wellbeing in Europe: A new approach on social capital. *Social Indicators Research*, 114, 493-511. <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0158-x>
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America's declining social capital. In L. Crothers & C. Lockhart (Eds), *Culture and Politics* (pp. 223-234). https://doi.org/10.1007/978-1-349-62397-6_12
- Rahayu, T. P. (2016). Determinan kebahagiaan di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(1), 149-170. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6844/5920>
- Remennick, L. I. (1999). Women of the "sandwich" generation and multiple roles: The case of Russian immigrants of the

- 1990s in Israel. *Sex Roles*, 40, 347-378. <https://doi.org/10.1023/A:1018815425195>
- Rodríguez-Pose, A., & von Berlepsch, V. (2014). Social capital and individual happiness in Europe. *Journal of Happiness Studies*, 15(2), 357–386. <https://doi.org/10.1007/s10902-013-9426-y>
- Sarracino, F. (2012). Money, sociability and happiness: are developed countries doomed to social erosion and unhappiness?: Time-series analysis of social capital and subjective well-being in Western Europe, Australia, Canada and Japan. *Social Indicators Research*, 109, 135-188. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9898-2>
- Sinha, M. (2013). Portrait of caregivers, 2012. Spotlight on Canadians: Results from the General Social Survey. In *Statistics Canada Catalogue no.89-652-X*.
- Tatarkiewicz, Wł. (1976). *Analysis of happiness*. Springer Dordrecht
- Tebes, J. K., & Irish, J. T. (2014). Promoting resilience among children of sandwiched generation caregiving women through caregiver mutual help. In *Diverse Families, Competent Families: Innovations in Research and Preventive Intervention Practice*, 20 (1-2), 139-158 . https://doi.org/10.1300/J005v20n01_10
- Uchida, Y., Norasakkunkit, V. & Kitayama, S. (2004). Cultural constructions of happiness: theory and empirical evidence. *Journal of Happiness Studies* 5, 223–239, <https://doi.org/10.1007/s10902-004-8785-9>
- United Nations.(2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. A/RES/70/1
- Van Oorschot, W., & Arts, W. (2005). The social capital of European welfare states: The crowding out hypothesis revisited. *Journal of European Social Policy*, 15(1), 5-26c. <https://doi.org/10.1177/0958928705049159>
- Voydanoff, P., & Donnelly, B. W. (1999). Multiple roles and psychological distress: The intersection of the paid worker, spouse, and parent roles with the role of the adult child. *Journal of Marriage and the Family*, 61(3), 725-738. <https://doi.org/10.2307/353573>
- Ward-Griffin, C., & Marshall, V. W. (2003). Reconceptualizing the relationship between “public” and “private” eldercare. *Journal of Aging Studies*, 17(2), 189-208. [https://doi.org/10.1016/S0890-4065\(03\)00004-5](https://doi.org/10.1016/S0890-4065(03)00004-5)
- Winkelmann, R. (2009). Unemployment, social capital, and subjective well-being. *Journal of Happiness Studies*, 10, 421-430. <https://doi.org/10.1007/s10902-008-9097-2>
- Yip, W., Subramanian, S. V., Mitchell, A. D., Lee, D. T. S., Wang, J., & Kawachi, I. (2007). Does social capital enhance health and well-being? Evidence from rural China. *Social Science and Medicine*, 64(1), 35-49. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.027>

Kontribusi ekonomi remitansi bagi pembangunan desa: Studi kasus pedagang warung tegal di Jakarta Selatan

The economic contribution of remittances for village development: Case study of warung tegal traders in South Jakarta

Nur Ali Hidayatulloh¹, Rakhmat Hidayat^{2*}

¹Prodi Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta

²Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta

*Korespondensi penulis: hidayat@unj.ac.id

ABSTRACT

Warung Tegal or warteg (a food stall with cheap food) is a local economic phenomenon that is rapidly growing in the Jakarta area, particularly for the lower middle-class society. This growth is due to the connection between warteg business and remittances sent to their hometowns. This paper aims to (i) explain the informal economy of warteg traders who provide economic opportunities for other migrants in Jakarta, (ii) describe the remittances economy of warteg traders to their families in their hometowns, and (iii) explain the economic contribution of remittances to the development of migrants' origin villages. This research uses a qualitative approach with case studies of warteg traders around Bangka IX, Pela Mampang, and Mampang Prapatan. Data were obtained by direct observation that was carried out from March 2016 to January 2017. The interviewees include five warteg traders who sell in the Pela Mampang region, as well as the children of the traders and village officials of Dukuhjati Kidul, Tegal. The results of the study show that warteg can increase the wealth of migrant families. Remittances serve as a form of social bonding and responsibility to their families. They are used for consumption and productive activities, such as building houses that are considered a symbol of success in running warteg.

Keywords: migrant, remittances, informal sector

ABSTRAK

Warung Tegal (warteg) menjadi fenomena ekonomi lokal yang berkembang cepat di kawasan Jakarta, terutama untuk masyarakat ekonomi kelas menengah bawah. Fenomena ekonomi lokal tersebut terjadi karena adanya keterkaitan usaha warteg dengan praktik ekonomi remitansi yang dikirimkan ke kampung halaman mereka. Tujuan penelitian ini adalah (i) menjelaskan ekonomi informal pedagang warteg yang berkontribusi terhadap peluang ekonomi bagi para migran lain di Jakarta, (ii) menggambarkan ekonomi remitansi pedagang warteg kepada keluarga mereka di kampung halaman, (iii) menjelaskan kontribusi ekonomi remitansi bagi pembangunan desa asal para migran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data diperoleh dengan teknik pengamatan langsung ke pedagang warteg yang berada di sekitar Bangka IX, Pela Mampang, Mampang Prapatan selama periode Maret 2016 hingga Januari 2017. Informan kajian ini terdiri dari lima orang pedagang warteg yang berjualan di sekitar Pela Mampang, serta anak dari pedagang warteg dan perangkat Desa Dukuhjati Kidul, Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warteg mampu menjadi alternatif untuk menambah kekayaan keluarga migran. Remitansi memiliki arti penting sebagai bentuk ikatan sosial dan sebagai tanggung jawab kepada keluarga mereka di kampung halaman. Remitansi digunakan untuk konsumsi dan kegiatan produktif, seperti membangun rumah yang dianggap sebagai simbol keberhasilan migran saat menjalankan warteg.

Kata kunci: migran, remitansi, sektor informal



PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan Jakarta yang semakin berkembang dengan mengutamakan modernisasi turut memengaruhi gejala mobilitas penduduk. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan mobilitas penduduk ke kota. Pembangunan kota yang besar biasanya akan diiringi dengan mobilitas penduduk. Perbedaan pertumbuhan perekonomian antardaerah yang tidak merata juga turut memengaruhi gerak laju mobilitas penduduk. Faktor lainnya seperti kondisi di daerah asal yang dianggap cenderung kurang memenuhi tingkat perekonomian penduduk. Mobilitas penduduk hampir tiap waktu biasa dijumpai di kota-kota besar seperti halnya Jakarta (Wajdi dkk., 2017). Fenomena tersebut turut berdampak terhadap kepadatan penduduk dan berbagai masalah lainnya. Mobilitas penduduk biasanya cenderung terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja. Kondisi ketimpangan yang terjadi di berbagai wilayah inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan mobilitas penduduk (Hummel, 2020; McKenzie, 2017).

Ada beragam motif yang melatarbelakangi gerak penduduk ke kota seperti halnya motif ekonomi. Salah satu faktor pendorong penduduk desa melakukan perpindahan adalah faktor ekonomi. Selain itu, faktor lainnya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan serta, adanya daya tarik kota yang mempunyai berbagai fasilitas dan struktur ekonomi yang beragam (Todaro, 1999; Mas'udah, 2020). Penduduk yang kebutuhannya tidak terpenuhi oleh kondisi yang ada di lingkungannya akan bergerak untuk meninggalkan daerahnya dan mencari daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Usaha sektor informal warung tegal (selanjutnya disingkat warteg) di Jakarta memberikan ruang tersendiri bagi migran. Warteg adalah jenis usaha kelas menengah bawah yang menyajikan makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Warteg identik menjadi milik penduduk asli Tegal atau orang-orang dari kota lain di Indonesia yang berlokasi di Tegal atau Jakarta (Asyuti, 2015; Novianti & Susanto, 2018). Secara historis, keberadaan warteg pertama kalinya di Jakarta muncul pada tahun 1950 (Samparaya, 2018). Pada saat itu terjadi fenomena perpindahan ibu kota Indonesia dari

Yogyakarta ke Jakarta. Saat itu terjadi migrasi yang cukup pesat dari masyarakat Jawa Tengah ke Jakarta seiring dengan pembangunan yang berlangsung di era Soekarno.

Kondisi lapangan pekerjaan di Jakarta yang menuntut berbagai macam persyaratan tertentu yang sesuai dengan tingkat pendidikan seseorang terkadang tidak bisa menampung kehadiran migran. Hal inilah yang akhirnya membuka kesempatan migran untuk bekerja di sektor informal. Sektor informal mampu menyerap tenaga migran dalam kehidupan mereka selama berada di Jakarta. Pedagang warteg yang bermigrasi ke Jakarta turut berpengaruh terhadap perubahan tingkat pendapatan yang diperolehnya. Menurut Simmons (1984), migrasi merupakan bagian yang integral dari perubahan sosial ekonomi suatu daerah. Lebih lanjut Simmons (1984) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara migrasi dan perubahan sosial ekonomi yang tampak secara nyata pada migran yang telah berhasil dalam kehidupannya. Keberadaan migran pedagang warteg turut serta berkontribusi terhadap daerah asalnya yang ditinggalkan. Hal tersebut ditandai dengan adanya arus pengiriman uang atau remitansi dari migran kepada keluarga yang ditinggalkan di daerah asalnya. Migrasi berpengaruh positif terhadap daerah asal karena membawa uang, barang-barang dan gagasan pembangunan (Mantra, 1988). Remitansi mempunyai peranan yang penting dalam menjaga hubungan keluarga dan juga sebagai wujud rasa tanggung jawab migran selama berada di Jakarta. Para migran biasanya akan mengirim sejumlah uang atau barang kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagi keluarga yang menerima remitansi tentu ini membawa keuntungan sendiri. Adanya hubungan yang masih terjalin antara migran dengan keluarganya diwujudkan melalui proses remitansi ke daerah asal ataupun dalam bentuk kunjungan.

Selain itu, melalui remitansi bisa dijadikan sebagai komponen dalam memelihara hubungan baik dengan daerah asal. Hal ini sangat penting mengingat keberadaan mereka yang tidak satu tempat dan wilayah. Melalui remitansi juga telah menunjukkan adanya suatu integrasi antara

perekonomian di perkotaan dengan perekonomian rumah tangga di daerah asal migran. Hal tersebut penting dalam interaksi desa dengan kota yang semakin menguat melalui proses remitansi ke daerah asal migran. Selain itu, turut berpengaruh terhadap tingkat kehidupan masyarakat di pedesaan. Hal ini tercermin dalam beberapa studi yang menunjukkan remitansi bisa mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang (Azizi, 2021; Mehedintu dkk, 2019).

Proses remitansi akan dilakukan dengan berbagai cara untuk mengalokasikan hasil pendapatan yang dimilikinya dari usaha warteg agar bisa mengirimkan uang yang lebih banyak ke daerah asal. Fenomena migrasi yang disertai dengan remitansi juga bisa terlihat saat migran pulang ke desa asalnya karena proses *aplus*¹ dalam usaha warteg. Mereka biasanya akan membawa barang atau sejumlah uang baik milik sendiri ataupun orang lain. Remitansi berpengaruh terhadap migran maupun keluarga yang ditinggalkan. Remitansi juga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam menjalin hubungan di antara mereka yang bisa berupa sarana informasi.

KAJIAN TEORITIS

Bentuk dan Faktor Pengiriman Remitansi

Selama dua dekade terakhir, analisis remitansi menjadi isu penting dalam kajian sosial ekonomi yang mengalami perkembangan dinamis. Dalam kajian ekonomi, remitansi berkembang menjadi alat analisa dan pendekatan baru (Rapoport & Docquier, 2005). Perubahan tersebut terjadi dari pendekatan ekonomi mikro remitansi yang lebih menekankan kepada peran informasi dan interaksi sosial dalam perilaku pengiriman uang bergeser menjadi pendekatan makro ekonomi remitansi yang menjelaskan remitansi lebih kepada dampak yang ditimbulkan di masyarakat dari pengiriman uang tersebut. Perubahan baru ini juga fokusnya secara bertahap bergeser ke pertimbangan jangka panjang, terutama peran pengiriman uang dalam dinamika ketimpangan

dan pembangunan.

Disisi lain, remitansi adalah dana yang dibawa masuk oleh pekerja migran ke negara atau daerah asalnya, baik berupa uang tunai maupun barang. Remitansi merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang penting bagi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara pengirim tenaga kerja migran (Romdiati, 2012). Jumlah uang yang dikembalikan imigran cukup besar. Remitansi juga penting bagi negara pengirim imigran. Selain itu, remitansi juga memengaruhi keseimbangan perdagangan dan mendukung investasi nasional. Caldwell (1969:152) menyatakan bahwa remitansi merupakan pengiriman uang atau barang. Dalam hal ini tidak masalah jika hasil remitansi digunakan untuk konsumsi atau membeli rumah atau investasi lainnya. Para migran menyediakan beragam bentuk modal seperti uang yang mempunyai dampak pembangunan bagi keluarga atau negara asal mereka. Dampak tersebut bisa dalam konteks perekonomian keluarga, sosial, budaya, dan lain-lain. Remitansi menghasilkan dampak positif terhadap perekonomian keluarga dan menstimulasi permintaan bagi barang dan jasa lain (Banga & Sahu, 2011). Dampak level mikro dan level makro pada dasarnya adalah bagian dari konsep *social remittance* (Levitt, 1998; Lacroix dkk., 2016). Konsep ini muncul sejak awal tahun 2000 untuk menggambarkan bahwa dalam remitansi bukan hanya uang, tetapi juga terdapat ide, praktik, modal sosial, dan identitas yang beredar antarkomunitas pengirim dan penerima. Pertukaran dan peredaran ini dilakukan secara berulang dan diperkuat oleh bentuk sirkulasi budaya lainnya.

Migrasi Pedagang Warung Tegal

Migrasi dan remitansi memiliki keterkaitan dalam level analisisnya, meskipun keduanya memiliki definisi konseptual masing-masing. Migrasi dapat dianalisis dari multiperspektif seperti geografis, ekonomi, sosiologi, psikologi hingga antropologi. Multiperspektif ini bisa dilakukan dengan bertopang pada kausalitas

¹ *Aplus* merupakan suatu istilah yang digunakan dalam mengelola warteg secara bergantian dalam waktu tiga bulan yang dilakukan oleh dua pedagang

antara teori dan efeknya (Haller dkk., 2018). Penjelasan multitafsir ini menunjukkan bahwa remitansi bukan sekadar konsep ekonomi, tetapi juga terkait aspek nonekonomi lainnya sebagaimana melekat dalam konsep remitansi. Namun, sifat hubungan antara migrasi, remitansi, dan pembangunan tampaknya bervariasi dari waktu ke waktu. Ada beberapa kasus penting yang menunjukkan migrasi dan remitansi telah terbukti memiliki efek netral atau bahkan negatif pada pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (Chiodi dkk., 2012).

Definisi migrasi tergambar dalam dinamika kehidupan di kota besar seperti halnya Jakarta. Di Jakarta tak terlepas dari kehidupan masyarakat pendatang. Keadaan seperti itulah yang hampir ditemui tiap tahunnya. Keberadaan masyarakat pendatang juga tak lepas dari faktor penarik yang ada di kota tersebut seperti halnya dengan berkembangnya proses pembangunan. Menurut Mabogunje (1970) dalam studinya tentang migrasi lokal di berbagai bagian Afrika Barat, mengatakan bahwa mobilitas regional ini mencakup gerakan perorangan dan kelompok-kelompok individu melintasi batas-batas etnis atau batas nasional. Batas-batas etnis dan regional yang mendorong terjadinya migrasi di masyarakat perantau seperti halnya Jakarta tak lepas dari ikatan sosial dengan keluarganya di kampung halaman. Ikatan sosial tersebut terbentuk melalui adanya jaringan sosial (*social networking*) di antara masyarakat perantau yang dijadikan sebagai sarana dalam mata pencaharian perantau (Haryono, 2007). Perantau di Jakarta berusaha untuk tetap mengembangkan dan menjaga jaringan sosial, terlebih bagi mereka yang masih satu desa. Fenomena jaringan sosial seperti ini dijadikan sebagai strategi untuk mengembangkan pekerjaan dan juga sebagai penyesuaian diri mereka di Jakarta. Kuatnya ikatan sosial akan memudahkan individu mengetahui kesediaan pekerjaan (Collet, 2003; Granovetter, 1998, 2005). Mereka bermigrasi ke Jakarta bukan berarti tanpa sebab, biasanya karena diajak oleh sanak keluarganya, teman, kerabat atau kenalan.

Sektor Informal Warteg sebagai Sumber Remitansi

Ada beberapa konsep sektor informal seperti, yaitu yang diungkapkan oleh Hart (1973, 1985) dan mencetuskan istilah sektor informal. Hasil penelitiannya dituliskan sektor informal berawal dari penelitian di Ghana yang membagi jenis-jenis pekerja formal dan informal. Penelitiannya dilakukan dalam sebuah buku yang berjudul "*Small-Scale Entrepreneurs in Ghana*". Dalam bukunya tersebut Hart (1973, 1985) menjelaskan tiga jenis tipologi mengenai kesempatan memperoleh penghasilan di kota yakni kesempatan memperoleh penghasilan yang formal, kesempatan memperoleh yang informal secara sah, dan kesempatan memperoleh penghasilan yang informal secara tidak sah. Pembahasan mengenai sektor informal Hart menjelaskan bagaimana memperoleh penghasilan yang informal secara sah salah satunya seperti distribusi kecil-kecilan dan pedagang besar, kelontong, kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, pengangkut barang agen atas komisi dan penyalur. Konsep sektor informal ini bisa digunakan sebagai salah satu dalam mendapatkan informasi mengenai hasil remitansi oleh masyarakat migran yang ada di Jakarta. Dalam pandangan Chatterjee dan Turnovsky (2018), penjelasan ini menunjukkan adanya kaitan erat antara sektor informal dengan remiten di kota-kota negara berkembang. Keberadaan warteg sebagai sektor informal seperti yang ada di kawasan Pela Mampang juga dijadikan sebagai strategi dalam perputaran hasil remitansi yang nantinya akan digunakan oleh migran dan keluarganya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Metode studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan berbagai sumber informasi (Raco, 2019:49). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan mulai dari tanggal 8 Maret 2016 – 3 Januari 2017. Data diperoleh dengan teknik

pengamatan langsung ke pedagang warteg yang berada di sekitar Bangka IX, Pela Mampang, dan Mampang Prapatan. Pemilihan lokasi di Kawasan Pela Mampang karena dibantu akses *gate keeper* yang dimiliki salah satu peneliti sehingga lebih memudahkan untuk menggali informasi dan melakukan penelitian.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dinamika remitansi pedagang warteg, penulis menggunakan sebanyak lima orang informan. Nama-nama informan diberikan inisial yaitu AM, IS, SU, SA, dan SUL. Kelima informan ini didapatkan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu mendapatkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik ini memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan informan karena sudah mendapatkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Mereka saling mengenal satu dengan lainnya. Semua informan merupakan pedagang warteg yang berjualan di sekitar Pela Mampang. Wawancara dilakukan di sela-sela mereka melayani di warungnya. Peneliti sengaja melakukan janji di waktu yang tidak sibuk seperti jam makan siang atau jam makan malam. Hal ini ditujukan agar wawancara berlangsung lancar dan tidak terpotong ketika mereka melayani konsumennya. Wawancara dilakukan secara informal dengan suasana santai dan dilakukan dengan bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Tegal. Salah satu anggota peneliti berasal dari daerah Tegal sehingga wawancara berlangsung menggunakan kedua bahasa tersebut.

Selain itu, penulis juga mewawancarai perangkat Desa Dukuhjati Kidul, Tegal yaitu AMN. Alasan peneliti melakukan wawancara dengan anak pedagang warteg dan perangkat desa untuk melakukan triangulasi data, yaitu mengonfirmasi temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan. Secara lebih khusus, wawancara dengan perangkat desa dilakukan untuk menggali data kontribusi dari pedagang warteg untuk kegiatan sosial pendidikan di desanya. Data dari perangkat desa ini sangat penting untuk mengonfirmasi apa yang sudah disampaikan seluruh informan terkait dengan remitansi yang dilakukan selama ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Migrasi sebagai Strategi Bertahan Hidup hingga Terbentuknya Remitansi

Pesatnya pertumbuhan kota umumnya disebabkan adanya proses migrasi penduduk yang kemudian melahirkan suatu masyarakat yang sangat kompleks menurut ukuran kesukaan, pekerjaan, serta kelompok sosial (Evers, 1986, 2007; Mardiansjah & Rahayu, 2019; Surya dkk., 2021). Kebutuhan yang semakin meningkat berpengaruh terhadap keputusan untuk bermigrasi ke kota besar seperti Jakarta. Hal ini mengindikasikan adanya suatu perubahan yang diharapkan oleh migran. Beberapa faktor migrasi turut memengaruhi keputusan mereka untuk melakukannya, ditambah adanya suatu anggapan tentang kecenderungan bekerja di Jakarta yang nantinya akan berdampak terhadap perubahan hidupnya.

Pedagang warteg yang menjadi informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa proses migrasi ke Jakarta sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Mereka melakukannya secara lintas generasi meskipun dengan usaha yang mengalami pasang surut. Seperti halnya AM yang sudah mulai bermigrasi sejak tahun 1980-an bersama dengan suaminya. Keputusannya untuk bermigrasi saat itu turut dipengaruhi oleh keadaan tingkat perekonomian yang dialaminya yang menghendaki adanya perubahan. Migrasi yang dilakukan pedagang warteg menggambarkan adanya strategi mencari nafkah yang disebut ‘‘strategi penghidupan’’ (*livelihood strategy*) daripada strategi cara hidup (*means of living strategy*). Strategi nafkah bisa berarti cara bertahan hidup atau memperbaiki status kehidupan (Irawaty & Wahyuni, 2011).

Keputusan pedagang yang melakukan migrasi ke Jakarta akan berpengaruh terhadap pengiriman remitansi ke daerah asalnya. Vadean dan Piracha (2010) mengelompokkan status migrasi yang dijalankan oleh pedagang warteg menjadi migrasi permanen dan migrasi sirkuler. Migrasi permanen merupakan jenis migrasi yang dilakukan oleh SU, AM, dan IS, sedangkan migrasi sirkuler dilakukan oleh SA dan SUL.

Pedagang warteg yang melakukan migrasi sirkuler lebih sering dalam mengirim remitansi ke daerah asalnya. Kondisi tersebut terjadi karena sistem *aplus* yang dilakukan oleh pedagang warteg. Lain halnya yang bermigrasi secara permanen atau menetap di Jakarta. Mereka juga

melakukan remitansi ke daerah asal namun frekuensinya akan berbeda dengan yang migrasi secara sirkuler. Dibawah ini disajikan tabel perbedaan antara migrasi sirkuler dan migrasi permanen.

Tabel 1. Tipologi Perbedaan Migrasi Sirkuler dan Migrasi Permanen

No	Migrasi Sirkuler	Migrasi Permanen
1.	Frekuensi pengiriman remitansi lebih banyak tiap bulannya seperti 3 – 4 kali	Frekuensi remitansi lebih sedikit bahkan tidak pernah tiap bulannya
2.	Jumlah pengiriman berupa uang akan semakin bertambah dengan adanya keluarga di daerah asal	Jumlah pengiriman uang ke daerah asal cenderung stabil karena tidak ada keluarga inti di daerah asal
3.	Hubungan komunikasi semakin kuat dengan keluarga di daerah asal	Hubungan komunikasi dilakukan saat ada keperluan tertentu
4.	Kontribusi remitansi semakin bertambah terhadap pembangunan dan kegiatan sosial di daerah asal	Kontribusi remitansi untuk daerah asal dilakukan dalam waktu tertentu seperti saat melakukan kunjungan, permintaan dari desa
5.	Pemanfaatan remitansi bagi keluarganya akan semakin bertambah untuk kebutuhan konsumtif dan produktif	Pemanfaatan remitansi di daerah asalnya bersifat produktif seperti pembangunan rumah

Berdasarkan Tabel 1, secara umum bisa dijelaskan bahwa migrasi permanen adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan niat menetap di daerah tujuan. Adapun migrasi sirkuler terjadi jika seseorang berpindah tempat, tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan, mungkin hanya mendekati tempat pekerjaan. Migrasi penduduk sirkuler dapat didefinisikan sebagai gerak penduduk yang melintasi batas administrasi suatu daerah menuju ke daerah lain dalam jangka waktu kurang dari enam bulan.

Pilihan dan keputusan bermigrasi yang dilakukan oleh pedagang warteg salah satunya berdasarkan keputusan apakah akan tinggal menetap di Jakarta atau tidak menetap. Hal tersebut dilakukannya dengan melihat beberapa kondisi seperti keluarga migran di daerah asal. SU dan AM merupakan pedagang warteg yang kini memutuskan untuk tinggal menetap di Jakarta. Hal tersebut dikarenakan keluarga inti migran di daerah asalnya kini sudah menetap di Jakarta. Kondisi tersebut nantinya berpengaruh terhadap wujud kunjungan atau remitansi yang dikirim ke daerah asalnya. AM merupakan migran yang sudah lama menetap di Jakarta sejak dia mengawali migrasi ke Jakarta tahun 1980-an.

Selain itu, IS kini juga menetap di Jakarta.

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor sistem pengelola warteg yang kini sedang dijalankan. Bagi IS, dalam mengelola warteg tidak menggunakan sistem *aplusan* seperti informan lainnya. Sebelumnya dia pernah menggunakan sistem *aplusan* dengan SUL pada awal bermigrasi. Sementara itu, sistem *aplusan* yang dilakukan SA dan SUL hingga saat ini turut berpengaruh terhadap status migran pedagang warteg lainnya terutama di lingkungan keluarga atau tetangga terdekatnya. Setiap tiga bulan, mereka (SA dan SUL) akan bergantian melakukan kunjungan ke kampung halamannya. Kunjungan dalam hal ini dipahami sebagai ‘‘pulang kampung’’ dengan membawa sejumlah uang atau barang-barang yang akan digunakan di kampung halamannya. Frekuensi kunjungan ke kampung halamannya dalam hal ini berpengaruh terhadap kuantitas remitansi ke daerah asalnya. Kunjungan dengan mengacu kepada sistem *aplusan* tetap menjaga operasional wartegnya sebagaimana mestinya.

Kunjungan dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai manifestasi pola remitansi kepada kampung halamannya tetapi juga bisa dipahami secara sosio-psikologis. Secara sosiologis, kunjungan mereka tetap mempertahankan ikatan sosial dengan akar sosial

budaya mereka di kampung halaman. Mereka bisa kembali berjumpa dan bersosialisasi dengan kerabat dan tetangga sekitarnya. Bahkan, mereka juga bisa ‘‘unjuk diri’’ hasil remitansi mereka melalui barang-barang yang dikonsumsi seperti perhiasan, kendaraan bermotor/mobil, pembelian tanah/sawah atau renovasi rumah. Secara psikologis dipahami sebagai mekanisme rehat dari hiruk pikuk ekonomi kota yang mereka jalani sebelumnya. Kunjungan ke kampung halaman adalah waktunya rehat seraya mengumpulkan energi untuk melanjutkan aktifitas ekonomi berikutnya setelah mereka giliran sistem *aplusan* tersebut. Pada saat mereka kembali ke Jakarta memulai aktifitasnya mengelola warteg, mereka sudah siap dan semangat kembali untuk menjalankan usaha warteg.

Migrasi yang dilakukan oleh pedagang warteg menunjukkan bahwa migrasi cenderung dianggap sebagai bentuk aktivitas yang bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang positif menjadi hal yang didambakan oleh para migran, mengingat alasan umum yang mendasari peristiwa migrasi adalah faktor ekonomi. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang paling sering ditemukan setelah migrasi terjadi adalah perubahan kepemilikan asset (Septiani dkk., 2022). Alasan-alasan ekonomi inilah yang mendorong warga desa turut bermigrasi ke Jakarta. Menurut mereka tingkat kebutuhan yang semakin meningkat harus ditingkatkan melalui pendapatan yang diperolehnya.

Mereka memutuskan migrasi ke Jakarta tak serta merta didasari oleh keinginan sendiri. Ada yang diajak oleh kerabat, teman maupun kenalan bahkan ada juga atas keinginan sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh IS dalam migrasi ke Jakarta. Sebelumnya dia hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, sementara suaminya bekerja sebagai sopir bajaj. Hasil wawancara dengan IS menunjukkan bahwa keputusan untuk bermigrasi ke Jakarta dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Sebelumnya dia tinggal di daerah asalnya dan hanya mengandalkan nafkah dari suaminya. Namun dia merasa pendapatan suaminya kurang mencukupi ditambah dengan kebutuhan yang

semakin meningkat.

Kondisi faktor ekonomi di daerah asalnya juga kurang mendukung bagi IS untuk meningkatkan ekonominya. Kondisi itulah berdampak terhadap keputusan migrasi ke Jakarta untuk membuka usaha warteg bersama dengan suaminya. Pilihan untuk melakukan migrasi merupakan salah satu alternatif dalam menghadapi berbagai perubahan sosial ekonomi keluarga migran. Hal tersebut seperti dalam hasil wawancara dengan IS yang mengalami berbagai perubahan kebutuhan. Selain itu, dalam upaya untuk bermigrasi turut berdampak terhadap meningkatnya remitansi yang dilakukan ke daerah asalnya. Hal ini dikarenakan keluarga migran yang ditinggal dengan pedagang di Jakarta masih mempunyai hubungan dan saling membutuhkan.

Wujud dari tanggung jawab pedagang warteg terhadap keluarga di daerah asalnya diwujudkan melalui remitansi. Hal tersebut merupakan suatu bentuk yang saling membutuhkan. Pedagang warteg biasanya akan mengirim remitansi sesuai dengan kebutuhan di kampung dan sesuai dengan keputusannya saat mengirim ke daerah asalnya. Adapun remitansi yang dihasilkan oleh pedagang warteg yaitu barang dan uang. Kedua bentuk remitansi tersebut dihasilkan oleh pedagang warteg dari hasil berdagang selama berada di Jakarta. Pedagang warteg akan mengirim dalam bentuk uang. Kiriman tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh penerima remitansi yang ada di daerah asalnya. Selain itu, wujud dari kiriman lainnya yaitu berupa barang. Wujud remitansi uang dan barang merupakan hal yang pokok bagi di antara kedua aktor yang saling berhubungan.

Uang merupakan wujud remitansi ekonomi dari pedagang warteg. Pengiriman uang digunakan untuk kebutuhan konsumsi bagi keluarga di daerah asalnya. Uang dihasilkan di sektor informal perkotaan yang dilakukan oleh migran dengan usaha warteg. Selain menjadi suatu hal kebutuhan pokok bagi pedagang dan keluarga di daerah asalnya, uang menjadi komoditi sebagai penghubung bentuk komunikasi di antara kedua aktor tersebut. Uang menjadi simbol dari keberhasilan pedagang

warteg dalam mengirim ke daerah asalnya. Hal inilah yang dialirkan kepada keluarga asalnya di Tegal. Selanjutnya, hasil dari remitansi tersebut akan dikelola untuk kebutuhan yang bisa bersifat produktif maupun konsumtif.

Arus Aliran Remitansi ke Daerah Asal

Sektor informal di Jakarta turut memberikan ruang bagi para migran dalam bertahan hidup di Jakarta. Kondisi ini menjadi salah satu katup perekonomian masyarakat migran. Warteg menjadi salah satu usaha yang menguntungkan bagi migran di Jakarta. Hal ini juga turut mendorong tingkat perubahan hidup baik dari segi kualitas maupun kuantitas migran. Warteg di Jakarta secara tidak langsung menyerap tenaga kerja migran yang bekerja di sektor informal. Hal ini juga turut mengurangi angka pengangguran. Terlebih lagi dalam menjalankan usaha warteg tidak membutuhkan aturan khusus seperti halnya dalam perusahaan. Adapun beberapa faktor yang dibutuhkan di warteg seperti keterampilan memasak, modal secara materi dan fisik, dan lain-lain sehingga ini cukup mudah untuk dimasuki kaum migran di Jakarta. Lokasi warteg yang berada di pinggir jalan raya turut mempermudah dalam meningkatkan usaha tersebut. Hal ini juga sebagai salah satu strategi

pedagang warteg. Biasanya lokasi yang digunakan sebagai warteg juga nantinya sebagai tempat tinggal.

Hal ini dikarenakan bagi para pedagang untuk memudahkan dalam mobilitas kegiatan berdagang dengan yang lainnya. Lokasi yang strategis turut berpengaruh dalam aliran remitansi yang nantinya akan dikirim ke daerah asal. Hal ini bersumber terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh oleh pedagang warteg setiap beroperasi. Sektor informal perkotaan memberikan ruang tersendiri bagi migran untuk membuka usaha warteg. Migran yang berasal dari desa akan mengalokasikan sumber daya mereka untuk bekerja di sektor informal. Hal tersebut ditandai dengan adanya pendirian warteg oleh masyarakat migran. Mereka akan membuka usaha makan sebagai strategi bertahan hidup di perkotaan. Hasil dari usaha Warteg kemudian menghasilkan pendapatan yang nantinya berupa remitansi. Wujud dari remitansi akan dikirim ke daerah asalnya berupa uang atau barang. Proses remitansi terjadi saat pedagang warteg bekerja di sektor informal. Setelah itu hasil pendapatan yang diperoleh bisa dimaknai sebagai wujud dari keberhasilan mereka selama bermigrasi di Jakarta. Dibawah ini disajikan bagan pola aliran remitansi yang dilakukan para pedagang warteg.



Gambar 1. Pola Aliran Remitansi

Berdasarkan Gambar 1 dua tanda panah yang menunjukkan pola aliran remitansi. Tanda panah pertama disebut dengan migrasi dengan tanda panah yang garisnya putus-putus dan tanda panah kedua disebut proses remitansi yang tanda panahnya tidak putus-putus. Kedua tanda panah ini memiliki kaitan satu dengan lainnya dan

memiliki relasi dualitas yang merupakan keterkaitan relasi sosial antara aktor masyarakat dengan struktur sosial budaya di masyarakat serta relasi ruang dan waktu yang berjalan secara dinamis (Giddens, 1986). Dalam bagan ini, proses migrasi dan proses remitansi keduanya secara linier membentuk pola hubungan dalam praktik

sosial berupa ekonomi remitansi.

Tanda panah migrasi menggambarkan awal mula proses migrasi berlangsung dari kampung halaman mereka di Tegal menuju Jakarta untuk mengelola warteg. Proses migrasi ini berlangsung dengan berbagai motivasi dan dinamika seperti sudah dijelaskan di bagian awal. Tanda panah kedua yang merupakan proses remitansi. Remitansi dikirim karena pada dasarnya antara keluarga yang di daerah tujuan migrasi dan di desa merupakan kesatuan ekonomi. Selain ditujukan untuk keluarganya juga ditujukan untuk anggota masyarakat desanya dan juga untuk keperluan desa asalnya (Putra dkk., 2017). Remitansi atau kiriman yang ditujukan untuk keluarganya lebih bersifat ekonomi dan pengiriman dilakukan secara rutin karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan. Selain dalam bentuk uang para pekerja migran juga mengirim barang-barang seperti pakaian, perabot rumah tangga, alat elektronik, dan juga mampu menginvestasikan kiriman dengan membeli tanah serta membuka usaha baru di desanya yang dijalankan oleh anggota keluarganya di desa.

Selain kedua tanda panah tersebut terdapat tanda panah warna ungu yang memiliki keterkaitan antara Kota Jakarta, sektor informal warteg dan daerah asal pedagang warteg. Dinamika dan kompleksitas Jakarta salah satunya dibentuk oleh keberadaan warteg yang menggerakkan ekonomi informal perkotaan. Keberadaan warteg yang menopang ekonomi informal perkotaan dibentuk karena kekuatan jaringan sosial dan kekerabatan dari dan untuk daerah asal mereka.

Remitansi merupakan salah satu wujud tanggung jawab bagi pedagang warteg terhadap keluarga di daerah asalnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga komunikasi di antara kedua aktor tersebut. Kehidupan yang terpisah antara pedagang warteg di Jakarta dengan keluarga asalnya menjadikan remitansi sebagai simbol hubungan komunikasi yang terjaga. Selain itu, remitansi juga sebagai wujud hasil usaha selama bekerja di Jakarta sebagai pedagang warteg. Remitansi yang dikirim ke

daerah asal juga sebagai wujud meningkatkan intensitas hubungan migran di Jakarta dengan di daerah asal. Terlebih lagi bagi migran yang mulai menetap di Jakarta akan semakin terjaga jika disertai proses remitansi ke daerah asal. Ikatan sosial yang terjalin di antara pengirim dan penerima remitansi semakin menunjukkan bahwa mereka yang berada di daerah asal saling berkaitan. Hal ini ditandai dengan adanya kebutuhan untuk meminta proses pengiriman dari kota ke daerah asal. Seperti halnya SUL yang mempunyai dua orang anak tak luput dari proses remitansi. Kondisi tempat tinggal yang terpisah menjadikan SUL harus tetap memperhatikan segala kebutuhan keluarga di daerah asalnya. Apalagi kebutuhan anaknya untuk bersekolah hampir setiap harinya membutuhkan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa remitansi menjadi sebuah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga di daerah asal (Yuliadi & Raharja, 2020).

Masuknya Migran di Sektor Informal Perkotaan

Masuknya migran asal Tegal turut berpeluang terhadap bertambahnya usaha sektor informal di Jakarta. Hal ini yang terwujud dalam usaha yang dijalankan migran terhadap usaha sektor informal warteg. Hal ini turut berkontribusi terhadap penyerapan sumber daya manusia khususnya migran asal Tegal. Selain itu, adanya usaha warteg juga turut memperluas lapangan pekerjaan di Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sektor informal dapat mengurangi pengangguran di kota negara sedang berkembang (Manning & Noer, 1996; Thompson, 2011). Hal ini menunjukkan sektor informal telah berperan secara aktif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Jakarta khususnya bagi migran. Terlebih lagi bagi usaha warteg yang dikelola oleh dua orang secara bergantian dalam waktu tertentu seperti tiga bulan turut berpeluang menambah perluasan pekerjaan migran di Jakarta. Hadirnya usaha warteg yang kini dijalankan oleh migran asal Tegal turut berkontribusi terhadap daerah asal keluarga migran yang ditinggalkan.

Hal ini diwujudkan dalam arus pengiriman

uang dan barang yang dikirim dari Jakarta ke Tegal. Adapun pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pedagang warteg dalam mengirimkan remitansi berupa uang dan barang. Hasil remitansi tersebut dimanfaatkan oleh keluarga migran di daerah asalnya. Selain itu, tak semua hasil remitansi dikirim ke daerah asalnya, sebagian digunakan untuk pemenuhan kebutuhan di daerah tujuan seperti kebutuhan konsumtif, pembayaran sewa kontrakan, dan lain-lain. Keputusan pedagang warteg dalam mengirimkan hasil remitansi juga berpengaruh terhadap pemanfaatan remitansi keluarga di daerah asalnya. Pemanfaatan remitansi pedagang warteg di daerah asal menandai bahwa keberhasilan selama bermigrasi di Jakarta yang ditunjukkan dengan adanya bangunan rumah, kepemilikan kendaraan, dan lain-lain. Hal ini berdampak terhadap peningkatan status sosialnya di masyarakat.

Pada umumnya warga lapisan bawah di desa akan berhasil memperoleh pekerjaan dengan cara bermigrasi ke kota besar (Rachbini & Hamid, 1994:55). Hal inilah yang dilakukan oleh migran asal Tegal ke Jakarta dengan menjalankan usaha warteg. Keputusan mereka untuk bermigrasi tak terlepas dari faktor ekonomi. Remitansi yang dilakukan membawa dampak ekonomi bagi pedagang warteg. Dampak ekonomi tersebut dapat dilihat beberapa fakta yang dijumpai peneliti di lokasi penelitian. Hal tersebut antara lain dilihat dari banyak rumah megah. Beberapa diantaranya berlantai dua. Namun banyak rumah-rumah tersebut tidak ada penghuninya karena penghuninya adalah mereka yang berdagang warteg di Jakarta. Rumah-rumah mewah tersebut hanya dijaga penghuni yang merawat dan menjaga rumah tersebut. Para penghuninya akan menempati rumah tersebut jika melakukan kunjungan dalam rangka *aplusan* atau libur Idul Fitri.

Selain kepemilikan rumah mewah, peningkatan ekonomi lainnya juga bisa dilihat dari meningkatnya kepemilikan asset seperti tanah atau sawah. Migran yang melakukan pekerjaan di luar desanya memberi pengaruh yang positif terhadap desa asal. Kondisi tersebut menandakan bahwa mereka yang bermigrasi ke Jakarta turut berpengaruh terhadap warga di desa

asalnya. Hal ini ditandai dengan adanya arus pengiriman uang dan barang ke daerah asalnya seperti halnya untuk kegiatan sumbangan kegiatan sosial. Keberadaan migran asal Tegal di Jakarta berperan dalam mendapatkan pekerjaan di kota terhadap migran lainnya. Hal ini terlihat pada pedagang warteg yang mengelola usahanya dengan migran lainnya secara bergantian. Penjelasan ini sejalan dengan tesis Garip (2014) yang menjelaskan bahwa migrasi lebih mungkin terjadi di komunitas dengan persentase migran lebih tinggi dan pengiriman uang di komunitas dengan persentase pengirim lebih tinggi.

Hubungan informasi antar pribadi dengan keluarga dan teman-teman yang telah berpengalaman di kota memegang peranan penting dalam mendapatkan pekerjaan di kota. Seperti halnya usaha warteg SA dikelola secara bergantian selama tiga bulan dengan kerabatnya yang lain. Hal ini tak terlepas dari hubungan informasi yang terjalin dalam mendapatkan pekerjaan di sektor usaha warteg. Selain itu, karyawan yang bekerja di warteg juga tak terlepas dari hubungan informasi dengan pedagang yang terlebih dahulu migrasi ke Jakarta.

Di sisi lain, usaha sektor informal merupakan salah satu kesempatan dalam memperoleh penghasilan yang secara sah yang dilakukan oleh migran. Hal ini yang terwujud dengan adanya usaha warteg di Jakarta yang dijalankan oleh migran asal Tegal. Hasil usaha yang selama menjalankan warteg diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan remitansi yang berbentuk fisik dan non fisik. Kepemilikan hasil remitansi bagi keluarga migran di daerah asalnya tak hanya sebatas sebagai alat pemenuhan kebutuhan namun juga sebagai wujud keberhasilan mereka selama menjalankan usaha warteg di Jakarta. Bagi pedagang warteg tujuan utama mereka dalam merintis usahanya adalah mampu mencukupi kebutuhan konsumtifnya seperti untuk kebutuhan pokok. Kepemilikan kebutuhan lainnya seperti kendaraan, sawah, dan lain-lain akan dipenuhi setelah kebutuhan pokok telah dipenuhi secara kecukupan.

Remitansi sebagai Pemenuhan Kebutuhan Konsumtif

Remitansi yang dihasilkan oleh pedagang warteg akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan tiap harinya. Wujud dari pemenuhan kebutuhan konsumtif yang dilakukan pun bermacam-macam disesuaikan dengan kebutuhan yang mendasar. Terlebih lagi jika migran pedagang warteg sebagai sumber pemenuhan nafkah. Remitansi yang digunakan bagi keluarga migran akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya tiap harinya. Salah satunya sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti halnya pemenuhan kebutuhan pokok dan yang lainnya. Mereka melakukan pemenuhan kebutuhan pokok setiap harinya bagi keluarga pedagang warteg. Hal ini bisa diwujudkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti makan, minum, dan yang lainnya bagi keluarga migran yang tinggal di daerah asalnya. Kebutuhan pedagang migran dalam mengirim hasil remitansi yang bersifat uang dan barang akan disesuaikan dengan status keluarga yang berada di daerah asalnya seperti halnya yang dilakukan oleh SU dan AM. Keluarga inti SU kini sudah berada di Jakarta beserta dengannya.

Demikian juga dengan AM yang sudah berkumpul di Jakarta semua sejak akhir tahun 2009. Hal ini menandakan bahwa remitansi yang dikirim pun mempunyai tujuan berbeda dengan pedagang warteg lainnya. Bagi kedua pedagang tersebut remitansi yang dikirim digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga di daerah asalnya. Remitansi yang dikirim ke daerah asal terdapat dua tujuan yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pokok keluarga inti dan sebagai sarana untuk membantu kerabatnya. Informan di penelitian ini menunjukkan bahwa SA, SUL dan IS tak hanya dikirim untuk pemenuhan keluarga intinya namun juga untuk membantu kerabatnya di Dukuhjati Kidul dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Lain halnya dengan SU dan AM dalam mengirim remitansi saat ini untuk membantu kebutuhan konsumtif kerabatnya di daerah asal. Bagi mereka yang masih ada kerabatnya di kampung maka setidaknya dalam waktu tertentu

akan *nyatu*² dengan kiriman yang bisa berupa uang atau barang. Remitansi yang dikirim ke daerah asal akan diterima oleh keluarga pedagang maupun kerabatnya. Hasil remitansi yang berbentuk uang cenderung lebih banyak dikirim kepada penerima remitansi untuk kebutuhan konsumtif. Uang yang dikirim nantinya digunakan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan maupun untuk membantu kerabat. Adapun dari hasil remitansi yang dikirim terdapat dua tujuan untuk daerah asalnya. Hal ini menandakan bahwa remitansi sebagai penghubung antara keluarga atau kerabat di daerah asal dengan pedagang warteg di Jakarta. Pemanfaatan lainnya digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan fisik seperti halnya kendaraan dan barang elektronik.

Pemanfaatan Remitansi Produktif

Hasil remitansi yang dikirim tak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif atau mempunyai nilai tambah. Hal ini juga merupakan salah satu komponen yang penting bagi keluarga pedagang warteg dalam memenuhi kebutuhan tiap harinya. Wujud dari pemanfaatan remitansi bisa berupa materiil atau fisik maupun non fisik antara lain (1) untuk digunakan sebagai biaya pendidikan. Remitansi yang dihasilkan oleh pedagang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka menyimpan sebagian untuk biaya pendidikan anaknya. Bagi mereka kebutuhan untuk pendidikan sangat penting untuk masa depan anaknya. Selain itu, melalui pendidikan bisa digunakan sebagai salah satu mobilitas sosial di keluarganya. Pendidikan merupakan jangka panjang bagi seorang anak dalam menjalankan kehidupan mendatang. Informan yang diteliti menunjukkan bahwa mereka menyekolahkan anak dengan harapan bisa jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan orang tuanya. Jika dilihat dari profil informan sebelumnya, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK. Kondisi inilah yang memunculkan harapan orang tua agar anaknya sukses untuk kehidupan mendatang. (2) digunakan sebagai

² *nyatu* merupakan istilah yang digunakan bagi pedagang warteg untuk melakukan kiriman terhadap keluarga inti maupun kerabatnya di daerah asalnya sebagai wujud tanggung jawab yang

bisa dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

sumbangan kegiatan sosial keagamaan. Penggunaan remitansi lainnya yaitu dalam bentuk sumbangan untuk pembangunan tertentu seperti halnya masjid/musholla, jalan desa, kegiatan pengajian, dan lain-lain. Beberapa informan dalam penelitian ini menggunakan remitansi untuk kegiatan di daerah asalnya. Mereka (informan penelitian) secara rutin tiap tahunnya untuk melakukan sumbangan ke anak yatim piatu di Dukuhjati Kidul, Tegal. Kegiatan tersebut biasanya akan dilakukan saat halalbihalal dengan warga desa setelah Hari Raya Idul Fitri. Tak hanya itu, mereka juga memberikan hasil remitansi untuk kegiatan pembangunan madrasah dan kegiatan keagamaan Islam. Mereka memanfaatkan remitansi untuk kegiatan sumbangan seperti halnya untuk kegiatan kepemudaan di desanya saat Hari Kemerdekaan RI, pembangunan jalan desa, madrasah dan lain-lain. (3) digunakan untuk tabungan. Pemanfaatan remitansi lainnya yaitu dalam bentuk tabungan. Beberapa informan memiliki tabungan di beberapa bank. Hal ini ditujukan sebagai wujud simpanan untuk kebutuhan mendatang yang tak terduga misalnya jika mendapat musibah sakit atau ada kerabat yang berduka karena meninggal.

Dia setiap harinya akan menyisihkan penghasilan yang didapat dari hasil berjualan sekitar Rp 200.000. Tabungan yang dilakukan oleh mereka juga digunakan sebagai persiapan untuk membangun rumah di daerah asalnya dan kebutuhan yang sifatnya dalam skala besar. Tak hanya itu, mereka juga turut menabung berupa barang bangunan seperti semen, batu bata dan pasir saat ada teman atau kerabatnya membangun rumah. Mereka menabung barang tersebut dan hasil tabungan barang tersebut akan dikembalikan saat membangun rumah. (4) mereka membelanjakannya untuk membeli sawah. Pedagang warteg menggunakan hasil remitansi untuk membeli sawah yang terletak di persawahan Dukuhjati Kidul, Tegal. Harga sawah sekitar tahun 2007 sekitar Rp 80.000.000 dengan luas 6.000 m². Kehidupan mereka beserta anaknya di Jakarta harus menitipkan sawahnya kepada kerabatnya untuk dikelola. Saat musim panen, mereka akan mendapatkan hasilnya sebesar 1/3 dari hasil panen keseluruhan. Sisanya

untuk yang menggarap sawahnya. Sawah menjadi salah satu bentuk pemanfaatan remitansi di bidang pertanian.

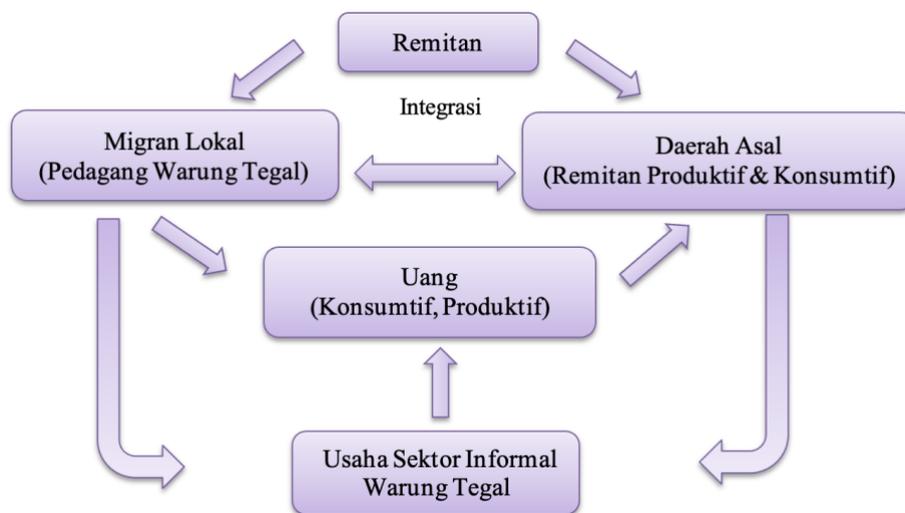
Hasil dari panennya bisa berupa padi, jagung, kacang kedelai yang bisa digunakan sebagai salah satu pemenuhan makan dan usaha warteg di Jakarta. Wujud pemanfaatan remitansi untuk sawah menjadi salah satu bentuk dari investasi untuk jangka panjang. (5) mereka menggunakan untuk membangun rumah. Hasil remitansi juga digunakan untuk pembangunan rumah informan di daerah asal Dukuhjati Kidul, Tegal. Secara umum, informan penelitian memiliki kesamaan bahwa hasil remitansi digunakan untuk membangun rumah. Hal ini juga salah satu kebutuhan yang penting bagi mereka saat tinggal di daerah asalnya sebagai tempat tinggal. Pemanfaatan remitansi seperti halnya dalam bentuk rumah dilakukan melalui tahapan. Hasil remitansi yang dihasilkan oleh pedagang warteg akan dikumpulkan terlebih dahulu. Biasanya saat awal mereka membuka usahanya, hasil remitansi akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi tiap harinya dan pengembalian modal. Mereka menggunakan hasil remitansi untuk pengembalian modalnya saat membuka usaha warteg. Selain itu, hasil remitansi lainnya sebagai pemenuhan kebutuhan anaknya yang bersekolah. Fokus utama hasil remitansi adalah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi kemudian akan digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif (Suyanto, 2018; Khoirunisa & Maruf, 2019). Kebutuhan konsumtif dan produktif misalnya berbentuk fisik seperti halnya rumah, kendaraan, sawah, dan lain-lain.

Pemenuhan kebutuhan konsumtif dan produktif ini kemudian meningkatkan asset yang dimiliki oleh warga termasuk keluarga terdekatnya. Dengan bertambahnya kepemilikan asset ini memberikan dampak juga dalam bentuk meningkatkan reputasi dan citra sosial mereka di lingkungan masyarakatnya. Kedua hal ini menjadi model strategis remitansi untuk menjelaskan determinasi aliran remitansi yang ada di kampung halamannya (Yoshino dkk., 2019). Selain itu, bentuk remitansi non fisik yaitu digunakan sebagai sumbangan keagamaan, dan lain-lain. Remitansi tak hanya sebatas pada

memenuhi kebutuhan keluarga pedagang warteg, namun juga sebagai integrasi antara daerah tujuan yang dijadikan usaha berdagang dengan daerah asal. Wujud integrasi kedua wilayah tersebut dihubungkan melalui remitansi untuk kegiatan pembangunan yang ada di Desa Dukuhjati Kidul, Tegal.

Remitansi juga mempunyai nilai sosial dengan melakukan sumbangan seperti untuk anak yatim piatu, masyarakat miskin, dan warga yang membutuhkan. Pemanfaatan remitansi yang bersifat produktif turut berperan aktif terhadap pembangunan di daerah asalnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi warganya dalam menggerakkan kegiatan di desa seperti untuk kegiatan sosial. Walaupun pedagang warteg bermigrasi ke Jakarta namun masih menjalin hubungan dengan daerah asalnya melalui remitansi yang dikirim. Hal tersebut turut

diungkapkan oleh AMN sebagai perangkat Desa Dukuhjati Kidul terhadap warganya yang bermigrasi ke Jakarta untuk menjalankan usaha warteg. Hal ini menunjukkan bahwa remitansi juga berperan sebagai integrasi antara daerah tujuan migran dengan daerah asalnya. Migran di Jakarta akan terhubung dengan daerah asalnya sebagai ikatan sosial. Hubungan migran dengan daerah asalnya tak hanya berupa kunjungan namun juga melalui remitansi (Rahman & Fee, 2014). Kondisi inilah yang bisa menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif migran terhadap daerah asalnya. Selain itu, melalui hasil kiriman warganya dari Jakarta ke daerah asalnya turut membangun sebuah kepedulian positif bagi desanya. Dibawah ini disajikan Bagan 2 yang menjelaskan relasi praktik remitansi, migran lokal dan sektor informal.



Gambar 2. Relasi Remitansi, Migran Lokal dan Sektor Informal

Berdasarkan Gambar 2. relasi antara praktik remitansi yang terjadi karena integrasi migran lokal dan daerah asalnya. Tanda panah yang ada dalam bagan diatas menunjukkan adanya implikasi kepada aspek lainnya. Hal tersebut dapat dilihat keberadaan migran lokal dan daerah asal memberikan implikasi menguatnya ekonomi informal perkotaan. Usaha sektor informal warteg berperan penting terhadap migran asal Tegal di Jakarta. Hal ini ditandai dengan usaha warteg yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga migran. Selain itu, usaha warteg

berdampak positif terhadap daerah asal migran yang ditandai dengan adanya pengiriman remitansi untuk kegiatan sosial di desanya. Hubungan antara daerah tujuan dengan daerah asal diintegrasikan melalui pengiriman remitansi ke daerah asalnya yang nantinya akan dimanfaatkan oleh migran. Pedagang warteg yang menetap di Jakarta terlibat dalam pembangunan sosial di daerah asalnya. Adanya usaha warteg turut menyerap tenaga migran di Jakarta sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Jakarta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Usaha sektor informal warteg menjadi salah satu sumber aliran remitansi yang dihasilkan oleh pedagang terhadap penerima remitansi. Hal ini tak terlepas dari keberadaan warteg yang mampu menjadi sumber penghasilan pedagang tersebut. Sektor pekerjaan warteg yang cukup mudah dimasuki oleh pekerja inilah yang mampu menyerap migran asal Tegal menjalankan usaha warung Tegal di Jakarta. Hasil dari usaha warteg berdampak signifikan terhadap daerah asalnya di Dukuhjati Kidul, Tegal melalui arus pengiriman uang dan barang. Bentuk remitansi yang dihasilkan oleh pedagang nantinya akan dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan. Remitansi juga sebagai wujud tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan di daerah asalnya. Selain mengirim remitansi, wujud tanggung jawab lainnya yaitu dengan melakukan kunjungan ke daerah asalnya namun dalam melakukan kunjungan tersebut hanya dalam waktu tertentu seperti halnya saat acara pernikahan kerabat, libur Hari Raya Keagamaan dan keperluan lainnya. Pola pengiriman remitansi yang dikirim bisa dilakukan dengan beragam cara. Seperti halnya dengan ditransfer, ditiptikan ke teman atau dibawa sendiri saat pulang ke daerah asal. Pola pengiriman tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat kebutuhan keluarga di daerah asal.

Selain itu, sistem usaha warteg yang dijalankan oleh pedagang warteg juga berpengaruh. Contohnya yaitu sistem pembagian kerja selama tiga bulan atau lebih oleh dua orang pedagang. Mereka biasanya akan mengirim remitansi saat habis masa kerjanya dengan di bawa sendiri. Hasil remitansi yang dikirim nantinya akan diwujudkan dalam bentuk produktif maupun konsumtif. Hal ini juga berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di daerah asalnya. Adanya pengiriman remitansi ke daerah asal menandakan bahwa ikatan sosial yang terjalin masih cukup kuat. Remitansi ekonomi yang dihasilkan oleh pedagang warteg ini juga berpengaruh terhadap persepsi mereka terhadap dunia pendidikan. Hal ini ditandai dengan adanya pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Pendidikan merupakan salah

satu bentuk investasi jangka panjang bagi migran.

Disisi lain, kritik juga ditujukan kepada praktik remitansi yang berkembang secara dinamis di negara-negara berkembang. Pada satu sisi diakui bahwa pengiriman uang memainkan peran yang semakin penting mengamankan dan benar-benar meningkatkan mata pencaharian jutaan orang-orang tetapi sekaligus naif untuk mengharapkan bahwa pengiriman uang saja dapat menyelesaikan pembangunan yang lebih struktural hambatan seperti lingkungan politik yang tidak stabil, disorientasi kebijakan makroekonomi, distabilitas keamanan, birokratisasi, korupsi dan masalah infrastruktur (Shera & Meyer, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Asyuti, R (2015). Pengusaha warung tegal di Jakarta (pendekatan modal sosial). *Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 13-24. <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/492/491>
- Azizi, S. (2021). The impacts of workers' remittances on poverty and inequality in developing countries. *Empir Econ* 60, 969–991. <https://doi.org/10.1007/s00181-019-01764-8>.
- Banga, R., & Sahu, P.K. (2011). *Impact of remittances on poverty in developing countries*. United Nations, UNCTAD/DITC/TNCD/2010/8. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctncd20108_en.pdf
- Caldwell, J.C. (1969). *African rural-urban migrations: The movement to Ghana's town*. New York: Columbia University.
- Chatterjee, S., & Turnovsky, S.J. (2018). Remittances and the informal economy. *Journal of Development Economics*, 113, 66-83. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.02.002>
- Chiodi, V., Jaimovich, E., & Montes-Rojas, G. (2012). Migration, remittances and capital accumulation: evidence from rural

- Mexico. *The Journal of Development Studies*, 48(8), 1139-1155. <https://doi.org/10.1080/00220388.2012.688817>
- Collet, F. (2003). *Economic social action and social network influences: a discussion around Mark Granovetter sociology of economic life*. 6th European Sociological Association Conference, Murcia. https://www.um.es/ESA/papers/Rn6_14.pdf
- Garip, F. (2014). The impact of migration and remittances on wealth accumulation and distribution in rural Thailand. *Demography*, 51(2), 673–698. <https://doi.org/10.1007/s13524-013-0260-y>
- Evers, H.D (1986). *Sosiologi perkotaan: urbanisasi dan sengketa tanah di Indonesia dan Malaysia*. LP3ES.
- Evers, H.D. (2007). The end of urban involution and the cultural construction of urbanism in Indonesia. *International Quarterly for Asian Studies*, 38 (1/2), 51-65. <https://hasp.uib.uni-heidelberg.de/journals/iaf/article/download/253/247/509>
- Giddens, A. (1986). *The Constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <http://www.jstor.org/stable/2780199>.
- Granovetter, M. (2005). The impact of social structure on economic outcomes. *Journal of Economic Perspective*, 19(1), 33–50. <https://doi.org/10.1257/0895330053147958>
- Haller, A.P., Butnaru, R.C., & Butnaru, G.I. (2018). International migrant remittances in the context of economic and social sustainable development. a comparative study of Romania-Bulgaria. *Sustainability*, 10(4), 1156. <https://doi.org/10.3390/su10041156>
- Haryono.T.J.S. (2007). Jaringan sosial migran sirkuler : Analisis tentang bentuk dan fungsi. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 20(2), 75-86. <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jaringan%20Sosial%20Migran%20Sirkuler.pdf>
- Hart, K (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61-89. <https://doi.org/10.1017/S0022278X00008089>
- Hart, K (1985). The informal economy. *The Cambridge Journal of Anthropology*, 10(2), 54-58. <https://www.jstor.org/stable/23816368>.
- Hummel, D. (2020). The effects of population and housing density in urban areas on income in the United States. *Local Economy*, 35(1), 27-47. <https://doi.org/10.1177/02690942209032>
- Irawaty, T., & Wahyuni E.S (2011). Migrasi internasional perempuan desa dan pemanfaatan remitansi di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. *Sodality*, 5(3), 297-310. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i3.9694>
- Khoirunnisa, F., & Maruf, A. (2019). Analisis pola penggunaan remitansi serta dampaknya terhadap perkembangan daerah asal: Studi kasus pada Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 3(1), 38-47. <https://doi.org/10.18196/jerss.030105>
- Lacroix, T., Levitt, P., & Vari-Lavoisier, I (2016). Social remittances and the changing transactional political landscape. *Comparative Migration Studies*, 4(16). <https://doi.org/10.1186/s40878-016-0032-0>
- Levitt, P. (1998). Social remittances: migration driven local-level forms of cultural

- diffusion. *The International Migration Review*, 32(4), 926-948. <https://doi.org/10.1177/019791839803200>
- McKenzie, D. (2017). Poverty, inequality, and international migration: Insights from 10 years of migration and development conferences. *Revue d'économie du développement*, 3-4 (25), 13-28. <https://doi.org/10.3917/edd.313.0013>
- Mabogunje, A.L. (1970). Systems approach to a theory of rural-urban migration. *Geographical Analysis* 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1970.tb00140.x>
- Mantra, I.B (1988). Population mobility and the link between migrants and the family back home in Ngawis Village, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta Special Region. *The Indonesian Journal Geography*, 18(55), 47-62. <https://doi.org/10.22146/ijg.2180>
- Manning, C., & Noer, T (1996). Urbanisasi, pengangguran, dan sektor informal di kota. Yayasan Obor Indonesia.
- Mardiansjah, FH., & Rahayu, P.(2019). Urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia: Suatu perbandingan antar-kawasan makro Indonesia. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7(1), 91-110. <https://doi.org/10.14710/jpk.7.1.91-110>
- Mas'udah, S. (2020). Remittances and lifestyle changes among Indonesian overseas migrant workers' families in their hometowns. *Int. Migration & Integration* 21, 649-665. <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00676-x>
- Mehedintu, A., Soava, G., & Sterpu, M. (2019). The effect of remittances on poverty in the emerging countries of the european union. *Sustainability* 11(12), 3265. <https://doi.org/10.3390/su11123265>
- Novianti, M.D., & Susanto, T (2018). Identifying warung tegal development factors: A preliminary analysis on warung tegal in Jabodetabek, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 85(1), 107-112, <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-12.14>
- Putra, M., Chadijah, R., & Warsito, H. (2014). Remitansi dan pemanfaatannya terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga: Studi kasus Desa Seriguna Kecamatan Teluk Gelam Oki. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 1(2), 20-33. <http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/10>
- Rachbini, D.J., & Hamid, A (1994). Ekonomi informal perkotaan: gejala involusi gelombang kedua. LP3ES.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Grasindo.
- Rahman M.M., & Fee L.K. (2014). Understanding remittances: Theoretical and methodological issues. dalam M.M. Rahman, T.T. Yong, A.K.M.A. Ullah (eds), *Migrant Remittances in South Asia*. International Political Economy Series. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137350800_2
- Rapoport, H & Docquier, F. (2005). *The economics of migrants' remittances*. Discussion Paper The Institute for the Study of Labor (IZA), No. 1531. <https://docs.iza.org/dp1531.pdf>
- Romdiati, H (2012). Migrasi tenaga kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan dan arah migrasi, serta remitansi. *Jurnal Kependudukan Indonesia* 7(2), 27-53. <https://doi.org/10.14203/jki.v7i2.25>
- Samparaya, C.F. (2018). Sejarah munculnya warteg di Jakarta, ternyata ada sejak tahun 1950!. Kompas.com. <https://travel.kompas.com/read/2018/10/25/190925127/sejarah-munculnya-warteg-di-jakarta-ternyata-ada-sejak-tahun-1950>.
- Septiani, S.V.R., Sihaloho, M., & Sita, R (2022). Pengaruh migrasi sirkuler terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga

- migran (kasus: Kampung Koroncong I, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5(06), 785-795. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i06..918>
- Shera, A., & Meyer, D. (2013). Remittances and their impact on economic growth. *Social and Management Sciences*, 21(1), 3–19. <https://doi.org/10.3311/PPso.2152>
- Simmons, A.B. (1984). Migrations and rural development, conceptual approach, research finding and policy issues, *dalam Population, Distribution, Migration, and Development* (hal. 156-192). New York, United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, ST/ESA/SER.A/89.
- Surya, B., Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., Menne, F., & Rasyidi, E.S. (2021). Land use change, urban agglomeration, and urban sprawl: A sustainable development perspective of Makassar City, Indonesia. *Land*, 10(6), 556. <https://doi.org/10.3390/land10060556>
- Suyanto. (2018). Pemanfaatan remitansi ekonomi dan ketergantungan migran kembali bekerja di luar negeri. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 30-37. <https://doi.org/10.14710/endogami.2.1.30-37>
- Todaro, M. (1999). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga.
- Thompson, H. (2011). The great migration: Rural-urban migration in China and Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 41(4), 691-692. <https://doi.org/10.1080/00472336.2011.610625>
- Vadean, F & Piracha, M. (2010). Circular migration or permanent return: what determines different forms of migration? Dalam G.S. Epstein & I.N. Gang (Eds), *Migration and culture* (Vol.8., pp. 467-495). Emerald Group Publishing Limited, Bingley. [https://doi.org/10.1108/S1574-8715\(2010\)0000008026](https://doi.org/10.1108/S1574-8715(2010)0000008026)
- Wajdi, N., Mulder, C.H. & Adioetomo, S.M (2017) Inter-regional migration in Indonesia: A micro approach. *J Pop Research*, 34, 253–277. <https://doi.org/10.1007/s12546-017-9191-6>
- Yoshino, N., F. Taghizadeh-Hesary, & M. Otsuka. (2019). *Determinants of International Remittance Inflows in Middle-Income Countries in Asia and the Pacific*. ADBI Working Paper 964. Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/506406/adbi-wp964.pdf>
- Yuliadi, I., & Raharja, S. S. (2020). Migration and economic inequality in Indonesia: longitudinal data analysis. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 541–548. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO11.541>

Pekerja migran Malaysia asal Kerinci Jambi dan pendidikan anak-anak mereka

Malaysia migrant workers from Kerinci Jambi and the education of their children

Musli¹, Della Amrina Yusra^{1*}, Yumasdaleni²

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

²Universitas Potensi Utama

*Korespondensi penulis: dellaamrinayusra@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

The existence of the name Kerinchi village in Kuala Lumpur is a trace of the migration of Kerinci residents to Malaysia. The increase in Indonesian migrant workers was parallel to the increase in the Malaysian economy in the 1990s that continues to this day. Although bringing children to settle in Malaysia is not allowed, the practise of bringing children illegally can be found. The study investigated the migration process of Kerinci residents and the education of their children. Data were collected using a qualitative method in Selangor, Malaysia and Danau Kerinci District (Jambi) in 2019 and 2021. The migration process is explained through four main factors, namely (1) lack of job opportunities in area of origin, (2) a higher value work and results in the destination area, (3) intention to have assets and continue children's education, and (4) social and family networks. Further, observations on the educational practises of the children who stay under illegal status show that they went to madrasah schools in the vicinity of PMI's residence because there are no document requirements, followed by returning back to Kerinci to take the Package A exam. Alternatively, migrant workers placed guardians over families with Malaysian citizenship status so that children born in Malaysia could attend formal schools. For the children who live in Kerinci, many of them go to university and some of them work in the formal sector. Migrating to become workers abroad is a form of effort to improve their children's education for Kerinci residents.

Keywords: Kerinci migrant workers, Malaysia, children education.

ABSTRAK

Keberadaan nama kampung Kerinchi di Kuala Lumpur merupakan jejak migrasi warga Kerinci di Malaysia. Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia terjadi seiring meningkatnya kondisi perekonomian Malaysia tahun 1990-an dan terus berlanjut hingga kini. Meskipun membawa anak-anak menetap di Malaysia tidak diizinkan, praktik membawa anak secara ilegal tetap dilakukan oleh pekerja migran Kerinci. Studi ini mengkaji bagaimana proses migrasi warga Kerinci dan pendidikan anak-anak mereka. Pengambilan data dilakukan dengan metode kualitatif di Selangor Malaysia dan Kecamatan Danau Kerinci Jambi pada 2019 dan 2021. Proses migrasi warga Kerinci dapat dijelaskan melalui empat faktor utama, yaitu (1) kurangnya peluang pekerjaan di daerah asal, (2) peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi di daerah tujuan, (3) keinginan untuk memiliki aset dan keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka, serta (4) adanya jaringan sosial dan kekeluargaan. Selanjutnya, anak-anak migran yang berstatus ilegal menempuh pendidikan di sekolah madrasah di sekitar tempat tinggal mereka di daerah tujuan migrasi. Anak-anak tersebut akan pulang pada waktu tertentu untuk mengikuti ujian Paket A. Beberapa migran Kerinci yang melahirkan anak di Malaysia memilih menumpang wali kepada keluarga yang berstatus warga negara Malaysia agar anak-anak tersebut dapat bersekolah formal. Selanjutnya, hasil kajian juga menunjukkan bahwa anak-anak migran yang ditinggalkan di Kerinci umumnya dapat menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi dan beberapa di antaranya berhasil bekerja pada sektor formal. Dapat dikatakan, bermigrasi ke luar negeri bagi warga Kerinci adalah salah satu bentuk upaya meningkatkan pendidikan anak-anak mereka.

Kata kunci: pekerja migran Kerinci, Malaysia, pendidikan anak

DOI: 10.14203/jki.v17i2.712

Naskah masuk: 12 Mei 2022

Revisi akhir: 7 Desember 2022

Naskah diterima: 26 Desember 2022

179



ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2022 National Research and Innovation Agency.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>).

PENDAHULUAN

Migrasi warga negara Indonesia ke Malaysia sudah berlangsung lama bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara. Menurut Kassim (2000), selama lebih dari dua dekade pertumbuhan ekonomi Malaysia yang cepat menarik gelombang masuk tenaga kerja asing hingga krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Sebagian besar pekerja migran asing di negara tersebut dari Indonesia, Bangladesh, dan Filipina. Faktor ekonomi, budaya, agama, dan bahasa yang menjadi alasan banyaknya orang Indonesia yang merantau ke Malaysia, termasuk dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Data BNP2TKI menunjukkan bahwa pekerja migran asal Kerinci menempati urutan tertinggi di Provinsi Jambi seperti tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jambi, 2017–2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kerinci – Sungai Penuh	151	129	106
Batang Hari – Muara Bulan	7	60	101
Jambi	30	31	36
Sarolangun	8	16	28
Merangin	4	11	28
Tebo	1	9	17
Sungai Penuh	36	21	15
Tanjung Jabung Barat	11	40	15
Muaro Jambi	6	14	11
Muara Bungo	4	2	9
Tanjung Jabung Timur	3	6	5
Total	261	339	371

Sumber: BNP2TKI (2020)

Bukti ramainya warga Kerinci di Malaysia ditunjukkan dari penamaan tempat Kampung Kerinchi di Kuala Lumpur. Menurut Junipah (1991), sejarah Kampung Kerinchi di Kuala Lumpur bermula pada tahun 1911 ketika orang Kerinci berdatangan datang ke tempat ini. Pada mulanya nama tempat itu adalah Bangsar Dalam dan kemudian berubah menjadi nama Kampung Kerinchi. Ada pula nama kampung Abdullah Hukum yang diambil dari nama Abdullah Hukum yang berasal dari Sungai Abu Kerinci. Abdullah Hukum diberi kepercayaan oleh Sultan Selangor untuk memimpin dan mengurus kawasan tersebut. Ada dua acuan rujukan masa pemerintahan Abdullah Hukum di kawasan

tersebut, yaitu antara tahun 1918–1930 (Zakaria & Samsudin, 2019:76) dan tahun 1946 (Nurazme, 1987:32). Meskipun berbeda pendapat tentang tahun pemerintahan Abdullah Hukum, jejak keberadaan orang Kerinci di Malaysia telah ditemukan sebelum kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Pemukiman kampung Kerinchi dan Abdullah Hukum memiliki kawasan yang berpotensi di bidang pertanian pada awal kedatangan warga Kerinci, seperti penanaman nanas, nangka, serai, daun mahang, padi, serta karet yang merupakan tanaman jangka panjang. Hasil tanaman tersebut kemudian dijual ke warung sayur maupun ke pasar yang berada di dekat Kampung Kerinchi. Uang dari penjualan tanaman terjadi menjadi sumber penghasilan bagi pekerja migran di kampung ini.

Motivasi atau dorongan orang untuk menjadi pekerja migran ke luar negeri adalah meningkatkan penghasilan keluarga. Hal ini merujuk pada pengiriman uang (remitansi) yang masuk ke Indonesia nilainya cukup besar. Pada tahun 2006, remitansi ke Indonesia dari TKI yang tercatat resmi melalui Bank Indonesia sekitar US\$ 2,7 milyar dan 9–10% diantaranya berasal dari Malaysia (Hernández-Coss dkk., 2008). Pada tahun 2019, remitansi diperkirakan mencapai US\$ 4,2 milyar. Menurut Wahyudi (2015), perkiraan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia adalah 1,3 juta orang yang mempunyai dokumen resmi dan 1,25 juta orang yang tidak mempunyai dokumen (ilegal). Situasi ini membuktikan bahwa Malaysia masih menarik sebagai tujuan bermigrasi. Menurut Primawati (2011), pemanfaatan hasil bekerja di Malaysia meliputi pembelian aset seperti sawah atau rumah, perbaikan rumah, tabungan di bank, dan pemenuhan keperluan sehari-hari.

Selain gaji yang besar, faktor daya tarik tempat tujuan berupa kemiripan bahasa dan budaya (Ford, 2006) memudahkan para migran pekerja untuk beradaptasi di negara tujuan. Jaringan kekerabatan juga memainkan peranan penting sebagai faktor yang mendorong kemudahan dalam migrasi (Bieder, 1973; Choldin, 1973; Wahyudi, 2015). Kondisi ini juga ditemukan pada proses migrasi warga Kerinci ke Malaysia yang terus menerus terjadi hingga saat ini. Migrasi ke Malaysia dapat dilakukan sendiri,

bersaudara, bahkan sekeluarga. Penelitian Nurmailinda (2017) terhadap warga Kampung Seleman di Kecamatan Danau Kerinci menemukan pola migrasi keluarga yang dilakukan menuju Malaysia. Sebagai contoh, istri yang memutuskan mengikuti migrasi suami dengan pertimbangan tidak ingin berpisah jauh, pengasuhan anak-anak yang ditinggal dapat diserahkan ke anggota keluarga lainnya, ataupun ikut bekerja di Malaysia. Meskipun demikian, secara regulasi, pekerja asing kategori buruh tidak diperkenankan membawa keluarga, hamil, dan melahirkan di Malaysia, seperti yang dinyatakan dalam laman resmi imigrasi Malaysia.¹ Masalah ini menjadi sorotan oleh LSM yang mengurus masalah pekerja migran (Solidaritas Perempuan, 2014; Wahyudi, 2015). Meskipun dilarang, pada kenyataannya praktik membawa anggota keluarga, termasuk anak, merupakan hal yang lumrah ditemukan pada komunitas migran. Pada awalnya, anak dibawa dengan visa kunjungan, tetapi kemudian terus berlanjut hingga *overstayed*. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan kesulitan bagi para anak migran untuk mendapat akses pendidikan. Situasi keberadaan anak migran di Malaysia lainnya dapat ditemui di beberapa kasus migrasi yang dilakukan saat masih bujang, dan kemudian menikah di Malaysia dengan sesama orang Kerinci yang juga bermigrasi. Keluarga baru ini mendapat anugerah anak yang tidak dilaporkan keberadaannya ke imigrasi. Anak-anak ini kemudian dimasukkan pada madrasah atau sekolah informal yang ada di masjid-masjid sekitar tempat mereka tinggal yang tidak mensyaratkan adanya dokumen formal untuk mengikuti proses belajar.²

Anak-anak yang dibawa orang tuanya atau lahir di Malaysia mendapat beragam persoalan, seperti tidak mempunyai izin tinggal (visa) dan akta lahir. Akibatnya, akses anak-anak ini terhadap layanan pendidikan menjadi terbatas. Meskipun ada layanan pendidikan yang disediakan pemerintah Indonesia di kawasan

Semenanjung Malaysia melalui keberadaan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK), fasilitas pendidikan ini tidak dapat sepenuhnya diakses oleh anak-anak pekerja migran karena kendala administrasi dan jarak yang jauh. Selanjutnya, pada 1 Maret 2018 pemerintah Indonesia (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia) meresmikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indonesia di Kuala Lumpur (khususnya Semenanjung) untuk mengatasi masalah pendidikan anak-anak pekerja migran. Aktivitas pembelajaran dilakukan pada akhir pekan agar para siswa dapat mengikuti ujian kesetaraan Paket A, B, dan C (IPA dan IPS).³ Pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jika mengacu pada persyaratan administratif pendaftaran yang diperlukan (kartu keluarga, akta lahir, KTP, dan foto), seharusnya tidak sulit untuk memenuhi keperluan pendidikan anak-anak pekerja migran. Namun, dalam praktiknya, hal ini menjadi kendala utama bagi warga yang tidak mempunyai dokumen. Selain itu, tantangan lainnya adalah waktu belajar yang disediakan hanya pada akhir pekan sedangkan waktu tersebut merupakan hari libur bagi pekerja sektor informal.

Kehadiran negara dalam melindungi warganya yang bekerja di negara asing terus diperbaiki dengan membuat peraturan dan perundang-undangan seperti UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini merupakan perbaikan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemerintah Indonesia menyadari permasalahan hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Malaysia dan meminta kepada

¹ <https://www.imi.gov.my/index.php/perkhidmatan-utama/pekerja-asing-2/> (diakses pada 11 November 2022).

² Informasi diperoleh dari hasil percakapan dengan sanak-saudara ketika mereka pulang ke Kerinci pada waktu hari raya. Pengembangan dari informasi awal ini sangat penting untuk

mencari ruang bagaimana sebaiknya pemenuhan kebutuhan anak akan pendidikan dasar tanpa harus berpisah dari orang tuanya.

³ <http://atdikbudki.org/2018/03/01/peresmian-pkbm-kbri-kuala-lumpur/>

pemerintah Malaysia untuk memberikan kesempatan kepada anak pekerja yang tidak berdokumen untuk dapat bersekolah. Hal ini didasarkan pada ketentuan internasional yang sudah diratifikasi oleh Malaysia dan Indonesia tentang hak pekerja migran dan keluarganya. Amanat organisasi internasional UNESCO juga perlu diperhatikan (Sulastri, 2017).

Di pihak lain, peningkatan rata-rata pendidikan di Kabupaten Kerinci menunjukkan adanya korelasi antara orang tua yang bermigrasi dan pemenuhan biaya sekolah. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, jumlah pengiriman uang ke Kerinci pada tahun 2010 sebanyak 25 milyar, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 27,5 milyar.⁴ Pada tahun 2018, kiriman uang dari Malaysia ke Kerinci mencapai satu milyar rupiah menjelang bulan puasa, sedangkan pada hari biasa kiriman uang kepada keluarga bernilai rata-rata antara lima dan sepuluh juta.⁵ Kiriman uang tersebut tentu berkorelasi dengan pembiayaan keluarga di kampung, termasuk biaya pendidikan. Data Badan Pusat Statistik Jambi tentang pendidikan di wilayah Kerinci mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, terdapat 19,13% penduduk yang memperoleh ijazah SMA dan meningkat menjadi 23,31% pada tahun 2019 dan 24,74% pada tahun 2020.⁶ Mengingat para pekerja migran ini pendidikan tertingginya adalah sekolah menengah, tentu saja harapannya adalah anak-anak mereka dapat bersekolah lebih tinggi. Mereka yang kuliah bisa saja memilih jurusan tertentu yang mungkin ada hubungannya dengan pengalaman orang tua mereka yang menjadi pekerja migran.

Migrasi berdampak pada perkembangan pendidikan anak-anak yang ditinggal ataupun yang dibawa. Menurut Bryant (2005), pertumbuhan migrasi internasional di Asia Tenggara telah memengaruhi banyak anak. Beberapa perhitungan kasar menunjukkan sekitar sejuta anak telah ditinggalkan oleh orang tua untuk bekerja di luar negeri, dan 2–3% di antaranya adalah anak-anak pekerja migran dari

Indonesia. Bukti yang ada menunjukkan bahwa anak-anak ini menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar dari pada anak-anak yang ditinggalkan di kampung halaman oleh orang tua mereka. Penelitian Jordan dan Graham (2012) tentang kebahagiaan anak yang orang tuanya menjadi migran atau nonmigran menunjukkan anak yang orang tuanya nonmigran lebih bahagia. Meskipun demikian, tidak ada bukti antara kebahagiaan anak dan prestasi sekolah. Selanjutnya, kemudahan akses pendidikan di dalam negeri yang lebih mudah dibandingkan anak yang dibawa ke negara tujuan tetap menimbulkan masalah bagi anak-anak pekerja migran, terutama terkait dengan permasalahan pengasuhan, kasih sayang, dan perhatian (Fatimah, 2017; Irenewaty dkk., 2008). Kajian di salah satu sekolah Tsanawiyah di Kabupaten Indramayu mendapati anak-anak yang orang tuanya (terutama ibu) menjadi pekerja migran cenderung rendah dalam motivasi dan prestasi belajar (Mujani, 2013).

Warga Kerinci sebagai pekerja migran yang memiliki anak-anak yang ditinggalkan di kampung halaman ataupun dibawa ke daerah tujuan migrasi merupakan objek menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan upaya mereka untuk mengatasi masalah pendidikan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pendapatan keluarga yang meningkat karena hasil bermigrasi ke Malaysia dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak migran, baik yang ditinggalkan di daerah asal maupun yang dibawa ke daerah tujuan. Anak yang ditinggal tidak mendapat pengasuhan, pengawasan, dan didikan dari orang tua secara langsung. Penentuan dan pengawasan dalam pendidikan anak tentu saja diwakilkan kepada keluarga lain yang tinggal di kampung, seperti kakek-nenek, paman-bibi dan saudara lainnya. Sementara itu, anak yang dibawa ke tempat tujuan juga mendapati masalah terkait akses pendidikan formal karena ada ketentuan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Penjelasan Lee (1966) tentang faktor migrasi pada faktor daerah asal, tempat tujuan, intervensi hambatan, dan

⁴ <https://jambi.antaranews.com/berita/297128/tki-kerinci-sumbang-miliaran-rupiah> (diakses pada 11 November 2022).

⁵ [https://jambi.tribunnews.com/2018/05/11/desa-di-kerinci-ini-terima-kiriman-uang-tnki-capai-rp-1-miliar-sebulan-jelang-](https://jambi.tribunnews.com/2018/05/11/desa-di-kerinci-ini-terima-kiriman-uang-tnki-capai-rp-1-miliar-sebulan-jelang-ramadan-naik)

[ramadan-naik](https://jambi.bps.go.id/indicator/28/1084/1/-persentase-ijazah-tertinggi-yang-dimiliki.html). (diakses pada 11 November 2022).

⁶ <https://jambi.bps.go.id/indicator/28/1084/1/-persentase-ijazah-tertinggi-yang-dimiliki.html> (diakses pada 11 November 2022).

faktor personal menjadi alat analisis kajian ini. Kajian ini juga menempatkan empat faktor tersebut dalam menjelaskan pendidikan anak-anak pekerja migran yang dibawa maupun yang ditinggal di Kerinci.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data. Menurut Patton (2005), sumber data utama dalam penelitian kualitatif berasal dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam perkembangannya cara mendapatkan data juga dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pekerja migran yang ada di Malaysia dan keluarga pekerja migran yang ada di Kerinci. Mereka yang bekerja di Malaysia dipilih dengan teknik “bola bergulir” (*snowball*). Teknik ini digunakan setelah mendapatkan informan kunci yang akan memberikan informasi siapa saja yang akan diwawancara berikutnya berkaitan dengan topik penelitian ini. Informan kunci adalah kerabat peneliti sendiri yang sedang berada di Malaysia bersama keluarganya untuk bekerja. Selanjutnya, informan kunci menyarankan siapa yang akan menjadi informan lain di lokasi yang sama. Pemilihan informan di Kerinci juga menggunakan teknik yang sama, dimulai dari kerabat peneliti yang mengurus anak-anak saudaranya yang bekerja di Malaysia. Informan kunci di Malaysia dan di Kerinci akan dijadikan studi kasus untuk metode pendekatan kajian biografi.

Observasi juga dilakukan di Malaysia untuk melihat bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak dalam konteks keterbatasan akses dan status ilegal. Di Kerinci, observasi dilakukan untuk melihat bagaimana kehidupan anak-anak migran, terutama terkait dengan kelangsungan pendidikan yang dibiayai oleh hasil bermigrasi. Selanjutnya, diskusi kelompok terpumpun dilakukan dengan cara berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang memenuhi kriteria

dalam penelitian, yaitu pekerja yang membawa anak ke Semenanjung Malaysia dan anak-anak yang ditinggal orang tua di kampung (Kerinci). Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara bersamaan, mendapat gambaran umum tentang pengalaman dan kendala yang dihadapi pekerja migran pada pendidikan anak-anak mereka (yang ditinggal maupun yang dibawa), serta untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari mereka tentang solusi atas masalah yang mereka hadapi kepada pemerintah (pusat maupun daerah). Analisis dokumen juga dilakukan untuk menyediakan data pendukung yang akan menguatkan temuan hasil lapangan. Dokumen yang diperlukan untuk dianalisis adalah jumlah data riil warga Kerinci yang bermigrasi ke Malaysia dari pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, serta jumlah pengiriman uang atau remitansi ke Kerinci melalui lembaga resmi seperti bank dan jasa lainnya. Informasi ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan hasil pendapatan keluarga dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kerinci.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Kampung Kerinci, Kuala Lumpur, Malaysia. Kajian ini berfokus pada proses migrasi warga di Desa Seleman, Koto Tengah dan Pasar Sore Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Informasi yang didapat dari organisasi PASMA⁷ di tiga desa ini ada sekitar 600 KK yang sekarang tinggal di Malaysia.⁸ Pengumpulan data lapangan dilakukan selama sebulan, dengan rincian 15 hari di Malaysia dan 15 hari di Kerinci. Pengambilan data di Malaysia dilakukan pada Desember 2019, sementara itu pengambilan data di Kerinci baru dapat dilakukan pada bulan Juni 2021 karena adanya situasi pandemi Covid-19.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dalam proses analisisnya. Pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama aspek migrasi dan pekerja migran dalam konteks makro. Pekerja migran adalah fenomena global yang dialami dan hampir ada pada setiap negara

⁷ Organisasi PASMA seperti paguyuban di Malaysia, PASMA diperuntukkan sebagai wadah segala macam urusan terkait warga yang berasal dari 3 Desa (Seleman, Koto Tengah dan Pasar Sore Seleman).

⁸ Data didapat dari kepala desa Koto Tengah yang juga pernah menjadi pekerja Migran di Malaysia yang masih tergabung dalam komunitas PASMA 3 DESA. Data didapat dari FGD pada tanggal 8 Juni 2021.

berkembang. Indonesia adalah negara penyumbang pekerja migran terbesar ke Malaysia (Hernández-Coss dkk., 2008; Hidayah dkk., 2013; Hutagalung & Indrio, 2019; Kassim, 2000). Penghasilan para pekerja migran ini berkontribusi pada devisa negara sehingga mereka sering disebut pahlawan devisa. Undang-Undang dalam perlindungan pekerja migran cukup memadai, namun diperlukan juga penanganan secara komprehensif terkait pendidikan anak-anak pekerja migran, baik yang ditinggal maupun yang dibawa. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak hanya dianggap sebagai pahlawan devisa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Pembahasan kedua pada konteks mikro yaitu pada anak-anak pekerja migran yang berasal dari Kerinci, baik yang ditinggal maupun yang dibawa. Kajian berfokus pada bagaimana pekerja migran yang berasal dari Kerinci mengatasi keperluan anak-anak dalam pendidikan di Semenanjung Malaysia dan pembahasan tentang bagaimana pendidikan anak-anak pekerja migran asal Kerinci yang tetap tinggal di daerah asalnya.

Pembahasan pada dua skala makro dan mikro dianalisis menggunakan teori migrasi oleh Lee (1966) yang merupakan *grand theory* dalam penelitian tentang migrasi. Penjelasan Lee (1966) tentang faktor migrasi pada faktor daerah asal, tempat tujuan, intervensi hambatan, dan faktor personal sangat relevan untuk menjelaskan kajian ini. Pendekatan biografi (Schittenhelm, 2007) dari pekerja migran yang berasal dari tiga desa kajian akan memperkaya analisis tersebut. Selanjutnya, data biografi dari anak-anak mereka yang berada di Kerinci dan di Malaysia menarik untuk dibahas. Deskripsi data tersebut akan memberikan gambaran tentang migrasi yang berpengaruh pada pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, isu migrasi dalam konteks global, nasional, dan lokal, serta perubahan sosial yang ditimbulkan turut dipaparkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Migrasi Warga Kerinci ke Malaysia

Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi yang ditetapkan bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi pada 6 Januari 1957. Nama Kerinci diperkirakan berasal dari bahasa Tamil, yaitu Kurintji, yang dinyatakan sebagai nama bunga di pegunungan India Selatan.⁹ Penduduk pada beberapa wilayah di kabupaten ini umumnya memiliki mata pencaharian sebagai migran di Malaysia, antara lain Desa Seleman, Koto Tengah, dan Pasar Sore Seleman. Oleh karena itu, tiga desa ini menjadi tempat lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini.

Periode tahun 1900 hingga 1905 merupakan puncak migrasi warga Kerinci ke Malaysia, baik secara legal maupun ilegal (Nurmailinda, 2017). Hal ini selaras dengan penuturan dari Bapak Iba (nama samaran) yang menceritakan sejarah warga Kerinci merantau ke Malaysia. Sekitar tahun 1939, penduduk asal Kerinci yang bekerja di Malaysia mulai menempati beberapa kawasan perkebunan di sekitar daerah Huluyam, Kemensyah, Kuala Kubu, dan Hulu Langat. Dengan bantuan dari warga asli setempat, mereka pun mulai membuka lahan perkebunan karet. Pada tahun 1957 yang merupakan awal kemerdekaan Malaysia, Kerajaan Malaysia memberikan kesempatan kepada setiap warga keturunan Indonesia yang bekerja di Malaysia, termasuk warga Kerinci, untuk menjadi warga negara Malaysia.

JH-orang Kerinci yang telah mendapatkan IC merah¹⁰ di Malaysia—menceritakan asal mula kampung Kerinchi. Kampung Kerinchi terbentuk pada akhir abad ke-18 dan awalnya dihuni oleh penduduk dari Kerinci Jambi, Minangkabau, dan Aceh yang bermigrasi ke Tanah Melayu Malaysia. Junipah (1991) juga menyatakan bahwa migrasi dari tiga daerah tersebut terjadi pada saat Belanda menjajah Indonesia. Untuk menghindari kezaliman penjajah yang melakukan penindasan dan menggunakan kekerasan, mereka memilih pindah secara

⁹ <https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html> (diakses pada 11 November 2022).

¹⁰ IC merah adalah kartu identitas izin tinggal yang masanya lebih lama. IC ini diperoleh karena menikah dengan warga negara Malaysia atau sudah lama menetap di Malaysia dengan izin kerja.

berkelompok ke Tanah Melayu. JH berpendapat bahwa kebudayaan Melayu yang berkembang di Malaysia memiliki banyak persamaan dengan budaya Kerinci.¹¹ Kedatangan dan menetapnya orang Kerinci di kawasan Kuala Lumpur dimulai dari Kampung Kerinchi. Beragam dan meluasnya aktivitas orang Kerinci di Kuala Lumpur mengakibatkan perluasan wilayah pemukiman mereka hingga Bukit Nanas, Petaling Jaya, Pudu, dan Kampung Haji Abdullah Hukum. Kampung Haji Abdullah Hukum dan Kampung Kerinchi menjadi perkampungan terluas (sekitar 60 hektare) di Kuala Lumpur pada tahun 2005. Saat ini, wilayah tersebut sudah bukan seperti kampung lagi yang banyak kebun dan tanaman pertanian. Perkembangan Kuala Lumpur yang menjadi ibukota negara Malaysia menjadikan Kampung Kerinchi menjadi kawasan metropolitan dengan ciri bangunan tinggi berupa *flat* dan apartemen.

Jenis pekerjaan yang dilakukan para migran ini beragam, antara lain pembantu rumah tangga, *plumber* (urusan ledeng), tukang perabot, tukang reparasi listrik, pedagang, dan kontraktor bangunan. Bervariasinya jenis pekerjaan ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup pekerja migran dari Kerinci. Informasi tentang keberhasilan orang Kerinci di Malaysia inilah yang terus menjadikan daya tarik bagi orang Kerinci, utamanya yang tinggal di Desa Seleman, Koto Tengah, dan Pasar Sore, untuk bermigrasi ke Malaysia. Tiap sektor pekerjaan yang melibatkan pekerja migran umumnya selalu membutuhkan tambahan orang. Misalnya, migran menjadi pekerja rumah tangga memiliki majikan yang mengabarkan kebutuhan pembantu bagi keluarga dan temannya. Begitu juga dengan migran sebagai pemborong bangunan yang tiap saat memerlukan tenaga kerja informal. Permintaan yang terus menerus inilah menjadi peluang orang Kerinci untuk melakukan migrasi berkelanjutan ke Malaysia.

Dengan kondisi regenerasi migrasi yang terus terjadi, lokasi tempat tinggal para migran tidak lagi di Kampung Kerinchi atau Abdulah

Hukum, sebab kawasan tersebut sudah menjadi daerah mahal untuk hunian. Warga dari tiga desa dalam penelitian ini umumnya tinggal di daerah Ulu Langat, Negeri Selangor, Semenanjung Malaysia. Sebagian dari mereka telah menjadi warga negara, ada pula yang menetap dengan mendapatkan kartu IC merah (izin tinggal dalam waktu lama). Migran yang telah mendapatkan kewarganegaraan Malaysia ataupun mendapat IC Merah dapat tinggal dan bekerja selayaknya masyarakat asli Malaysia. Selanjutnya, ada pula pekerja migran yang masuk dengan izin kerja dan ada yang bekerja dengan status ilegal. Pekerja migran ilegal ini biasanya tidak mendapatkan izin kerja atau masuk Malaysia dengan izin pelancongan (berwisata) dan setelah masa izin berakhir (satu bulan) mereka tidak kembali ke Indonesia. Beragam alasan dikemukakan oleh para migran yang berstatus ilegal terkait keputusannya untuk tetap tinggal di Malaysia, seperti ada penyakit tertentu ataupun tidak lolos proses aplikasi visa. Ada juga yang bertahan dengan status ilegal karena keengganan membayar pajak yang mahal dalam kondisi pendapatan tidak menentu dan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Walaupun sudah banyak orang Kerinci yang menjadi warga negara Malaysia ataupun memiliki keturunan yang berkewarganegaraan Malaysia, mereka masih menjunjung tinggi kebudayaan Kerinci. Budaya Kerinci masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan bahasa Kerinci, upacara adat pernikahan, kelahiran, dan kematian. Meskipun sudah menjadi warga negara Malaysia, tidak jarang mereka kembali ke Kerinci hanya untuk bersilaturahmi dengan keluarga yang masih tinggal di Kerinci sekaligus memperkenalkan kampung halaman pada anak cucu mereka.¹² Salah satu tradisi sosial orang Kerinci adalah berkelompok sebagai orang satu desa maupun sebagai sanak keluarga satu turunan. Kelompok keluarga Kerinci yang menempati suatu daerah biasanya berasal dari kampung asli Kerinci yang mereka tinggalkan. Sebagai contoh, warga asal Desa Seleman

¹¹ Hasil wawancara dengan JH, warga Kerinci yang sudah mendapat IC Merah di Malaysia (izin tinggal dalam waktu lama), wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2019 di Kampung Kerinchi.

¹² Hasil wawancara dengan IBA (warga Kerinci yang mendapat *permit* kerja di Malaysia), wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021 di Kerinci.

Kerinci menetap di kawasan Hulu Langat dan Kuala Kubu Baru, warga Desa Tanjung Tanah bermukim di kawasan Kampung Pasir dan Kampung Kerinci, sedangkan warga Desa Pulau Tengah menetap di daerah Hulu Langat Ujung dan Pansun.

Salah satu motivasi kedatangan imigran dari Kerinci ke Malaysia adalah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, terlebih karena nilai tukar mata uang Malaysia yang lebih tinggi dibandingkan mata uang Indonesia. Dari segi lingkungan, mereka merasa tidak ada perbedaan yang begitu jauh karena mereka tinggal di lingkungan yang mayoritas juga berasal dari Kerinci. Sistem kekerabatan dan kekeluargaan orang Kerinci yang begitu kuat adalah salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan bermigrasi. Sistem kekerabatan dan kekeluargaan ini pula yang menjadi penghubung ketersediaan lapangan kerja dan tersedianya tempat tinggal sementara bagi pendatang baru. Namun, sebagian pendatang baru inilah yang kemudian tinggal secara ilegal (pendatang haram).¹³ Keadaan ini tidak hanya dapat merugikan pemerintah Malaysia tetapi juga dirinya sendiri karena besarnya risiko tertangkap polisi kerajaan dan dipenjara.

Semakin besar peluang pekerjaan dan tingginya pendapatan di Malaysia, khususnya sebagai buruh dan jasa, semakin besar pula minat orang Kerinci bermigrasi ke Malaysia. Hal ini juga dipengaruhi kondisi pendapatan di Malaysia jauh lebih besar dibandingkan di daerah asal mereka untuk jenis pekerjaan serupa. Hasil bekerja atau berbisnis di Malaysia dibuktikan oleh berjejernya rumah mewah yang dibangun dari hasil kerja di Malaysia. Ratusan rumah mewah yang tak berpenghuni dapat ditemui di Kerinci karena pemiliknya berada di Malaysia dan akan terisi kembali rumahnya jika mereka pulang ke Kerinci pada hari raya. Meskipun demikian, kejayaan mencari nafkah di Malaysia terganggu oleh pandemi Covid-19. Sejak bulan Maret 2020, pemerintah Kerajaan Malaysia memulangkan sebagian migran asal Kerinci yang

berstatus izin tinggal atau izin kerja mereka tidak diperpanjang. Mereka juga tidak diperkenankan datang kembali selama masa *lockdown* di Malaysia. Pendapatan migran yang jauh berkurang saat kembali ke Kerinci membuat mereka harus banting setir untuk membuat usaha atau bekerja di Kerinci. Sebagian dari mereka yang kembali masih meninggalkan keluarga (istri, anak, atau orang tua) di Malaysia. Istri yang ditinggalkan masih berstatus pekerja dengan izin, begitu juga dengan orang tua. Meskipun demikian, anak-anak pekerja migran yang tetap tinggal di Malaysia umumnya menghadapi permasalahan. Mereka tidak mempunyai izin tinggal sehingga sang ibu harus memperpanjang *permit* kerja atau mereka terpaksa tinggal dalam keadaan ilegal di Malaysia. Selain status tinggal, kendala besar yang dialami migran yang masih tetap di Malaysia adalah masalah pemenuhan biaya hidup. Pendapatan berkurang karena suami mereka pulang ke tanah air pada masa pemberlakuan *lockdown* yang panjang oleh pemerintah Kerajaan Malaysia. Mereka yang berstatus ilegal, selain tidak bisa pulang kampung mengikuti jejak pemulangan migran, juga menghadapi permasalahan terbatasnya ruang gerak. Ketatnya peraturan di Malaysia yang memberlakukan polisi patroli selama *lockdown* membuat mereka tidak leluasa untuk melakukan pekerjaan. Risiko ditangkap dan masuk penjara adalah momok yang menakutkan.¹⁴

Pendidikan Anak-anak Pekerja Migran Asal Kerinci

Masalah pendidikan anak pekerja migran sangat dipengaruhi oleh situasi dengan siapa mereka tinggal, baik yang dibawa maupun yang tinggal. Pendidikan anak pekerja migran yang dibawa ke Malaysia dan lahir di Malaysia sering menghadapi masalah administratif, seperti pengurusan akta kelahiran dan NIK. Mereka yang bekerja di Malaysia dengan menggunakan *permit* kerja tidak diizinkan membawa anak dan melahirkan anak di Malaysia. Bagi anak dari migran yang memiliki IC merah, mereka secara

¹³ Istilah pendatang haram diperuntukkan bagi warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Istilah ini kemudian diganti dengan PATI (Perja Asing Tanpa Izin).

¹⁴ Hasil wawancara dengan IS yang merupakan pekerja migran di Malaysia asal Selemantan Kerinci, status mendapat *permit* kerja. IS

sedang kembali ke Kerinci karena pemulangan oleh pemerintah kerajaan Malaysia efek pandemi covid-19. Wawancara pada FGD pada tanggal 8 Juni 2021.

otomatis menjadi warga negara Malaysia. Peluang untuk bersekolah bagi anak-anak dari orangtua migran tanpa IC merah dituturkan oleh responden IB sebagai berikut.

“Kalau orang tuanya tidak ada IC merah maka sekolahnya di sekolah khusus Indonesia di Kuala Lumpur. Tapi kalau kami-kami ni tak lah, jauh nak ke Kuala Lumpur. Harus antar naik bus-kan sedangkan kami kerja. Kalau orang tua yang tak punya permit anaknya sekolah di sekolah agama swasta boleh. Kerajaan Malaysia membolehkan sekolah di sekolah swasta tapi tidak dapat ijazah. Jadi intinya kalau yang anaknya bukan warga negara Malaysia tapi lahir di Malaysia bisa sekolahnya sekolah di tahfidz-tahfidz itu saja. Sekolah agama yang tidak dapat ijazah. Tapi banyak juga yang orang tua yang anaknya lahir ditiptkan ke keluarga yang sudah mendapatkan IC merah jadi anaknya dapat kewarganegaraan Malaysia dan bisa sekolah di Malaysia di sekolah negeri pun bisa”.

Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, sebenarnya menyediakan program ujian Paket A, B, dan C yang diadakan melalui Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk anak-anak migran. Namun, kebanyakan dari warga Kerinci hanya mendengar saja informasinya dan belum ada dari mereka yang mengikuti program tersebut. Salah satu solusi untuk pendidikan anak-anak migran yang tidak berdokumen ini adalah mengikuti sekolah informal yang diselenggarakan kader partai tertentu pada hari Sabtu dan Minggu. Materi pengajaran ini disesuaikan untuk ujian Paket A. Situasi ini dapat dicermati dari penuturan MN–migran yang membawa anak usia sekolah (umur 9 tahun) ke Malaysia dalam kondisi tidak memiliki dokumen–sebagai berikut.

“Tapi sekarang ada partai ‘X’ yang membuat sekolah, sekolahnya itu setiap hari Sabtu dan Ahad, bentuk kesetaraan pendidikan Paket A. Sekolahnya itu di daerah setapak, yang ngajar itu orang ‘X’ tulah. Dengar juga dari ketua Muslimat Indonesia kalau Serikat NU juga sudah mendirikan sekolah untuk kesetaraan pendidikan di Gombak”.

Pekerja migran lainnya (DV) juga turut menjelaskan situasi terkait pendidikan anak migran tanpa IC merah di Malaysia sebagai berikut.

“Secara peraturan pekerja yang mendapat permit tidak boleh membawa anak dan tidak boleh melahirkan anak di Malaysia. Kalau yang punya IC merah pun sekolah Negeri di Malaysia pun jadi mahal, karena biaya-biaya untuk buku dan lain-lainnya juga mahal. Jadi biasanya yang dikejar itu untuk tingkat SD tetap di Malaysia tapi untuk SMP dan selanjutnya sekolah kembali ke Kerinci”.

FGD yang dilakukan di Selangor Malaysia dan dihadiri oleh pekerja migran dari tiga desa kajian mendiskusikan tentang pendidikan anak-anak migran secara umum. Berdasarkan pengalaman dari migran yang telah lama tinggal di Malaysia dan umumnya telah memiliki IC merah, taraf pendidikan anak-anak mereka dirasa meningkat dan banyak yang telah berkuliah dan bekerja menjadi PNS. Sebelum pengiriman migran dari Kerinci marak dilakukan, pendidikan tinggi tidak begitu menjadi perhatian utama masyarakat setempat. Meskipun demikian, ada juga didapati anak migran yang memutuskan untuk tidak berkuliah dan menjadi generasi penerus menjadi migran. Hal ini didorong oleh peluang kerja dan nilai bayaran yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di kampung.

Di sisi lain, keadaan anak yang ditinggal orang tuanya bermigrasi umumnya kurang nyaman secara psikologis karena mereka tidak dapat tinggal bersama orang tuanya. Ada yang hanya ibu atau ayahnya yang pergi ke Malaysia, bahkan ada yang kedua orang tuanya bekerja di Malaysia. Situasi ini menjadikan sebagian dari mereka terpaksa tetap tinggal di Kerinci tanpa peran orang tuanya dalam pengasuhan dan kasih sayang. Anak-anak pekerja migran yang tinggal di kampung umumnya diasuh oleh keluarga seperti nenek atau kakek, saudara dari orang tuanya, atau kakaknya. Kekuatan sistem kekerabatan dan kekeluargaan telah terjalin dari zaman dahulu oleh masyarakat Kerinci yang memegang teguh kebersamaan pengasuhan anak oleh keluarga besar. Anak-anak migran yang tinggal dengan nenek atau kakeknya umumnya bersikap lebih manja karena kakek dan nenek

lebih menuruti kehendak cucunya. Meskipun demikian, kakek dan nenek kurang memperhatikan pendidikan anak yang ditinggalkan kepada mereka. Selain itu, pengasuhan oleh anggota keluarga lainnya mengakibatkan hubungan batin dan emosional antara anak dan pengasuh yang lebih dekat dibandingkan dengan orang tuanya yang bekerja di Malaysia. Situasi ini wajar terjadi karena kurangnya intensitas pertemuan antara anak-anak migran dan orang tua kandungnya yang bekerja di Malaysia. Bahkan, kajian ini juga menemukan adanya anak yang memanggil neneknya dengan Mak atau Ibu karena lamanya waktu yang dihabiskan bersama neneknya. Anak migran yang sejak kecil telah ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bermigrasi umumnya merasa tidak masalah dengan kondisi orang tua yang tinggal jauh dari mereka.¹⁵

Pendidikan pengasuh anak yang ditinggalkan oleh pekerja migran ke Malaysia berpengaruh pada kualitas pendidikan anak yang ditinggalkan di kampung halaman. Jika pendamping yang ditinggali adalah orang yang mengerti pendidikan, akan lebih mudah mengajarkan anak tentang pelajaran dan pentingnya pendidikan. Keadaan berbeda jika pendamping anak migran tidak bersekolah atau kurang memperhatikan proses pendidikan, sebab mereka umumnya tidak memahami pelajaran sekolah dan sistem kurikulum yang semakin berkembang.

Dari hasil FGD dan wawancara yang dilakukan dengan anak-anak yang tinggal di Kerinci yang orang tuanya bekerja di Malaysia, mereka umumnya masih bersekolah dan ada pula yang telah menyelesaikan bangku kuliah. Hasil wawancara dengan kepala sekolah memperlihatkan bahwa anak yang ditinggalkan orang tuanya bermigrasi ke Malaysia umumnya terlihat pemalu. Kondisi ini kemungkinan disebabkan perasaan kurang percaya diri karena jauh dari orang tua. Hal ini terutama tampak ketika ada pertemuan yang mengundang orang tua dan para anak migran terlihat sedih. Selain itu, anak migran yang tinggal dengan pengasuh

berpendidikan SMP ke atas umumnya tampak lebih aktif jika dibandingkan dengan anak migran yang tinggal dengan pengasuh berpendidikan rendah.¹⁶ Dari segi finansial, anak migran tampak lebih mencolok jika dilihat dari uang jajan hariannya. Ada yang memiliki uang jajan harian hingga seratus ribu rupiah, ada pula yang mampu mengupah temannya untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Beberapa anak migran yang tekun belajar menyatakan bahwa mereka merasa harus belajar maksimal untuk membahagiakan orang tuanya yang telah melakukan pengorbanan dengan bekerja di luar negeri dan terpaksa terpisah jarak dengan anggota keluarganya.

Akibat pandemi Covid-19, sebagian orang tua dari anak-anak migran ini dipulangkan oleh pemerintah Malaysia karena adanya kebijakan *lockdown* yang panjang. Selama pemulangan itu, anak-anak migran umumnya terlihat lebih berseri dan bahagia. Situasi ini menunjukkan bahwa kehadiran orang tua di sisi mereka sangat memengaruhi kondisi psikologis mereka.¹⁷ Di sisi lain, kajian ini juga mendapati anak migran yang memilih untuk bersekolah secara asal-asalan karena tidak adanya kontrol dari keluarga yang mengasuh selama orang tua mereka bermigrasi. Beberapa anak migran lainnya juga yang tidak merasakan pentingnya menempuh jenjang pendidikan yang tinggi. Mereka berkaca dari pengalaman orang tua mereka yang tidak bersekolah, tetapi tetap dapat menghasilkan pendapatan besar dengan bekerja di luar negeri.¹⁸

Hasil wawancara dengan 16 informan anak-anak yang tinggal di Kerinci yang orang tuanya bekerja di Malaysia¹⁹ menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui secara persis pekerjaan orang tuanya di Malaysia. Mereka hanya tahu orang tuanya menjadi migran di luar negeri sehingga mampu memberikan kehidupan yang layak, bahkan mewah, untuk keluarga yang ditinggalkan di Kerinci.²⁰ Ada juga anak migran yang mengungkapkan rasa senangnya dengan kondisi orang tua bekerja di Malaysia, sebab hal ini menyebabkan terpenuhinya kebutuhan finansial mereka dan anak tersebut dapat

¹⁵ Hasil FGD dan wawancara dengan keluarga pekerja migran Malaysia asal Selemang Kerinci.

¹⁶ Wawancara dengan kepala sekolah dasar Koto Tengah.

¹⁷ Wawancara dengan guru/wali kelas MTs Tanjung Tanah.

¹⁸ Hasil FGD.

¹⁹ Terdiri dari 3 orang siswa SD, 5 orang siswa SMP, 6 orang siswa SMA dan 3 orang mahasiswa.

²⁰ Hasil FGD dengan anak pekerja migran yang ditinggalkan di Kerinci.

berbangga hati di depan teman-teman sekolahnya karena kondisi finansial yang jauh lebih baik. Situasi ini memotivasi anak migran tersebut untuk menjalani proses pendidikan dengan lebih baik dan memperoleh nilai hasil belajar yang lebih tinggi. JF—salah satu anak yang putus sekolah akibat kurangnya kontrol dari orang tua yang bekerja di Malaysia dan keluarga yang mengasuh di Kerinci—mengungkapkan penyesalannya karena telah mengambil keputusan yang salah dalam proses pendidikannya dan memilih untuk mengikuti ujian Paket C karena malu untuk kembali mengulang belajar di sekolah.²¹

Sebagian besar anak migran yang ditinggalkan di Kampung Kerinci mengungkapkan bahwa mereka akan lebih bahagia jika mereka dapat berada di dekat orang tuanya saat menjalani pendidikannya. Meskipun demikian, kondisi yang dihadapi tidak memungkinkan keluarga mereka untuk tinggal bersama. Bagi JM—anak migran yang berhasil bekerja sebagai tentara—, pengalaman hidup sebelumnya saat berada dalam kondisi kesulitan finansial dan terpisah dengan orang tua yang bekerja sebagai migran di Malaysia menjadi motivasi besar untuk lebih baik dalam pendidikan dan pekerjaan. Hal itu ia buktikan dengan memperoleh penghargaan mahasiswa undangan ke UGM, namun kesempatan itu tidak digunakan karena ia memilih menjadi taruna tentara. JM dengan bangga mengungkapkan bahwa ia menjadi seperti sekarang karena jasa ibunya yang menjadi migran di Malaysia selama bertahun-tahun. Status pekerjaannya saat ini menjadikan JM sebagai sosok kebanggaan warga Seleman.

DISKUSI

Indonesia merupakan penyumbang tenaga kerja migran ke berbagai negara seperti Malaysia, Hongkong dan Timur Tengah. Malaysia sebagai negara terdekat adalah tempat tujuan terbanyak pekerja migran asal Indonesia (Ford, 2006, 2019; Hidayah dkk., 2013; Wahyudi, 2016). Provinsi pengirim migran terbesar di Indonesia adalah

Jawa Timur dan Jawa Barat, sementara wilayah lainnya juga secara simultan mengirim migran ke luar negeri, contohnya Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Ikhsan, 2012; Junipah, 1991; Kasim, 2000). Data BNP2TKI menunjukkan bahwa kontribusi penghasilan pekerja migran berkontribusi pada devisa negara sebesar 4,64%. Gelar pahlawan devisa ditujukan kepada pekerja migran karena bukti remitansi dari mereka tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap pekerja migran terus diperbaiki. Meskipun demikian, persoalan terkait dengan sistem dan peraturan di negara tujuan terus ditemui. Salah satu persoalan pekerja migran di Malaysia yang perlu dicarikan jalan keluarnya adalah larangan membawa anak ke daerah tujuan migrasi. Hal ini dikarenakan anak-anak migran yang masih di bawah umur masih memerlukan kasih sayang, pengasuhan, dan perlindungan dari orang tua. Selain itu, anak-anak migran dengan status ilegal di Malaysia menghadapi masalah serius terkait pendidikan. Lain halnya anak-anak migran yang ditinggal di kampung halaman bersama anggota keluarga lainnya. Peluang dan keberlanjutan pendidikan mereka terbentang luas karena tidak ada permasalahan terkait dokumen administratif.

Penjelasan Lee (1966) tentang faktor migrasi pada faktor daerah asal, tempat tujuan, intervensi hambatan, dan faktor personal menjadi alat utama dalam analisis kajian ini. Meskipun teori Lee (1966) menjelaskan tentang faktor migrasi, pengkaji juga menempatkan empat faktor tersebut dalam menjelaskan tentang pendidikan anak-anak pekerja migran yang dibawa maupun yang ditinggal di Kerinci. Tabel 2 menyajikan ringkasan hasil temuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa migrasi sebagai pekerja ke Malaysia bagi warga Kerinci berkaitan erat dengan faktor ekonomi serta praktik sosial dan budaya yang berkesinambungan. Kontinuitas bermigrasi bagi warga Kerinci terjadi karena adanya peluang ekonomi dan celah dalam peraturan yang berpotensi dilanggar.

²¹ JF merupakan anak pekerja migran yang ditinggalkan dikampung yang putus sekolah

Tabel 2. Bermigrasi dan Pendidikan Anak

Objek 1	Faktor Migrasi			
	Daerah Asal	Daerah Tujuan	Intervensi Hambatan	Pribadi
Pekerja Migran	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lapangan Pekerjaan sulit ➢ Hasil tani yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pekerjaan mudah ➢ Nilai ringgit lebih tinggi daripada rupiah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Agama ➢ Bahasa ➢ Budaya ➢ Kekerabatan ➢ Peraturan: <i>permit</i> dan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kehidupan yang lebih baik ➢ Pengalaman ➢ Pendidikan anak lebih baik
Objek 2	Pendidikan Anak			
	Daerah Asal	Daerah Tujuan	Intervensi Hambatan	Pribadi
Anak PMI dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sekolah ➢ Kuliah ➢ Bekerja sektor formal meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sekolah ➢ Madrasah ➢ Menumpang warga: sekolah resmi di Malaysia 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Target menulis, membaca dan berhitung. ➢ Ujian Paket A di kampung ➢ Bekerjasama dengan saudara dalam mengatur status kewarganegaraan anak 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Orang tua yang bermigrasi menimbulkan rasa sedih tetapi juga bangga. ➢ Mampu membiayai kehidupan sama seperti orang kaya di kampung ➢ Bisa punya tabungan dan investasi ➢ Bisa sekolah sampai kuliah karena dibiayai oleh orang tua yang bermigrasi ➢ Bekerja formal dengan status lebih baik dari orang tua.

Selanjutnya, upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak-anak migran dilakukan dengan berbagai cara, seperti sekolah informal di Malaysia yang dilanjutkan dengan pendidikan di kampung halaman. Peningkatan taraf pendidikan dalam keluarga migran dapat dicermati dengan pendidikan anak-anak migran yang umumnya lebih tinggi daripada orang tua mereka. Sebagian besar orang tua mereka berijazah SMP dan SMA sementara anak-anak mereka bisa sampai kuliah. Selain itu, banyak dari anak-anak pekerja migran yang berhasil bekerja di sektor formal, seperti menjadi tentara, guru PNS, Jaksa, bekerja di kantor pemerintah, atau bank. Situasi ini memberi motivasi pada anak-anak lain untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Bermigrasi bagi warga Kerinci ke Malaysia adalah bagian dari sejarah warga kampung Seleman, Koto Tengah, dan Pasar Sore Seleman, Kecamatan Danau Kerinci, Provinsi Jambi.

Faktor sejarah menjadikan jaringan sambung-menyambung dalam bermigrasi tidak hanya dipengaruhi tujuan ekonomi, tetapi juga adanya faktor motivasi pribadi, kesamaan secara budaya, dan kemudahan lainnya. Faktor kemudahan jalan yang telah diperoleh pendahulu warga Kerinci yang sudah berada di Malaysia menjadi kekuatan sosial dalam mengatasi masalah hukum di tempat tujuan.

Peraturan pemerintah Malaysia yang tidak membolehkan pekerja migran membawa anak disiasati dengan berbagai jalan oleh warga migran dari Kerinci. Jika memiliki dokumen lengkap, anak yang dibawa dan lahir di Malaysia dapat bersekolah di Sekolah Indonesia. Namun, jika lahir dari orang tua yang hanya menggunakan *permit* kerja, para migran umumnya mengubah data anak mereka. Anak-anak tersebut diakui lahir dari saudara atau kerabat yang telah memiliki IC merah. Hal ini dilakukan agar anak-anak tersebut dapat diakui dan mendapat pendidikan layak di Malaysia. Alternatif lainnya bagi anak yang tidak memiliki

dokumen adalah mengikuti pendidikan di sekolah madrasah. Sayangnya, sekolah tersebut tidak dapat menerbitkan ijazah kelulusan. Oleh karena itu, solusi yang dipilih adalah mayoritas orang tua memulangkan anaknya ke Kerinci pada usia SD agar mendapatkan identitas resmi sehingga bisa bersekolah dan mendapatkan ijazah kelulusan. Ada pula pilihan sekolah informal yang didirikan oleh partai tertentu yang bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak yang tidak berdokumen mengikuti ujian Paket A. Di sisi lain, pendidikan anak-anak yang ditinggal pada umumnya mengalami peningkatan dibandingkan orang tua mereka. Namun, anak yang ditinggal orang tua yang menjadi pekerja migran di Malaysia umumnya merasa kurang nyaman secara psikologis karena tidak tinggal bersama orang tuanya dan diasuh oleh anggota keluarga lainnya, seperti nenek atau kakek, saudara dari orang tuanya, atau kakaknya.

Masalah yang perlu menjadi perhatian kajian lebih lanjut adalah pendidikan anak-anak pekerja migran yang mungkin tidak bersekolah formal di Malaysia dan tidak kembali ke kampung untuk ujian Paket A dan seterusnya. Mereka tetap dengan status mereka yang ilegal dan meneruskan pekerjaan orang tua mereka dengan risiko ditangkap. Pendekatan pada pemerintah Malaysia agar pekerja migran diizinkan anak ikut orang tua mereka adalah salah satu solusi nyata untuk kepastian pendidikan formal anak-anak pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

Bieder, R. E. (1973). Kinship as a factor in migration. *Journal of Marriage and Family*, 35(3), 429-439. <https://doi.org/10.2307/350579>

BNP2TKI. (2020). *Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) tahun 2019*. [https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI___2019\(2\).pdf](https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI___2019(2).pdf)

Bryant, J. (2005, April). Children of international migrants in Indonesia, Thailand and the

Phillipines: A review of evidence and policies. *Innocenti Working Papers*, 2005–05. UNICEF. <https://www.unicef-irc.org/publications/381-children-of-international-migrants-in-indonesia-thailand-and-the-philippines-a-review.html>

Choldin, H. M. (1973). Kinship networks in the migration process. *The International Migration Review*, 7(2), 163–175. <https://doi.org/10.2307/3002426>

Fatimah, L. (2017). Migrasi dan pengaruhnya terhadap pola pengasuhan anak TKW di Dusun Panganglele Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. *AntroUnairNet*, VI(1), 108-122.

Ford, M. (2006). After Nunukan: The regulation of Indonesian migration to Malaysia. Dalam A. Kaur & I. Metcalfe (Ed.), *Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia* (pp. 228–247). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230503465_12

Ford, M. (2019). *From migrant to worker: Global unions and temporary labor migration in Asia*. ILR Press.

Hernández-Coss, R., Brown, G., Buchori, C., Endo, I., Todoroki, E., Naovalitha, T., Noor, W., & Mar, C. (2008). *The Malaysia-Indonesia remittance corridor: Making formal transfers the best option for women and undocumented migrants*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7577-8>

Hidayah, A., Susilo, W., & Muljadi. (2013). *Seluruh kebijakan (minus) perlindungan buruh migran Indonesia*. Migrant Care.

Hutagalung, S. A., & Indrio, V. T. (2019). *Laporan tematik studi midline MAMPU Tema 3: Akses perempuan buruh migran luar negeri terhadap layanan perlindungan*. <https://smeru.or.id/id/node/1887>

Ikhsan, R. (2012). Senarai sejarah peradaban Kerinci. Dalam *Sejarah Kebudayaan Alam Kerinci* (hlm. 1–16). Yayasan Bina Potensia Kerinci.

- Irenewaty, T., Lestari, P., & Kumalasari, D. (2008). *TKW dan pengaruhnya terhadap kelangsungan pendidikan anak di Kabupaten Sleman*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jordan, L. P., & Graham, E. (2012). Resilience and well-being among children of migrant parents in South-east Asia. *Child Development*, 83(5), 1672–1688. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01810.x>
- Junipah, W. (1991). *Kegiatan sosio-ekonomi penghijrahan Indonesia di Kampung Kerinci* [Thesis]. Universiti Malaya
- Kassim, A. (2000). Indonesian immigrant settlements in Peninsular Malaysia. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 15(1), 100–122. <https://www.jstor.org/stable/41057031>
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2060063>
- Mujani, A. (2013). *Hubungan kepergian ibu menjadi TKW dengan motivasi dan prestasi belajar siswa di MTs Rabiatul 'Ulum Krangkeng Indramayu* [Tesis]. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Nurazme, Y. (1987). *Profail wanita dalam kemiskinan: Kajian kes komuniti setinggan Melayu Kg.Hj. Abdullah Hukum, Jalan Bangsar, Kuala Lumpur* [Undergraduate Thesis]. University of Malaya.
- Nurmailinda. (2017). *Alasan pasangan suami istri merantau ke Malaysia: Kasus Desa Seleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci* [Tesis Diploma]. Universitas Andalas.
- Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. Dalam *Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/0470013192.bsa514>
- Primawati, A. (2011). Remitan sebagai dampak migrasi pekerja ke Malaysia. *Sosiokonsepsia*, 16(2), 209–222.
- Schittenhelm, K. (2007). Concept and methods in migration research (Editorial). Dalam K. Schittenhelm, *Concepts and methods in migration research: Conference Reader* (hlm. 3-6). www.cultural-capital.net
- Solidaritas Perempuan. (2014). *Situasi kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran perempuan dan keluarganya di negara ASEAN*. <https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/Situasi-Kekerasan-dan-Pelanggaran-Hak-Buruh-Migran-Perempuan-dan-Keluarganya.pdf>
- Sulastri, S. L. (2017). *Upaya Indonesia memenuhi hak pendidikan bagi anak TKI dan PATI di Johor Bahru (2014-2017)* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wahyudi, R. (2015, 9 Oktober). *Berbagai permasalahan buruh migran Indonesia di Malaysia*. <https://buruhmigran.or.id/2015/10/09/berbagai-permasalahan-buruh-migran-indonesia-di-malaysia/>
- Wahyudi, R. (2016). *Perjalanan haram pekerja migran Indonesia tidak berdokumen ke Malaysia*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Zakaria, A. F. A., & Samsudin, M. (2019). Pembentukan istilah dan stratifikasi aristokrat Melayu Selangor era Sultan Salehuddin, Sultan Selangor Pertama, 1766-1782. *Akademika*, 89(2), 67–81. <https://doi.org/10.17576/akad-2019-8902-06>

Dilema petani di tengah dualisme kebijakan pertanian: Studi kasus strategi penghidupan berkelanjutan petani sawah di kawasan agropolitan Ciwidey, Jawa Barat

Paddy field farmers' dilemma in the midst of agricultural policy dualism: A case study of sustainable livelihood strategies of paddy field farmers in the Ciwidey agropolitan area, West Java

Nurrokhmah Rizqihandari^{*1,4}, Rijanta², Sudrajat³, Rika Harini³, Hafid Setiadi⁴

¹Program Doktor Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

²Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

³Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴Departemen Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia, Depok

*Korespondensi penulis: nurrokhmahrizqihandari@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Agriculture-based policies for rural development and food sufficiency lead to the welfare of farmers. However, the implementation of these policies often cannot address these issues. This study examines the impact of implementing agropolitan area and Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) policies on paddy field farmers in the Ciwidey Agricultural Area. A review of the literature on regulations related to these two policies was conducted to identify their application in the Ciwidey area. Furthermore, a phenomenological qualitative approach was carried out to observe rice field farmers as the object of these policies. Agropolitan policies can create capital flows in agricultural areas that open opportunities to diverse farmers' livelihood portfolios. This capital inflow would be followed by activities of primitive accumulation that changed paddy field land tenure. In a strategic location, this change will increase the risk of the paddy field's conversion to non-agriculture. The LP2B policy is used to control this transfer of function. Unfortunately, the policy puts farmers with small land at risk of being in the survival strategy because their livelihood portfolio is limited. Their cultivated rice fields have less economic value compared to horticultural commodities. Although the LP2B policy can generally control land use conversion, paddy field farmers retain their identity. The primitive accumulation that follows the capital inflow due to agropolitan policy raises the risk of LP2B farmers become vulnerable in land ownership, changed from land owners to agricultural laborers. In general, this impact keeps the welfare of farmers below expectations.

Keywords: farmer's pressure, policy dualism, livelihood strategy

ABSTRAK

Kebijakan berbasis pertanian untuk pembangunan pedesaan maupun penyediaan kebutuhan pangan penduduk bermuara pada kesejahteraan petani. Namun, proses penerapan kebijakan tersebut belum tentu menjawab permasalahan yang ada. Kajian ini bertujuan untuk melihat dampak dari proses penyelenggaraan kebijakan kawasan agropolitan dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada kawasan pertanian, dengan menjadikan petani sebagai objek kajian. Kajian pustaka dilakukan secara detail pada segala aturan yang terkait dua kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif fenomenologi dilakukan untuk mengamati petani sawah sebagai objek kebijakan tersebut. Kebijakan agropolitan mampu menciptakan aliran kapital pada wilayah pertanian dan membuka peluang terbentuknya keragaman portofolio penghidupan petani. Aliran kapital ini akan diikuti oleh aktivitas akumulasi primitif yang akan mengubah penguasaan lahan pertanian. Pada lokasi yang strategis, perubahan ini akan meningkatkan risiko alih fungsi lahan menjadi nonpertanian. Kebijakan LP2B digunakan untuk mengontrol alih fungsi ini. Sayangnya, kebijakan LP2B ini justru menjadikan petani dengan kepemilikan sempit berisiko untuk masuk dalam strategi *survival* karena keterbatasan portofolio mata

DOI: 10.14203/jki.v17i2.619

Naskah masuk: 30 Desember 2021

Revisi akhir: 16 Mei 2022

Naskah diterima: 1 Januari 2023

193



ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2022 National Research and Innovation Agency.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>).

pencahariannya akibat sawah yang diolah tidak bernilai ekonomi. Secara umum, kebijakan LP2B dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, namun tidak mencegah petani sawah kehilangan identitasnya. Mekanisme akumulasi primitif yang terjadi karena aliran kapital sebagai dampak kebijakan agropolitan menjadikan risiko petani sawah LP2B semakin rentan berubah dari petani pemilik dan pengelola menjadi hanya sebagai petani pengolah saja, bahkan dari petani pemilik menjadi buruh tani. Secara umum, dampak ini menjadikan kesejahteraan petani jauh dari harapan.

Kata kunci: tekanan petani, dualisme kebijakan, strategi penghidupan petani

PENDAHULUAN

Pada World Food Summit (WFS) di Roma, FAO (2006) menyatakan bahwa ketahanan pangan (*food security*) adalah hak untuk memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pangan dalam rangka menjalani hidup yang sehat dan aktif. Pada kesepakatan ini, dasar ketahanan pangan ditinjau dari sudut pandang distribusi pangan yang merata dengan membuka akses perdagangan pangan dunia. Sayangnya, kondisi ini sering kali menyebabkan adanya kenaikan harga pangan dunia, baik karena kelangkaan produksi, kenaikan biaya transportasi, maupun karena penimbunan pangan. Sepanjang periode waktu 1960 hingga saat ini, telah terjadi beberapa kenaikan harga pangan secara tajam. Sebagai contoh, peningkatan harga pangan terjadi setelah adanya kejadian pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan perang di negara pemasok komoditas pangan dan pupuk pada tahun 2022 (FAO, 2022; McDonald, 2017). Hal ini terjadi karena tidak terdistribusinya pangan dengan biaya murah. Kenaikan harga pangan ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan akses ketersediaan pangan pada penduduk miskin di sebuah negara. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi warganya. Kebijakan pangan sebuah negara menjadi jaminan bagi kestabilan kedaulatan negara (Headey & Fan, 2010).

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan di Indonesia menganut tiga konsep penting sistem pangan, meliputi (i) kedaulatan: negara dapat mengatur sistem pangannya sendiri; (ii) kemandirian: mampu memproduksi untuk menjamin pemenuhan pangan; serta (iii) ketahanan: ketersediaan pangan dapat digunakan untuk penduduk beraktivitas dan pemenuhan gizi. Jaminan pemenuhan ketiga komponen sistem pangan tersebut harus tercapai karena berpengaruh pada kestabilan bahkan kedaulatan negara. Dalam menjamin kapasitas produksi beras yang merupakan komoditas pangan pokok

penduduk Indonesia, lahan sawah sebagai tempat produksi beras harus dipertahankan keberadaannya dan nilai produktivitasnya.

Penerbitan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memastikan ketersediaan lahan pangan yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pangan. Secara ideologis, UU LP2B mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan pertanian yang diletakkan dalam kerangka kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Berkaitan dengan kebutuhan beras, Kementerian ATR/BPN melakukan perhitungan ulang Lahan Baku Sawah (LBS), menetapkannya pada tahun 2019, serta menjamin tersedianya *land banking* penyediaan pangan. Saat lahan sawah ditetapkan sebagai LBS, lahan tersebut tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan lain. Padi harus ditanam secara periodik walaupun dapat diselingi oleh tanaman lain dalam satu tahun penanamannya.¹

Regulasi pemerintah menjadi perangkat penting dalam memastikan ketersediaan lahan pertanian. Namun, tantangan terhadap konversi lahan pertanian pangan tetap ditemukan. Dari 8,1 juta hektare lahan sawah yang tersedia saat ini, diprediksi akan tersisa hanya 5,1 juta hektare di tahun 2045, dengan Provinsi Jawa Barat mengalami risiko konversi paling tinggi (Mulyani dkk., 2016). Selain itu, lahan sawah di Jawa mengalami pengurangan sebesar 60 ribu hektare tiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir (Daris dkk., 2017). Rendahnya luas kepemilikan lahan pertanian per petani disinyalir turut memberikan andil dalam laju konversi ini. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, sekitar 55,33% rumah tangga pertanian pengguna tanah merupakan rumah tangga petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.² Saat lahan petani terlalu kecil untuk memproduksi komoditas pangan, petani cenderung untuk mengubah komoditas pertaniannya ataupun mengubah jenis penggunaan lahannya menjadi lahan terbangun. Konversi lahan pertanian ini tentunya akan mempengaruhi keseimbangan ekologis

¹ Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. No. 686 tahun 2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional.

² www.st2013.bps.go.id

(Sumaryanto dkk., 2001; Verhoeven & Setter, 2010), iklim lokal (Komariah dkk., 2015), dan akan berdampak pada pasokan pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang menahan laju konversi lahan pertanian tidak bisa berjalan sendiri dan harus diletakkan sebagai perencanaan menyeluruh pembangunan pertanian di pedesaan.

Pembangunan pertanian di pedesaan merupakan sebuah pendekatan untuk meningkatkan kondisi perekonomian penduduk pedesaan berbasis kegiatan pertanian yang produktif. Friedmann (1985) mengajukan konsep agropolitan sebagai solusi pembangunan kawasan pedesaan yang berasosiasi dengan kegiatan pertanian di negara-negara berkembang. Konsep agropolitan merupakan strategi pembangunan yang direkayasa untuk mempercepat infiltrasi gaya pengaturan yang biasa ada di wilayah perkotaan dengan budaya pedesaan yang akan meningkatkan nilai produk pertanian dan menciptakan kesejahteraan petani dan kehidupan pedesaan. Internalisasi ini akan mendorong penduduk di pedesaan agar tetap produktif dan mengelola lahan pertaniannya, mengurangi laju migrasi, dan menguatkan keterikatan sosial pedesaan sehingga mampu membangun jaringan dan menciptakan pembangunan (Friedmann, 1985; Friedmann & Douglass, 1978; Prasetya dkk., 2014; Rosiadi dkk., 2022; Surya dkk., 2020). Konsep agropolitan inilah yang kemudian diadaptasi di Indonesia sejak tahun 2002 sebagai solusi pengembangan kawasan pedesaan.

Kawasan Agropolitan Ciwidey (selanjutnya disebut KAC) merupakan satu dari dua kawasan agropolitan di Kabupaten Bandung. KAC berada pada rentang ketinggian 700 - 2.000 mdpl dengan medan bergelombang hingga terjal. KAC terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, dan Kecamatan Ciwidey. Berdasarkan konsep Wilayah Tanah Usaha (WTU) (Sandy, 1977), area dengan kondisi morfologi seperti ini masuk dalam konsepsi WTU 2. Konsepsi WTU 2 merupakan

area lahan yang masih cocok untuk kegiatan budidaya yang didominasi oleh komoditas pertanian beriklim sedang, dengan pengusahaan sawah secara terbatas. Secara spesifik, Ciwidey merupakan kawasan pengembangan agroekosistem kebun sayur (Iskandar & Iskandar, 2011). Berdasarkan rencana pengembangannya sebagai kawasan agropolitan, wilayah KAC ditetapkan sebagai sentra komoditas beras organik, kelapa, sayur, mayur, buah-buahan, dan hewan ternak.³ Selain berbasis pada kegiatan pertanian komoditas unggulan, pengelolaan KAC ditopang oleh kegiatan pariwisata pertanian, baik dalam bentuk desa wisata, wisata berbasis edukasi pertanian, maupun wisata lainnya yang menjadikan lahan pertanian sebagai komoditas wisata.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan risiko konversi sawah paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung menetapkan Perda LP2B pada tahun 2019 dengan area pertanian pangan yang dimaksud adalah lahan sawah baku. Sebagai sebuah kawasan pengembangan pertanian terpadu, sebagian lahan pertanian di KAC masuk dalam kategori LP2B. Hal ini menjadikan lahan sawah pada KAC tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi lahan pertanian lain atau penggunaan tanah lainnya. Sayangnya, perhitungan luas sawah baku yang dilakukan Kementerian ATR/BPN di wilayah ini pada periode 2013 - 2019 menunjukkan pengurangan hingga 177 hektare per tahunnya.⁴

Kajian Agustina dan Artiningsih (2017) tentang dampak penetapan kawasan KAC terhadap kegiatan pertanian penduduk menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani karena penetapan kawasan agropolitan. Namun, peningkatan ekonomi ini terjadi hanya pada petani dengan komoditas hortikultura. Akibatnya, petani sawah akan cenderung mengubah komoditasnya menjadi komoditas hortikultura yang tentunya bertentangan dengan ketetapan LP2B sawah baku. Kondisi ini terjadi karena komoditas sayur relatif memiliki nilai

³ Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kawasan Agropolitan Ciwidey tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Bandung.

⁴ Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. No. 686 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional

ekonomi yang lebih tinggi daripada padi. Kebijakan agropolitan yang disandingkan dengan pengembangan agrowisata menyebabkan semakin terbukanya peluang investasi oleh pihak luar. Mekanisme ini akan membuka peluang adanya akumulasi primer pada lahan pertanian (Friedmann & McMichael, 1989; McMichael, 1997) yang mengubah pola kepemilikan lahan pertanian. Temuan tersebut, ditambah dengan adanya ketetapan LP2B, menjadikan petani sawah LP2B di KAC menghadapi tantangan tersendiri dalam mempertahankan keberlanjutan lahan sawahnya. Mereka harus secara periodik membudidayakan padi pada lahan sawahnya, sementara nilai produktivitasnya jauh lebih rendah daripada tanaman hortikultura, serta ditambah dengan risiko alih fungsi lahan untuk melayani sektor pariwisata.

Kemampuan petani dalam menghadapi tantangan lahan pertanian sawah ini tentunya beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh kemampuan petani mengelola aset pertaniannya. Scoones (1998, 2015) mengungkapkan bahwa pengelolaan aset, yang terdiri dari modal alam (tanah, air, pohon); modal fisik (saluran irigasi, peralatan, jalan); modal manusia (pendidikan, keterampilan, kesehatan); modal keuangan atau penggantinya (tabungan tunai, perhiasan, kambing dan sapi); dan modal sosial (jaringan, asosiasi) akan memengaruhi aktivitas dan strategi penghidupan. Pengelolaan kelima aset ini penting untuk ketahanan mata pencaharian dan strategi kelangsungan hidup rumah tangga. Penduduk dipercaya harus memiliki akses yang luas untuk mengelola asetnya sehingga dapat melakukan aktivitas strategi penghidupan. Strategi dilakukan dengan melakukan diversifikasi mata pencaharian (Niehof & Price, 2001). Diversifikasi dilakukan dengan membangun portofolio mata pencaharian keluarga petani dengan memperluas dukungan sosial untuk bertahan hidup dan meningkatkan standar hidup petani (Ellis, 1998) dan memperkuat kapasitas rumah tangga untuk bertahan dalam menghadapi tekanan yang mungkin terjadi (Niehof, 2004). Keberlanjutan ketahanan itu dapat dicapai dengan memastikan pendapatan penduduk dari kegiatan ketenagakerjaannya memiliki keterkaitan

terhadap aktivitas produktif yang secara ekologi mengalami keberlanjutan dan memiliki nilai ekonomi, serta memastikan adanya akses terhadap sumber daya dan manajemen aset untuk melakukan koping saat terjadi tekanan pada rumah tangga.

Fokus kajian ini adalah untuk mendudukkan kembali dua kebijakan yang berjalan di wilayah pertanian Ciwidey, yaitu kebijakan kawasan agropolitan dan penetapan LP2B, serta memahami bagaimana petani pangan bereaksi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Interaksi dua kebijakan yang berbasis pertanian dapat dirasakan berbeda pada kelompok petani yang berbeda di sebuah wilayah pertanian. Oleh karena itu, kajian ini meninjau bagaimana petani sawah di KAC melakukan strategi penghidupan karena adanya keharusan untuk mempertahankan lahan sawahnya di tengah tekanan ekonomi lahan. Tekanan ekonomi lahan tersebut dibedakan berdasarkan (i) tekanan ekonomi yang berasal dari keberadaan komoditas lain yang melahirkan peluang konversi komoditas padi menjadi lahan hortikultura; serta (ii) tekanan ekonomi yang berasal dari adanya kegiatan pariwisata yang membuka peluang konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Ragam strategi tersebut terlihat dari kondisi portofolio mata pencaharian rumah tangga petani sawah yang dipengaruhi oleh kondisi tekanan ekonomi lahan mereka.

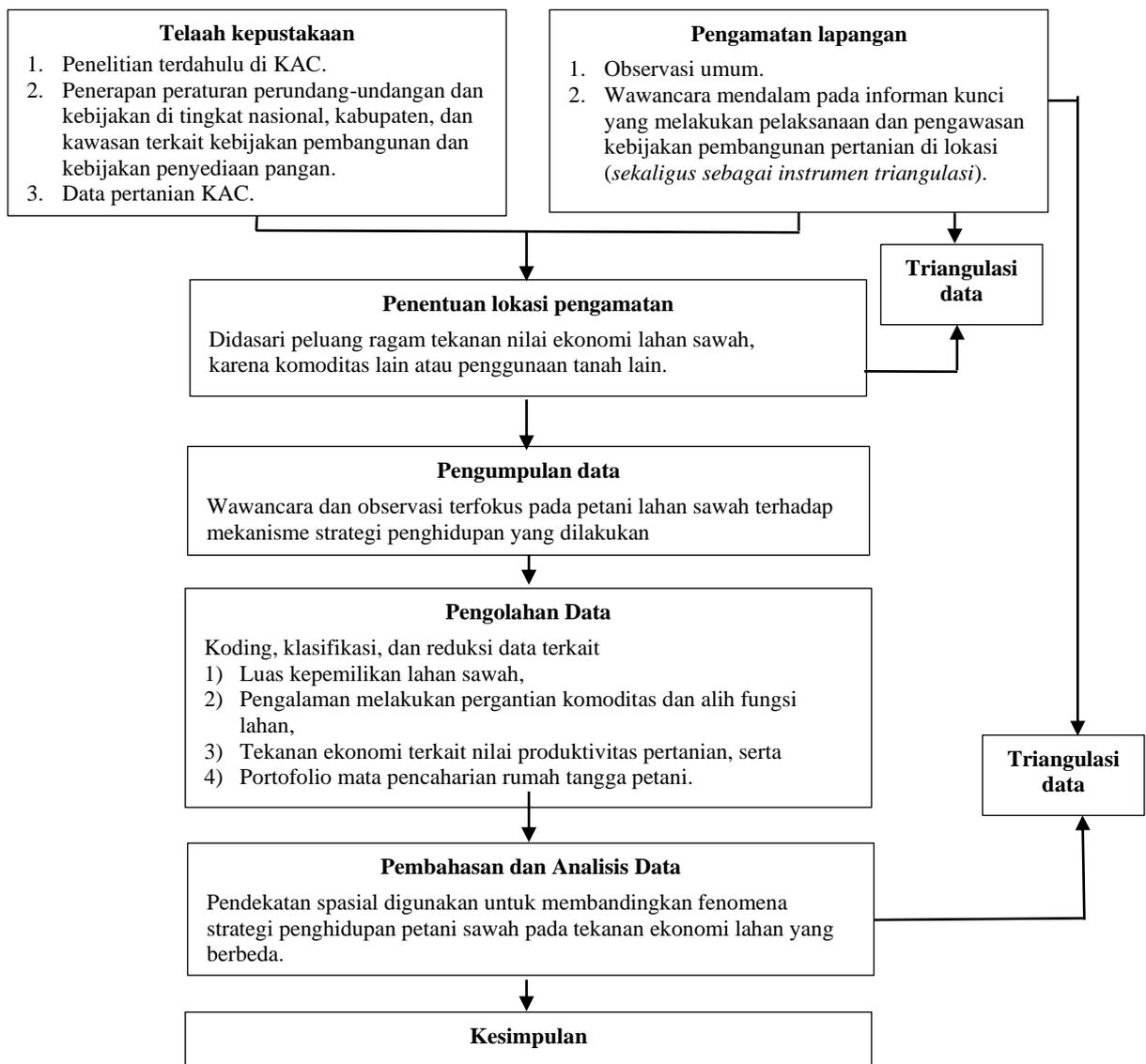
Tulisan ini diharapkan dapat menggambarkan proses yang terjadi pada sebuah pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan regional pada kehidupan lokal. Pengamatan pada objek yang terkena dampak kebijakan mampu membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kebijakan dan mengevaluasi keberhasilan proses penerapan kebijakan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadikan masukan pada proses penyelenggaraan kebijakan yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibangun dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, yaitu didasari pengalaman

subjektif yang dialami petani sawah di lokasi penelitian. Untuk dapat memahami peluang keragaman fenomena, peneliti melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang

berlaku pada daerah penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan pengujian dampak dualisme kebijakan pertanian berdasarkan reaksi petani dalam beradaptasi pada dua kebijakan tersebut.



Gambar 1. Tahapan Penelitian Strategi Penghidupan Rumah Tangga Petani

Kajian pustaka dilakukan pada kumpulan aturan yang melingkupi kebijakan pembangunan wilayah pedesaan yang berbasis kegiatan pertanian. Kajian ini berfokus pada aturan perundangan yang berkaitan dengan kebijakan mempertahankan lahan pertanian yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan, dari tingkat pusat hingga daerah, melalui kebijakan LP2B dan ketetapan LBS. Dalam menguji dampak penyelenggaraan kebijakan yang diterapkan pada tingkat daerah, pendekatan

fenomenologi dilakukan pada kelompok petani di KAC. Kajian pustaka juga dilakukan pada data statistik kependudukan dan pertanian, serta peta yang menggambarkan kondisi petani di KAC secara umum. Selanjutnya, wawancara terbimbing dilaksanakan pada beberapa informan kunci yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan di daerah penelitian. Berdasarkan wawancara tersebut, beberapa desa ditetapkan sebagai lokasi pengamatan atas dasar kondisi tekanan ekonomi lahan sawah. Kondisi tekanan

ekonomi lahan ini merupakan bagian dari dampak pelaksanaan kebijakan. Observasi juga dilakukan pada lokasi terpilih untuk mendapatkan petani kunci yang dijadikan informan untuk dapat memahami fenomena strategi penghidupannya. Beberapa pertanyaan mendasar terkait (i) luas kepemilikan lahan sawah; (ii) pengalaman melakukan pergantian komoditas dan alih fungsi lahan; (iii) tekanan ekonomi terkait nilai produktivitas pertanian, serta (iv) portofolio mata pencaharian rumah tangga petani ditetapkan untuk mengidentifikasi tekanan lahan pertanian sawah dan bentuk strategi penghidupan yang dilakukan oleh rumah tangga petani. Setelah wawancara dilakukan, proses pengodean, klasifikasi data, dan reduksi data dilakukan per kelompok lokasi pengamatan. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan kondisi petani yang memiliki luas lahan sawah yang sama terhadap strategi penghidupannya di lokasi dengan tekanan ekonomi yang berbeda. Gambar 1 menyajikan tahapan penelitian dalam kajian ini.

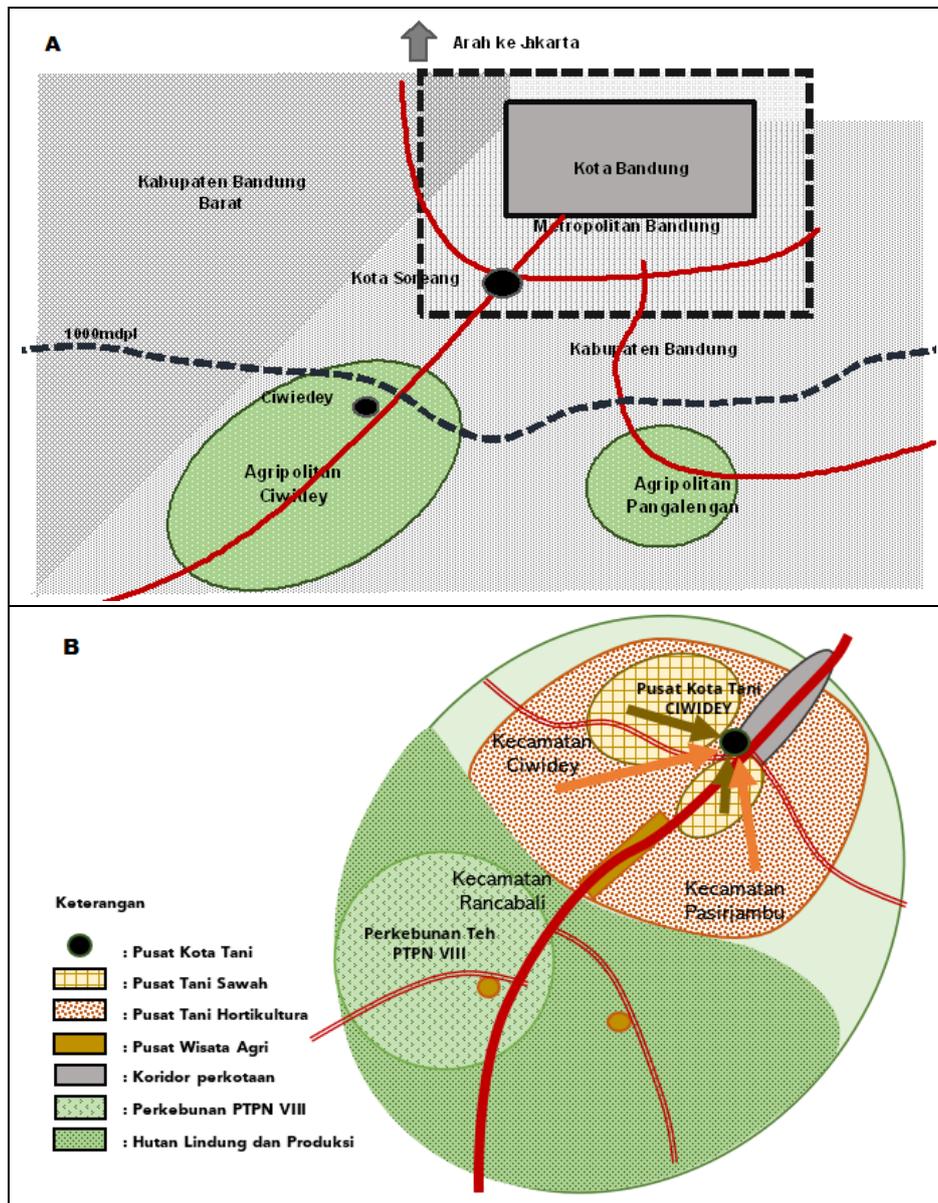
RAGAM KEBIJAKAN PERTANIAN

Pelaksanaan Ketetapan Kawasan Agropolitan Ciwidey

Pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan didukung dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterikatan desa dan kota (Kasikoen dkk., 2020; Surya dkk., 2020). KAC ditetapkan pada tahun 2007 dan berdasarkan Masterplan Agropolitan Ciwidey pengembangannya disinergikan dengan konsep agrowisata. Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung, pengembangan KAC disinergikan dengan konsep agrowisata, yang berada pada delapan desa, meliputi Alamendah, Ciwidey, Sukawening, Rawabogo, Panundaan, Lebakmuncang, Nengkelan, dan Pasirjambu.

Dilihat dari sejarahnya, KAC merupakan bagian dari lahan pertanian subur di dataran tinggi Bandung yang memasok berbagai komoditas penting pertanian. Lahan ini dimanfaatkan untuk komoditas teh yang diekspor pada masa kolonial melalui perkebunan teh Rancabali yang menjadi awal terjadinya kapitalisasi pertanian di Jawa Barat (Boomgard, 2004). Selanjutnya, lahan ini juga dimanfaatkan untuk program pancausaha pertanian oleh pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari proses revolusi hijau pada awal 1970-an (Hidayat dkk., 2020; Svensson, 1991) untuk memastikan pasokan ekspor seperti teh, dan tembakau, serta komoditas buah dan sayur dengan sistem tegalan (Iskandar & Iskandar, 2021). Pada bagian daerah yang landai, KAC ditanami oleh padi sawah karena pasokan air yang stabil (Abramson, 2020; Verhoeven & Setter, 2010).



Gambar 2. A. Skema Lokasi Regional Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC) dan B. Pengembangan Kawasan Agropolitan Ciwidey Kabupaten Bandung

Sumber: Disarikan dari Masterplan Agropolitan Ciwidey 2007; Metropolitan Bandung Raya, 2013; RTRW Kabupaten Bandung 2016 - 2021; dan RDTR Kota Ciwidey 2015 - 2025

Posisi KAC secara regional berinteraksi langsung dengan Soreang yang merupakan Kabupaten Bandung. Soreang dan simpul penting dalam kawasan Metropolitan Bandung Raya langsung terhubung dengan jalan tol menuju DKI Jakarta (Gambar 2). Menurut Nurman dan Lund (2016), KAC terhubung langsung dengan Kota Bandung melalui jaringan rel kereta pada masa kolonial dan revolusi hijau. Oleh karena itu, secara kedudukan regional, jaringan ordo kota tani KAC terbangun dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetya

dkk. (2014) yang mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan meningkatkan nilai tambah dan sumber daya. Bentuk integrasi tersebut dibentuk dengan adanya sistem jaringan antarkota yang mampu mendukung kegiatan distribusi pemasaran hasil pertanian. Kunci sukses pengembangan kawasan ini adalah kegiatan agribisnis yang didukung dengan kelengkapan fasilitas serta sarana prasarana perkotaan dan diarahkan pada

penyelenggaraan fungsi kota yang utama, yaitu pengadaan tempat tinggal, tempat bekerja, transportasi, dan rekreasi (Kasikoen dkk., 2020).

Prasetya dkk. (2014) mengungkapkan kembali bahwa agropolitan merupakan kawasan pedesaan, hutan, dan pertanian dengan kesatuan sistem yang saling terintegrasi dan terkoneksi melalui sistem jejaring. KAC pun memiliki dominasi penggunaan tanah tidak terbangun. Berdasarkan penggunaan tanahnya, luasan area terbangun di KAC kurang dari 10% dengan proporsi penggunaan tanah terbesar adalah kawasan hutan (35%) dan perkebunan (34%) di bagian selatan KAC. Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani BKPH Ciwidey berupa hutan lindung dan hutan produksi dengan empat Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Patuha, Dewata, Gambung, dan Cibodas. Sementara itu, kawasan perkebunan dikuasai PT Perkebunan Negara VIII Indonesia dengan dominasi komoditas teh. Penggunaan tanah sisanya sebagai lahan pertanian yang bisa dikelola oleh penduduk lokal berupa sawah (9,26%), tegalan (7,8%), dan kebun campuran (4,3%).

Dua perusahaan negara tersebut memegang peranan penting sebagai penggerak kegiatan wisata alam di kawasan ini. Kawah putih yang berada pada kawasan hutan, serta kebun teh dan Situ Patenggang yang dikelola di kawasan perkebunan merupakan obyek wisata utama di KAC. Interaksi kegiatan pertanian di KAC kuat terhadap kegiatan agroforestri dan agrowisata, memicu hadirnya kegiatan agroindustri (Budiman & Kurniasari, 2016). Namun, interaksi pada kegiatan agribisnis tidak tinggi. Lebih lanjut, kebijakan agropolitan juga mengubah wajah pertanian di KAC. Kegiatan agroforestri dan agrowisata menciptakan bangkitan kegiatan ekonomi baru di kawasan ini.

Tidak hanya memiliki kesempatan untuk bergabung di sektor nonpertanian, penduduk di area ini juga melakukan komodifikasi pada lahan pertaniannya. Kawasan yang dikelola oleh penduduk lokal banyak dikembangkan sebagai desa wisata. Berkembang pada desa-desa di pinggir jalan utama, kebun hortikultura yang dengan komoditas sayur diubah menjadi stroberi

yang kemudian diperuntukkan sebagai tempat wisata petik stroberi. Tidak hanya perubahan komoditas pertanian, perubahan penggunaan tanah juga terjadi. Pemilik lahan pertanian banyak mendirikan fasilitas penginapan dan rumah makan yang menawarkan atraksi wisata petik stroberi di tanah pekarangannya. Nilai komoditas stroberi tidak hanya mengubah jenis komoditas yang ditanam, juga memberikan kesempatan kerja di sektor wisata pertanian. Selain itu, komoditas stroberi memberikan peluang berkembangnya kegiatan agroindustri. Pada saat kelebihan panen stroberi, penduduk mengubahnya menjadi produk turunan stroberi yang dipasarkan sebagai produk oleh-oleh. Fenomena penanaman komoditas spesifik karena kebutuhan pasar wisata menunjukkan adanya interaksi kapital dengan pihak luar. Interaksi kapital ini akan menciptakan 'gangguan' hubungan relasi produksi pertanian, yang tentunya akan memberikan variasi bentuk interaksi sosial petani (Gebru dkk., 2021).

Pelaksanaan Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

UU LP2B menjamin tersedianya *land banking* dalam rangka penyediaan pangan. Oleh karena itu, tanah pertanian yang masuk dalam kategori LP2B tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan lain, kecuali lahan tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum atau mengalami bencana sehingga tidak lagi dapat berproduksi. Terkait isu penyediaan pangan, lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B harus selalu dalam kondisi produktif, dilengkapi dengan sistem pengairan yang baik, serta terintegrasi dengan jaringan jalan untuk memudahkan distribusi pemasarannya.

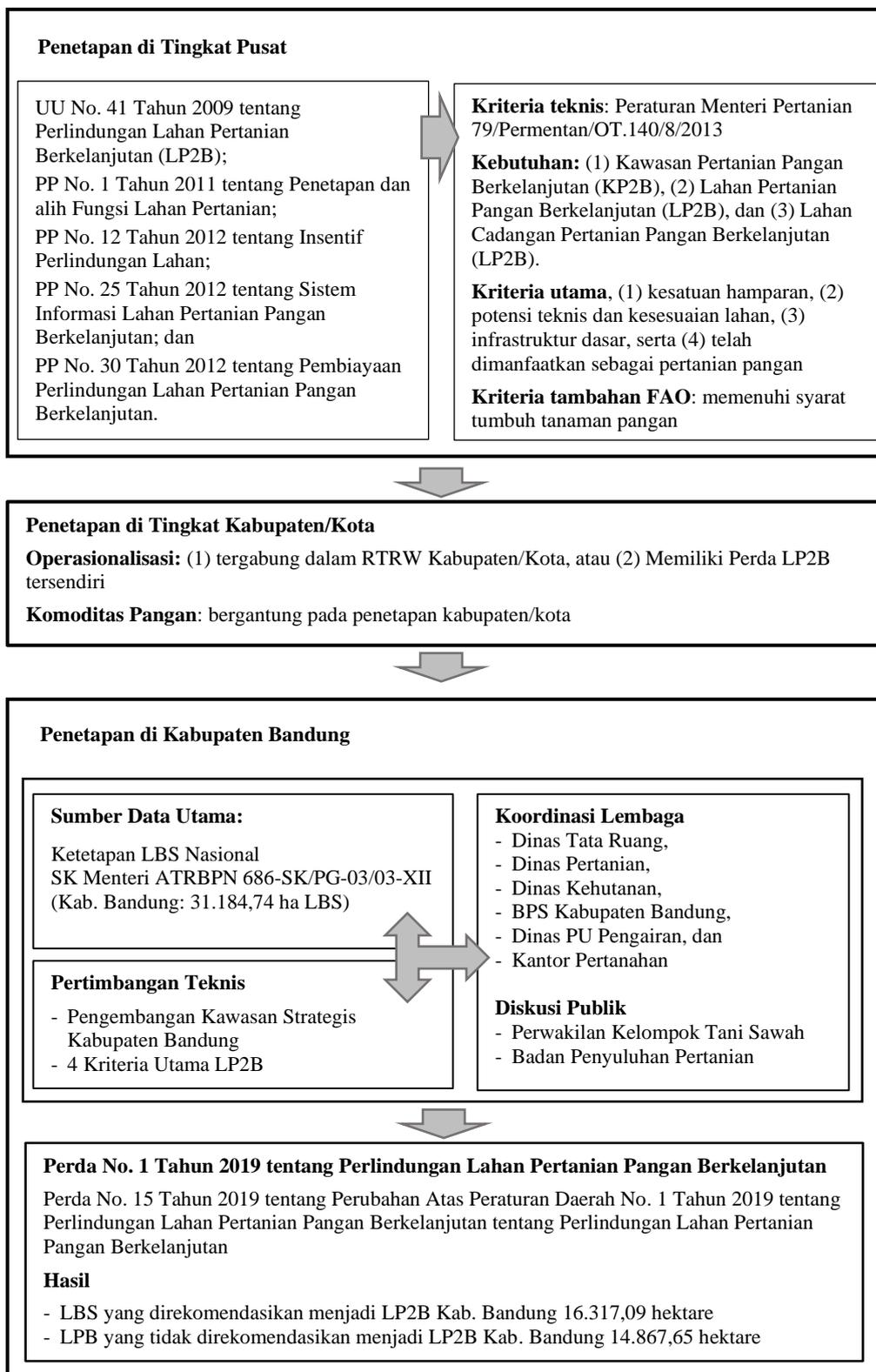
Berdasarkan UU 41 Tahun 2009, penetapan LP2B diserahkan kepada kabupaten/kota dan diatur mekanismenya pada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat yang pengaturannya disebutkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota. Pada tahun 2020, terdapat 30 provinsi yang mengeluarkan perda LP2B di tingkat kabupaten/kota-nya. Berdasarkan hasil rekapitulasi data tahun 2021 yang tertera pada laman Sistem Informasi

Rekomendasi dan Pemantauan Penetapan LP2B (SIKOMANTAP) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian,⁵ dari 541 kabupaten/kota, hanya 48,22% (253 kabupaten/kota) yang telah menetapkan LP2B dalam RTRW mereka. Cara penetapannya bergantung pada kemampuan daerah, dapat berdasarkan kajian akademis dengan pendekatan daya dukung lahan pertanian (Ragil, 2017; Taufik dkk., 2017) atau menggunakan sumber data lainnya. Penetapan LP2B di Kabupaten Bandung sendiri ditetapkan melalui Perda Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2019, dengan beras sebagai komoditas pangannya. Kabupaten Bandung memanfaatkan keputusan Kementerian ATR/BPN terkait Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional Tahun 2019. Berdasarkan penetapan LBS di tingkat pusat, dilakukan konfirmasi pada tingkat kabupaten yang didasari oleh perencanaan pengembangan kawasan. Dalam penetapannya, Kabupaten Bandung melibatkan Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BPS Kabupaten/Kota, Dinas PU Pengairan, Bappeda, dan Kantor Pertanahan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Proses penetapan LP2B Kabupaten Bandung diilustrasikan pada Gambar 3.

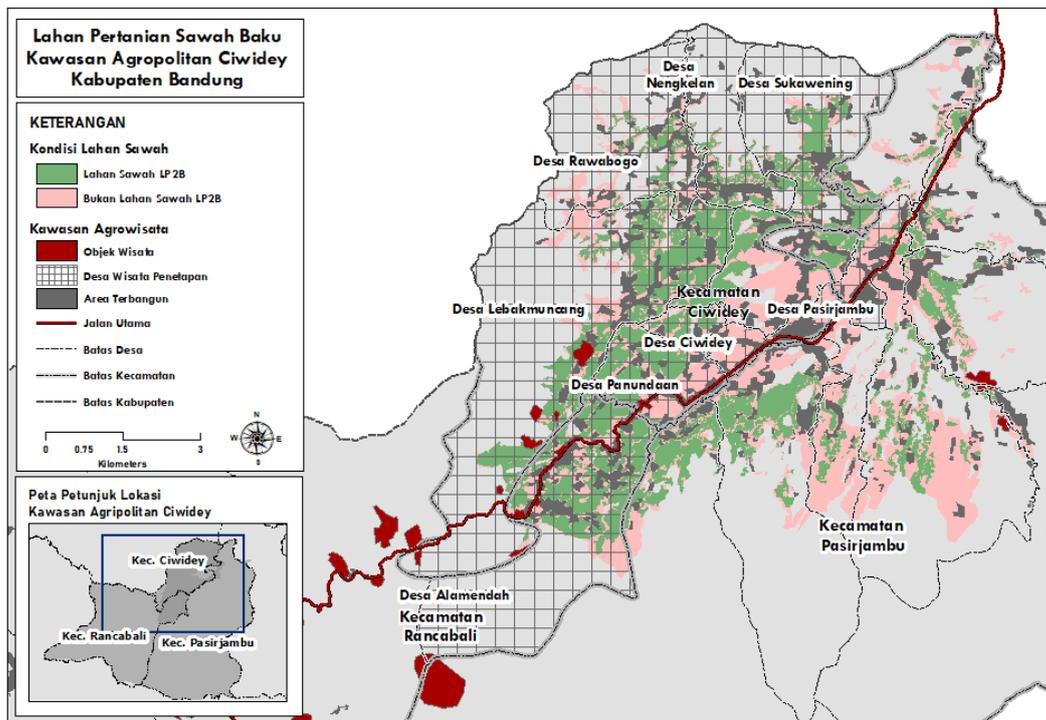
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2019, dari 31.184,74 hektare LBS Nasional di Kabupaten Bandung, hanya 52,32% (16.317,09 hektare) yang ditetapkan sebagai LP2B. Pertimbangan penetapan kawasan tersebut didasari oleh

perencanaan pengembangan Kawasan serta mekanisme penentuan LP2B yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Mekanisme tersebut berupa (i) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; (ii) memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; (iii) didukung infrastruktur dasar; dan (iv) telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Rincian LBS yang telah ditetapkan di Kabupaten Bandung dapat dicermati pada Gambar 4 dan Tabel 1. Luasan LBS di KAC sebesar 2.848,13 hektare atau hanya sebesar 7,13% luas wilayah KAC, dan terpusat pada Kecamatan Ciwidey yaitu sebesar 1.409,14 hektare atau sekitar 49,48% dari keseluruhan LBS di KAC. Walaupun hanya memiliki proporsi lahan sawah yang kecil, keberadaan sawah di kawasan agropolitan sangat penting. Oleh karena itu, lebih dari separuhnya (68%) ditetapkan sebagai kawasan LP2B, di atas rata-rata kabupaten (52%), dan tidak boleh dikonversikan menjadi komoditas nonpangan pokok (Tabel 1). Adanya kepentingan politis terhadap kebijakan LP2B memastikan lahan pangan ini tidak akan berubah fungsi dan yang dimiliki mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Namun demikian, kecilnya proporsi lahan sawah di KAC terhadap keseluruhan lahan sawah di Kabupaten Bandung (hanya 9,13%) mengindikasikan bahwa lahan pangan ini hanya diperuntukkan produksinya untuk penduduk lokal KAC.

⁵ <http://sikomantap.psp.pertanian.go.id/monitoring/lp2b/city>



Gambar 3. Mekanisme Penetapan LP2B di Kabupaten Bandung



Gambar 4. Peta Sebaran Lahan Pertanian di Utara Kawasan Agropolitan Ciwidey

Sumber: Masterplan Agropolitan Ciwidey 2007 dan BIG, 2009

Tabel 1. Distribusi Lahan Sawah berdasarkan Status LP2B di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019

Wilayah	Luas Area (hektare)	Luas Lahan Sawah (hektare)			Rasio (%)		
		Penetapan LP2B	Bukan Penetapan LP2B	Total	Lahan Sawah Terhadap Lahan Sawah Kabupaten	Lahan Sawah Terhadap Wilayah	LP2B Terhadap Sawah di wilayah
Kecamatan Ciwidey	4.771,08	936,58	472,56	1.409,14	4,52	29,53	66,46
Kecamatan Rancabali	14.787,85	386,12	112,81	498,93	1,60	3,37	77,39
Kecamatan Pasirjambu	20.402,89	626,66	313,40	940,06	3,01	4,61	66,66
Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC)	39.961,81	1.949,36	898,77	2.848,13	9,13	7,13	68,44
Kabupaten Bandung	175.723,91	16.317,09	14.867,65	31.184,74		17,75	52,32

Sumber: Penetapan Lahan Baku Sawah ATR BPN tahun 2019 dan Perda LP2B Kabupaten Bandung tahun 2020

DAMPAK DUALISME KEBIJAKAN PERTANIAN

Tekanan Petani Sawah di Kawasan Agropolitan Ciwidey

Dua kebijakan pembangunan pertanian di KAC tentunya berdampak pada kehidupan penduduk lokal, terutama petani. Kebijakan agropolitan

yang bersinergi dengan agrowisata akan menciptakan masuknya aliran modal dari luar wilayah ke KAC. Aliran modal ini akan memutar kegiatan perekonomian di KAC dan menciptakan diversifikasi kehidupan penduduk setempat. Penduduk yang tadinya hanya didominasi oleh kegiatan pertanian menjadi beragam, baik yang masih berkaitan dengan kegiatan pertanian maupun yang lahir

dari interaksi agraria yang terjadi. Pada kelompok petani yang bergerak di bidang agribisnis, penetapan kawasan agropolitan mampu meningkatkan nilai ekonomi lahan pertanian (Budiman & Kurniasari, 2016; Syarifudin & Ishak, 2020). Di sisi lain, kebijakan LP2B yang merupakan bagian dari kebijakan kemandirian pangan dan kebijakan tata ruang berusaha memastikan keberadaan lahan sawah bagi petani dan menahan laju konversi tanah-tanah pertanian yang terus terjadi secara masif di berbagai daerah (Harini dkk., 2019; Purbiyanti dkk., 2017). Mayoritas kepemilikan lahan pertanian kurang dari 1 hektare berisiko menjadi lahan pertanian yang tidak menguntungkan secara ekonomi dan lama-kelamaan akan menciptakan alih fungsi lahan nonpertanian (Bernstein, 2010).

Kajian terhadap dampak penerapan kebijakan agropolitan di Ciwidey menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada kondisi fisik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi kehidupan petani di KAC (Agustina & Artiningsih, 2017). Perubahan kondisi fisik berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung aktivitas pertanian dan agribisnis, sedangkan perubahan sosial berfokus pada pembangunan kelembagaan usaha seperti koperasi usaha tani dan kelompok tani yang merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Untuk kondisi ekonomi, walaupun petani umumnya mengalami perbaikan ekonomi karena peningkatan produktivitas dan nilai lahan pertanian, petani sawah cenderung mengalami penurunan produksi padi sehingga mereka menggantinya dengan komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomi lebih baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa, walaupun berada pada wilayah pertanian unggulan, petani yang berada pada sawah LP2B mendapatkan tekanan dalam

kehidupan pertanian karena harus tetap mempertahankan padi sebagai komoditas utama pertaniannya.

Kombinasi dampak fisik, ekonomi, dan sosial terutama pada petani sawah terjadi pada ragam wilayah pertanian yang berbeda di KAC, bergantung pada kondisi tekanan ekonomi lahannya. Keragaman ini terjadi karena, walaupun terdistribusi memusat di utara KAC (Gambar 4), lahan sawah terdistribusi secara spasial pada kondisi tekanan berbeda. Desa Ciwidey dan Pasirjambu –yang berada pada jalan utama KAC dan merupakan pusat kota tani– relatif landai dengan rata-rata kepemilikan bentangan sawah pada kisaran 0,5 - 0,8 hektare per petani. Walaupun relatif berada di kawasan perkotaan dan merupakan wilayah dengan tekanan urbanisasi tinggi, sebagian besar area ini masih mendukung kegiatan pertanian sawah karena masih berada pada jaringan irigasi teknis. Selama masih memiliki jaringan irigasi teknis, tekanan terhadap keberadaan sawah akan relatif rendah, terutama pada wilayah yang relatif jauh dari jaringan jalan utama, seperti di Desa Sukawening. Namun, tekanan bukan hanya berasal dari kondisi aksesibilitas yang berkaitan dengan keberadaan jalan utama. Semakin jauh dari jalan utama, semakin bergelombang kondisi morfologinya. Hal ini menyebabkan luasan lahan pertanian semakin sempit dan terpecah sehingga kegiatan pengusahaan sawah lebih susah pada area yang tidak dialiri saluran irigasi utama. Nilai ekonomi lahan sawah relatif rendah karena varian padi lokal yang biasa digunakan di KAC membutuhkan waktu enam bulan untuk berproduksi dan pengaruh iklim yang sejuk. Semakin sulit pengusahaan sawah, semakin tinggi tekanan lahan untuk ditanami komoditas lain.

Tabel 2. Kondisi Tekanan Ekonomi Lahan Sawah LP2B di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019

Desa	Kondisi Penggunaan Tanah	Kondisi Status Sawah LP2B	Kondisi Bentangan dan Rerata Luas Penguasaan	Kondisi Saluran irigasi	Aksesibilitas	Aliran Kapital dari Luar	Tekanan Ekonomi Lahan Sawah
Sukawening	>70% sawah >10% permukiman <30% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Bentangan 0,5 – 0,8 hektare/petani	Irigasi teknis	Tidak berada di jalur pariwisata utama	Moderat (kegiatan agrobisnis)	Rendah
Rawabogo dan Nengkelan	<40% sawah 5-10 % permukiman >70% kebun-talun	40%-70% sawah LP2B	Parsial < 0,5 hektare/petani	Irigasi teknis pada daerah landai	Tidak berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata aktif	Rendah (kegiatan agrowisata)	Tinggi karena lahan sawah sempit dan dominasi kebun-talun
Lebakmuncang	<40% sawah <5 % permukiman >70% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Bentangan < 0,5 hektare/petani	Irigasi teknis pada daerah landai	Tidak berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata aktif	Moderat (kegiatan agrowisata, agrobisnis, agroforestri)	Area Landai: moderat karena lahan sawah terpecah, pada area landai saja Area bergelombang: tekanan tinggi karena berbatasan langsung dengan kebun kopi dan komoditas tahunan
Ciwidey dan Pasirjambu	>70% sawah >10% permukiman <30% kebun-talun	40%-70% sawah LP2B	Bentangan 0,5 – 0,8 hektare/petani	Irigasi teknis	Pusat kota tani Berada di jalur pariwisata utama	Tinggi (kegiatan agrobisnis)	Moderat karena kepemilikan lahan sawah luas
Alamendah	<40% sawah >10% permukiman >30-70% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Parsial < 0,5 hektare/petani	Irigasi lokal	Berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata	Tinggi (kegiatan agrowisata agroforestri)	Tinggi karena bersilangan dengan kebun hortikultura dan stroberi

Sumber: Olah data peneliti

Kebijakan LP2B juga dilengkapi dengan seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban petani dalam mempertahankan lahan mereka untuk berproduksi. Pada bentangan LP2B, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan komoditas lahan pangan tidak berubah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan jaminan terhadap akses sarana produksi (saprodi) yang kontinu, akses terhadap penelitian pertanian, jaringan pemasaran, kesempatan pembuatan sertifikat tanah, dan insentif pajak. Namun, ada perbedaan perlakuan pada kelompok tani sawah dan hortikultura. Hal ini disebabkan adanya prioritas pertanian di KAC berupa hortikultura dan perkebunan, serta rendahnya pengaruh pertanian sawah yang hanya memasok konsumsi lokal. Penelitian sebelumnya di KAC menunjukkan tidak berjalannya konsep kelembagaan agropolitan yang seimbang antarkelompok petani pada wilayah ini (Agustina & Artiningsih, 2017). Petani tanaman hortikultura memiliki dukungan yang lebih baik melalui jaminan pasokan pupuk dan jaringan pemasaran, sementara petani sawah yang memproduksi tanaman pangan tidak mendapatkan pasokan pupuk dan bibit yang baik. Adanya ketidakseimbangan pelayanan antarkelompok tani menyebabkan petani sawah cenderung mengubah tanah sawahnya menjadi tanaman sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang lebih baik (Budiman & Kurniasari, 2016).

Strategi Penghidupan Berkelanjutan sebagai Respons terhadap Tekanan Pertanian

Analisis penghidupan berkelanjutan berkaitan dengan dampak kebijakan besar, sejarah, dinamika sosial, dinamika politik, dinamika ekonomi, serta keadaan ekologi pertanian terhadap lingkungan (Scoones, 1998). Sumber penghidupan ini kemudian dihubungkan dengan kelembagaan atau suatu organisasi yang menerapkan berbagai strategi bertahan hidup terutama di area pedesaan, misalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, diversifikasi mata pencaharian, serta migrasi (Ellis, 1998).

Berdasarkan pendataan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Ciwidey, terdapat 10.263 rumah tangga petani pada tahun 2019, terdiri dari 5.190 petani hortikultura (51%), 1.023 petani perkebunan (10%), dan 4.050 petani tanaman pangan (39%). Total luas tanah yang diusahakan hampir 4.000 hektare dengan pengusahaan tanah rata-rata per petani adalah sekitar 0,39 hektare. Luas wilayah perkebunan tergolong paling rendah (kurang dari 800 hektare atau 19,65%), tetapi rata-rata luasan tanah yang diusahakan oleh petani perkebunan mencapai 0,76 hektare per petani atau lebih dari dua kali lipat luasan tanah para petani hortikultura dan tanaman pangan (Tabel 3).

Tabel 3. Rata-rata Luas Pengusahaan Tanah Pertanian

Kategorisasi Petani	Jumlah Petani		Pengusahaan Tanah		Rata-Rata Pengusahaan Tanah (Hektare)
	Absolut (jiwa)	%	Absolut (hektare)	%	
Hortikultura	5.190	50,57	1.875,96	47,30	0,36
Perkebunan	1.023	9,97	779,3	19,65	0,76
Tanaman pangan	4.050	39,46	1.310,51	33,05	0,32
Jumlah	10.263	100	3.965,77	100	0,39

Sumber: Hasil pendataan petani oleh BPP Ciwidey tahun 2019

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, petani yang bekerja di lahan sawah mengubah lahan sawahnya dari komoditas padi menjadi sayur yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jika hanya menghitung nilai ekonomi, hal ini tentu menguntungkan. Namun jika mempertimbangkan kebutuhan politis pangan,

maka terjadi ancaman bagi produksi beras secara lokal. Ancaman disintegrasi komunitas pun dapat terjadi, sistem pertanian. Sistem pertanian sawah mengutamakan sistem pertanian komunal yang dicerminkan pada pengaturan irigasi dan kerja sama dalam melakukan kegiatan panen.

Banyaknya kegiatan pengolahan lahan pertanian di lahan pertanian selama menunggu masa panen mampu menguatkan sistem komunal pertanian yang ada. Berbeda dengan sistem pertanian sayuran, petani memiliki banyak pilihan dalam kegiatan pertanian, terutama pada pilihan media tanam dan komoditas. Setiap komoditas yang dipilih petani pemilik lahan akan menciptakan keputusan individual yang menuntun pada perubahan sistem pertanian menjadi lebih bersifat individual dan bisnis (Syarifudin & Ishak, 2020). Pemilik lahan pertanian akan menggunakan saprodi yang beragam, termasuk tenaga kerjanya (Kasikoen dkk., 2020). Pada pertanian hortikultura, sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap yang biasa bekerja di sistem lahan sawah akan cenderung hilang dan berubah menjadi buruh harian.

Keberadaan kebijakan LP2B yang mengontrol perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah mungkin menjadi jawaban atas ancaman ini. Petani yang sawahnya berada pada lahan pertanian LP2B akan “dipaksa” menanam komoditas padi di lahan pertaniannya. Petani diperbolehkan menanam komoditas lain di lahan sawahnya, selama dalam satu tahun tetap memproduksi beras. Berdasarkan paksaan ini, sebagian besar rumah tangga petani sawah melakukan penganekaragaman kegiatan untuk pemenuhan kehidupannya, bergantung pada kondisi dominan pertanian mereka. Menurut Chambers dan Conway (1992), kombinasi kegiatan rumah tangga dapat dilihat sebagai diversifikasi mata pencaharian dalam portofolio penghidupan

rumah tangga petani sawah. Pada kondisi inilah, strategi konsolidasi banyak dilakukan oleh petani sawah.

Strategi diversifikasi penghidupan terjadi karena berbagai alasan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan. Secara ekonomi, nilai lahan pertanian sawah jauh lebih rendah daripada lahan pertanian sayur. Oleh karena itu, petani di wilayah ini melakukan strategi dalam mengelola tanah pertaniannya, baik dengan melakukan kegiatan pengguliran tanam maupun dengan memiliki lahan pertanian lain selain sawah yang difungsikan menjadi tanaman hortikultura. Petani sawah pada Kecamatan Ciwidey masih menganggap bahwa kepemilikan sawah menjadi simbol kehidupan petani. Mereka menyatakan bahwa sawah digunakan sebagai penyedia pangan utama dan komoditas lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka, seperti yang diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan petani di kawasan LP2B berikut ini:

“Kalau ngga punya sawah bukan orang kampung, jadi pasti itu orang kampung kalau pagi ke sawah. Kan berasnya buat makan, yang penting ada beras. Bisa makan kenyang. Tidur tenang. Nah nanti kalau sudah panen tuh, nah dibagi-bagi (lahan), satu untuk bibit, yang lain untuk tanem labu dan cabe. W “(Petani 1, 35 tahun, Desa Sukawening)

“... kalau di sawah mah padi. Nah kalau di atasnya masih tanah bapak juga, nah itu buat sayur, ya kobis, ya seledri, bawang daun”. (Petani 2, 47 tahun, Desa Pasirbogo)

Tabel 4. Bentuk Portofolio Penghidupan di Tengah Tekanan Ekonomi Lahan Sawah LP2B di Kawasan Agropolitan Ciwidey (KAC), 2019

Desa	Kondisi Penggunaan Tanah	Kondisi Status Sawah LP2B	Aksesibilitas	Tekanan Ekonomi Lahan Sawah	Portofolio Penghidupan
Sukawening	>70% sawah >10% permukiman <30% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Tidak berada di jalur pariwisata utama	Rendah	Petani sawah melakukan tumpang sari atau memanfaatkan lahan pekarangan untuk penanaman komoditas palawija dan hortikultura terbatas Kombinasi nonpertanian pada area dengan akses baik
Rawabogo dan Nengkelan	<40% sawah 5-10 % permukiman >70% kebun-talun	40%-70% sawah LP2B	Tidak berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata aktif	Tinggi karena lahan sawah sempit dan dominasi kebun-talun	Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah, tetapi luasannya relatif sempit Petani mengombinasikan dengan kegiatan hortikultura terbatas atau membangun rumah jamur. Sebagian besar mengombinasikannya dengan kebun tanaman sepanjang tahun Kombinasi nonpertanian terbatas, biasanya paling tidak ada anggota keluarga yang melakukan migrasi
Lebakmuncang	<40% sawah <5 % permukiman >70% kebun-talun	>70% sawah LP2B	Tidak berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata aktif	Area Landai: moderat karena lahan sawah terpecah, pada area landai saja Area bergelombang: tekanan tinggi karena berbatasan langsung dengan kebun kopi dan komoditas tahunan	Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah, luasannya sedang untuk kegiatan penghidupan. Petani mengombinasikan dengan kegiatan hortikultura yang optimal. Petani juga mengombinasikan dengan kebun tanaman sepanjang tahun Petani sawah yang memiliki kerabat dengan petani di kampung yang dekat dengan kawasan hutan juga memiliki kebun kopi walaupun tidak diusahakan optimal (<i>frontiers commodity</i>) Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan pariwisata, selain mengirimkan salah satu anggota keluarga untuk bermigrasi.
Ciwidey dan Pasirjambu	>70% sawah >10% permukiman <30% kebun-talun	40%-70% sawah LP2B	Pusat kota tani Berada di jalur pariwisata utama	Moderat karena kepemilikan lahan sawah luas	Petani sawah yang berada di area irigasi mengusahakan sawah dengan luasan sedang hingga tinggi. Sebagian petani menanam sawahnya dengan tanaman sayur dan membangun rumah jamur, terutama yang berada di luar jalur irigasi teknis. Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan perkotaan dan pariwisata

<p>Alamendah</p>	<p><40% sawah >10% permukiman >30-70% kebun-talun</p>	<p>>70% sawah LP2B</p>	<p>Berada di jalur pariwisata utama Memiliki desa wisata</p>	<p>Tinggi karena bersilangan dengan kebun hortikultura dan stroberi</p>	<p>Petani sawah mengusahakan sawah dengan luasan kecil untuk kebutuhan subsisten. Sebagian besar petani bahkan sudah mengubah sawahnya menjadi tanaman palawija. Jika masih ada yang tetap mengusahakan sawah, hanya diusahakan dalam satu masa penanaman saja, yang digilir tanaman palawija. Lahan sawah yang ditanami palawija biasanya berdampingan dengan tanaman hortikultura terutama pada lahan di tepi jalan utama. Lahan pertanian di pinggir jalan utama, menanam stroberi untuk kebutuhan wisata. Petani juga memiliki petak lahan pertanian lain yang berada jauh dari jalan utama yang diusahakan untuk tanaman kopi sebagai <i>frontiers commodity</i> Kombinasi nonpertanian berkaitan dengan kegiatan pariwisata, baik mengelola kebun petik ataupun penginapan. Surplus dari kegiatan pariwisata biasanya digunakan untuk membeli lahan kebun yang jauh dari jalan utama</p>
-------------------------	--	-------------------------------	--	--	--

Sumber: Olah data peneliti

Sebagian besar sawah di wilayah Kecamatan Ciwidey memiliki satu pola tanam, yaitu penanaman padi dilakukan terus-menerus tanpa ada pergantian dengan penanaman lain. Ada sebagian kecil petani yang membagi petak sawahnya untuk menanam tanaman labu atau cabai pada masa tunggu ke masa tanam padi selanjutnya (Kurniawan & Sudrajat, 2017). Padi ditanam dua kali dalam satu tahun atau dalam kurun waktu lima sampai enam bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Chambers dan Conway (1992) bahwa alasan untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian yang berbeda terbukti pada skala waktu berbeda, baik

antarmusim dalam satu tahun maupun antartahun. Selain padi yang merupakan komoditas utama sebagai bahan pangan, petani yang memiliki lahan pertanian selain sawah juga menanam palawija lain seperti jagung. Palawija ditanam menjelang panen padi agar dapat dipanen setelah panen padi dilakukan. Mekanisme seperti ini wajar dilakukan oleh sebagian besar petani sawah untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan sawahnya, bahkan Harini dkk. (2019) mengungkapkan bahwa nilai valuasi ekonomi untuk palawija jauh lebih tinggi daripada sawah.



Gambar 4. Persawahan di dalam wilayah LP2B yang ditanami padi bersebelahan atau bergantian dengan komoditas hortikultura

Sumber: Survei Lapangan Kecamatan Ciwidey

Petani sawah yang berada pada lahan sawah dengan kondisi baik mampu melakukan kegiatan produksi yang menguntungkan. Jika petani ini memiliki kerabat dengan petani di lahan pertanian dekat kawasan hutan, mereka akan melakukan perluasan kegiatan pertanian. Sawah di Desa Lebakmuncang memusat mendekati saluran irigasi utama. Kondisi ini menjadikan sawah tersebut memiliki tingkat produksi tinggi. Desa Lebakmuncang merupakan desa yang relatif luas, dengan keragaman penggunaan tanah bervariasi, dari sawah, hortikultura, kebun, hingga hutan. Pada area kawasan hutan yang

menjorok masuk ke kawasan pertanian, oleh PT Perhutani sengaja disewakan pengelolaannya kepada masyarakat demi menghindari konflik dan penjarahan oleh masyarakat. Umumnya lahan yang dimanfaatkan untuk komoditas kopi ini diusahakan atas perjanjian antara para petani sebagai “penyewa tanah” dan PT Perhutani sebagai “pemilik tanah” dengan mempertimbangkan keuntungan ekonomi (komersial) bagi kedua pihak.

Pada wilayah ini, kekuatan jaringan sosial yang dimiliki petani sawah sangat memengaruhi penguatan kapasitas rumah tangga untuk

bertahan dalam menghadapi tekanan (Ellis, 1998; Niehof, 2004). Petani yang berhasil melakukan akumulasi produksi dari lahan sawah, sekaligus memiliki kerabat di dekat kawasan hutan, mampu memiliki akses pengelolaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kopi. Oleh karena itu, strategi penghidupan petani sawah ini bervariasi. Sebagian besar mereka melakukan strategi optimalisasi tanah pertanian dengan mengombinasikan kondisi tanah pertaniannya. Lahan sawah digunakan sebagai sumber kebutuhan pangan, didampingi oleh sayur, dan memiliki hak pengelolaan lahan hutan dengan mekanisme bagi hasil.



Gambar 5. Kebun Kopi yang letaknya tidak jauh dari lahan sawah LP2B; Kp. Sukamanah, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey
Sumber: Survei Lapangan Kecamatan Ciwidey

Peran Kepemilikan Lahan Sawah sebagai Kontrol Terhadap Keberlanjutan Lahan Pertanian Sawah

Berdasarkan kondisi kepemilikan lahan di Kecamatan Ciwidey, pemilik lahan belum tentu melakukan pengelolaan lahan. Bagi pemilik tanah yang tinggal jauh di luar desa, sebagian besar keputusan terkait dengan pengusahaan tanah mulai dari pemilihan komoditas, penggunaan tenaga kerja, hingga penjualan hasil pertanian bahkan ditentukan oleh penduduk lokal yang berstatus sebagai petani penggarap. Di sisi lain, keputusan untuk mengubah fungsi atau menjual tanah sepenuhnya tergantung pada kepentingan pemilik lahan. Pada kondisi ini, keberlanjutan tanah pertanian rentan akibat

tingginya ketergantungan pada pihak eksternal.

Tingkat keberlanjutan tanah pertanian akan jauh lebih baik jika tanah pertanian tersebut dimiliki oleh penduduk lokal, apalagi jika mereka berasal dari keluarga petani dengan tradisi pertanian yang kuat, serta memiliki penerus, terutama anak laki-laki. Mereka cenderung mempertahankan lahan sawahnya, meskipun hasilnya tidak terlalu baik atau bahkan mengalami kegagalan. Situasi ini tergambar dalam kutipan wawancara berikut.

“Belum sih saya mah. Waktu itu pernah pas gagal panen kepikiran mau jual. Tapi sayang ah orang makan sama minum dari tanah juga. Jadi waktu itu saya ngegadai emas aja”. (Petani 3, 42 tahun)

“Kalo saya rasa mah, nggak mau ah. Nggak mau jual lagi, maunya mah beli. Sayang atuh da ibu juga udah tua. Tapi ya kalo emang perlu dan kepepet mah gimana ya. Mau nggak mau saya mah. Tergantung kondisi, tapi kalo ditanya mau atau engganya mah sebenarnya nggak mau”. (Petani 4, lebih 60 tahun)

Namun, keinginan para petani untuk mempertahankan sawah harus berhadapan dengan dua tekanan eksternal yang saling terkait, yaitu produktivitas pertanian dan perkembangan ekonomi wilayah. Menurut pandangan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung,⁶ salah satu unsur yang paling menentukan dalam hal produktivitas adalah rendahnya insentif keuntungan dari kegiatan pertanian yang diakibatkan kombinasi keterlibatan (i) kebijakan harga oleh pemerintah, (ii) ketersediaan saprodi, (iii) akses pemasaran, dan (iv) luas tanah garapan. Insentif keuntungan yang rendah dan penuh ketidakpastian menyebabkan para petani tidak cukup termotivasi untuk mengembangkan inovasi demi kemajuan pertanian. Aktivitas pertanian terkesan lebih ditujukan untuk keperluan “bertahan hidup” atau “melanjutkan pekerjaan orang tua.” Penyebab utama kegagalan panen petani sawah di KAC adalah penggunaan bibit padi lokal bantuan pemerintah pada periode 2005-an yang memiliki masa tanam panjang.

Situasi tersebut berlangsung dalam suasana

⁶ Hasil wawancara tanggal 10 Desember 2020

kehidupan masyarakat yang semakin diramaikan oleh aktivitas pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), dataran tinggi Ciwidey memang ditetapkan sebagai wisata berbasis pertanian (agrowisata). Meningkatnya kegiatan pariwisata ditandai oleh kemunculan hotel, vila, rumah makan, dan berbagai atraksi wisata lainnya; terutama di sepanjang jalan utama. Permintaan terhadap tanah pun semakin meningkat yang memicu kenaikan harga tanah, seperti yang digambarkan dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Ini depan aja kan villa, dulunya sawah. Terus dekat jalan itu juga banyak jadi homestay. Soalnya di sini mah kan dekat sama jalan gede, terus mau ke tempat wisata juga gampang. Makanya harga tanah teh sebenarnya kalo dibeli sama orang luar tinggi sekali. Itu aja yang di dekat jalan, yang sekarang jadi homestay, dulu satu meternya saya denger pernah ditawar 4.5 juta. Coba kan lumayan dibanding harga biasa yang segitu teh harganya satu tumbak lebih sedikit”. (Penduduk Desa Nengkelan)

Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya petani yang tergoda mendapatkan “dana segar yang besar” melalui penjualan lahan sawah yang berdekatan dengan jaringan jalan utama akses ke lokasi wisata. Dana besar ini biasanya ditawarkan oleh pihak luar yang bermaksud mengubah lahan sawah tersebut sebagai sebuah investasi, yang pada kemudian hari mungkin berubah menjadi penggunaan tanah lain. Aliran modal dari pihak luar ini merupakan salah satu bentuk akumulasi primitif yang biasa terjadi karena adanya penguasaan lahan karena surplus kapital (Amin, 2017). Aktivitas ini akan menimbulkan efek domino pada penguasaan lahan lain. Petani sawah ini akan memanfaatkan dana segar hasil penjualan sawah untuk membeli dan mengusahakan tanah pertanian baru yang lebih luas pada tempat-tempat yang tidak terlalu strategis, seperti pada lereng perbukitan yang jauh dari jalan raya. Hal ini menunjukkan akumulasi primitif juga dilakukan oleh petani lokal yang lahan sawahnya dibeli oleh pihak luar terhadap petani sawah di pedalaman.

Jika dikaitkan dengan kebijakan LP2B,

lahan sawah di tepi jalan utama biasanya merupakan lahan sawah primer dan biasanya masuk dalam kawasan LP2B. Adanya perubahan kepemilikan lahan dari petani lokal ke pihak luar atau dari petani pemilik yang juga mengelola ke petani penggarap inilah yang meningkatkan peluang alih fungsi lahan sawah. Sementara itu, petani lokal menginvestasikan hasil penjualannya ke lahan sawah yang luas tetapi cenderung memiliki nilai produktivitas lebih rendah. Jika dikaitkan strategi penghidupan, masuknya akumulasi modal dari luar menciptakan peluang keragaman portfolio walaupun tidak selalu mengubah mata pencaharian petani. Jika petani mampu memanfaatkan hasil penjualan tersebut dengan baik dan melakukan strategi akumulasi pada penghidupannya, mereka dapat mengganti lahan sawahnya ke lokasi yang tidak strategis tetapi dengan luas penguasaan yang lebih besar. Strategi akumulasi inilah yang mampu meningkatkan kualitas hidup petani secara umum.

Sesungguhnya mekanisme alih kepemilikan dan alih fungsi lahan berjalan jauh lebih rumit daripada gambaran di atas. Kerumitan tersebut tidak terlepas dari ketimpangan kepemilikan lahan yang terbentuk di kalangan petani tanaman pangan (sawah). Hanya 5% petani tanaman pangan yang memiliki luas tanah lebih dari 1 hektare. Angka ini pun masih lebih rendah dibandingkan petani hortikultura (6,3%). Sebagian besar (53%) petani sawah mengusahakan tanah seluas 0,1-0,3 hektare. Bahkan, sekitar 13% petani memiliki luasan tanah kurang dari 0,1 hektare. Gambaran tentang distribusi kepemilikan tanah tersebut memberi isyarat kuat rentannya usaha pertanian tanaman pangan di Ciwidey. Menurut para petani, luasan tanah yang sempit tersebut menyebabkan sebagian dari mereka mengusahakan pertanian pangan secara subsisten. Produksi petani subsisten ini hanya diperuntukkan bagi pemenuhan pangan rumah tangga demi menghemat pengeluaran untuk konsumsi beras. Petani inilah yang mengalami risiko penurunan kualitas penghidupan dan masuk dalam strategi *survival*. Saat petani hanya menguasai luasan sawah yang sempit, serta lahan sawahnya masuk

pada pasar jual-beli dan hasil penjualannya tidak mampu digunakan untuk mengganti lahan sawahnya, peluang menjadi buruh tani akan semakin besar.

KESIMPULAN

Kebijakan pembangunan pedesaan berbasis pertanian melalui kebijakan agropolitan mampu meningkatkan kualitas hidup petani selama petani tersebut mengusahakan lahannya untuk komoditas unggulan. Kondisi ini akan menempatkan petani dalam kondisi surplus yang mampu menciptakan strategi akumulasi pada kegiatan penghidupannya. Kebijakan agropolitan, terutama yang bersamaan dengan pengembangan agrowisata, mampu menciptakan aliran kapital yang mampu memengaruhi mekanisme pengelolaan lahan. Kegiatan agrowisata membuka peluang terbentuknya mata pencaharian baru bagi para petani sekaligus mampu menciptakan strategi konsolidasi sebab petani berkesempatan untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian dan meragamkan portofolio penghidupannya.

Aliran kapital akan menciptakan akumulasi primitif pada lahan pertanian yang dilakukan oleh pihak luar wilayah. Lahan pertanian sawah yang berada pada lokasi strategis umumnya merupakan sawah primer dengan produktivitas tinggi sehingga memiliki risiko untuk berganti kepemilikan dari penduduk lokal menjadi pihak luar. Kepemilikan inilah yang menentukan peluang alih fungsi lahan karena pihak luar umumnya tidak aktif melakukan kegiatan pertanian.

Kebijakan LP2B ditetapkan untuk melindungi alih fungsi lahan sawah. LP2B mampu menahan pemilik lahan dari luar mengubah lahan pertanian menjadi nonpertanian. Di saat yang sama, kebijakan LP2B juga membuat petani lokal tetap harus membudidayakan padi secara periodik. Oleh karena itu petani sawah LP2B mendapatkan jaminan pasokan saprodi dan irigasi yang lebih baik daripada petani dengan lahan lainnya. Sayangnya, tingkat inovasi pada lahan sawah di wilayah ini relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan nilai produktivitas padi tetap lebih

rendah jika dimanfaatkan untuk komoditas hortikultura walaupun dapat diproduksi dengan mudah.

Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi lahan sedang hingga tinggi bagi para petani sawah. Sawah yang berada pada area bentangan akan cenderung lebih kuat menahan alih fungsi sawahnya karena berada dalam sistem pengairan bersama. Sistem pengairan ini sekaligus membentuk sistem jaringan sosial mereka. Jika petani sawah mampu memanfaatkan jaringan sosialnya, keragaman portofolio pertaniannya dapat ditingkatkan. Pasokan air menjadikan lahan pertanian dapat dibagi peruntukannya. Namun, jika tidak berada pada area bentangan maka risiko untuk kehilangan lahan sawah makin besar. Pada petani sawah yang memiliki lahan sempit, produktivitas sawahnya hanya digunakan untuk kebutuhan subsisten. Kondisi ini menciptakan strategi penghidupan tergolong *survival* dengan portofolio mata pencaharian terbatas.

Hal menarik terjadi pada petani lahan sawah luas yang berada di lokasi strategis. Lahan sawah ini umumnya berada pada pasar tanah jual-beli. Saat sawah mereka berpindah kepemilikan, dengan hasil penjualan yang tinggi, mereka akan melakukan strategi akumulasi. Strategi ini dilakukan dengan melakukan akumulasi primitif pada tanah sawah lain di lokasi yang tidak strategis, bahkan pada lereng terjal, demi mempertahankan mata pencahariannya. Pada kurun waktu tertentu, akumulasi primitif ini akan terus menekan petani yang memiliki lahan sempit. Tekanan ini mampu mengubah petani lahan sempit di pedalaman untuk turun pada kondisi *survival*, bahkan menjadi buruh tani.

Kebijakan LP2B dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, tetapi tidak mencegah petani sawah kehilangan identitasnya. Petani pemilik dan pengelola menjadi hanya sebagai petani pengolah saja, bahkan petani pemilik menjadi buruh tani. Akumulasi primitif yang tidak terkendali karena masuknya aliran kapital di karena kebijakan agropolitan menjadikan risiko petani sawah LP2B berada pada kondisi terbatas yang justru menjauhkan tujuan dari kebijakan pembangunan agropolitan dan

penyediaan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramson, D. B. (2020). Ancient and current resilience in the Chengdu Plain: Agropolitan development re-‘revisited.’ *Urban Studies*, 57(7), 1372–1397. <https://doi.org/10.1177/0042098019843020>
- Agustina, I., & Artiningsih, A. (2017). Evaluasi implementasi masterplan kawasan agropolitan Ciwidey menggunakan logic models. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.1.1-10>
- Amin, S. (2017). The agrarian question a century after October 1917: Capitalist agriculture and agricultures in capitalism. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 6(2), 149–174. <https://doi.org/10.1177/2277976017731842>
- Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change*. Fernwood Pub.
- Boomgard, P. (2004). *Anak jajahan Belanda, sejarah sosial dan ekonomi Jawa 1795–1880*. Djambatan.
- Budiman, M. R., & Kurniasari, N. (2016). Kajian keterkaitan kegiatan ekonomi pertanian di Kawasan Agropolitan Ciwidey, Kabupaten Bandung. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(2), <http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v0i0.4941>
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. Institute of Development Studies.
- Daris, E., Aminudin, I., & Feriansyah, A. (2017). Determinants of paddy fields conversion in Java Island, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Science and Technology (ICOSAT 2017)*, 95–98. <https://doi.org/10.2991/icosat-17.2018.22>
- Ellis, F. (1998). Household strategies and rural livelihood diversification. *The Journal of Development Studies*, 35(1), 1–38. <https://doi.org/10.1080/00220389808422553>
- FAO. (2006, June). *Food security*. Policy Brief Issue 2, June 2006. https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
- FAO. (2022). *FAO food price index*. <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>
- Friedmann, J. (1985). Political and technical moments in development: Agropolitan development revisited. *Environment and Planning D: Society and Space*, 3(2), 155–167. <https://doi.org/10.1068/d030155>
- Friedmann, J. R. P., & Douglass, M. (1978). Agropolitan development: Towards a new strategy for regional planning in Asia. Dalam P.C. Lo & K. Salih (Ed.), *Growth Pole Strategy and Regional Development Policy* (hlm. 163-192). Oxford Pergamon Press.
- Friedmann, H., & McMichael, P. (1989). Agriculture and the state system: The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present. *Sociologia Ruralis*, 29(2), 93–117. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.1989.tb00360.x>
- Gebru, K. M., Rammelt, C., Leung, M., Zoomers, A., & van Westen, G. (2021). The commodification of social relationships in agriculture: Evidence from northern Ethiopia. *Geoforum*, 126, 350-360. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.07.026>
- Harini, R., Ariani, R. D., Supriyati, S., & Satriagasa, M. C. (2019). Analisis luas lahan pertanian terhadap produksi padi di Kalimantan Utara. *Jurnal Kawistara*, 9(1), 15-27. <https://doi.org/10.22146/kawistara.38755>
- Hidayat, R. A., Iskandar, J., Gunawan, B., &

- Partasasmita, R. (2020). Impact of green revolution on rice cultivation practices and production system: A case study in Sindang Hamlet, Rancakalong Village, Sumedang District, West Java, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 21(3), 1258-1265. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210354>
- Headey, D. D., & Fan, S. (2010). *Reflections on the global food crisis: How did it happen? How has it hurt? And how can we prevent the next one?* International Food Policy Research Institute. https://doi.org/10.2499/9780896291782_RM165
- Iskandar, J., & Iskandar, B. S. (2011). *Agroekosistem orang Sunda*. Kiblat Buku Utama.
- Kasikoen, K. M., Fatmah, D. H., Yuni, R., Suryandari, & Suprajaka. (2020). Agropolitan and Regional Development in Indonesia: A Case Study of Langkaplancar District, West Java. *International Journal of Society, Development, and Environment in the Developing World*, 4(3), 60–73.
- Komariah, Senge, M., Sumani, Dewi, W. S., Yoshiyama, K., & Rachmadiyahanto, A. N. (2015). The impacts of decreasing paddy field area on local climate in Central Java, Indonesia. *Air, Soil and Water Research*, 8, ASWR.S21560. <https://doi.org/10.4137/ASWR.S21560>
- Kurniawan, A. M., & Sudrajat. (2017) Diversifikasi pemanfaatan lahan sawah di Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4). <https://media.neliti.com/media/publications/228849-diversifikasi-pemanfaatan-lahan-sawah-di-4d99bb50.pdf>
- McDonald, B. L. (2017). The world food crisis and the end of the postwar food system. Dalam B. L. McDonald (Ed.), *Food Power: The Rise and Fall of the Postwar American Food System*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190600686.003.0007>
- McMichael, P. (1997). Rethinking globalization: The agrarian question revisited. *Review of International Political Economy*, 4(4), 630–662. <https://www.jstor.org/stable/4177246>
- Mulyani, A., Kuntjoro, D., Nursyamsi, D., & Agus, F. (2016). Konversi lahan sawah Indonesia sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan. *Jurnal Tanah dan Iklim*, 40(2), 121-133. <https://doi.org/10.21082/jti.v40n2.2016.121-133>
- Niehof, A. (2004). The significance of diversification for rural livelihood systems. *Food Policy*, 29(4), 321–338. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2004.07.009>
- Niehof, A. & Price, L. L. (2001). *Rural livelihood systems: A conceptual framework*. <https://edepot.wur.nl/379081>
- Nurman, A., & Lund, C. (2016). On track: Spontaneous privatization of public urban land in Bandung, Indonesia. *South East Asia Research*, 24(1), 41–60. <https://doi.org/10.5367/sear.2016.0296>
- Prasetya, A., Suyadi, Bisri, M., & Soemarno. (2014). Analysis of Sendang Agropolitan Area development, Tulungagung. *American Journal of Sociological Research*, 4(2), 60–66. <https://doi.org/10.5923/j.sociology.20140402.06>
- Purbiyanti, E., Yazid, M., & Januari, I. (2017). Konversi lahan sawah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 14(3), 209-217. <https://doi.org/10.17358/jma.14.3.209>
- Ragil, C. (2017). *Arahan pengembangan kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) padi berbasis D3TLH (Daya Dukung dan Daya*

- Tampung Lingkungan Hidup) di Kabupaten Kulon Progo. Prosiding Seminar Nasional XII Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2017 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.*
- Rosiadi, A., Juniarko, O., Putro, P. W., & Fatmawati, D. S. A. (2022). Can agropolitan promise prosperity and sustainability? *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(1), 75-94. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i1.253>
- Sandy, I. M. (1977). *Penggunaan tanah (land use) di Indonesia*. Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri.
- Scoones, I. (1998, 1 January). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis*. IDS Working Paper 72. <https://www.ids.ac.uk/publications/sustainable-rural-livelihoods-a-framework-for-analysis/>
- Scoones, I. (2015). *Sustainable livelihoods and rural development*. Practical Action Publishing.
- Soetomo, S. (2002). *Dari urbanisasi ke morfologi kota: Mencari konsep pembangunan tata ruang kota yang beragam*. Graha Ilmu.
- Sumaryanto, Friyatno, S., & Irawan, B. (2001). Konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian dan dampak negatifnya. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah 2001* (hlm. 1-18). <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/prosiding/mflp2001/su> maryanto.pdf
- Surya, B., Saleh, H., Hamsina, H., Idris, M., & Ahmad, D. N. A. (2020). Rural agribusiness-based agropolitan area development and environmental management sustainability: Regional economic growth perspectives. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(1), 142–157. <https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10184>
- Syarifudin, D., & Ishak, R. F. (2020). The importance of rural social productive space to increase the social capital of agribusiness community in agropolitan area. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(1), 67–83. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.67-83>
- Svensson, T. (1991). *State bureaucracy and capitalism in rural West Java: Local gentry versus peasant entrepreneurs in Priangan in the 19th and 20th centuries*. Nordic Institute of Asian Studies.
- Taufik, M., Kurniawan, A., & Pusparini, F. M. (2017). Penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menggunakan metode multi data spasial di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. *Geoid*, 13(1). <https://doi.org/10.12962/j24423998.v13i1.3679>
- Verhoeven, J. T. A., & Setter, T. L. (2010). Agricultural use of wetlands: Opportunities and limitations. *Annals of Botany*, 105(1), 155–163. <https://doi.org/10.1093/aob/mcp172>

Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran

Empowering the community of ex-Indonesian Migrant Workers through community-based organization of Forum Warga Buruh Migran

Rahmat Saleh^{1,2,*}, Ricardi S. Adnan¹, Aswatini Raharto²

¹ Pascasarjana Magister Sosiologi, Universitas Indonesia

² Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

*Korespondensi penulis: rahmat.saleh01@ui.ac.id

ABSTRACT

Nowadays, Community-Based Organisation (CBO) has been admitted as a more successful activity to empower the community than other organisations, such as Non-Governmental Organisation (NGO). This article aims to emphasise how activism of the Forum of Indonesian Migrant Workers or the Forum Warga Buruh Migran (FWBM), as a CBO initiated by Nahdlatul Ulama (NU) at the grassroots level, works to empower ex-Indonesian migrant workers and their families in their areas of origin. This article used the qualitative methodology of the CBO framework and the perspective of community empowerment with a case study in Cilacap Regency, Central Java. Primary data was collected by in-depth interviews and focus group discussions, while secondary data was collected by literature review. The data was processed using content analysis techniques. This research found that the activism of FWBM has been manifested in four holistic community empowerment programmes. Through these programmes, ex-Indonesian Migrant Workers and their families can improve their quality of life. They can be more empowered, economically independent, and wealthier. However, the FWBM still has limitations in terms of volunteers and financial resources to support sustainable activities.

Keywords: Empowerment; ex-Indonesian Migrant Workers; Community-Based Organization; Forum Warga Buruh Migran

ABSTRAK

Organisasi Berbasis Komunitas (*Community Based Organization* - CBO) dinilai lebih berhasil dalam upaya pemberdayaan komunitas dibanding organisasi pembangunan lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Analisis dalam artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana aktivisme Forum Warga Buruh Migran (FWBM)—sebagai CBO yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama (NU) di tingkatan akar rumput—dalam pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (purna-PMI) dan keluarganya di daerah asal. Data diperoleh dari studi kasus di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan pendekatan kualitatif menggunakan kerangka pemikiran CBO dan pemberdayaan komunitas. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion*, sedangkan data sekunder melalui telaah pustaka. Pengolahan data menggunakan teknik analisis konten. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme FWBM dimanifestasikan dalam empat bidang program pemberdayaan komunitas dengan pendekatan holistik. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pemberdayaan tersebut telah dan masih berjalan dengan baik. Hal ini dapat dipahami dari meningkatnya kemampuan para purna-PMI dan keluarganya untuk memperbaiki kualitas kehidupannya agar bisa lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera. Namun, FWBM masih menghadapi keterbatasan, utamanya terkait sumber daya manusia (relawan) dan finansial (pendanaan) untuk mendukung aktivitas yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pemberdayaan; Purna Pekerja Migran Indonesia; Organisasi Berbasis Komunitas; Forum Warga Buruh Migran

DOI: 10.14203/jki.v17i2.754

Naskah masuk: 14 Juli 2022

Revisi akhir: 6 Oktober 2022

Naskah diterima: 8 Desember 2022

219



ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2022 National Research and Innovation Agency

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Studi-studi tentang organisasi dalam kaitannya dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah banyak dilakukan. Namun, kajian yang ada hanya berfokus pada peran sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Andayani & Pahlawan, 2017; Kristanti, 2021; Raharto & Noveria, 2012; Sumardiani, 2014; Wahyono, 2007; Wahyudi & Jusoh, 2016). Selain itu, studi terkait topik ini kebanyakan menekankan aspek perlindungan bagi PMI pada tahap pra-keberangkatan, keberangkatan, perjalanan menuju negara tujuan/transit, dan selama bekerja di negara tujuan. Di satu sisi, ada anggapan yang semakin meluas bahwa LSM telah kehilangan kekuatannya sebagai organisasi pembangunan lokal tingkat akar rumput (Banks & Hulme, 2012; Streeten, 1997). Di sisi lain, negara dinilai belum optimal dalam memenuhi hak sosial-ekonomi warga, sehingga mendorong tumbuh kembangnya organisasi berbasis komunitas (*Community Based Organization - CBO*). Dapat dikatakan, masih jarang penelitian yang mencermati CBO dengan fokus utama pada aspek pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal.

Sejumlah studi telah mengungkapkan pentingnya peran dan kontribusi CBO di sebagian besar negara berkembang dalam pembangunan melalui pemberdayaan, baik di tingkat regional, nasional, maupun lokal. UN-Habitat (2008) mencatat CBO telah muncul di Asia dan wilayah lainnya setidaknya selama dua dekade terakhir dan perannya menjadi kuat dalam kontribusi pembangunan di tiap negara saat ini. Menurut Clark (1999, dalam Njuguna, 2013), CBO merupakan organisasi tingkat bawah (*grassroots organization*) yang tidak mencari keuntungan dan bertujuan untuk memberdayakan kelompok penduduk yang kurang beruntung pada populasi tertentu. Meskipun CBO memiliki cakupan yang kecil dan bersifat informal, organisasi ini menyediakan berbagai layanan terhadap pembangunan masyarakat. Studi Prihatiningsih dan Astuti (2019) juga menunjukkan cara kerja CBO yang berkontribusi dalam pembangunan, antara lain melalui program pemberdayaan ekonomi, psikologi, hukum, sosial, budaya, dan politik. Namun, CBO

juga seringkali mengalami kendala seperti sumber pendanaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya (Kwok dkk., 2015). Kondisi ini berbeda dengan LSM yang cenderung memiliki lebih banyak akses terhadap sumber pendanaan dan didukung oleh SDM yang mumpuni. Hal ini dapat dipahami karena memang terdapat perbedaan antara CBO dengan LSM. CBO merupakan individu-individu dalam suatu kelompok/komunitas di ruang lingkup wilayah geografis tertentu yang kecil dengan SDM yang terbatas (lokal) (Dumi dkk., 2014). Oleh karena itu, seringkali beberapa aktivitas program atau kegiatan CBO tidak dapat diakui dan tidak dapat diintegrasikan ke dalam 'sistem formal' program pemerintah. Pada saat yang bersamaan, di beberapa kota yang pemerintahnya mengakui adanya LSM, lembaga ini akan memberikan bantuan teknik dan keuangan kepada CBO untuk pengembangan program pemberdayaan komunitas (Bennet dkk., 1999, dalam Suhartono, 2005).

Mencermati kompleksnya permasalahan yang dihadapi para purna-PMI, penelitian tentang peran CBO dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal, penting untuk dilakukan. Sebagai contoh, permasalahan yang sering dialami purna-PMI adalah perubahan aktivitas ekonomi dan sosial sepulangnya ke tanah air, serta perubahan pola hidup yang cenderung konsumtif bahkan hedonis. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya keterampilan dalam pemanfaatan hasil kerja (remitansi) yang mereka peroleh untuk kegiatan/usaha ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Bank Indonesia (2021) mencatat total remitansi PMI mencapai US\$ 9,43 miliar atau setara dengan 133 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka remitansi ini tidak termasuk pengiriman dana dari PMI melalui jalur nonperbankan atau pola tradisional yang masih berlaku, misalnya, uang yang dibawa langsung oleh PMI atau uang yang dititipkan temannya yang pulang ke Indonesia. Sayangnya, besarnya aliran remitansi tersebut biasanya digunakan sebagai aliran searah saja (Goldring, 2004; Levitt & Lamba-Nieves, 2011). Dengan kata lain, remitansi hanya digunakan untuk

kebutuhan ekonomi keluarga dan pembangunan fisik rumah di daerah asal tanpa adanya perencanaan pemanfaatan untuk keberlangsungan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kondisi ini semakin parah karena belum adanya program yang signifikan dari pemerintah mengenai pengelolaan remitansi bagi PMI, termasuk purna-PMI (Migrant CARE, 2021).

Menurut Mentari dan Fatimah (2021), perubahan pola hidup purna-PMI sedemikian rupa menyebabkan apa yang telah mereka hasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka waktu yang panjang. Setelah hasil yang diperoleh habis, purna-PMI harus mencari cara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Misalnya, bekerja serabutan, menjadi buruh tani, ataupun mencoba peruntungan ke kota besar untuk menjadi buruh pabrik atau asisten rumah tangga. Mereka juga tidak mudah mendapatkan pekerjaan lagi di daerah asal karena peluang kerja yang tersedia sangat terbatas. Keberadaan mereka malah menambah jumlah pengangguran dan menempatkan rumah tangga pekerja migran di daerah asal dalam siklus migrasi yang tidak berkesudahan (Cohen dkk., 2005, dalam Dewayanti, 2010). Dengan kata lain, tidak sedikit purna-PMI memilih untuk kembali bekerja ke luar negeri dan hidup berpisah dengan keluarganya selama bertahun-tahun. Hal ini tentu saja berdampak terhadap pola asuh anak, ketidakharmonisan keluarga, bahkan perceraian karena *long distance relationship*. Secara moral, kondisi demikian menggerakkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjalankan perannya dalam bidang sosial-kemanusiaan.

Hasil Muktamar NU XXVII di Situbondo pada tahun 1984 menegaskan bahwa NU kembali ke khittah, yakni menjalankan peran sosial-kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan membangun demokrasi (demokratisasi). Dalam menjalankan peran sosial-kemanusiaan, NU—melalui pesantren serta lembaga-lembaga/badan-badan ke-NU-an seperti Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH), lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia

(Lakpesdam), dan Fatayat—melakukan upaya advokasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat/komunitas lokal (Ekawati, 2016). Jaringan NU mulai dari tingkat global, regional, nasional (provinsi, kabupaten/kota), sampai dengan lokal (kecamatan hingga ke pelosok pedesaan) merupakan kekuatan (*capital*) yang besar. Misalnya, NU Kabupaten Cilacap melaksanakan instruksi dari tingkat pusat (dari PBNU), tingkat kabupaten, hingga tingkat desa di Kabupaten Cilacap.

Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap memiliki fokus pada program pemberdayaan dan pendampingan PMI, termasuk purna-PMI (NU Online, 2018). Pada tahun 2011, Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap bersama Tifa *Foundation* membentuk organisasi berbasis komunitas CBO Forum Warga Buruh Migran (FWBM) sebagai wadah untuk pelaksanaan program pemberdayaan mantan buruh migran di daerah asal Cilacap. Sebanyak 30 desa menjadi anggota FWBM yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nusawungu, Binangun, dan Adipala (Octaviani, 2015). Namun, Windiasih dan Sugito (2019) mengungkapkan bahwa para anggota FWBM belum sepenuhnya memahami aturan hukum perburuhan, masih kurang memahami pengelolaan remitansi, dan belum adanya kesempatan yang lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) guna menghasilkan program pembangunan desa yang mendukung kewirausahaan para anggota FWBM. Dengan demikian, FWBM pada konteks organisasi berbasis komunitas CBO semakin penting peranannya dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal (di desa).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan melalui kerangka pemikiran CBO (Chechetto-Salles & Geyer, 2006) dan pemberdayaan komunitas (Ife & Tesoriero, 2006/2016). Pertanyaan tersebut adalah bagaimana upaya-upaya (aktivisme) FWBM yang diinisiasi oleh NU pada tingkatan akar rumput, khususnya di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dalam memberdayakan komunitas purna-PMI,

termasuk dengan keluarganya.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Penentuan lokasi ini didasarkan pada tiga justifikasi. Pertama, NU Kabupaten Cilacap memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu PMI, terutama program-program pemberdayaan purna-PMI. Kedua, Kabupaten Cilacap menempatkan PMI ke luar negeri terbanyak di antara kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dapat dikatakan, Kabupaten Cilacap merupakan ‘lambung terbesar’ PMI di Jawa Tengah, salah satunya di Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu. Ketiga, di Desa Danasri Kidul tersebut juga banyak purna-PMI yang tergabung dalam FWBM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dipandang paling tepat untuk melihat, menjelaskan, mengetahui, mendeskripsikan, menginterpretasikan proses dan makna secara autentik (*authentic interpretations*) dalam studi kasus (*examinations of cases*) sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian secara lebih mendalam (Neuman, 2007). Oleh karena itu, peneliti melakukan *authentic interpretations* untuk memahami bagaimana aktivisme FWBM di Desa Danasri Kidul, dalam memberdayakan komunitas purna-PMI. Pada konteks penelitian ini, *authentic interpretations* merupakan suatu proses memahami makna ‘sedekat mungkin’ terhadap dunia riil atau kehidupan nyata dari aktivisme FWBM tersebut.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pokok-pokok bahasan pada wawancara mendalam dan FGD diarahkan untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai implementasi berbagai kegiatan pemberdayaan komunitas purna-PMI yang dilakukan oleh FWBM di Desa Danasri Kidul. Penentuan informan melalui *purposive sampling*, artinya, dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, berlandaskan pada kedalaman pemahaman yang ingin digali terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu,

sumber data berasal secara bergulir dari satu informan ke informan lain yang memenuhi kriteria hingga pada suatu titik tertentu berhenti saat informasi sudah dirasa cukup (*snowball sampling*). Peneliti juga melakukan validasi data melalui triangulasi (*triangulation of data for validation*).

Informan utama dalam penelitian ini yaitu dua orang pegiat FWBM, lima orang purna-PMI dan/atau keluarga PMI yang tergabung di dalam FWBM, serta tiga orang pengurus NU Kabupaten Cilacap. Informan pendukung terdiri dari satu orang aparat Desa Danasri Kidul, satu orang eks pengurus LSM buruh migran/Tifa *Foundation*, satu orang wartawan/pers lokal Kabupaten Cilacap, satu orang pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Cilacap, dan satu orang pegawai satu orang pegawai Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten Cilacap. Dengan demikian jumlah informan seluruhnya adalah 15 orang.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Juli–September 2021. Oleh karena masa pandemi COVID-19 masih berlangsung pada rentang waktu tersebut, bahkan memasuki “gelombang kedua”, serta adanya kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelaksanaan wawancara mendalam dan FGD dilakukan secara daring (*online*) dengan memanfaatkan aplikasi teknologi komunikasi, seperti Google Meet, Zoom, dan panggilan video WhatsApp. Peneliti menyadari bahwa pengumpulan data primer secara daring ini menjadi kelemahan tersendiri pada saat peneliti melakukan *authentic interpretations* atas data/informasi yang terkumpul. Di satu sisi, pengumpulan data primer secara daring menjadikan informan lebih nyaman karena tidak khawatir terpapar COVID-19. Di sisi lain, metode ini dapat berimplikasi pada pengamatan peneliti terhadap kesan informan, *interviews/FGD setting, nonverbal information*, seperti *gesture* tubuh dan mimik/ekspresi wajah para informan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan pada rentang waktu yang sama dengan data primer dan

berbasis metode digital menggunakan *summons search engine*, *google scholar*, dan situs pencarian jurnal internasional bereputasi serta jurnal nasional terakreditasi. Pengumpulan data sekunder berupa *literature review* artikel-artikel pada jurnal atau *e-books* yang memuat topik terkait penelitian ini. Hasil pencarian literatur tersebut kemudian dibaca judul dan abstraknya, serta dipilih yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Setelah terkumpul beberapa literatur terpilih, dilakukan analisis.

Teknik analisis data baik data primer maupun sekunder dimulai dengan melakukan organisasi data ke dalam kategori berdasarkan tema, konsep, atau suatu kesamaan/kemiripan tertentu. Proses ini disebut dengan *coding*. Miles & Huberman (1994:56, dalam Neuman, 2014:480–481) menjelaskan bahwa “*codes are tags or labels for assigning units of meaning to the descriptive or inferential information compiled during a study. Codes usually are attached to “chunks” of varying size—words, phrases, sentences or whole paragraphs, connected or unconnected to a specific setting*”. Nama atau label yang diberikan dalam proses *coding* ini didasarkan atas tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian. Proses *data coding* dilakukan dalam tiga tahap, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Strauss, 1987, h. 55, dalam Neuman, 2014, h. 481–484). Proses *data coding* pada penelitian ini menggunakan matriks untuk membantu peneliti melakukan kategorisasi data. Selanjutnya, peneliti melakukan penajaman analisis konten secara

sistematis untuk memahami makna data tersebut. Pada tahap ini, peneliti memberikan interpretasi data. Proses interpretasi sepenuhnya dilakukan oleh peneliti untuk menghindari terjadinya *lack of interpretation*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Purna-PMI di Desa Danasri Kidul

Data BP2MI (2018; 2019; 2020; 2021) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2021, jumlah penempatan PMI yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 91.791 orang. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang menempatkan PMI ke luar negeri dalam jumlah terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya di provinsi ini, yaitu 31.918 orang. Pada tahun 2018, Kabupaten Cilacap menempatkan 11.785 orang, tahun 2019 sebanyak 11.525 orang, dan tahun 2020 sebanyak 5.175 orang. Jumlah PMI yang ditempatkan cenderung menurun cukup drastis sejak tahun 2020 karena kebijakan penutupan (*lockdown*) perbatasan negara tujuan PMI. Pada tahun 2021, jumlah PMI dari Kabupaten Cilacap sebanyak 3.433 orang (Tabel 1). Data yang dirilis BP2MI (2018; 2019; 2020; 2021) juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021, jumlah PMI yang kembali ke daerah asal sebanyak 314.389 orang, dan yang terbanyak kembali ke daerah asal di Jawa Tengah yaitu 79.038 orang.

Tabel 1. Data Penempatan PMI Menurut Asal di Lima Kabupaten/Kota Pengirim PMI Terbesar di Jawa Tengah Tahun 2018–2021

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	Total
1	Cilacap	11.785	11.525	5.175	3.433	31.918
2	Kendal	7.812	7.743	4.199	3.501	23.255
3	Brebes	5.995	6.268	2.461	1.344	16.068
4	Banyumas	4.112	3.892	1.619	843	10.466
5	Pati	3.700	3.835	1.628	921	10.084

Sumber: BP2MI (2018; 2019; 2020; 2021), data diolah oleh peneliti

Hampir semua kecamatan di Kabupaten Cilacap merupakan daerah asal PMI. Kondisi ini, menjadikan Kabupaten Cilacap sering disebut sebagai lumbung PMI. Salah satu kecamatan

yang menempatkan PMI bekerja di luar negeri dalam jumlah besar adalah Kecamatan Nusawungu. Kondisi ini tergambar dalam petikan wawancara mendalam dengan informan

dari P4MI dan pegiat FWBM di Kabupaten Cilacap sebagai berikut.

“Kalau sekarang sebutan lumbung atau kantong ya(?) Kalau di Cilacap ini kan kebanyakan memang paling tinggi PMI, [...] memang minat mereka untuk bekerja di luar negeri sangat tinggi untuk penduduk di Cilacap, baik perempuan maupun laki-laki.” (EK, 45 tahun, pegawai P4MI Kabupaten Cilacap, Kamis 26 Agustus 2021).

“[...] ternyata jumlah TKI di Cilacap itu tidak sedikit. Cilacap ternyata ranking satu di Jawa Tengah. Disebut kantong TKI apa lumbung TKI karena saking banyaknya ya.” (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, Rabu 25 Agustus 2021).

Merujuk pada *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*¹ dan *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration*,² proses migrasi PMI dapat dipahami sebagai suatu siklus yang dimulai dari daerah asal (pendaftaran dan persiapan keberangkatan), keberangkatan dan selama perjalanan menuju negara tujuan bekerja, transit (pertukaran moda transportasi), tinggal dan bekerja di negara tujuan selama masa kontrak kerja, sampai kembali lagi ke daerah asal setelah kontrak kerja berakhir. Proses migrasi yang panjang tersebut menandakan bahwa penanganan terhadap permasalahan-permasalahan PMI sangat kompleks karena ada keterkaitan antara tahapan proses migrasi tersebut. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya pada tahap pra-penempatan (sebelum bekerja) dan penempatan (selama bekerja), tetapi juga pasca-penempatan (setelah bekerja). Hal ini tercermin dari permasalahan yang dihadapi oleh PMI yang berasal dari Kabupaten Cilacap baik saat di luar negeri maupun yang sudah kembali ke daerah asal, seperti yang dituturkan oleh informan berikut ini:

“[...] banyak kasus pekerja migran yang mendapatkan penganiayaan di luar

negeri, entah itu diperkosa, entah itu disiksa, entah itu digaji sedikit, tidak sesuai dengan job. Terus belum lagi kalau proses PMI ketika akan ke luar negeri, ketika dia di luar negeri, ketika dia pulang, luar biasa banyak, menumpuk. Ibaratnya kalau kita lihat bagaikan gunung es. Nah kebetulan di sini [di Desa Danasri Kidul] mengalami.” (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, Rabu 25 Agustus 2021).

Mengacu data pengaduan terdokumentasi dari BNP2TKI dan BP2MI yang dirangkum Noveria dkk. (2021), permasalahan yang dialami PMI pada masa selama bekerja ataupun setelah bekerja cenderung terkait dengan permasalahan pada masa sebelum bekerja seperti kurangnya pelatihan kerja, terputusnya komunikasi dengan keluarga di daerah asal, serta pemalsuan dokumen (seperti sertifikat kesehatan, KTP, atau ijazah). Dalam konteks ini, salah satu penyebab terjadinya penyiksaan dapat terkait juga karena kekecewaan majikan terhadap kualitas PMI akibat kurangnya pelatihan kerja pada tahap pra-penempatan.

Berdasarkan analisis hasil wawancara mendalam dan FGD, Tabel 2 menyajikan gambaran mengenai beberapa kecenderungan tipe purna-PMI dan permasalahannya di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu.

Tabel 2. Tipe Purna-PMI dan Permasalahannya di Desa Danasri Kidul

1	Gaya hidup yang cenderung konsumtif. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, hanya sekedar untuk gengsi. Misalnya membeli perhiasan terbaru, sepeda motor terbaru, TV terbaru, telepon seluler terbaru.
2	Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena tabungan sudah digunakan untuk membangun rumah dan membayar biaya pendidikan anak.
3	Minimnya program/pelatihan yang terkait dengan usaha ekonomi produktif.
4	Minimnya pendampingan terhadap mereka yang mengalami trauma, kasus hukum, dan lain sebagainya.
5	Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri.

¹ Konvensi ini diadopsi oleh UN melalui General Assembly Resolution 45/158 of 18 December 1990. Namun, konvensi ini baru mulai berlaku pada 1 Juli 2003 setelah jumlah

negara yang meratifikasi mencapai 20 negara pada Maret 2003.

² <https://www.iom.int/global-compact-migration>

6	Kembali pada aktivitas menjadi ibu rumah tangga atau pekerja serabutan.
7	Menganggur/tidak bekerja.
8	Kembali bekerja ke luar negeri (kembali menjadi PMI) sebagai pilihan terakhir dan terpaksa berpisah dengan keluarga selama puluhan tahun.

Sumber: Temuan Penelitian (2021)

Tabel 2 menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi para purna-PMI adalah kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan atau pemanfaatan hasil kerja yang mereka peroleh untuk kegiatan/usaha ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tidak hanya dikarenakan minimnya literasi keuangan, tetapi juga minimnya program/pelatihan terkait usaha ekonomi produktif bagi para purna-PMI. Hampir sebagian besar informan peserta FGD mengatakan bahwa mereka seperti memulai kehidupan dari nol dalam bidang ekonomi setelah kembali dari (bekerja) luar negeri. Akhirnya, mereka terpaksa kembali menjadi PMI agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan pegiat FWBM berikut ini.

“Kebanyakan masalah pengelolaan keuangan. Yang purna, ketika pulang ke Indonesia sementara di sana terbiasa punya uang dan sebagainya sampai di Indonesia karena memang paradigmanya untuk mendapatkan uang adalah membarter tenaga dan waktu, kerja pada oranglain, maka ketika pulang uangnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Misalnya, untuk beli motor baru, beli tv baru, serba baru motor, mobil, hape, yang sebetulnya belum menjadi sesuatu yang betul-betul dibutuhkan. Nah ini menjadi keprihatinan, sehingga setelah beberapa waktu di rumah akhirnya uangnya habis, cenderung kemudian pergi lagi [kembali menjadi PMI]” (HS, 40 tahun, pegiat FWBM, Selasa 24 Agustus 2021).

Minimnya literasi keuangan para purna-PMI juga dikarenakan rendahnya latar belakang pendidikan mereka. Hal ini sesuai dengan data sekunder dari P4MI Kabupaten Cilacap (2020) yang menunjukkan bahwa mayoritas mereka

berpendidikan SD dan SMP, berjenis kelamin perempuan, serta bekerja di sektor informal (*domestic workers*) saat bekerja di luar negeri. Hal ini menempatkan purna-PMI pada kelompok yang rentan, seperti yang diungkapkan oleh informan pegawai P4MI setempat berikut ini.

“Jadi kalau untuk di Cilacap yang rentan ini kan biasanya yang [dulu bekerja di sektor] informal dengan pendidikan yang rendah (ke Singapur, Hongkong, Taiwan, Malaysia). Kadang berpikirnya hanya sebatas dia bekerja di luar negeri mendapatkan gaji hanya untuk konsumsi, pendidikan anak, hanya sebatas itu aja. Tapi sesampainya di Indonesia, di daerah asal, tiga sampai empat bulan mereka ya sudah, karena mungkin tabungan sudah habis, akhirnya memutuskan untuk pergi [menjadi PMI] lagi.” (EK, 45 tahun, pegawai P4MI Kabupaten Cilacap, Kamis 26 Agustus 2021).

Jejak Langkah dan Peran FWBM

Secara keseluruhan, tipe purna-PMI dan permasalahannya di Desa Danasri Kidul dapat dikatakan sebagai salah satu “potret buram” masyarakat Kabupaten Cilacap. Artinya, hal tersebut bukan hanya terjadi pada saat ini atau baru-baru ini saja melainkan sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, FWBM yang diinisiasi oleh kader-kader NU Kabupaten Cilacap pada tingkatan akar rumput – RT/RW/dusun – dalam naungan Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap senantiasa berupaya untuk memberikan solusi-solusi melalui program pemberdayaan. Pada konteks ini, program pemberdayaan yang dilakukan oleh FWBM dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) para purna-PMI agar dapat melakukan kegiatan/usaha ekonomi yang produktif di daerah asal, khususnya di Desa Danasri Kidul. Dengan upaya ini, purna-PMI di desa tersebut diharapkan bisa lebih berdaya, mandiri, sejahtera, dan tidak kembali bekerja ke luar negeri (kembali menjadi PMI).

FWBM secara “resmi” menerapkan program pemberdayaan bagi para purna-PMI

pada tahun 2011. Sampai saat ini, program tersebut masih berjalan. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk mengajak/mengedukasi para purna-PMI agar mereka mengorganisasikan diri ke dalam sebuah wadah komunitas FWBM. Dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang, dimulai sejak sekitar tahun 2002–2003, Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap menginisiasi Forum Warga (FW). Secara sederhana, FW berbentuk kelompok-kelompok sosial/sektoral, misalnya kelompok rembug dusun, pengajian, arisan, lintas agama, peternak, petani, pedagang, dan lain sebagainya. FW tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nusawungu, Binangun, dan Adipala. Di tiap kecamatan tersebut, FW dapat ditemukan di 10 desa, salah satunya di Desa Danasri Kidul.

Salah satu kegiatan rutin FW setiap bulannya adalah ‘Diskusi Kampung’ (Diskam), yakni sebuah sesi untuk saling bertukar pikiran, mencurahkan isi hati (curhat), dan bahkan menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai pelayanan publik di tingkat desa/kecamatan/kabupaten di Cilacap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terkait dengan hak-hak masyarakat yang belum tersosialisasikan (belum terpenuhi). Pada tahun 2008, para pegiat FW menyadari adanya beragam permasalahan yang dihadapi oleh para eks buruh migran di desanya, misalnya belum terpenuhinya hak-hak mereka. Dari sini, teretuslah gagasan dari para pegiat FW tersebut untuk memulai membentuk FW khusus bagi para buruh migran, eks buruh migran, dan keluarganya bahkan calon buruh migran sekalipun (FWBM).

Pada rentang waktu mulai dari 2008 sampai dengan 2010, para pegiat FWBM melakukan pendekatan langsung (*door to door*) untuk mengedukasi para purna-PMI akan pentingnya komunitas eks buruh migran sebagai wadah untuk saling berbagi (*sharing*) cerita atau pengalaman mereka ke masyarakat sekitar. Dalam rentang waktu tersebut, kegiatan FWBM hanya sekadar sesi berbagi cerita atau pengalaman mereka selaku purna-PMI, terutama saat mereka menjadi PMI di luar negeri. Berbagi cerita ini dapat membuka wawasan mereka dan menjadi pertimbangan bagi seseorang yang

hendak bekerja di luar negeri (menjadi PMI). Berikut petikan wawancara mendalam dengan pegiat FWBM terkait kondisi tersebut.

“Oh ya sangat luar biasa, manis, pahit getir. Kalau diceritakan itu mungkin akan jadi sebuah novel. Ada cerita sedihnya, ada senangnya. Yang jelas kita door to door. Terus kita juga melalui forum-forum NU juga. Itu sangat sulit sekali untuk bisa ngobrol dengan mantan TKI. [...] [kami] Terus-menurus door to door untuk merayu mereka karena ‘ini lho penting, nanti anak kita jadi TKI lagi. Apa diwariskan terus-menerus di luar negeri? Njenengan sekarang bisa lihat, njenengan ke luar dari luar negeri njenengan kondisinya kayak gini. Apa mau seperti ini terus? Kehidupan ini terus diwariskan? Kita perlu sharing, kita perlu ngobrol biar pengalaman-pengalaman njenengan di sana yang manis yang pahit itu bisa didengar umum’.” (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, Rabu 25 Agustus 2021).

Pada tahun 2011–bertepatan adanya penawaran program kerja sama dengan Tifa Foundation yang didanai oleh World Bank – FWBM secara “resmi” dideklarasikan. Namun dalam pelaksanaan program tersebut, Tifa Foundation menggunakan istilah CBO (*Community Based Organization*) untuk menyebut FWBM dan istilah CO (*Community Organizer*) untuk menyebut pegiat/koordinator FWBM. CBO ini tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nusawungu, Binangun, dan Adipala. Di tiap kecamatan tersebut terdapat CBO di 10 desa, sebagaimana dipaparkan oleh informan pegiat FWBM:

“Di 2011 kita deklarasi namanya Forum Warga Buruh Migran (FWBM). Kemudian waktu kita dengan Tifa itu ada istilah CBO dan CO. CBO Community Based Organization itu ya FWBM, CO itu Community Organizer orangnya, koordinatornya. CBO dan CO itu untuk bahasa proyeknya Tifa. [...] Tifa itu juga punya program yang arahnya ke situ (pemberdayaan eks buruh migran)

sehingga kemudian kita mencoba melakukan komunikasi yang akhirnya kemudian kita bisa kerja sama.” (HS, 40 tahun, pegiat FWBM, Selasa 24 Agustus 2021).

Adapun karakteristik anggota FWBM yang menjadi subjek garapan FWBM yaitu mayoritas purna-PMI Singapura atau Malaysia, berjenis kelamin perempuan, *low-educated* (SD atau SMP), *eks domestic worker* (*eks* pekerja rumah tangga atau sektor informal), keluarga PMI (suaminya masih bekerja di Malaysia), dan rata-rata usianya berkisar 35-50 tahun. Beberapa informan selaku pegiat FWBM menyatakan bahwa pada dasarnya sasaran program pemberdayaan komunitas FWBM terbuka untuk masyarakat luas (para PMI, purna-PMI, dan keluarganya, bahkan calon PMI sekalipun). Lebih lanjut, jangkauan program pemberdayaan komunitas FWBM berbasis pada kedekatan wilayah domisili atau dusun-dusun (RT/RW) dari para purna-PMI. Hal ini supaya lebih memudahkan dalam berkoordinasi. Namun, basis wilayah domisili ini tidaklah kaku, sebab jika ada purna-PMI yang berbeda wilayah domisili atau dusun, maka boleh saja mereka bergabung.

FWBM sebagai Organisasi Berbasis Komunitas

Organisasi berbasis komunitas atau *Community Based Organization* (CBO) memiliki sebutan yang berbeda-beda di berbagai wilayah, seperti asosiasi pengembangan komunitas (*community development associations*), perkumpulan/kelompok/forum/asosiasi (*societies*), organisasi kesejahteraan (*welfare organizations*), paguyuban-kekerabatan (*neighborhood councils*), dan perhimpunan (*united community*) (Agbola & Tunde, 1998, dalam Ali & Khan, 2015). Namun, Chechetto-Salles dan Geyer (2006) mendefinisikan CBO sebagai organisasi yang menyediakan berbagai pelayanan sosial di tingkat lokal. CBO merupakan organisasi nirlaba (*non-profit organisation*) yang kegiatan-kegiatannya didasarkan terutama pada upaya sukarela. Oleh karena itu, CBO sangat bergantung pada kontribusi kerja-kerja para relawannya dan

dukungan material serta keuangan dari donatur. Dapat disimpulkan, karakteristik CBO meliputi (i) berorientasi pada layanan; (ii) bertindak di tingkat lokal; (iii) bersifat nirlaba; dan (iv) berdasarkan kerja-kerja sosial/asas kesukarelaan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kerangka pemikiran CBO sebagai suatu organisasi nirlaba yang terletak dalam komunitas tertentu, keanggotaannya bersifat lokal, aktivitasnya didasarkan pada asas kesukarelaan dengan tujuan bersama/kolektif untuk kesejahteraan komunitas yang bersangkutan.

FWBM bisa dikategorikan sebagai CBO organisasi berbasis komunitas lokal karena FWBM berorientasi pada pelayanan sosial (pemberdayaan) di tingkat lokal. Dapat dipahami bahwa jejak langkah FWBM dibentuk untuk mewadahi tidak hanya bagi para PMI, purna-PMI di daerah asal (di desa/kampung halaman) dan keluarganya, tetapi juga calon PMI. Dalam aktivitasnya, FWBM selalu berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para anggotanya. Terlebih lagi, aktivisme FWBM didasarkan pada asas kesukarelaan (nirlaba) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Lebih lanjut, Ali dan Khan (2015) menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara CBO dan pengembangan komunitas (kesejahteraan komunitas), salah satunya melalui pemberdayaan komunitas. CBO berperan penting dalam mengedukasi dan mendorong penduduk lokal dalam pemecahan masalah. Dalam konteks ini, CBO memiliki kapasitas untuk membantu mereka memilah permasalahan dan menyelesaikannya secara bersama. Demikian juga yang terjadi di FWBM, perumusan program pemberdayaan FWBM berbasis pada apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan para anggotanya. FWBM menyadari sejatinya para anggota komunitaslah yang lebih tahu apa yang dibutuhkannya.

Dapat dikatakan bahwa FWBM mempunyai kapasitas dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI. Menurut Mattessich (2009), kapasitas ini disebut sebagai kapasitas sosial yang meliputi kemampuan komunitas dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri. Dengan kata lain,

FWBM pada dasarnya memiliki kemampuan (meskipun masih tampak sederhana dan memiliki keterbatasan) dalam mengorganisasikan diri mereka sendiri guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para anggotanya (calon PMI/PMI/purna-PMI dan keluarganya). Hal ini terbukti dari aktivisme FWBM yang hingga kini masih terus berjalan. Salah satunya di Desa Danasri Kidul yang dalam perkembangannya kemudian tidak hanya dimotori oleh kader-kader Lakpesdam, tetapi juga Fatayat NU Kabupaten Cilacap. Hingga tahun 2021, anggota FWBM yang merupakan purna-PMI di desa ini sudah mencapai ratusan orang. Situasi ini menunjukkan bahwa FWBM sebagai organisasi berbasis komunitas tidak bisa dikesampingkan. Temuan penelitian ini sejalan dengan Darmajanti (2002) yang menekankan bahwa pelaksanaan pemberdayaan komunitas untuk memperbaiki kondisi kehidupan para anggotanya perlu mempertimbangkan keberadaan organisasi berbasis komunitas yang telah ada, baik dari dinamika berorganisasi, kinerja, maupun jaringan kerja sama.

Program Pemberdayaan Komunitas Purna-PMI di FWBM

Ife dan Tesoriero (2006) menjelaskan bahwa pemberdayaan komunitas artinya menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada para anggotanya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memperbaiki kondisi atau kualitas kehidupannya. Dalam praktiknya, pemberdayaan komunitas sangat berbeda-beda. Banyak program pemberdayaan komunitas yang berupaya membangun dengan fokus hanya pada satu bidang dan mengabaikan bidang-bidang lainnya. Sebagai contoh, pemberdayaan yang berfokus pada bidang pendidikan tetapi mengabaikan bidang ekonomi, kesehatan, dan bidang sosial lainnya. Di sisi lain, banyak juga program pemberdayaan komunitas yang berpijak pada asumsi bahwa dimulai bidang ekonomi, maka bidang sosial lainnya akan mengikuti. Poin pentingnya yaitu pemberdayaan komunitas yang hanya fokus pada satu bidang sudah pasti akan gagal karena didasarkan pada pemikiran linear, bukan pendekatan holistik. Namun, dalam situasi

tertentu, tidak semua bidang akan mendapat prioritas yang sama antara komunitas yang satu dan lainnya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan komunitas.

Berdasarkan analisis hasil wawancara mendalam dan FGD, peneliti menemukan gambaran tentang berbagai program pemberdayaan komunitas purna-PMI yang terdapat di FWBM. Berbagai program pemberdayaan tersebut setidaknya bisa dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu ekonomi, teknologi informasi komunikasi (TIK), hukum, dan mental-psikologis.

Dalam bidang ekonomi, FWBM menyadari perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, FWBM telah dan masih melaksanakan beragam kegiatan diantaranya pelatihan pengelolaan keuangan, menjahit, membuat kue, keripik, produksi telur asin, bakso, *fried chicken*, dan lain sejenisnya. Salah satu terobosan yang berhasil dan kemudian menjadi kekuatan aktivisme FWBM yakni mendirikan Koperasi Serba Usaha Baitulmaal Wattamwil (BMT) Buruh Migran (Bumi) Sejahtera pada tahun 2015. Hingga kini koperasi tersebut masih berjalan. Tidak hanya melayani simpan-pinjam, koperasi ini juga mewadahi produk-produk olahan dari para anggotanya seperti kue, keripik, telur asin, dan lain sejenisnya. Di sini tampak suatu alternatif dari FWBM yang mengelaborasi konsep koperasi dengan mini-market untuk memasarkan berbagai produk dari purna-PMI, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini.

“Alhamdulillah, kalau koperasinya sampai detik ini saya pertahankan agar menjadi kekuatan kita [...] bisa mengembangkan usaha. Koperasi kita bukan hanya simpan-pinjam tapi sudah merambah ke jual-beli dari produk-produk punya teman-teman mantan TKI dijual di koperasi.” (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, Rabu 25 Agustus 2021).

Kehadiran koperasi ini memberikan dampak positif khususnya bagi para anggotanya dan umumnya masyarakat luas di sekitar. Mereka bisa sewaktu-waktu meminjam uang ke koperasi

pada saat mereka membutuhkan dana mendadak seperti untuk biaya pendidikan anak serta perawatan anak atau anggota keluarganya yang sakit. Selain itu, mereka dapat meminjam uang di koperasi untuk mengembangkan usaha, misalnya warung sembako. Beberapa informan menyatakan bahwa yang menjadi nilai tambah dari proses pinjaman di koperasi ini adalah mudah, tidak berbelit-belit, dan cepat. Hal ini dilandasi adanya rasa kepercayaan yang tinggi di antara anggota FWBM.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam pemberdayaan pada bidang ekonomi adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan FWBM untuk merubah pola pikir para purna-PMI agar tetap mempunyai semangat dan jiwa kewirausahaan. Hal ini diakui oleh para pegiat FWBM bahwasanya semangat dan jiwa kewirausahaan para purna-PMI masih tergolong lemah. Artinya, bukan hanya persoalan modal usaha (uang) melainkan juga terkait dengan pola pikir (*mindset*). Dalam pandangan otokritiknya para pegiat FWBM mengungkapkan bahwa manakala pola pikir belum berubah (berjiwa wirausahawan) “yang tahan banting” maka seberapa pun besar modal usaha yang diberikan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usahanya. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian IOM dkk. (2021) yang mengungkapkan bahwa akses permodalan dan perubahan pola pikir dari purna-PMI itu sendiri diperlukan untuk mendukung kewirausahaan para purna-PMI.

Terkait pemberdayaan bidang teknologi informasi komunikasi (TIK), FWBM awalnya hanya menggagas upaya untuk memupuk kepercayaan diri para anggotanya dengan cara melatih mereka supaya berani menceritakan pengalaman-pengalamannya dalam bentuk tulisan di media sosial (Facebook). Oleh karena itu, FWBM melakukan pelatihan menulis reportase sederhana dan memberikan pengetahuan bermedia sosial yang baik. Dari sinilah kemudian mereka cukup terampil untuk membagikan berbagai pengalamannya saat menjadi PMI, baik suka maupun duka, agar diketahui oleh masyarakat luas terutama di laman Facebook. Kemampuan tersebut juga digunakan

oleh mereka pada saat membantu orang lain, dalam arti tidak hanya sesama purna-PMI tetapi juga non-PMI. Dapat dikatakan, FWBM membekali para anggotanya kemampuan mendasar untuk menggali data/informasi dan menuliskan kronologi dari sebuah permasalahan.

Penting juga digarisbawahi bahwa pada bulan September 2020 yang lalu telah dilaksanakan pelatihan *digital marketing* di FWBM. Pelatihan tersebut terselenggara atas kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Pelatihan tersebut diberikan dalam rangka menjawab kebutuhan para anggota FWBM yang mayoritas sudah memiliki usaha produk-produk olahan tetapi masih menghadapi kendala pemasaran. Situasi ini diungkapkan oleh informan anggota FWBM sebagai berikut.

“Selain modal, kalau bisa jualan online bisa lebih luas lagi. Kayak kemarin saya bawa ke Yogja, dari dia berapa terus saya tawarin ke temen, saya titipkan ke warung temen, saya online [melalui WA saja] juga sampai ke Papua ke Bali saya kirimin.” (RF, 38 tahun, anggota FWBM, peserta FGD, Minggu 19 September 2021).

Dalam pelatihan-pelatihan *digital marketing* semacam ini FWBM seringkali berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Unsoed Purwokerto, Universitas Amikom Yogyakarta, dinas-dinas terkait, dan komunitas wartawan/pers lokal Kabupaten Cilacap. Peserta pelatihan ini tidak hanya anggota FWBM, tetapi salah satu anggota keluarga juga diikutsertakan supaya mereka melek teknologi digital. Pengetahuan yang diberikan seperti penggunaan gawai, yang selain untuk komunikasi juga bisa untuk mengemas dan memasarkan produk usaha secara digital. Artinya, FWBM sudah menyadari bahwa praktik-praktik TIK sederhana semacam itu juga penting dalam proses pemberdayaan bagi para purna-PMI, terutama dalam mengakselerasi kewirausahaan para anggotanya. Hal ini sejalan dengan studi Wahyono dkk. (2019) dan Laksono dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pelatihan di bidang TIK memiliki peranan penting dalam

proses pengembangan kewirausahaan di desa asal PMI, terutama untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi pemasaran produk.

Selanjutnya, langkah awal FWBM dalam pemberdayaan di bidang hukum adalah melalui kegiatan diskam dalam melakukan sosialisasi atau edukasi para anggotanya mengenai berbagai kebijakan yang terkait dengan perlindungan (termasuk pemberdayaan) purna-PMI dan keluarganya. Edukasi tentang hukum ini membahas peraturan perundang-undangan mulai dari kebijakan tingkat pusat (seperti UU No. 18 Tahun 2017), tingkat daerah (seperti peraturan daerah Kabupaten Cilacap), sampai dengan di tingkat desa (seperti peraturan desa). Edukasi ini oleh FWBM dikenal dengan sebutan pelatihan paralegal. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif serta sensitivitas anggota FWBM terhadap implementasi dari berbagai kebijakan khususnya yang terkait dengan nasib para purna-PMI. Untuk kepentingan ini, FWBM menggandeng para advokat probono yaitu advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Para advokat probono ini antara lain dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Selain menjadi narasumber, para advokat tersebut sekaligus menjadi mentor para anggota FWBM melalui praktik-praktik pendampingan dan advokasi kasus hukum.

Dari semua upaya pemberdayaan hukum yang dilakukan, FWBM diharapkan tidak hanya mampu menangani permasalahan hukum yang menimpa para anggotanya ataupun keluarganya, tetapi juga menjadi paralegal bagi masyarakat luas di sekitarnya. Namun, FWBM selalu menekankan bahwa menjadi paralegal merupakan kerja sosial ‘panggilan hati’ dalam arti tanpa mengharapkan imbalan satu rupiah pun. Selain itu menjadi paralegal juga harus bertindak penuh kehati-hatian dengan tetap mengacu pada aturan/norma yang berlaku serta berkonsultasi dengan para advokat probono baik dari SBMI maupun LBH. Beberapa pegiat FWBM menyatakan bahwa pemberdayaan di bidang hukum telah cukup membuahkan hasil. Hal ini diindikasikan dari catatan FWBM dari

tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa laporan kasus yang menimpa calon PMI/PMI/purna-PMI dan keluarganya cenderung terus menurun. Cahyani dkk. (2019) juga mengungkapkan bahwa paralegal FWBM berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pendampingan dan advokasi kasus hukum. Mereka melakukan penyelesaian kasus di luar pengadilan atau nonlitigasi melalui mediasi dan negosiasi, yang berdampak pada penurunan jumlah kasus yang dialami oleh calon PMI/PMI/purna-PMI dan keluarganya.

Pendampingan dan advokasi hukum bagi para purna-PMI di FWBM juga dilakukan bersamaan dengan pendampingan mental-psikologisnya, seperti diungkapkan oleh para pegiat FWBM. Alasannya, mengingat permasalahan yang sering ditemui pada PMI umumnya adalah kekerasan fisik, gaji yang tidak dibayar serta tidak memiliki asuransi kesehatan. FWBM menyebutkan bahwa pernah menangani suatu kasus purna-PMI yang ketika pulang dari luar negeri tidak membawa apa-apa, yang melekat hanya baju yang dipakainya, dan dengan kondisi tidak bisa berjalan akibat dianiaya oleh majikannya. Singkatnya, permasalahan yang dialami bukan hanya pada kondisi fisik tetapi juga juga kesehatan mental-psikologis purna-PMI tersebut. Iqbal (2019) mengungkapkan bahwa ancaman stres dan gangguan psikologis PMI bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan dan pendampingan terkait dengan kesehatan mental-psikologis PMI, termasuk purna-PMI. Terkait hal itu, FWBM melakukan pemberdayaan di bidang mental-psikologis berupa upaya pengobatan dan rehabilitasi anggotanya baik secara fisik maupun mental-psikologis agar tetap semangat untuk bangkit menjalani kehidupan lagi. Pemberdayaan ini tentunya dengan melibatkan tenaga medis dan psikolog untuk memberikan pendampingan.

Hal lain yang dilakukan FWBM dalam pemberdayaan di bidang mental-psikologis adalah mengadakan kegiatan kebersamaan dan menciptakan suasana yang nyaman dengan melibatkan partisipasi para anggotanya. Dari kegiatan ini diharapkan kemudian muncul rasa memiliki (*sense of belonging*) dan ikut serta

bertanggung jawab bersama di dalam FWBM (*sense of community*), seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini.

“[di FWBM] Ada kegiatan yang untuk siraman rohani, pengajian. Seminggu sekali, tiap hari minggu. [FWBM] sebagai tempat kumpul, kita sharing, sebagai wadah kita untuk curhatanlah.” (ST, 46 tahun, anggota FWBM, peserta FGD, Minggu 19 September 2021).

Dapat dikatakan bahwa FWBM merupakan “ruang/rumah bersama” untuk berbagi terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para anggotanya. Beberapa informan peserta FGD mengungkapkan bahwa secara psikologis ketika ada permasalahan yang diceritakan kepada “teman yang senasib-sepenanggungan” di FWBM, maka mereka akan merasa lega. Hal ini dikarenakan mereka akan mendapatkan tanggapan berupa masukan atau solusi atas permasalahannya. Hal ini sejalan dengan Yuniarto (2019) yang menyimpulkan bahwa komunitas pekerja migran sebagai bagian dari lembaga/organisasi pemberdayaan berperan sebagai “teman” untuk memberikan bantuan bagi anggotanya yang membutuhkan. Peran tersebut juga dapat dilihat sebagai “agen yang tidak terlihat” untuk membangun kesetiakawanan sosial dan kebersamaan.

Tantangan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Komunitas Purna-PMI FWBM

Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya kapasitas komunitas FWBM sebagai suatu organisasi berbasis komunitas lokal guna pelaksanaan pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal. Pada konteks ini, FWBM tentu perlu dijaga eksistensinya. Sebagaimana diketahui, FWBM secara ‘resmi’ dideklarasikan pada tahun 2011, tetapi sebetulnya praktik-praktik pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal di Kabupaten Cilacap telah dilakukan sejak tahun 2008. Kerja sama dengan Tifa Foundation pada tahun 2011 semakin meneguhkan Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap melalui FWBM untuk melaksanakan berbagai program pemberdayaan komunitas purna-PMI.

Kendatipun program kerja sama dengan Tifa Foundation sudah berakhir pada tahun 2014, berbagai bidang program pemberdayaan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Dalam perkembangan pengorganisasiannya, berbagai bidang program pemberdayaan komunitas purna-PMI FWBM di Desa Danasri Kidul tidak hanya dimotori oleh Lakpesdam, tetapi juga oleh Fatayat NU Kabupaten Cilacap. Tentunya dengan beragam bentuk penyesuaian program seiring kebutuhan dari para anggota FWBM itu sendiri.

Aktivisme FWBM dalam memberdayakan komunitas purna-PMI senantiasa berpijak pada kebutuhan para anggotanya “dari bawah” (*bottom-up*). Hal ini dapat memperkuat komitmen dan *ownership* terhadap program pemberdayaan tersebut, serta untuk keberlanjutan program bagi komunitas FWBM itu sendiri. Pada akhirnya, program pemberdayaan komunitas purna-PMI melalui FWBM dapat meningkatkan kualitas kehidupan para anggotanya menjadi lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera.

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan komunitas purna-PMI, FWBM masih menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pegiat FWBM yang bersedia untuk menjadi relawan lapangan dalam arti bisa siap-sedia setiap waktu untuk mengelola dan mampu memfasilitasi pemecahan masalah para anggotanya. Kendala lainnya yaitu meskipun pada umumnya kegiatan pelatihan dalam program pemberdayaan tersebut tidak dipungut biaya, FWBM tetap harus menyiapkan dana swadaya untuk biaya operasional. Meskipun sudah ada iuran anggota, pada prinsipnya FWBM tidak ingin biaya operasional menjadi beban para anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh purna-PMI di daerah asal di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Hal ini mendorong FWBM yang diinisiasi dan dimotori oleh kader-kader NU

Kabupaten Cilacap (Lakpesdam dan Fatayat) pada tingkatan akar rumput—RT/RW/dusun—berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Adapun aktivisme FWBM dimanifestasikan dalam program pemberdayaan komunitas purna-PMI dan keluarganya.

Keberadaan FWBM menjadi penting dalam kapasitasnya sebagai organisasi berbasis komunitas lokal. Dengan pendekatan holistik, FWBM membantu purna-PMI dalam mengorganisasikan diri mereka sendiri (dan keluarganya), mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, menyusun perencanaan, dan pemecahan masalah/solusi bersama. Empat bidang program pemberdayaan di FWBM adalah ekonomi, TIK, hukum, dan mental-psikologis. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pemberdayaan tersebut telah dan masih berjalan dengan baik, dalam arti meningkatkan kemampuan para purna-PMI dan keluarganya untuk memperbaiki kondisi atau kualitas kehidupannya agar bisa lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera. Namun demikian, FWBM menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya SDM (relawan) dan finansial.

Penelitian ini membuktikan bahwa organisasi berbasis komunitas lokal memiliki kontribusi dan peranan yang penting dalam keberhasilan program pemberdayaan komunitas. Oleh karena itu, secara praktis, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah (Kemnaker dan BP2MI) agar memprioritaskan organisasi berbasis komunitas lokal untuk bisa menjadi alternatif model pemberdayaan komunitas purna-PMI dan keluarganya di daerah asal. Sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemberdayaan tersebut meliputi pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi purna-PMI. Lebih jauh dari itu, FWBM tidak hanya melakukan pemberdayaan di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga melingkupi bidang TIK, hukum, dan mental-psikologis. Secara akademik, peneliti menyarankan penelitian selanjutnya menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Dengan demikian, peneliti terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam

setiap tahapan program pemberdayaan komunitas, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Melalui metode PRA, penelitian selanjutnya diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam sehingga dapat memperkaya analisis teoretis yang masih jarang dikaji, utamanya terkait dengan organisasi berbasis komunitas lokal dalam pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan *preliminary study* dari Tesis Rahmat Saleh (peneliti) yang dibimbing oleh Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si. sebagai pembimbing pertama (promotor) dan Prof. Dr. Aswatini, M.A. sebagai pembimbing kedua (co-promotor). Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada para pembimbing tersebut atas segala sumbangsuhnya. Terima kasih juga kepada Kedepatian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (sekarang berubah menjadi Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora [IPSH] Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]) yang telah memberikan dukungan pendanaan penelitian ini melalui program beasiswa *Degree by Research*. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak, terutama para informan yang telah membantu dan berpartisipasi dalam wawancara serta berbagi informasi/data terkait dengan penelitian ini.

PERNYATAAN CONFLICTS OF INTEREST

Kami menyatakan bahwa tidak ada *conflict of interest* sehubungan dengan penelitian, penulisan, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI

Dalam artikel ini, Rahmat Saleh berperan sebagai Kontributor Utama, sedangkan Ricardi S. Adnan dan Aswatini Raharto berperan sebagai Kontributor Anggota (pembimbing).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Khan, A. (2015). Benefits of community-based organizations for community development. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 1(2), 39-43. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v1.2.15>
- Andayani, F., & Pahlawan, I. (2017). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia tahun 2013-2015. *JOM FISIP*, 4(2), 1-9. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15242>
- BP2MI [Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]. (2018). Data penempatan dan pelindungan PMI periode tahun 2018. Pusat Data dan Informasi BP2MI. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf
- BP2MI [Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]. (2019). Data penempatan dan pelindungan PMI periode tahun 2019. Pusat Data dan Informasi BP2MI. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf)
- BP2MI [Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]. (2020). Data penempatan dan pelindungan PMI periode tahun 2020. Pusat Data dan Informasi BP2MI. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>
- BP2MI [Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]. (2021). Data penempatan dan pelindungan PMI periode tahun 2021. Pusat Data dan Informasi BP2MI. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>
- Bank Indonesia. (2021). Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia: Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut negara penempatan. https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf
- Banks, N., & Hulme, D. (2012). The role of NGOs and civil society in development and poverty reduction (SSRN Scholarly Paper No. 2072157). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2072157>
- Cahyani, R. T., Al-Rasyid, M., & Rejekiingsih, T. (2019). Partisipasi paralegal dalam pendampingan hukum non litigasi bagi tenaga kerja Indonesia luar negeri (Studi pada Forum Warga Buruh Migran Nusawungu Kabupaten Cilacap). *Jurnal PPKn*, 7(2), 174-186. <https://doi.org/10.2019/jppkn.v7i2.87>
- Chechetto-Salles, M. & Geyer, Y. (2006). Community-based organisation management, Handbook series for community-based organisations. Institute for Democracy in South Africa (IDASA).
- Darmajanti, L. (2002). Kehidupan berorganisasi sebagai modal sosial komunitas Jakarta. *Jurnal Masyarakat*, 11, 62-88.
- Dewayanti, R. (2010). Penguasaan tanah, migrasi internasional dan perubahan pedesaan. *Jurnal Analisis Sosial*, 15(2), 57-72. <https://www.akatiga.org/wp-content/uploads/2021/02/JAS-Vol.-15-No.-2-2010.pdf>
- Dumi, A., Jahmurataj, I., Siagniliss, I., & Maze, D. (2014). The role of community-based organizations in management access and success of public administration development empirical analysis in front of Theory-Cal analysis. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(3), 457-466. <https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n3p457>
- Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai civil society di Indonesia. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 13(2), 233-249. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1098>
- Goldring, L. (2004). Family and collective remittances to Mexico: A multi-dimensional typology. *Development and Change*, 35(4), 799-840.

- <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00380.x>
- Ife, J. & Tesoriero, F. (2016). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (3rd edition) (S. Manullang, N. Yakin, & M. Nursyahid, Penerjemah). Pustaka Pelajar. (Publikasi asli diterbitkan 2006).
- IOM [International Organization for Migration], UNDP [United Nations Development Program], & SBMI [Serikat Buruh Migran Indonesia]. (2021). *Memperkuat kapasitas desa dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia: Praktik terbaik dan inklusi layanan selama pandemi COVID-19*. IOM, UNDP, & SBMI.
- Iqbal, M. (2019). Apakah pekerja migran Indonesia sehat mental? *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2), 65–82. <https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.825>
- Kristanti, M. V. A. (2021). Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam penyelesaian isu migrasi pekerja perempuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 95–109. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.20845>
- Kwok, C. H., Samah, A. A., Hashim, A. H., Redzuan, M., & Jaafar, W. M. W. (2015). Peranan organisasi berasaskan komuniti (OBK) dalam pembangunan komuniti: Suatu pemerhatian awal. *Geografia: Malaysian Journal of Society and Space*, 11(3), 53–60. <http://journalarticle.ukm.my/9224/1/6x.geografia-mac15-kwok&asnarul-edam1.pdf>
- Laksono, A. T., Astuti, S. D., Widagdo, A., & Iswahyudi, S. (2021). Peningkatan kemampuan digitalisasi promosi dan pemasaran produk kelompok eks-buruh migran di Kabupaten Wonosobo. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(1), 13–26. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i1.2867>
- Levitt, P. & Lamba-Nieves, D. (2011). *Social remittances revisited*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 37(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.521361>
- Mattessich, P. W. (2009). Social capital and community building. Dalam R. Phillips & R. H. Pitman (Ed.), *An Introduction to Community Development* (hlm. 49-57). Routledge.
- Mentari, M. & Fatimah, N. (2021). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memberdayakan mantan buruh migran di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. *Solidarity*, 10(1), 76–85. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/48013>
- Migrant CARE. (2021, 23 Juni). *Integrasi dan kontribusi pekerja migran dalam pembangunan*. Presentasi disampaikan oleh Wahyu Susilo pada FGD Penyusunan Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Implementasi Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM) IV, Klaster 3. Migrant CARE.
- Neuman, W. L. (2007). *Basic of social research: Qualitative and quantitative approaches* (Second edition). Pearson Education, Inc.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (Seventh edition). Pearson Education Limited.
- Njuguna, S. N. (2013). *The influence of community based organizations (CBOs) activities on economic empowerment of rural communities—A case of selected CBOs in Bahati division, Nakuru county*. [Thesis, University of Nairobi]. <http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/52379>
- Noveria, M., Romdiati, H., Aswatini, A., Latifa, A., Setiawan, B., Fitranita, F., Hidayati, I., & Saleh, R. (2021). Rencana Aksi Nasional (RAN) Implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler (KGM) / Global Compact for Safe, Orderly, and

- Regular Migration (GCM). Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- NU Online. (2018, 23 November). LAKPESDAM NU Cilacap berdayakan mantan pekerja migran dan keluarganya. <https://www.nu.or.id/post/read/99423/lak-pesdam-nu-cilacap-berdayakan-mantan-pekerja-migran-dan-keluarganya>
- Octaviani, L. (2015). Pemanfaatan remitansi ekonomi dan sosial di kalangan buruh migran perempuan (Studi kasus: Desa Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah). *Forum Ilmu Sosial*, 42(1), 57–59. <https://doi.org/10.15294/fis.v42i1.9245>
- P4MI [Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia] Kabupaten Cilacap. (2020). Rekap data penempatan 2020. P4MI Kabupaten Cilacap.
- Prihatiningsih, T. A. & Astuti, P. (2019). The role of Puspita Bahari as a community-based organization in empowering fisherman women (Study: Women fishermen in Morodemak Village, Bonang District, Demak Regency). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(3), 401–410. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp-gs/article/view/24102>
- Raharto, A., & Noveria, M. (2012). Advocacy groups for Indonesian women migrant workers' protection. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(1), 1-17. <https://doi.org/10.14203/jki.v7i1.80>
- Streeten, P. (1997). Nongovernmental organizations and development. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 554(1), 193–210. <https://doi.org/10.1177/0002716297554001012>
- Suhartono, E. (2012). Model-model public private partnership pada sektor pelayanan air bersih. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 72-81. <https://doi.org/10.20961/jab.v5i1.22>
- Sumardiani, F. (2014). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melindungi hak Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. *Pandecta Research Law Journal*, 9(2), 253-268. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3579>
- UN-Habitat. (2008). Housing the poor in Asian cities, No 6: Community-based organizations: The poor as agents of development. United Nations. <https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/3158>
- Wahyono, E., Kolopaking, L. M., Sumarti, T., & Hubeis, A. V. S. (2019). Jaringan digital dan pengembangan kewirausahaan sosial buruh migran perempuan. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 16(1), 57–76. <https://doi.org/10.24002/jik.v16i1.1837>
- Wahyono, S. (2007). The problems of Indonesian migrant workers' rights protection in Malaysia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2(1), 27-44. <https://doi.org/10.14203/jki.v2i1.139>
- Wahyudi, R., & Jusoh, H. (2016). Encouraging access to justice for Indonesian migrant workers in Malaysia: The need of engaging legal aid organizations in ASEAN. *Scientific Journal of PPI-UKM*, 3(3), 143–151. <https://www.kemalapublisher.com/index.php/ppi-ukm/article/view/188>
- Windiasih, R., & Sugito, T. (2019). Forum Warga Buruh Migran (FWBM) sebagai media peningkatan partisipasi pemberdayaan perempuan. *Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX*, 19-20 November 2019. <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1149>
- Yuniarto, P. R., (2019). Migrant workers empowerment through vocational education and community-based learning: A study case of Indonesian in Taiwan. *Journal of Indonesian Social Sciences and*

Humanities (JISSH), 9(2), 113–129.
<http://dx.doi.org/10.14203/jissh.v9i2.151>

Kontribusi hubungan kemiskinan dan disabilitas netra: Studi kasus di Indonesia dengan menggunakan Data IFLS tahun 2014

The relationship between poverty and visual disability: Case study in Indonesia using IFLS data 2014

Fera Febriana Sritutur

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

*Korespondensi penulis: febri.fera@gmail.com

ABSTRACT

Various studies have explored the relationship between visual impairment and poverty. This study aims to enrich understanding on the relationship between poverty and visual disability in the Indonesian context. This study uses data from Wave 5 of the Indonesian Family Life Survey (IFLS), focused on individuals aged 25 and above in 2014. The method used in this study consists of descriptive analysis and logistic regression. This study found that there is no relationship between poverty and visual impairment. The empirical result shows that people who experienced visual disability tend to have a lower probability of being poor in 2014 compared to people without visual disability. Poor persons also have lower probability to be visually disabled in 2014. This finding tends to be slightly different from previous research which showed the bidirectional relationship between poverty and visual disability. This difference might be due to the indicator of visual disability used in this study. Based on the IFLS data, people with visual disability come from a non-poor family so that they were able to perform medical check up, including eye health check. The results of this study indicate that a person with visual disability is capable of performing various activities, including productive activities. They are also able to work and create income. Thus, there is the possibility that they do not experience severe visual disability

Keywords: poverty, visual disability, IFLS

ABSTRAK

Berbagai studi telah mengkaji hubungan antara disabilitas netra dan kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan dua variabel tersebut pada konteks Indonesia. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data gelombang 5 dari Indonesian Family Life Survey (IFLS), dan berfokus pada individu berusia 25 tahun ke atas di tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan regresi logistik. Studi ini menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kemiskinan dan disabilitas netra. Hasil empiris menunjukkan bahwa individu yang mengalami disabilitas netra berisiko lebih rendah untuk mengalami kemiskinan di tahun 2014 dibandingkan individu yang tidak mengalami disabilitas netra. Individu yang miskin cenderung lebih rendah risikonya untuk mengalami disabilitas netra di tahun 2014. Temuan ini cenderung sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa individu miskin berisiko tinggi untuk mengalami disabilitas netra dan sebaliknya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh penggunaan indikator disabilitas netra dalam studi ini yang mengacu pada diagnosis mengalami gangguan penglihatan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan data IFLS, individu dengan disabilitas netra berasal dari keluarga yang tidak termasuk dalam kategori miskin sehingga mampu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata. Individu dengan disabilitas netra masih dapat melakukan berbagai macam aktivitas termasuk melakukan kegiatan yang produktif, seperti bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, kemungkinan individu tersebut tidak mengalami disabilitas netra yang cukup parah.

Kata kunci: kemiskinan, disabilitas netra, IFLS

DOI: 10.14203/jki.v17i2.756

Naskah masuk: 8 Desember 2022 Revisi akhir: 29 Desember 2022 Naskah diterima: 14 Januari 2023



ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2022 National Research and Innovation Agency.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>).

PENDAHULUAN

Penglihatan merupakan salah satu hal penting bagi seseorang. WHO (2019) menyebutkan bahwa penglihatan diperlukan dalam berbagai aspek, seperti ketika individu melakukan komunikasi secara langsung (*face to face*) dengan individu lainnya, tumbuh kembang anak, serta kemungkinan individu untuk mengakses kesehatan, bekerja, dan menghasilkan pendapatan. Sekitar 2,2 miliar penduduk dunia mengalami disabilitas netra, baik jarak dekat maupun jarak jauh.¹ Sementara itu, terdapat 34,9 juta orang yang mengalami disabilitas netra di tahun 2020 atau sekitar 12,8% dari total populasi di Indonesia.²

Pizzarello dkk. (2004) menyatakan bahwa jumlah individu yang mengalami gangguan penglihatan akan semakin meningkat apabila tidak ada upaya pencegahan. Peningkatan populasi yang mengalami gangguan penglihatan juga dipengaruhi oleh peningkatan populasi yang berusia lanjut. Studi Gooding (2006) menjelaskan bahwa disabilitas netra menyebabkan keterbatasan untuk mengakses layanan dasar (seperti kesehatan dan pendidikan), mendapatkan nutrisi yang memadai, dan menghasilkan pendapatan. Selain itu, Popivker dkk. (2010) menyebutkan gangguan pada penglihatan berpotensi menghambat individu untuk menjadi kaya, memiliki status sosial, dan rencana untuk berkeluarga.

Gangguan penglihatan telah menjadi isu serius sehingga WHO dan IAPB menerbitkan *Vision 2020: The Right to Sight Initiative* pada tahun 1990. Dokumen tersebut berisi upaya untuk mengurangi gangguan penglihatan dan upaya pencegahan terhadap terjadinya penyebab gangguan penglihatan, seperti katarak, kekurangan vitamin A, dan glaukoma. Seiring dengan kepedulian WHO untuk mengurangi dan melakukan pencegahan gangguan penglihatan, Indonesia juga berkomitmen untuk turut serta dalam melakukan upaya untuk mengurangi dan mencegah gangguan penglihatan penduduknya.

Upaya tersebut tercermin dari diratifikasinya *Vision 2020: The Right to Sight Initiative* pada tahun 2000. Sebagai bentuk nyata dari implementasi inisiatif tersebut, Kementerian Kesehatan Indonesia menerbitkan Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan 2017–2030. Dokumen tersebut berisi enam pilar sistem kesehatan yang terdiri atas tata kelola (*governance*), sumber daya manusia, peningkatan akses ke layanan, pengelolaan keuangan, teknologi dan peralatan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan. Tujuan peta jalan ini adalah agar warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk melihat. Selain itu, bagi yang mengalami gangguan penglihatan, mereka tetap dapat memperoleh peluang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki (Kementerian Kesehatan, 2017).

Di sisi lain, kemiskinan telah menjadi isu yang terus menerus dibahas dalam ilmu ekonomi hingga saat ini. Persentase penduduk miskin global menurun dari 27,7% pada tahun 2000 menjadi 8,6% di tahun 2018.³ Namun, persentase kemiskinan global kembali meningkat pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Persentase kemiskinan pada tahun 2020 diprediksi meningkat menjadi 9,1% atau 9,4%.⁴ Persentase kemiskinan pada Indonesia juga menunjukkan tren penurunan dari 16,58% pada tahun 2007 menjadi 9,22% pada tahun 2019⁵. Persentase kemiskinan di Indonesia kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 10,19% karena pandemi Covid-19. Namun, persentase kemiskinan di Indonesia kembali menunjukkan penurunan menjadi 9,71% pada tahun 2021.

Terkait dengan disabilitas netra dan kemiskinan, Sen (2009) memperkenalkan konsep *capability approach* yang menekankan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Dalam konsep *capability approach*, setiap individu memiliki keterbatasan (*constraint*) yang berbeda. Kemiskinan dan disabilitas merupakan bentuk dari *capability deprivation* (Sen, 2009). Individu yang mengalami kemiskinan memiliki

¹ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>

² <https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/magnitude-and-projections/countries/>

³ <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY>

⁴ <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>

⁵ <https://bps.go.id/indikator/23/192/1/persentase-penduduk-miskinp0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>

keterbatasan untuk mengakses peluang yang ada, seperti kesehatan. Terbatasnya peluang yang dapat diakses membuat individu kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Sementara itu, individu dengan disabilitas biasanya hidup dalam kemiskinan karena kondisi disabilitas yang dialami membatasi kemampuan individu tersebut untuk mengakses peluang.

Secara umum, kemiskinan dan disabilitas saling memengaruhi satu sama lain (Pinilla-Roncancio, 2015). Individu dengan disabilitas cenderung memiliki biaya ekstra karena kondisi disabilitas mereka. Kondisi disabilitas yang dialami individu berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, jejaring sosial, kesehatan, dan legal. Keterbatasan akses tersebut membuat individu dengan disabilitas memiliki keterampilan dan *self-esteem* yang rendah, kesehatan yang buruk, *human capital* yang rendah, rendahnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, dan rendahnya kesempatan untuk menghasilkan pendapatan. Faktor-faktor tersebut kemudian menyebabkan penyandang disabilitas cenderung rentan untuk menjadi miskin. Studi Pinilla-Roncancio dkk. (2020) menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan individu tanpa disabilitas.

Secara spesifik, disabilitas netra dan kemiskinan diduga saling berhubungan (Jaggernath dkk., 2014; Kuper dkk., 2008). Hubungan antara kemiskinan dan disabilitas (termasuk disabilitas netra) telah diuji oleh beberapa peneliti. Beberapa menyimpulkan korelasi yang positif dan beberapa yang lain menunjukkan korelasi yang negatif. Penelitian Jaggernath dkk. (2014) menunjukkan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan risiko untuk mengalami disabilitas netra. Kemiskinan menyebabkan keterbatasan bagi individu untuk mengakses pendidikan, mendapatkan pekerjaan, memperoleh layanan kesehatan, serta mengakses air bersih dan sanitasi yang layak. Keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan individu, termasuk adanya gangguan penglihatan yang akhirnya menjadi disabilitas netra. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, Arifin

dan Ananta (2021) menunjukkan adanya korelasi positif antara disabilitas netra dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketika kemiskinan semakin meningkat, kecenderungan untuk mengalami disabilitas netra juga meningkat.

Pham dkk. (2013) menemukan adanya hubungan negatif antara anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan dan pendapatan rumah tangga. Anak-anak dari rumah tangga kaya memiliki prevalensi disabilitas netra yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dari rumah tangga miskin. Hal tersebut dapat disebabkan oleh tingginya jam belajar bagi anak-anak yang berasal dari rumah tangga kaya dibandingkan jam belajar anak-anak dari rumah tangga miskin. Selanjutnya, studi Roba dkk. (2020) menunjukkan bahwa umur dan kemiskinan berhubungan erat dengan kemungkinan terjadinya disabilitas netra.

Lebih lanjut, para peneliti juga menganalisis hubungan antara kemiskinan dan disabilitas netra. Disabilitas netra dapat menyebabkan seseorang mengalami kemiskinan (Jaggernath dkk., 2014). Kondisi disabilitas netra yang dialami oleh individu menyebabkan mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, individu yang mengalami disabilitas netra menjadi kehilangan pendapatan dan kekurangan dana sehingga membuat mereka menjadi miskin. Selain itu, kondisi disabilitas netra yang dialami oleh individu berdampak pada buruknya nutrisi individu tersebut (Gladstone dkk., 2017; Jones & Bartlett, 2018). Salah satu penyebab rendahnya nutrisi pada individu dengan disabilitas netra adalah kesulitan mereka untuk berbelanja makanan (Jones dkk., 2019; Kostyra dkk., 2017).

Hasil penelitian Kuper dkk. (2008) menunjukkan bahwa individu yang memiliki katarak cenderung lebih miskin dibandingkan individu yang tidak mengalami katarak. Selain itu, kondisi disabilitas netra, yang dicerminkan dengan katarak, dapat menyebabkan kemiskinan karena berkurangnya kesempatan untuk bekerja. Namun, Bella dan Dartanto (2018) yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 menemukan

bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga seorang disabilitas netra cenderung tidak miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai penyandang disabilitas dengan tipe selain disabilitas netra.

Walaupun beberapa studi telah meneliti hubungan antara disabilitas, termasuk disabilitas netra, dan kemiskinan, namun studi dalam ranah ini masih terbatas (Banks dkk., 2017; Mont & Cuong, 2011; Pinilla-Roncancio, 2015). Keterbatasan data menjadi salah satu alasan masih terbatasnya studi mengenai hubungan kemiskinan dan disabilitas. Selain itu, Jaggernath dkk. (2014) menyatakan data kuantitatif yang komprehensif masih diperlukan untuk menguji hubungan antara kemiskinan dan disabilitas netra, juga sebaliknya. Keterbatasan data juga berdampak pada kurang bervariasinya metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti untuk menguji hubungan antara kemiskinan dan disabilitas (Bella & Dartanto, 2018).

Berdasarkan *research gap* tersebut, studi ini menguji hubungan dua arah antara kemiskinan dan disabilitas netra pada tahun 2014 untuk kasus Indonesia dengan menggunakan data dari gelombang 5 *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) yang dilakukan pada tahun 2014. Individu yang dikategorikan mengalami disabilitas netra adalah individu yang didiagnosis mengalami gangguan penglihatan oleh tenaga kesehatan. Hipotesis penulis adalah terdapat hubungan dua arah antara kemiskinan dan disabilitas netra, yang artinya individu yang miskin memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami disabilitas netra serta individu yang mengalami disabilitas netra lebih berisiko untuk menjadi miskin. Pada konteks Indonesia, penulis menduga individu yang mengalami disabilitas netra rentan untuk menjadi miskin karena berbagai keterbatasan yang dimiliki, misalnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Kemiskinan yang dialami juga dapat menjadi hambatan untuk mengakses layanan kesehatan sehingga individu dapat mengalami disabilitas netra.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data gelombang 5 IFLS tahun 2014. Sampel

penelitian ini merupakan responden yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2014. Total sampel yang digunakan sebanyak 19.319 individu. Konstruksi variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu ukuran kemiskinan dan ukuran disabilitas netra.

Berbagai macam indikator dapat digunakan sebagai proksi kemiskinan. Banks dkk. (2017) menyebutkan beberapa proksi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan yang dikaitkan dengan disabilitas, yaitu pendapatan, aset, pengeluaran per kapita, dan status sosial ekonomi, seperti karakteristik perumahan, akses ke berbagai layanan, dan tingkat pendidikan. Bella dan Dartanto (2018) menggunakan *poverty gap index* sebagai ukuran kemiskinan. Pinilla-Roncancio dkk. (2020) menggunakan ukuran kemiskinan berupa indeks kemiskinan multidimensional. Indikator kemiskinan dalam kajian ini berupa variabel biner, yaitu bernilai 1 untuk miskin dan 0 untuk tidak miskin. Kemiskinan diukur dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPS. Pengeluaran konsumsi per kapita dihitung dengan membagi jumlah total konsumsi rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Jumlah total konsumsi rumah tangga diambil dari Buku 1 Seksi Konsumsi Jenis Pangan dan Jenis Bahan Bukan Pangan. Sementara itu, jumlah anggota rumah tangga (ART) diambil dari Buku K Seksi Anggota Rumah Tangga.

Dalam penelitian yang hanya secara spesifik melihat hubungan antara disabilitas netra dan kemiskinan, terdapat berbagai ukuran disabilitas netra yang digunakan. Kuper dkk. (2008) menggunakan indikator berupa individu yang mengalami katarak untuk mengukur *visual impairment*. Ukuran disabilitas netra yang lain digunakan oleh Murthy dkk. (2005), yaitu prevalensi kebutaan dan *low vision*. Terdapat tiga kategori, yaitu $<6/60$ in *better eye*; $<3/60$ in *better eye*; dan $<6/18 - 6/60$ *better eye*. Bella dan Dartanto (2018) mengacu pada indikator yang terdapat dalam data Susenas untuk mengukur gangguan penglihatan, yaitu ketidakmampuan untuk melihat setelah menggunakan kacamata, seperti *low vision*, buta warna, atau kebutaan

total. Selanjutnya, penelitian Arifin dan Ananta (2021) menggunakan ukuran disabilitas netra berupa kesulitan untuk melihat walaupun menggunakan kacamata. Sementara itu, untuk mengukur disabilitas netra, Pham dkk. (2013) menggunakan set pertanyaan yang direkomendasikan oleh Washington Group untuk mengidentifikasi gangguan dalam enam aspek, salah satunya adalah masalah gangguan penglihatan. Opsi jawaban yang tersedia untuk pertanyaan tersebut adalah tidak mengalami gangguan, gangguan dalam kategori ringan, gangguan dalam kategori sedang, dan gangguan dalam kategori berat. Pham dkk. (2013) mengklasifikasikan seseorang mengalami disabilitas netra apabila individu tersebut mengalami gangguan penglihatan dari kategori ringan, sedang, dan berat. Individu yang menjawab tidak memiliki gangguan atau masalah penglihatan kemudian dikategorikan tidak mengalami disabilitas netra. Dalam penelitian ini, variabel disabilitas netra tahun 2014 dibentuk dengan menggunakan pertanyaan CD01 Buku 3B Seksi Penyakit Kronis (CD). Dalam kuesioner IFLS tersebut, ditanyakan apakah responden yang berusia 15 tahun ke atas didiagnosis oleh tenaga kesehatan mengalami gangguan

penglihatan atau tidak. Dalam data IFLS, level penglihatan tidak sempurna tidak dijabarkan secara terperinci (dari gangguan ringan hingga gangguan berat). Oleh karena itu, semua responden yang terdeteksi memiliki gangguan penglihatan akan dimasukkan sebagai disabilitas netra. Individu yang terdeteksi mengalami disabilitas netra diberikan kode 1. Individu lainnya yang tidak mengalami disabilitas netra diberikan kode 0.

Selain melihat hubungan antara disabilitas netra dan kemiskinan, diperlukan penambahan variabel kontrol untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara disabilitas netra dan kemiskinan. Sen (2009) menjelaskan berbagai faktor dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengakses peluang yang ada, seperti karakteristik individu, kondisi lingkungan, dan iklim sosial. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan memasukkan beberapa variabel kontrol, yaitu karakteristik individu, karakteristik rumah tangga, dan lingkungan yang diambil dari data IFLS. Variabel kontrol yang digunakan tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Kontrol

Kategori	Keterangan	Sumber	Pertanyaan
Karakteristik Individu			
Jenis kelamin	1 = Laki-laki; 0 = Perempuan	Buku K	AR07
Umur		Buku K	AR09
Pendidikan	1 = Pendidikan tinggi (SMA atau sederajat, Universitas); 0 = Pendidikan rendah (TK, SD atau sederajat, SMP atau sederajat)	Buku 3A Seksi DL (pendidikan)	DL06
Status pernikahan	1 = Menikah; 0 = Lainnya	Buku K	AR13
Status bekerja	1 = Bekerja; 0 = Tidak bekerja	Buku K	AR15a
Pengeluaran kesehatan per kapita	Rupiah	Buku 1	KS08 dan KS09a
Konsumsi sayur-mayur per kapita	Persentase terhadap total konsumsi pangan per kapita	Buku 1	KS02 dan KS03
Karakteristik Rumah Tangga			
Jenis kelamin kepala rumah tangga	1 = Laki-laki; 0 = Perempuan	Buku K	AR02 dan AR07
Ukuran rumah tangga		Buku K	SC17
Lingkungan			
Wilayah perdesaan/perkotaan	1 = Perkotaan; 0 = Perdesaan	Buku K	SC05
Jawa/Non-Jawa	1 = Jawa; 0 = Non-Jawa	Buku K	SC01
Kepemilikan asuransi kesehatan/tunjangan kesehatan	1 = Ya; 0 = Tidak	Buku IIIB	AK01

Sumber: Kuesioner IFLS 2014

Untuk menguji hubungan dua arah antara kemiskinan dan disabilitas netra di Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan metode regresi logistik. Untuk model regresi logistik, terdapat dua model yang digunakan dalam penelitian ini. Selain variabel independen utama (kemiskinan 2014 dan disabilitas netra 2014), pada empiris ditambahkan variabel kontrol. Model pertama menguji ada tidaknya hubungan kemiskinan dan disabilitas netra di tahun 2014, sebagai berikut.

$$Visual14_i = \alpha_i + \gamma Poverty14_i + \beta_1 Individu14_i + \beta_2 Lingkungan14_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- Visual14_i = Indikator gangguan penglihatan/disabilitas netra tahun 2014 (1=mengalami disabilitas netra, 0 = tidak mengalami disabilitas netra)
- Poverty14_i = Indikator kemiskinan tahun 2014 (1=miskin, 0= tidak miskin)
- Individu_i = Karakteristik individu (jenis kelamin, umur, pendidikan, status pernikahan, status bekerja, pengeluaran kesehatan, konsumsi sayur per kapita)
- Lingkungan_i = Kondisi lingkungan (kepemilikan asuransi kesehatan/tunjangan kesehatan, wilayah pedesaan/perkotaan, Jawa/Non-Jawa)

Selanjutnya, model kedua menguji hubungan dari disabilitas netra terhadap kemiskinan di tahun 2014, sebagai berikut.

$$Poverty14_i = \alpha_i + \delta Visual14_i + \beta_1 Individu14_i + \beta_2 RT14_i + \beta_3 Lingkungan14_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- Poverty14_i = Indikator kemiskinan tahun 2014 (1=miskin, 0= tidak miskin)

- Visual14_i = Indikator gangguan penglihatan/disabilitas netra tahun 2014 (1= mengalami disabilitas netra, 0 = tidak mengalami disabilitas netra)
- Individu_i = Karakteristik individu (jenis kelamin, umur, pendidikan, status pernikahan, status bekerja)
- RT_i = Karakteristik rumah tangga (jenis kelamin kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga)
- Lingkungan_i = Kondisi lingkungan (wilayah pedesaan/perkotaan, Jawa/Non-Jawa)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Data IFLS 2014 menyediakan informasi mengenai individu yang mengalami gangguan penglihatan berdasarkan diagnosis dari tenaga kesehatan yang kemudian dikategorikan sebagai disabilitas netra. Sebagian besar individu dengan disabilitas netra tidak termasuk dalam kategori miskin (Tabel 2). Hanya 3% individu dengan disabilitas netra yang miskin. Berdasarkan jenis kelaminnya, individu dengan disabilitas netra didominasi oleh perempuan. Selain itu, mayoritas individu dengan disabilitas netra berumur antara 25 dan 55 tahun.

Tabel 2. Profil Individu dengan Disabilitas Netra

Kategori	Jumlah	Persentase
Status Kemiskinan		
Miskin	51	3,01
Tidak Miskin	1.644	96,99
Karakteristik Individu		
Jenis kelamin		
Laki-laki	677	39,94
Perempuan	1.018	60,06
Umur		
25 - 40 tahun	571	33,67
41 - 55 tahun	642	37,86
56 - 65 tahun	281	16,57
> 65 tahun	201	11,87
Pendidikan		
Pendidikan tinggi	950	56,05

Kategori	Jumlah	Persentase
Pendidikan rendah	745	43,95
Status pernikahan		
Menikah	1.368	80,71
Lainnya (belum menikah/cerai hidup/cerai mati)	327	19,29
Status bekerja		
Bekerja	1.192	70,32
Tidak bekerja	503	29,68
Rata-rata pengeluaran kesehatan per kapita (Rp)	59.712	
Rata-rata konsumsi sayur mayur per kapita (%)	10,7	
Karakteristik Rumah Tangga		
Jenis kelamin kepala rumah tangga		
Laki-laki	1.449	85,49
Perempuan	246	14,51
Rata-rata ukuran rumah tangga	4	
Lingkungan		
Wilayah pedesaan/perkotaan		
Perkotaan	1.239	73,1
Perdesaan	456	26,9
Jawa/Non-Jawa		
Jawa	976	57,58
Non-Jawa	719	42,42
Kepemilikan asuransi kesehatan/tunjangan kesehatan		
Ya	1.074	63,36
Tidak	621	36,64
N=1.695 individu		

Sumber: Olah data IFLS 2014

Data IFLS 2014 menunjukkan banyak individu dengan disabilitas netra yang berpendidikan tinggi, yaitu tamat dari sekolah menengah atas atau lulus dari universitas. Namun, masih banyak individu dengan disabilitas netra yang berpendidikan rendah (tidak bersekolah/tamat SD sederajat/tamat SMP sederajat). Terkait dengan status pernikahan, sebanyak 80,71% individu dengan disabilitas

berstatus menikah. Mayoritas individu dengan disabilitas netra juga memiliki pekerjaan. Individu dengan disabilitas netra rata-rata mengeluarkan biaya kesehatan per kapita sebesar Rp59.712 setiap bulan dan rata-rata persentase konsumsi dan sayur per kapita setiap bulan sebesar 10,7% dari total pengeluaran pangan. Apabila dilihat dari karakteristik rumah tangganya, individu dengan disabilitas netra lebih banyak tinggal dalam rumah tangga yang dikepalai oleh seorang laki-laki. Berdasarkan data IFLS tahun 2014, hanya 14,51% individu dengan disabilitas netra yang tinggal dalam rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Individu dengan disabilitas netra juga tinggal di dalam rumah tangga yang rata-rata jumlah anggota rumah tangganya empat orang. Berkaitan dengan tempat tinggal, mayoritas individu dengan disabilitas netra tinggal di kawasan perkotaan. Individu dengan disabilitas netra tersebar di wilayah Jawa dan juga di luar Jawa. Namun, jumlah individu dengan disabilitas netra yang tinggal di Pulau Jawa sedikit lebih banyak dibandingkan dengan individu dengan disabilitas netra yang tinggal di luar Pulau Jawa. Selain itu, sebagian besar individu dengan disabilitas netra telah memiliki asuransi kesehatan atau tunjangan kesehatan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menguji hubungan dua arah antara kemiskinan dan disabilitas netra maka dilakukan tabulasi silang antara variabel kemiskinan dan disabilitas netra, serta antara variabel kontrol dan disabilitas netra, (Tabel 3). Dari seluruh sampel, persentase individu yang miskin dan mengalami disabilitas netra lebih rendah dibandingkan persentase individu yang tidak miskin dan mengalami disabilitas netra. Persentase individu yang miskin dan mengalami disabilitas netra sebesar 4,9%, sedangkan persentase individu yang tidak miskin dan mengalami disabilitas netra sebesar 9%. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan disabilitas netra berkorelasi.

Tabel 3. Tabulasi Silang Variabel Kemiskinan dan Variabel Kontrol dengan Disabilitas Netra

Variabel	Disabilitas Netra				Total		Chi2
	Ya		Tidak		N	%	
	N	%	N	%			
Kemiskinan							
Miskin	51	4,9	983	95,1	1.034	100,0	20,1416 (0,000)
Tidak miskin	1.644	9,0	16.641	91,0	18.285	100,0	
Karakteristik Individu							
Jenis Kelamin							
Laki - laki = 1	677	7,4	8.468	92,6	9.145	100,0	40,7677 (0,000)
Perempuan = 0	1.018	10,0	9.156	90,0	10.174	100,0	
Pendidikan							
Pendidikan Tinggi = 1	950	12,2	6.839	87,8	7.789	100,0	191,0430 (0,000)
Pendidikan Rendah = 0	745	6,5	10.785	93,5	11.530	100,0	
Status pernikahan							
Ya = 1	1.368	8,4	14.935	91,6	16.303	100,0	19,1040 (0,000)
Lainnya = 0	327	10,8	2.689	89,2	3.016	100,0	
Status bekerja							
Ya = 1	1.192	8,1	13.575	91,9	14.767	100,0	38,5536 (0,000)
Tidak = 0	503	11,1	4.049	88,9	4.552	100,0	
Lingkungan							
Wilayah pedesaan/perkotaan							
Perkotaan = 1	1.239	10,7	10.347	89,3	11.586	100,0	133,3386 (0,000)
Perdesaan = 0	456	5,9	7.277	94,1	7.733	100,0	
Jawa/Non-Jawa							
Jawa = 1	976	9,0	9.871	91,0	10.847	100,0	1,5524 (0,213)
Non-Jawa = 0	719	8,5	7.753	91,5	8.472	100,0	
Kepemilikan asuransi kesehatan/tunjangan kesehatan							
Ya = 1	1.074	10,9	8.798	89,1	9.872	100,0	111,8163 (0,000)
Tidak = 0	621	6,6	8.826	93,4	9.447	100,0	

Sumber: Olah data IFLS 2014

Tabel 4 menunjukkan perbandingan rata-rata usia, konsumsi sayur dan buah, serta biaya kesehatan dari individu dengan disabilitas netra dan individu yang tidak mengalami disabilitas netra. Apabila dilihat dari usia, individu dengan disabilitas netra memiliki rata-rata usia yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami disabilitas netra. Sementara itu, apabila dilihat dari konsumsi sayur dan buah per kapita, individu yang mengalami disabilitas netra memiliki persentase pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami disabilitas netra. Demikian pula rata-

rata biaya kesehatan per kapita individu dengan disabilitas netra lebih tinggi dibandingkan dengan individu tanpa disabilitas netra. Berdasarkan profil individu dengan disabilitas netra, mayoritas dari mereka tidak termasuk dalam kategori miskin. Selain itu, berdasarkan data responden yang memeriksakan diri apakah dirinya mengalami gangguan penglihatan ke tenaga kesehatan, persentase individu yang miskin dan mengalami disabilitas netra lebih rendah dibandingkan dengan persentase individu yang miskin dan tidak mengalami disabilitas netra.

Tabel 4. Rata-rata Usia, Konsumsi Sayur dan Buah, dan Biaya Kesehatan pada Individu dengan Disabilitas Netra dan Individu Tanpa Disabilitas Netra

Variabel	Disabilitas Netra		Mean Difference Test	
	Ya	Tidak	t-hitung	Probability
Umur				
Min	25	25		
Rata-rata	48	43	-13,1891	0,0000

Variabel	Disabilitas Netra		Mean Difference Test	
	Ya	Tidak	t-hitung	Probability
Max	101	96		
Persentase konsumsi sayur mayur per kapita				
Min	0	0		
Rata-rata	11	10	-4,935	0,0000
Max	64	63		
Biaya kesehatan perkapita (dalam ribuan rupiah)				
Min	0	0		
Rata-rata	59,7	32,9	-5,7386	0,0000
Max	6.250,0	8.341,7		

Sumber: Olah data IFLS 2014

Tabulasi silang juga dilakukan untuk melihat korelasi antara disabilitas netra dan kemiskinan serta variabel kontrol dan kemiskinan (Tabel 5). Persentase individu yang mengalami disabilitas netra dan miskin yaitu 3%. Sementara itu, persentase individu yang tidak mengalami disabilitas netra dan miskin sebanyak 5,6%. Berdasarkan hasil tabulasi silang tersebut, ada dugaan awal bahwa individu dengan disabilitas netra relatif tidak rentan untuk menjadi miskin. Untuk hasil tabulasi antara variabel kemiskinan dengan variabel kontrol, persentase perempuan yang miskin lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki yang miskin. Persentase individu yang berpendidikan tinggi dan miskin lebih rendah dibandingkan individu yang berpendidikan rendah dan miskin. Apabila

dilihat dari status pernikahan, persentase individu yang berstatus menikah dan miskin lebih rendah dibandingkan dengan individu berstatus belum menikah/cerai hidup/cerai mati dan miskin. Individu bekerja dan termasuk miskin memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan individu yang tidak bekerja dan masuk kategori miskin. Selanjutnya, persentase individu yang miskin dan tinggal dalam rumah tangga dengan kepala rumah tangga seorang laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan individu yang miskin dan tinggal dalam rumah tangga dengan kepala rumah tangga seorang perempuan. Apabila dilihat dari segi wilayah, persentase individu yang miskin lebih tinggi pada orang yang hidup di perdesaan dan di Pulau Jawa

Tabel 5. Tabulasi Silang Variabel Disabilitas Netra dan Variabel Kontrol dengan Kemiskinan

Variabel	Miskin		Tidak Miskin		Total		Chi2
	N	%	N	%	N	%	
Disabilitas Netra							
Disabilitas Netra	51	3,0	1.644	97,0	1.695	100,0	20,141 (0,000)
Tidak Disabilitas Netra	983	5,6	16.641	94,4	17.624	100,0	
Karakteristik Individu							
Jenis Kelamin							
Laki - laki = 1	496	5,4	8.649	94,6	9.145	100,0	0,1752 (0,676)
Perempuan = 0	538	5,3	9.636	94,7	10.174	100,0	
Pendidikan							
Pendidikan Tinggi = 1	203	2,6	7.586	97,4	7.789	100,0	194,2644 (0,000)
Pendidikan Rendah = 0	831	7,2	10.699	92,8	11.530	100,0	
Status pernikahan							
Ya = 1	820	5,0	15.483	95,0	16.303	100,0	21,4398 (0,000)
Lainnya = 0	214	7,1	2.802	92,9	3.016	100,0	
Status bekerja							
Ya = 1	737	5,0	14.030	95,0	14.767	100,0	16,1574 (0,000)
Tidak = 0	297	6,5	4.255	93,5	4.552	100,0	
Karakteristik Rumah Tangga							
Jenis kelamin kepala rumah tangga							

Variabel	Miskin		Tidak Miskin		Total		Chi2
	N	%	N	%	N	%	
Laki-laki = 1	894	5,2	16.198	94,8	17.092	100,0	4,3369 (0,037)
Perempuan = 0	140	6,3	2.087	93,7	2.227	100,0	
Lingkungan							
Wilayah pedesaan/perkotaan							
Perkotaan = 1	572	4,9	11.014	95,1	11.586	100,0	9,8525 (0,002)
Perdesaan = 0	462	6,0	7.271	94,0	7.733	100,0	
Jawa/Non-Jawa							
Jawa = 1	606	5,6	10.241	94,4	10.847	100,0	2,6863 (0,101)
Non-Jawa = 0	428	5,1	8.044	94,9	8.472	100,0	

Sumber: Olah data IFLS 2014

Tabel 6 menunjukkan perbandingan rata-rata umur dan ukuran rumah tangga dari individu yang miskin dan tidak miskin. Kelompok individu yang miskin rata-rata umurnya sedikit lebih tua dibandingkan dengan kelompok individu yang tidak miskin. Untuk ukuran rumah tangga, kelompok individu yang miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan kelompok individu yang tidak miskin.

Tabel 6. Rata-rata Usia dan Ukuran Rumah Tangga pada Individu Miskin dan Tidak Miskin

Variabel	Miskin	Tidak Miskin	Mean Difference Test	
			t-hitung	Probability
Umur				
Min	25	25		
Rata-rata	46	43	-6,5098	0,0000
Max	93	101		
Ukuran rumah tangga				
Min	1	1		
Rata-rata	5	4	-18,5578	0,0000
Max	15	15		

Sumber: Olah data IFLS 2014

Hasil Regresi Logistik

Estimasi dengan model regresi logistik dilakukan untuk menguji hubungan antara kemiskinan dan disabilitas netra. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa individu yang miskin memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mengalami disabilitas netra dibandingkan individu yang tidak miskin. Hasil ini tetap tidak berubah walaupun ditambahkan variabel kontrol (Tabel 7).

Berdasarkan Tabel 7, individu yang miskin memiliki probabilitas 5,2% lebih rendah untuk mengalami disabilitas netra dibandingkan individu yang tidak miskin. Apabila dimasukkan variabel kontrol, hasilnya cenderung tidak berubah, yaitu individu yang miskin memiliki probabilitas yang lebih rendah 4 perse untuk mengalami disabilitas netra dibandingkan individu yang tidak miskin. Hasil ini menunjukkan bahwa arah koefisien dari variabel kemiskinan tidak berubah walaupun ditambahkan variabel kontrol. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan kajian Gureje dkk. (2006) serta Trani dan Loeb (2012) yang menemukan bahwa kemiskinan bukan *significant risk factor* sebagai penyebab terjadinya disabilitas pada seseorang.

Tabel 7. Marginal Effect Hubungan Kemiskinan dengan Disabilitas Netra

Variabel Dependen: Disabilitas Netra

Variabel	Persamaan 7.1			Persamaan 7.2			Persamaan 7.3		
	Koefisien	Std Error		Koefisien	Std Error		Koefisien	Std Error	
Kemiskinan	-0,0515	***	0,0117	-0,0403	***	0,0115	-0,0403	***	0,0114
Karakteristik individu									
Jenis kelamin				-0,0356	***	0,0044	-0,0348	***	0,0044
Pendidikan				0,0791	***	0,0045	0,0667	***	0,0046
Status pernikahan				-0,0059		0,0053	-0,0062		0,0053

Variabel	Persamaan 7.1		Persamaan 7.2		Persamaan 7.3	
	Koefisien	Std Error	Koefisien	Std Error	Koefisien	Std Error
Status bekerja			-0,0057	0,0048	-0,0034	0,0048
Umur			0,0028	***	0,0002	0,0002
Konsumsi sayur dan buah per kapita			0,0006	**	0,0003	0,0003
Biaya kesehatan per kapita			0,0000	***	0,0000	0,0000
Lingkungan						
Wilayah perdesaan/perkotaan					0,0303	***
Wilayah Jawa/Non-Jawa					-0,0026	0,0041
Kepemilikan asuransi kesehatan/tunjangan kesehatan					0,0298	***

Level signifikansi: *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01

Sumber: Olah data IFLS 2014

Pada persamaan 7.2 dan 7.3, variabel yang signifikan berhubungan dengan disabilitas netra adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, konsumsi sayur dan buah per kapita, biaya kesehatan per kapita, wilayah perkotaan/perdesaan, dan kepemilikan asuransi kesehatan. Laki-laki memiliki probabilitas sebesar 3,5–3,6% lebih rendah untuk mengalami disabilitas netra dibandingkan perempuan. Selanjutnya, individu yang berpendidikan tinggi memiliki probabilitas sekitar 6,8–7,9% lebih tinggi untuk mengalami disabilitas netra dibandingkan individu yang berpendidikan rendah. Studi Woldeamanuel dkk. (2020) dan Paudel dkk. (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi risiko mengalami disabilitas netra. Hal tersebut disebabkan karena individu yang berpendidikan tinggi menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan melakukan kegiatan di dalam ruangan sehingga berisiko untuk menyebabkan terjadinya disabilitas netra. Selanjutnya, semakin bertambahnya umur meningkatkan risiko sebesar 0.3% untuk mengalami disabilitas netra.

Variabel sayur dan buah per kapita serta biaya kesehatan memiliki arah koefisien yang positif. Individu yang mengalami disabilitas netra semakin banyak mengonsumsi sayur dan buah. Selain itu, individu yang mengalami disabilitas netra cenderung mengeluarkan biaya kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami disabilitas netra.

Selanjutnya, individu yang tinggal di kawasan perkotaan juga lebih berisiko sebesar 3% untuk mengalami disabilitas netra dibandingkan individu yang tinggal di kawasan perdesaan. Individu yang memiliki asuransi kesehatan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi sebesar 2,9% untuk terdeteksi mengalami disabilitas netra. Hal ini karena mereka dapat pergi ke penyedia layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk kemungkinan gangguan pada kesehatan mata.

Tabel 8 menunjukkan hasil estimasi hubungan antara disabilitas netra dan kemiskinan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa individu yang mengalami disabilitas netra memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan individu yang tidak mengalami disabilitas netra. Hasil estimasi Persamaan 8.1 menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas netra memiliki probabilitas 3,3% lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan individu tanpa disabilitas netra. Ketika ditambahkan variabel kontrol, individu yang mengalami disabilitas netra memiliki probabilitas 2,7% lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan individu tanpa disabilitas netra. Hasil estimasi ini sejalan dengan hasil penelitian Pham dkk. (2013) yang menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas netra kebanyakan hidup dalam rumah tangga yang tidak miskin. Dalam studi Pham dkk. (2013), individu dengan disabilitas netra memiliki

pengeluaran kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan individu tanpa disabilitas netra. Hasil estimasi dalam penelitian ini juga mendukung temuan Bella dan Dartanto (2018) yang menyebutkan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga seorang disabilitas netra memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan kepala rumah tangga dengan jenis disabilitas lainnya. Studi LPEM FEB UI (2017) dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2016 juga menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas netra memiliki probabilitas yang paling tinggi untuk dipekerjakan dibandingkan individu dengan jenis disabilitas lainnya.

Individu dengan disabilitas netra dalam studi ini cenderung tidak miskin. Berdasarkan profil individu dengan disabilitas netra pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa sebagian besar individu dengan disabilitas netra memiliki

pekerjaan. Mereka kemungkinan tidak mengalami disabilitas netra yang parah sehingga masih dapat bekerja. Sebagian besar dari mereka juga memiliki pendidikan yang tinggi. Selain itu, kemungkinan individu dengan disabilitas netra memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dalam Bella dan Dartanto (2018), Didi Tarsidi (Mantan Ketua Perhimpunan Tunanetra Indonesia/Pertuni) menyatakan bahwa seseorang dengan disabilitas netra cenderung percaya diri. Keterbatasan mereka dalam melihat justru membuat mereka tidak dapat memerhatikan orang-orang yang mungkin memandang rendah mereka, sehingga hal mereka cenderung percaya diri untuk menyatakan disabilitas yang mereka alami. Dengan demikian, penyandang disabilitas netra dapat lebih fokus untuk menggunakan tenaga dan pikirannya untuk melakukan kegiatan yang produktif, dibandingkan memikirkan pandangan orang lain mengenai disabilitas netra yang mereka alami.

Tabel 8. Marginal Effect Hubungan Disabilitas Netra dengan Kemiskinan

Variabel Dependen: Kemiskinan

Variabel	Persamaan 8.1		Persamaan 8.2		Persamaan 8.3		Persamaan 8.4							
	Koefisien	Std Error												
Disabilitas Netra	-0,0326	***	0,0074		-0,0274	***	0,0074		-0,0274	***	0,0073			
Karakteristik Individu														
Jenis Kelamin				0,0095	***	0,0035		0,0098	***	0,0036		0,0097	***	0,0036
pendidikan				-0,0503	***	-0,0043		-0,0485	***	0,0042		-0,0468	***	0,0043
Status pernikahan				-0,0163	***	0,0041		-0,0162	***	0,0046		-0,0170	***	0,0046
Status bekerja				-0,0142	***	0,0039		-0,0094	**	0,0039		-0,0096	**	0,0039
Umur				0,0002		0,0001		0,0003	**	0,0001		0,0003	**	0,0001
Karakteristik Rumah Tangga														
Jenis kelamin kepala rumah tangga								-0,0104	*	0,0055		-0,0101	*	0,0055
Ukuran rumah tangga								0,0132	***	0,0008		0,0134	***	0,0008
Lingkungan														
Wilayah pedesaan/perkotaan												-0,0069	**	0,0033
Wilayah Jawa/Non-Jawa												0,0087	***	0,0033

Level signifikansi: *p<0,1, **p<0,05, ***p<0,01

Sumber: Olah data IFLS 2014

Selain karena individu dengan disabilitas netra memiliki kepercayaan diri yang tinggi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan sebagai wujud dukungan kepada penyandang disabilitas, termasuk disabilitas netra, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut memberikan mandat bagi lembaga pemerintah dan BUMN untuk menyediakan kuota sebanyak 2% dari total pekerja untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Sementara itu, perusahaan swasta diwajibkan memberikan kuota sebanyak 1% dari total tenaga kerja bagi penyandang disabilitas (Mani dkk., 2022). Keberadaan komunitas atau organisasi yang menaungi individu dengan disabilitas netra juga berperan positif dalam membantu individu dengan disabilitas netra untuk mengakses pendidikan dan juga lapangan pekerjaan. Pertuni telah menerbitkan dokumen yang berisi panduan perekrutan tenaga kerja individu dengan disabilitas netra (DPP Pertuni, t.t.). Panduan tersebut dapat menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin merekrut individu dengan disabilitas netra.

Individu dengan disabilitas netra juga cenderung dapat beradaptasi serta dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu mendukung kegiatan mereka sehari-hari. Individu yang mengalami disabilitas netra dapat dilatih untuk menggunakan perangkat dan teknologi yang adaptif bagi orang dengan disabilitas netra (Jeffres & MacKay, 1997; Raasch dkk., 1997; Stoll dkk., 1995). Oleh karena itu, individu dengan disabilitas netra dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja dan belajar. Saat ini, sudah banyak teknologi yang dapat digunakan oleh individu dengan disabilitas netra untuk menunjang aktivitas mereka. Misalnya, terdapat buku yang saat ini sudah tersedia dalam format audio digital atau dalam format EPUB yang dapat dibaca dengan menggunakan komputer maupun telepon pintar. Selain itu, *smartphone* juga menyediakan berbagai macam aplikasi pembaca layar yang dapat dimanfaatkan oleh individu dengan disabilitas netra, seperti aplikasi *Talk Back* yang berbasis Android. Selain itu, *screen reader software*, seperti *Non-Visual Desktop Access* (NVDA), dapat membantu individu dengan

disabilitas netra ketika menggunakan komputer (DPP Pertuni, t.t.). Untuk menunjang aktivitas sehari-hari, aplikasi *smartphone* dapat digunakan untuk mengetahui nilai nominal mata uang rupiah, misalnya *Mas Jawa T-Netra*. Ada juga aplikasi *Tap-Tap See* yang dapat dimanfaatkan oleh tunanetra untuk mengenali lingkungan di sekitarnya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dengan cara yaitu memotret objek yang diinginkan kemudian akan ada identifikasi kembali melalui suara (Hidayat, 2020).

Terkait variabel kontrol, Tabel 8 menunjukkan bahwa laki-laki memiliki probabilitas 0,9% lebih tinggi untuk menjadi miskin dibandingkan perempuan. Individu yang berpendidikan tinggi berisiko 4,7–5% lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan individu yang berpendidikan rendah. Individu yang menikah juga memiliki probabilitas 1,6–1,7% lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan individu belum menikah/cerai mati. Selanjutnya, individu yang bekerja memiliki probabilitas 0,9–1,4% lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan individu yang tidak bekerja. Terkait umur, semakin bertambahnya usia maka semakin besar kemungkinan untuk menjadi miskin. Individu yang tinggal dalam rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan memiliki probabilitas 1% lebih tinggi untuk menjadi miskin dibandingkan individu yang tinggal dalam rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki. Selanjutnya, individu yang tinggal di kawasan perkotaan memiliki probabilitas 0,6% lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan individu yang tinggal di perdesaan. Sementara itu, individu yang tinggal di Pulau Jawa memiliki probabilitas lebih tinggi sebesar 0,8% untuk menjadi miskin dibandingkan individu yang tinggal di luar Pulau Jawa.

KESIMPULAN

Penglihatan yang sehat telah menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak karena pentingnya peran penglihatan dalam kehidupan manusia. Namun, jumlah individu yang mengalami disabilitas netra menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Berbagai macam faktor dapat

memengaruhi terjadinya disabilitas netra, termasuk kemiskinan. Selain itu, disabilitas netra dapat menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan dua arah antara kemiskinan dan disabilitas netra di Indonesia dengan menggunakan data gelombang 5 IFLS pada tahun 2014. Temuan studi ini tidak sesuai dengan hipotesis dan temuan kebanyakan penelitian terdahulu. Hasil estimasi menunjukkan tidak ditemukan adanya hubungan dua arah antara kemiskinan dan disabilitas netra. Hasil estimasi dengan model regresi logistik menunjukkan bahwa individu yang miskin memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mengalami disabilitas netra dibandingkan dengan individu yang tidak miskin. Di sisi lain, individu yang mengalami disabilitas netra memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk menjadi miskin dibandingkan individu yang tidak mengalami disabilitas netra.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas netra masih memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Penetapan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan salah satu langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kepedulian pada hak-hak penyandang disabilitas, termasuk disabilitas netra. Peraturan tersebut dapat menjadi upaya untuk mengubah dan menghilangkan stigma negatif terhadap individu dengan disabilitas netra di masyarakat sehingga mereka dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, termasuk kesempatan untuk dapat mengakses pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk bekerja. Selain itu, penting untuk menyediakan infrastruktur yang bersifat *universal design* dalam fasilitas publik sehingga individu dengan disabilitas netra juga dapat memperoleh peluang yang sama dengan individu tanpa disabilitas netra untuk memanfaatkan fasilitas publik tersebut.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi perhatian dan dapat menjadi celah untuk penelitian selanjutnya. Pertama, indikator disabilitas netra yang

digunakan dalam studi ini menggunakan pertanyaan dari kuesioner IFLS yaitu diagnosis dari tenaga kesehatan terkait gangguan penglihatan oleh tenaga kesehatan. Namun, individu yang mampu memeriksakan diri ke tenaga kesehatan atau membeli kacamata untuk membantu penglihatan kemungkinan merupakan individu yang berasal dari rumah tangga yang tidak miskin. Apabila menggunakan pertanyaan pernah mengalami katarak yang ada dalam kuesioner, maka jumlah individu yang mengalami katarak terlalu sedikit. Sementara itu, penelitian sebelumnya menggunakan ukuran disabilitas netra yang lebih spesifik (Arifin & Ananta, 2021; Bella & Dartanto, 2016; Kuper dkk., 2008; Murthy dkk., 2005; Pham dkk., 2013).

Kedua, indikator disabilitas netra yang digunakan dalam penelitian ini tidak mencakup tingkat keparahan dari disabilitas netra yang dialami oleh individu. Individu yang dianggap mengalami disabilitas netra dalam penelitian ini kemungkinan tidak mengalami disabilitas netra yang parah sehingga mereka masih dapat melakukan berbagai aktivitas, termasuk bekerja untuk memperoleh pendapatan, sehingga mereka tidak termasuk dalam kategori miskin. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa individu yang menggunakan kacamata untuk membantu penglihatan juga masih mengalami masalah dalam penglihatan walaupun tidak termasuk dalam kategori yang parah. Ketiga, indikator kemiskinan yang dibentuk dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsumsi dan ukuran yang digunakan adalah konsumsi per kapita. Hasil studi kemungkinan akan berbeda apabila kemiskinan diukur dengan menggunakan indikator lainnya, misalnya pendapatan per kapita. Keempat, pengukuran kemiskinan dengan pendekatan konsumsi dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan bobot dari konsumsi individu dalam rumah tangga, baik untuk individu dewasa maupun anak-anak. Jumlah konsumsi individu dewasa kemungkinan lebih banyak dibandingkan konsumsi individu yang masih anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, E. N., & Ananta, A. (2021). Understanding visual disability as development and global human rights issues: A demographic perspective in Indonesia. Dalam R. Barichello, A. A. Patunru, & R. Schwindt, *Globalization, poverty, and income inequality* (hlm.197-217). University of British Columbia Press.
- Banks, L. M., Kuper, H., & Polack, S. (2017). Poverty and disability in low- and middle-income countries: A systematic review. *PLOS ONE*, 12(12), e0189996. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189996>
- Bella, A., & Dartanto, T. (2018). Persons with disabilities (PWD) and poverty in Indonesia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 55(2), 167–188. <https://doi.org/10.22452/MJES.vol55no2.2>
- DPP Pertuni. (t.t.). *Panduan perekrutan & penempatan tenaga kerja penyandang tunanetra*. https://pertuni.or.id/download/307/umum/3003/panduan-perekrutan-dan-penempatan-tenaga-kerja-penyandang-tunanetra_rev-3.pdf
- Gladstone, M., McLinden, M., Douglas, G., Jolley, E., Schmidt, E., Chimoyo, J., Magombo, H., & Lynch, P. (2017). ‘Maybe I will give some help.... maybe not to help the eyes but different help’: An analysis of care and support of children with visual impairment in community settings in Malawi. *Child: Care, Health and Development*, 43(4), 608–620. <https://doi.org/10.1111/cch.12462>
- Gooding, K. (2006). *Poverty and blindness: A survey of the literature*. Sightsavers International Programme Development Unit.
- Gureje, O., Ogunniyi, A., Kola, L., & Afolabi, E. (2006). Functional disability in elderly Nigerians: Results from the Ibadan Study of Aging. *Journal of the American Geriatrics Society*, 54(11), 1784–1789. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2006.00944.x>
- Hidayat, L. (2020). Assistive technology pada aplikasi Android untuk tunanetra. *Jurnal Exponential (Education for Exceptional Children)*, 1(2). <https://journal.upy.ac.id/index.php/PLB/article/view/969>
- Jaggernath, J., Øverland, L., Ramson, P., Kovai, V., Chan, V. F., & Naidoo, K. S. (2014). Poverty and Eye Health. *Health*, 6(14), 1849–1860. <https://doi.org/10.4236/health.2014.614217>
- Jeffres, C., & MacKay, A. T. (1997). Improving stoma management in the low-vision patient. *Journal of Wound, Ostomy, and Continence Nursing: Official Publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society*, 24(6), 302–310. [https://doi.org/10.1016/s1071-5754\(97\)90134-0](https://doi.org/10.1016/s1071-5754(97)90134-0)
- Jones, N., & Bartlett, H. (2018). The impact of visual impairment on nutritional status: A systematic review. *British Journal of Visual Impairment*, 36(1), 17–30. <https://doi.org/10.1177/0264619617730860>
- Jones, N., Bartlett, H. E., & Cooke, R. (2019). An analysis of the impact of visual impairment on activities of daily living and vision-related quality of life in a visually impaired adult population. *British Journal of Visual Impairment*, 37(1), 50–63. <https://doi.org/10.1177/0264619618814071>
- Kementerian Kesehatan. (2017). *Peta jalan penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia tahun 2017 - 2030*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kostyra, E., Żakowska-Biemans, S., Śniegocka, K., & Piotrowska, A. (2017). Food shopping, sensory determinants of food choice and meal preparation by visually impaired people. Obstacles and expectations in daily food experiences. *Appetite*, 113, 14–22. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.02.008>

- Kuper, H., Polack, S., Eusebio, C., Mathenge, W., Wadud, Z., & Foster, A. (2008). A case-control study to assess the relationship between poverty and visual impairment from cataract in Kenya, the Philippines, and Bangladesh. *PLOS Medicine*, *5*(12), e244. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050244>
- LPEM FEB UI. (2017). *Laporan akhir: Memetakan penyandang disabilitas (PD) di pasar tenaga kerja Indonesia*. Organisasi Perburuhan Internasional.
- Mani, M. N. G., Lucas, M., Indrawati, A., & Phuc, D. H. (2022). *Transition to employment lessons from the Philippines, Indonesia & Vietnam*. The Nippon Foundation & ICEVI. <https://icevi.org/wp-content/themes/ICEVI/pdf/Transition-to-Employment.pdf>
- Mont, D., & Cuong, N. V. (2011). Disability and poverty in Vietnam. *The World Bank Economic Review*, *25*(2), 323–359. <https://doi.org/10.1093/wber/lhr019>
- Murthy, G. V. S., Gupta, S. K., Bachani, D., Jose, R., & John, N. (2005). Current estimates of blindness in India. *British Journal of Ophthalmology*, *89*(3), 257–260. <https://doi.org/10.1136/bjo.2004.056937>
- Paudel, P., Ramson, P., Naduvilath, T., Wilson, D., Phuong, H. T., Ho, S. M., & Giap, N. V. (2014). Prevalence of vision impairment and refractive error in school children in Ba Ria—Vung Tau province, Vietnam. *Clinical & Experimental Ophthalmology*, *42*(3), 217–226. <https://doi.org/10.1111/ceo.12273>
- Pham, H.-L., Kizuki, M., Takano, T., Seino, K., & Watanabe, M. (2013). Out-of-pocket costs of disabilities and their association with household socioeconomic status among school-aged children in Vietnam. *Journal of Rural Medicine: JRM*, *8*(2), 212–221. <https://doi.org/10.2185/jrm.2876>
- Pinilla-Roncancio, M. (2015). Disability and poverty: Two related conditions. A review of the literature. *Revista de La Facultad de Medicina*, *63*, 113–123. <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.50132>
- Pinilla-Roncancio, M., Mactaggart, I., Kuper, H., Dionicio, C., Naber, J., Murthy, G. V. S., & Polack, S. (2020). Multidimensional poverty and disability: A case control study in India, Cameroon, and Guatemala. *SSM - Population Health*, *11*, 100591. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100591>
- Pizzarello, L., Abiose, A., Ffytche, T., Duerksen, R., Thulasiraj, R., Taylor, H., Faal, H., Rao, G., Kocur, I., & Resnikoff, S. (2004). VISION 2020: The right to sight: A global initiative to eliminate avoidable blindness. *Archives of Ophthalmology*, *122*(4), 615–620. <https://doi.org/10.1001/archophth.122.4.615>
- Popivker, L., Wang, S., & Boerner, K. (2010). Eyes on the prize: Life goals in the context of visual disability in midlife. *Clinical Rehabilitation*, *24*(12), 1127–1135. <https://doi.org/10.1177/0269215510371421>
- Raasch, T. W., Leat, S. J., Kleinstein, R. N., Bullimore, M. A., & Cutter, G. R. (1997). Evaluating the value of low-vision services. *Journal of the American Optometric Association*, *68*(5), 287–295.
- Roba, A. A., Chagunda, M., & Machissa, T. S. (2020). Blindness above and below the Poverty Line: Reflections from Sofala, Mozambique. *Journal of Public Health in Africa*, *11*(1), Article 1. <https://doi.org/10.4081/jphia.2020.1113>
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Stoll, S., Sarma, S., & Hoefft, W. W. (1995). Low vision aids training in the home. *Journal of the American Optometric Association*, *66*(1), 32–38.
- Trani, J.-F., & Loeb, M. (2012). Poverty and disability: A vicious circle? Evidence from Afghanistan and Zambia. *Journal of International Development*, *24*(S1), S19–S52. <https://doi.org/10.1002/jid.1709>

WHO. (2019). *World report on vision*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570>

Woldeamanuel, G. G., Biru, M. D., Geta, T. G., & Areru, B. A. (2020). Visual impairment and associated factors among primary school children in Gurage Zone, Southern Ethiopia. *African Health Sciences*, 20(1), 533–542.
<https://doi.org/10.4314/ahs.v20i1.60>

PANDUAN PENULISAN

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah diunggah secara daring (online) melalui website <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jki>. Penulis harus login untuk dapat mengunggah naskah tersebut. Pendaftaran secara daring (online) tidak dikenakan biaya apapun.
2. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
3. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
5. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
6. Dalam 1 edisi JKI tidak menerbitkan lebih dari 1 artikel dengan penulis yang sama (baik sebagai penulis utama atau pendamping).
7. Penulis (baik sebagai penulis utama atau pendamping) yang telah terbit dalam 1 edisi, maka artikel berikutnya dapat terbit kembali pada edisi ketiga setelah terbit. Contoh: artikel penulis A terbit di JKI pada **Juni 2018**, maka penulis tersebut dapat diterbitkan kembali paling cepat **Desember 2019**.
8. Outline dan isi naskah terdiri dari dua jenis sebagai berikut:

I. Untuk manuskrip yang merupakan **hasil kajian literatur** menggunakan outline sebagai berikut :

1. **Judul** ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata. Identitas penulis yang diletakkan di bawah judul meliputi nama dan lembaga penulis serta alamat email.
2. **Abstrak** dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 150-200. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
3. **Pendahuluan** yang berisi justifikasi isu yang diangkat dalam artikel, maksud/tujuan artikel, pendekatan dan metode yang digunakan.
4. **Batang tubuh/inti artikel** berisi kupasan, analisis, argumentasi, dan komparasi penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
5. **Kesimpulan** berisi bahasan tentang hal-hal penting dari temuan. Kesimpulan dapat ditambahkan saran-saran atau rekomendasi berkaitan dengan persoalan yang menjadi temuan.
6. **Tampilan tabel, gambar atau grafik** harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.
7. **Daftar Pustaka** menggunakan format APA Edisi ke-7 (APA 7th Ed).

Style; <https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa7>).

Jumlah daftar pustaka minimum untuk hasil kajian literatur adalah 25 dan semuanya disitasi dalam naskah. Daftar pustaka harus terdiri dari **minimal 80% sumber primer** (artikel jurnal dan prosiding). Selain itu, direkomendasikan untuk minimal 80% daftar pustaka diterbitkan dalam **sepuluh tahun terakhir**.

II. Untuk manuskrip yang merupakan **hasil penelitian** menggunakan outline sebagai berikut :

1. **Judul** ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata. Identitas penulis yang diletakkan di bawah judul meliputi nama dan lembaga penulis serta alamat email.
2. **Abstrak** dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 150-200. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
3. **Pendahuluan** yang berisi justifikasi isu yang diangkat dalam artikel, dan maksud/tujuan artikel.
4. **Metodologi** yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan (kuantitatif dan atau kualitatif), model dan variabel yang digunakan serta sumber data yang digunakan. Apabila menggunakan data primer, jelaskan metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan analisa data yang digunakan.
5. **Batang tubuh/inti artikel** berisi kupasan, analisis, argumentasi, dan komparasi penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
6. **Kesimpulan** berisi bahasan tentang hal-hal penting dari temuan. Kesimpulan dapat ditambahkan saran-saran atau rekomendasi berkaitan dengan persoalan yang menjadi temuan.
7. **Tampilan tabel, gambar atau grafik** harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.
8. **Daftar Pustaka** menggunakan format APA edisi ke-7 (APA 7th Ed).
Style; <https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa7>).

III. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (sepuluh tahun terakhir)

IV. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Buku

O'Keefe, J. H., Bell, D. S. H., & Wyne, K.L. (2009). *Diabetes essentials*. Jones and Bartlett Publishers.

Bunga Rampai

Friedman, S. L., & Wachs, T. D. (Editor). (1999). *Measuring environment across the life span: Emerging methods and concepts*. American Psychological Association.

Electronic Book

De Lara, M., & Doyen, L. (2008). *Sustainable management of natural resources: Mathematical models and methods*. Diakses dari <http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-3-540-79073-0>

Ardia, D. (2008). Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models: Theory and applications. doi: 10.1007/978-3-540-78657-3

Bagian dari Buku

Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. Dalam A. C. Gaw (Editor), *Culture, ethnicity, and mental illness* (pp. 517-552). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Scott, D. (2005). Colonial governmentality. Dalam J. X. Inda (Editor), *Anthropologies of modernity* (pp. 21-49). Diakses dari <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117909832>

Iacono, W. G. (2008). Polygraph testing. Dalam E. Borgida & S. T. Fiske (Editor), *Beyond common sense: Psychological science in the courtroom* (pp. 219-235). doi: 10.1002/9780470696422

Artikel Jurnal

Skenderian, J. J., Siegel, J. T., Crano, W. D., Lac, A., & Alvaro, E. E. (2008). Expectancy change and adolescents' intentions to use marijuana. *Psychology of Addictive Behaviors*, 22, 563-569. <https://doi.org/10.1037/a0013020>

Williams, S., & Beattie, H. J. (in press). Problem-based learning in the clinical setting – a systematic review. *Nurse Education Today*.

Makalah/Artikel Daring

Fallon, A., & Engel, C. (2008). Hypertensive disorders of pregnancy. *The Practising Midwife*, 11(9), 1-27. Diakses dari <http://www.practisingmidwife.co.uk>

Makalah Seminar

Bowden, F.J., & Fairley, C.K. (1996, June). *Endemic STDs in the Northern Territory: Estimations of effective rates of partner change*. Makalah dipresentasikan pada the Scientific Meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin.

Laporan

Queensland Health. (2005). *Health systems review. Final report*. Brisbane, Australia: Queensland Government.

Australian Institute of Health and Welfare. (2010). *Child protection Australia 2008-09 (Report No. CWS 35)*. Diakses dari <http://www.aihw.gov.au/publications/cws/35/10859.pdf>

Tesis/Disertasi

Axford, J.C. (2007). *What constitutes success in Pacific island community conserved areas?* (Disertasi, University of Queensland, Brisbane, Australia). Diakses dari <http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747>

Set Data

Pew Hispanic Center. (2004). *Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media* [Data file and code book]. Retrieved from <http://pewhispanic.org/datasets/>

Laman dengan Penulis

Atherton, J. (2005). *Behaviour modification*. Retrieved from http://www.learningandteaching.info/learning/behaviour_mod.htm

Winther, M. (2009, January 14). *The unconscious is spirit* [Online forum comment]. Retrieved from <http://groups.google.com/group/alt.psychology.jung/topics?lnk>

Laman tanpa Penulis

Behaviour modification. (2007). Retrieved from <http://www.educational-psychologist.org.uk/behaviour.html>

Manuskrip

Johnson, A. (2008). *Week three: Foucault* [Powerpoint slides]. Unpublished manuscript, BESC1001, University of Queensland, St Lucia, Australia.

7. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.



KEPENDUDUKAN INDONESIA

Lansia di Era Bonus Demografi
Lilis Heri Mis Cicih, Darojad N. Agung

Komposisi Pengaruh Faktor Demografi dan Nodemografi
terhadap Fertilitas di Indonesia
Mugia Shafira Ramadhani Nugraheni, Lilik Sugiharti

Pengaruh Upah Reservasi dan Umur terhadap Lama
Mencari Kerja di Indonesia
Ratih Sari Dewi, Dwini Handayani

Migrasi dalam Perspektif Semiotika Etnografi dan Gender:
Kasus Masyarakat di Hulu Sembakung, Kalimantan Utara
Puji Hastuti

Determinan Status Partisipasi Pendidikan Anak di Usia Dini di
Pulau Jawa Tahun 2019
Aisyah Salsabila, Budyana Budyana

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penduduk Lanjut Usia Berobat
Jalan di Provinsi Jawa Timur
Irdham Ahmad, Ayu Lailal Barikha

Pola Pelayanan Keluarga Berencana pada Masa Pandemi COVID
-19 dan Strategi Menghadapi *New Normal* di Yogyakarta
Dwi Wulan Pujiriyani

Elemen Kunci Pendorong Partisipasi Masyarakat sebagai
Fondasi Kebijakan *Smart City*: Suatu Kebijakan Pustaka
Sistematis
Adriansyah Dhani Darmawan

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 17	No. 1	1-124	Jakarta, Juni 2022	ISSN 1907-2902
----------------------------------	---------	-------	-------	-----------------------	-------------------

ISSN 1907-2902



9 771907 290214